# Tata Kelola Perusahaan

*Corporate Governance*

# 06





Blue Mosque, Istanbul. Turkey

# Pendahuluan

## *Introduction*

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) telah menjadi landasan yang kuat bagi Bank Muamalat Indonesia dalam menghadapi perkembangan bisnis perbankan. Segala keputusan strategis Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran yang merupakan komitmen kuat Bank untuk memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan dan mendorong peningkatan kinerja Bank.

*The implementation of Good Corporate Governance (GCG) has become a strong foundation for Bank Muamalat Indonesia to face future changes in the business environment. All strategic decisions made by the Board of Commissioners and Board of Directors always consider the principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, and Fairness which are the Bank's strong commitment in the interest of shareholders and other stakeholders.*

Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya dan mampu menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

*Regulators together with various parties who put attention to the development of GCG in Indonesia give a strong affirmation of the importance of harmonious relationships between business entities and stakeholders. It is expected that such harmonious relationship will form a business world that is able to contribute to the surrounding social and environmental dimensions and to avoid means of creating short-term profit.*

# Landasan Penerapan dan Kebijakan GCG

## *GCG Foundation and Principles*

Sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia senantiasa berupaya untuk menghadirkan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Bank Muamalat Indonesia berpegang teguh pada penerapan *best practice* tata kelola perusahaan sebagai hal yang sangat diutamakan. Standar etika dan akuntabilitas tinggi diimplementasikan dengan berpijak pada asas *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang mengacu pada dasar spiritual dan dasar operasional sebagai landasan utama dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

*As a pioneer of sharia banking in Indonesia, Bank Muamalat Indonesia always strives to deliver the best banking experience for its customers. To realize these ideals, Bank Muamalat Indonesia adheres to the best practice of corporate governance as its business priority. High ethical and accountability standards are manifested by referring to the principle of Good Governance of Sharia Business which refers to the spiritual and operational foundation as the main foundation in realizing a sustainable business.*

Pelaksanaan dan penerapan GCG Bank Muamalat Indonesia mengacu pada regulasi yang relevan dan ketentuan internal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

*The implementation of Bank Muamalat's GCG refers to the relevant regulations and internal provisions that have been determined as follows:*

1. *Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
2. *Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking;*

3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013;
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah;
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
15. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
16. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah;
17. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
18. *Board Manual* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
19. Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
20. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
21. Kode Etik Bankir;
22. Kode Etik Bank Muamalat Indonesia; dan
23. Ittifaq Muamalat.

3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 15/13/PBI/2013;*
5. *Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPbS concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
6. *Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Application of Public Company Governance Guidelines;*
7. *Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies;*
8. *Regulation of the Financial Services Authority No. 46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Function;*
9. *Regulation of the Financial Services Authority No. 65/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
10. *Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Units;*
11. *Financial Services Authority Circular No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
12. *Regulation of the Financial Services Authority No. 31 / POJK.04/2015 concerning Openness of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;*
13. *Regulation of the Financial Services Authority Number 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;*
14. *Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2014 concerning Application of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;*
15. *Fatwa of National Sharia Board - The Indonesian Council of Ulama*
16. *General Guidelines for Sharia Business Good Governance;*
17. *Articles of Association of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;*
18. *Manual Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;*
19. *Good Corporate Governance Policy of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;*
20. *Guidelines and Procedures for Implementing Customer Complaints Reporting PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;*
21. *Code of Ethics for Bankers;*
22. *Bank Muamalat Code of Ethics; and*
23. *Ittifaq Muamalat.*

# Prinsip GCG

## *GCG Principles*

Aspek operasional berkaitan dengan performa positif dalam memberikan layanan terbaik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah sifat dan perilaku Nabi dan Rasul yang patut untuk diteladani dalam kegiatan sehari-hari dan termasuk juga dalam berbisnis. Sifat-sifat tersebut antara lain yaitu shidiq, fathonah, amanah dan tabligh. Sementara asas kedua adalah asas yang dipakai secara umum oleh pelaku bisnis lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, kewajaran, kesetaraan dan sikap kepedulian.

Asas-asas tersebut terangkum dalam nilai-nilai Muamalat IDEAL yang diimplementasikan pada seluruh tingkatan jenjang dan organisasi. Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek aspek sebagai berikut:

### Keterbukaan

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya". (QS. An-Nisa: 58). Keterbukaan (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank Muamalat Indonesia dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Bank Muamalat Indonesia serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Kebijakan Bank Muamalat Indonesia dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *Stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Akuntabilitas

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu pengetahuan)" (QS Fathir: 28). "Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan" (QS Az-Zumar: 9). "Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan" (QS Al-Mujaadilah: 11) Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.

*The operational aspect is relevant to positive performance of providing the best service and fulfilling the expectation of stakeholders. In this regard, Bank Muamalat Indonesia refers to two principles. The first principle is character and behavior of the Prophets and Apostle who deserve to be emulated in everyday activities and in running business. These characters include shidiq, fathonah, amanah, and tabligh. While the second principle is one applied in the business world in general, namely transparency, accountability, responsibility, professional, fairness, equality, and caring attitude.*

*These principles are summarized in IDEAL Values of Muamalat which implemented to all levels of organization. The values are reflected in the following aspects:*

### *Transparency*

*"Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due" (QS. An-Nisa: 58). Transparency contains the elements of disclosure and the provision of information in a timely, adequate, clear and accurate manner as well as comparable and easily accessed by the stakeholders and the public. Bank Muamalat Indonesia and all levels of its management always seeks to ensure transparency in conveying the material and relevant information and transparency in the decision making process and on Bank Muamalat Indonesia as well as easily accessed by the stakeholders in accordance with their rights. Bank Muamalat Indonesia policy is made in writing and communicated to all stakeholders who are entitled to obtain the information. Transparency does not only mean the disclosure of information required by the legislation, but it is also important in the decision making process in accordance with the provisions of sharia, without reducing the Bank's obligation to comply with the provision on the confidentiality of the organization in accordance to the legislation in force.*

### *Accountability*

*"Only those fear Allah, from among His servants, who have knowledge" (QS Al-Fathir: 28). "Are those who know equal to those who do not know?" (QS Az-Zumar:9). "Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with what you do." (QS Al-Mujaadilah: 11). Accountability contains the elements of clarity of functions within the organization and the way to hold responsible thus management can run effectively. Bank Muamalat Indonesia's Management must be accountable for the performance transparently and fairly. To that end, the business of Bank Muamalat Indonesia should be properly managed, measured and should be in accordance with the interests of the business player while taking into account the interests of stakeholders.*

## Pertanggungjawaban

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"(QS Al-Muddatsir: 38). Pertanggungjawaban mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*. Bank Muamalat Indonesia dan segenap Jajaran Bank Muamalat Indonesia dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat Indonesia dan Jajaran Bank Muamalat Indonesia harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

## *Responsibility*

*"Every soul, for what it has earned, will be retained." (QS Al-Muddatsir: 38). Responsibility contains the elements of compliance with the legislations and internal regulations as well as the responsibility towards the society and the environment. Responsibility is required to ensure long-term sustainability of the business and recognition as a good corporate citizen. Bank Muamalat Indonesia and the entire levels of Bank Muamalat Indonesia always uphold the principles of prudence in all of its actions as well as the conformity of the Bank's management with the applicable legislations and the principles of sound bank management, while remained aware of all the possible risks and negative implications caused by its actions. Bank Muamalat Indonesia and the entire levels of Bank Muamalat Indonesia must always consider the interests of all stakeholders in carrying out its functions and determine policies or make decisions.*

## Profesional

"Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka" (HR Abu Daud) "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)" (HR Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Albany). Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dan seluruh Jajaran Manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

## *Professional*

*"Whoever imitate a people, then it belonged to them" (HR Abu Dawud). "Trully, God loves someone who carries out work in a professional manner (itqon)" (HR Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Albany). Professional namely possessing competence, able to act objectively, and free of the influence/pressure from other parties (independent), free of conflicts of interest and posseses a strong commitment to develop Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia and all levels of the Management ensure that Bank Muamalat Indonesia is managed in a professional manner without any conflicts of interest and can avoid the influence/pressure from other parties (independent) which are not in accordance with the legislations in force and the principles of sound corporation. Implementation of the principles of professional and independence are carried out by Bank Muamalat Indonesia.*

## Kewajaran dan Kesetaraan

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan" (QS An-Nahl: 90). "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (QS An-Nisa:135). Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain:

## *Fairness*

*"Indeed, Allah orders justice and good conduct" (QS An-Nahl: 90). "O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives..."(QS An-Nisa:135). Fairness and equality contain the elements of fair treatment and equal opportunity in accordance with its proportion in fulfilling the rights of stakeholders under the agreement and the legislation in force. Equality contains the elements of similarity of treatment and opportunity, thus always consider the interests of shareholders, customers and other stakeholders based on the principles of fairness of each of the parties concerned.*

1. Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bank Muamalat Indonesia menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Sikap Kepedulian

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat berat". (QS Al-Maidah: 2) Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa: "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Di samping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.

Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip-prinsip GCG kepada semua organ dan jenjang secara terencana, terarah dan terukur. Hal ini bertujuan agar penerapan GCG berlangsung konsisten sesuai praktik-praktik terbaik penerapan GCG.

*1. Bank Muamalat Indonesia applies the principle of fairness which is implemented as justice and equality (equal treatment) in fulfilling the rights of the Stakeholders arising under the agreement and the laws and regulations in force.*

*2. Bank Muamalat Indonesia ensures that all stakeholders will receive equal treatment without discrimination in accordance with the laws and regulations in force.*

## *Social Awareness*

*"And cooperate in righteousness and piety,but do not cooperate in sin and aggression" (QS Al-Maidah: 2). The caring attitude (social awareness) is the concern to the disadvantaged communities and the environment which is reflected by performing various forms of humanitarian and social activities as a form of Bank Muamalat Indonesia's social responsibility to the society and the environment. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 25 Year 2007 regarding Capital Investment Article 15 (b), among others, is stated that: "All capital investment is obliged to carry out corporate social responsibility". Besides, in accordance with the applicable GCG rules and regulations which among others mention that each bank is obliged to inform the distribution of funds for social activities in the GCG report. In the implementation of Bank Muamalat Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) to the community, the Bank cooperates with Baitulmaal Muamalat (BMM) so that the distribution of CSR can be precisely targeted and have appropriate objectives.*

*Bank Muamalat Indonesia applies the principles of GCG to all levels in planned and measurable manner. It aims to ensure that the implementation of GCG is consistent according to the best practices of GCG implementation.*

# Pernyataan Tata Kelola Perusahaan

## *Corporate Governance Statement*

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank. Dengan Tata Kelola yang Baik maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

*Implementation of good corporate governance is essential in every aspect of the Bank's business activities. With good corporate governance, trust and confidence of all customers and stakeholders can be further maintained and improved.*

Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Penerapan GCG pada Bank Muamalat Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dimulai dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman pada semua unit kerja Bank tentang arti penting dari penerapan GCG, masing-masing fungsi yang dijalankan diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten.

*Bank Muamalat Indonesia is committed to improve the implementation of Good Corporate Governance as one of the main prerequisites for business success and sustainability. The implementation of GCG at Bank Muamalat Indonesia is carried out in a sustainable manner starting with an internalization process to gain understanding on all lines of the bank's work units on the importance of GCG implementation, each function which is run is being followed by correct and consistent implementation.*

Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan praktik GCG, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan Tata Kelola yang Baik.
3. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank.
4. Secara berkesinambungan melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada pejabat dan pegawai.
5. Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*), budaya risiko dan budaya anti *fraud* di lingkungan Bank.
6. Melakukan sosialisasi kode etik Bank dan *corporate culture*.
7. Setiap karyawan diwajibkan untuk membuat persetujuan secara elektronik surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi anti *fraud* secara berkala.
8. DPS dan *Compliance* Syariah melakukan pengawalan terhadap penerbitan produk dan aktivitas Bank agar sesuai dengan aspek syariah termasuk melakukan uji petik dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah di unit bisnis.

*Such commitment is embodied by taking measures to improve GCG practices, among others are as follows:*

1. *Periodically evaluate and update policies and procedures in order to maintain the effectiveness, adequacy, and suitability of policies and procedures that are owned according to the provisions and the applicable laws and regulations.*
2. *The Board of Directors has continuously made efforts to improve the Bank's performance with due regard to prudential and good governance aspects.*
3. *Improve the Bank's organizational structure in line with the Bank's business focus.*
4. *Continuously conduct training and certification to officials and employees.*
5. *Conduct socialization in order to build a compliance culture, risk culture and anti-fraud culture within the Bank.*
6. *Conduct socialization of Islamic corporate ethics and corporate culture.*
7. *Periodically, every employee is required to make an electronic approval of compliance statement letter, GCG implementation and anti-declaration.*
8. *The Sharia Supervisory Board and Sharia Compliance oversee the issuance of Bank products and activities to conform with sharia aspects including sampling to ensure compliance with Shariah Compliance in business units.*

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit intern dan audit ekstern, Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

*The active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors in implementing GCG principles is applied in 11 (eleven) aspects of GCG implementation as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7th, 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Units and Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Risk-Based Bank Rating for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units, including the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, the completeness and implementation of duties by the committee, implementation of sharia principles in funding, financing activities and services, handling of conflicts of interest, application of Bank's compliance function, internal and external audit functions, Legal Lending Limit and transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, report of GCG implementation and internal report.*

# Tujuan Penerapan GCG

## *GCG Objectives*

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, nasabah, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank Muamalat Indonesia.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat Indonesia.
7. Memperbaiki budaya kerja Bank Muamalat Indonesia.
8. Meningkatkan citra (*image*) Bank Muamalat Indonesia menjadi semakin baik.

*Bank Muamalat Indonesia is committed to implement GCG principles consistently with the following objectives:*

1. *Control and direct relationships between the Company's Organs (Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board), employees, customers, partners, as well as the public and environment in order for the Bank to run well in accordance with GCG principles.*
2. *Encourage and support the development of Bank Muamalat Indonesia.*
3. *Manage resources more trustfully.*
4. *Manage risks better.*
5. *Increase accountability to stakeholders.*
6. *Prevent the occurrence of irregularities in the management of Bank Muamalat Indonesia.*
7. *Improve the working culture of Bank Muamalat Indonesia.*
8. *Improve the image of Bank Muamalat Indonesia to be better.*

# Roadmap GCG

## *GCG Roadmap*

*Road Map* GCG Bank Muamalat Indonesia merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG yang berdasarkan dengan standar ketentuan yang ada yakni menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

*GCG Roadmap of Bank Muamalat Indonesia is the grand strategy and milestone of GCG implementation which is based on the existing standard of provisions towards sustainable corporate governance by integrating the aspects of compliance, internal control, risk management and corporate social responsibility.*

Tahapan *Road Map* GCG Muamalat adalah sebagai berikut:

*Stages of Muamalat's GCG Roadmap are as follows:*




**TAHAP 1**
PHASE 1

**TAHAP 2**
PHASE 2

**TAHAP 3**
PHASE 3

Pada tahap awal penerapan GCG, Bank memfokuskan pada pemenuhan aspek *governance structure* dan *governance process* sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau memenuhi rekomendasi dari regulasi/otoritas pengawas. Pemenuhan *governance structure* antara lain melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Dengan *govenance structure* yang baik diharapkan dapat mendukung efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG. Tolok ukur keberhasilan dari penerapan GCG adalah menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan yang mampu mendukung terwujudnya kelangsungan usaha Perseroan yang sehat.

*In the early stages of GCG implementation, the Bank focuses on fulfilling the aspects of governance structure and governance process in accordance with prevailing regulations and/or fulfilling the recommendations of supervisory regulations/ authorities. The fulfillment of governance structure among others are through the improvement of the Bank's policies and procedures, management information system as well as the main duties and functions of each organizational structure. With a good governance structure is expected to support the effectiveness of the implementation process of GCG principles. The success benchmark of GCG implementation is to make GCG as a part of corporate culture that is able to support the growth and sustainability of the Company's business.*

## Penguatan Penerapan GCG

Bank Muamalat Indonesia terus berupaya memperkuat penerapan GCG untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Selama tahun 2018, Bank Muamalat Indonesia melakukan berbagai upaya dalam memperkuat implementasi GCG, antara lain:

1. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan Tata Kelola yang Baik.
2. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia melakukan pengawasan atas terselenggaranya kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia bertindak dan mengambil keputusan secara profesional dan independen.
4. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dengan memastikan transaksi, produk dan aktivitas Bank sesuai dengan aspek syariah.
5. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip GCG.
6. Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab komite level Dewan Komisaris agar efektif dan tepat dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Menyusun Rencana Bisnis Bank, melaksanakannya secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan atas rencana bisnis yang telah ditetapkan.
8. Menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pengelolaan perusahaan.
9. Meningkatkan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fungsi manajemen risiko Bank.
10. Melakukan *self-assessment* dan menyampaikan hasilnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui training atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan setiap karyawan.
12. Menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, akurat, terkini dan utuh sesuai ketentuan yang berlaku.

## *GCG Strengthening*

*Bank Muamalat Indonesia continues to strengthen the implementation of GCG to support the growth and sustainability of the Bank's business. Throughout 2017, Bank Muamalat Indonesia made various efforts to strengthen the implementation of GCG, among others:*

1. *Complete the governance structure at the Board of Commissioners level by fulfilling members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee from independent parties skilled in sharia.*
2. *The Board of Directors has continuously made efforts to improve the Bank's performance with due regard to prudential and good governance aspects.*
3. *The Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia oversees the implementation of the Bank's operational and management activities effectively.*
4. *The Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia act and make decisions in a professional and independent manner.*
5. *Duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors are carried out in compliance with GCG principles.*
6. *Optimize the committee's duties and responsibilities to be effective and appropriate in providing recommendations to the Board of Commissioners.*
7. *Prepare the Bank's Business Plan, implement it effectively and efficiently as well as oversee the business plan.*
8. *Implement risk management and prudential banking principles in the management of the Company*
9. *Improve compliance function, internal audit function and risk management function of the Bank.*
10. *Conduct self-assessment and deliver the results to the Financial Services Authority in accordance with applicable provisions.*
11. *Improve the quality of Human Resources through training according to the needs of each employee.*
12. *Deliver financial and non-financial statements to the public in a timely, accurate, current and complete manner in accordance with applicable regulations.*

# *Self-Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance*

## *Good Corporate Governance Self Assessment*

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank diwajibkan untuk melakukan *self-assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*.

*In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7th, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Units and Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Risk-Based Bank Rating for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units, the Bank is required to conduct a self-assessment on the implementation of Good Corporate Governance.*

*Self-assessment* dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit internal;
9. Penerapan fungsi audit eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.

*Self-assessment is carried out on 11 (eleven) assessment factors of GCG implementation stipulated by Bank Indonesia, namely:*

1. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
2. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors;*
3. *Completeness and implementation of the Committee's duties;*
4. *Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;*
5. *Implementation of sharia principles in the activities of funding and financing as well as services;*
6. *Handling of conflicts of interest;*
7. *Implementation of the bank's compliance functions;*
8. *Implementation of internal audit functions;*
9. *Implementation of external audit functions;*
10. *Legal Lending Limit; and*
11. *Transparency of financial and non-financial conditions, report of Good Corporate Governance implementation and internal reporting.*

*Self-Assessment* implementasi GCG Bank Muamalat Indonesia semester I dan semester II di tahun 2018 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat *self-Assessment* GCG Bank Muamalat Indonesia secara Individual adalah 3 (tiga) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

*Self-assessment of GCG implementation of Bank Muamalat Indonesia in the first semester and second semester of 2017 has been carried out comprehensively with the result of Self-assessment rating of GCG Bank Individual's Muamalat is 3 (three) with a rating definition that reflects the Bank's Management has performed a generally good implementation of Good Corporate Governance. This is reflected in the application of the principles of Good Corporate Governance is sufficient. If there are weaknesses in the application of Good Corporate Governance principles, the weaknesses are generally quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.*

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pelaksanaan GCG PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:

*Based on the analysis of all criteria/indicators of GCG implementation, it can be concluded that the strength of GCG implementation of Bank Muamalat Indonesia is:*

### *Governance Structure*

Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank Muamalat Indonesia dan secara reguler telah di*review* dan dievaluasi menyesuaikan kebutuhan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia juga telah melengkapi struktur Dewan Komisaris, Direksi, DPS, satuan kerja Audit, satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan secara memadai sehingga masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga, komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS juga telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis serta kebutuhan Bank Muamalat Indonesia. Terkait persetujuan

### *Governance Structure*

*Bank Muamalat's organizational structure has been aligned with the business focus of Bank Muamalat and has been regularly reviewed and evaluated to adjust the needs of Bank Muamalat. Bank Muamalat has also completed the structure of the Board of Commissioners, Directors, DPS, Audit work units, Risk Management work units and Compliance work units adequately so that each function can carry out its duties and responsibilities properly. Likewise, the composition of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS is suitable with the regulations and scale of the business and needs of Bank Muamalat. Regarding the approval from the*

dari OJK, seluruh anggota Direksi telah lulus PKK dan seluruh anggota DPS telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Sementara untuk Dewan Komisaris, masih terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses PKK.

Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, telah memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah memiliki pedoman kerja yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Perusahaan sehingga sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Direksi juga telah membentuk 4 (empat) komite yaitu *Risk Management Committee*, IT *Steering Committee*, ALCO dan *Human Capital Committee* guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan secara efektif, cepat dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini BMI dan tantangan bisnis ke depan.

Selain ke-4 Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan satuan kerja Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen dari satuan kerja Operasional. Satuan kerja yang merupakan *2nd & 3rd line of defense* tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional BMI dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan GCG. Infrastruktur tata kelola Bank berupa Kebijakan dan Prosedur Bank, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

## *Governance Process*

BMI selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank sesuai dengan CCG dan prinsip kehati-hatian. Proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Semua organ BMI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing secara proper. Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah melakukan rapat koordinasi untuk saling memberikan informasi, berdiskusi dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga bisnis BMI berjalan dengan baik.

Pada level Dewan Komisaris, untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun

*OJK, all members of the Board of Directors have passed the PKK and all members of the DPS have received approval from the FSA. Meanwhile there are still 2 (two) members of the Board of Commissioners who are still in the PKK process.*

*In the appointment of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and DPS, the integrity, competency, and financial reputation factors have been taken seriously so that members of the Board of Commissioners, Directors and DPS have adequate and relevant competencies to carry out their duties and responsibilities and are able to implement the competencies they have in implementing their duties and responsibilities.*

*To carry out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners, Directors and DPS have worked based on guidelines that govern the implementation of the duties and responsibilities of each function. In order to assist the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners has established and completed the membership of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee and Corporate Governance Committee so that they are match the regulations and the Bank's needs. The Board of Directors has also formed 4 (four) committees; the Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO and Human Capital Committee to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities and are expected to be able to make effective, fast and appropriate decisions in dealing with current BMI conditions and challenges business going forward.*

*Besides the 4th Committee, the Board of Directors has also provided the organization with an Audit, Risk Management and Compliance work unit that is independent of the Operational work unit. The work unit which is the 2nd & 3rd line of defense is expected to be able to support BMI operational activities by paying attention to the principles of prudence and GCG. The Bank's governance infrastructure in the form of Bank Policies and Procedures, Main Tasks and Functions of each organizational structure are good enough to support the Bank's business activities.*

## *Governance Process*

*BMI always strives to carry out the Bank's business activities and operational processes in accordance with the CCG and the precautionary principle. The process of appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners, Board of Directors and DPS has been carried out in accordance with applicable regulations and with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee by considering the assessment of factors of integrity, competence and financial reputation. All BMI organs must carry out their duties and responsibilities according to their respective functions properly. The Board of Commissioners, DPS and Directors have held coordination meetings to provide information to each other discuss and take the decisions needed to keep the BMI business running well.*

*To support the duties and responsibilities of Board of Commissioners level in supervising and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has approved the Bank Business Plan (RBB) which has been prepared to*

dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi dari RBB yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris membentuk komite yang dapat membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite-Komite yang dibentuk telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait proses perbaikan yang perlu dilakukan oleh BMI.

*match the conditions of the external and internal factors of the Bank. The Board of Commissioners has also supervised the realization of the stipulated RBB. In an effort to improve the supervisory function of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners forms a committee that can assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties. The committees formed have submitted recommendations to the Board of Commissioners regarding the process of improvement that needs to be carried out by BMI.*

DPS secara rutin telah menyelenggarakan rapat bulanan guna memastikan antara lain usulan produk, jasa dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga telah melakukan uji petik atas transaksi dan dokumen transaksi terhadap kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pelaksanaan uji petik dibantu oleh 3 (tiga) orang *Liasion Officer* yang berada di bawah supervisi unit kerja Compliance. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran ke OJK, DSN dan Direksi.

*DPS routinely holds monthly meetings to ensure, proposals for products, services and programs has matched with sharia principles stipulated in the DSN-MUI Fatwa. In order to carry out its duties and responsibilities, DPS has also conducted quotation tests on transactions and documents on fund raising activities and fund distribution. The test was assisted by 3 (three) Liaison Officers who were under the supervision of the Compliance work unit. The results of supervision from DPS have been reported semi-annually to OJK, DSN and Directors.*

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan prinsip syariah. RBB yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menjadi panduan dan fokus bagi Direksi untuk dapat direalisasikan dengan baik. Proses pengambilan keputusan Direksi antara lain dilakukan melalui rapat Direksi yang diselenggarakan seminggu sekali. Direksi berupaya merealisasikan target bisnis dalam RBB dan memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan GCG

*Without any intervention from shareholders the board of Directors perform its duties and responsibilities for the implementation of the Bank's management based on prudential principles, GCG and sharia principles. The RBB that has been approved by the Board of Commissioners become a guideance and focus for the Board of Directors to be realized properly. The decision making process of the Board of Directors is carried out through a Board of Directors meeting held once a week. The Board of Directors seeks to realize business targets in the RBB and improve the performance of the Bank by taking into account the principles of prudence and GCG*

Dalam rangka mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan budaya yang baik, seluruh karyawan BMI diwajibkan menandatangani/menyetujui surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi anti *fraud* secara berkala yang berisi antara lain mentaati segala peraturan perundang-undangan, memegang teguh rahasia bank, tidak menerima pemberian apapun yang mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan/pekerjaan, tidak memiliki konflik kepentingan, tidak melakukan tindakan *fraud* dan pernyataan lainnya yang terkait dengan kepatuhan, GCG dan anti *fraud* dalam aplikasi Muamalat Human Power. Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan training-training secara fleksibel berdasarkan minat dan kebutuhan dari masing-masing karyawan. Secara reguler juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

*In order to maintain integrity and culture, all BMI employees are required to sign/approve a statement of compliance, implementation of GCG and anti-fraud declaration periodically which contains, several things such as obeying all laws and regulations, holding bank secrets, not accepting any gifts related to position/job, does not have a conflict of interest, does not commit fraud and other statements related to compliance, GCG and anti-fraud in the Muamalat Human Power application. Employees also get the opportunity to get training flexibly based on the interests and needs of each employee. Training is also regularly conducted to improve the ability and knowledge of employees so as to support employees in carrying out their duties and responsibilities properly.*

Secara berkala, BMI juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan internal dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Dalam pengajuan produk dan aktivitas baru, telah dikaji/dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait (fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Legal) dan telah mendapatkan opini/persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas kesesuaian produk dan aktivitas baru dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

*Periodically, BMI has evaluated and updated internal provisions in order to maintain the effectiveness, adequacy and suitability of internal provisions with applicable laws and regulations and sharia principles. In submitting new products and activities, Bank Muamalat should review and evaluate them by related functions (Risk Management, Compliance and Legal functions) and has received an opinion/approval from the Sharia Supervisory Board (DPS) for the suitability of new products and activities with the Fatwa of National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).*

## *Governance Outcome*

1. Dengan struktur dan proses yang telah dilakukan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan, diharapkan *outcome* yang dicapai oleh BMI dapat membantu BMI untuk terus berkembang.
2. Rasio-rasio *prudential aspect* Bank telah memenuhi ketentuan.
3. Sejalan dengan evaluasi/*review*, pengkinian dan alur proses dalam melakukan penerbitan produk/aktivitas baru dan ketentuan internal BMI maka produk dan/aktivitas BMI telah memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk aspek syariah. Ketentuan internal BMI juga telah dikinikan secara berkala sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki, oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk antara lain:
1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat melalui RUPS masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK.
2. Terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris (masih proses PKK) yang belum memenuhi regulasi yang berlaku.
3. Fungsi dalam lini pertahanan mulai dari *first line, second line and third line of defense* perlu ditingkatkan sebagai bagian dari *internal control bank*.
4. Transaksi dalam rangka penguatan permodalan Bank masih perlu diupayakan untuk dapat segera direalisasikan.
5. Kualitas data pelaporan masih perlu diperbaiki sehingga dapat meminimalisasi denda yang dikenakan oleh otoritas.

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria yang ditetapkan oleh OJK. Dari hasil *Self-assessment* pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* maka diperoleh peringkat per faktor.

## *Governance Outcome*

1. *With the structure and processes that have been carried out and continue to be pursued, it is expected that the outcomes achieved can help BMI to continue to develop.*
2. *The Bank's prudential aspect ratios have met the conditions.*
3. *To match the evaluation, updating and issuing process of new products/activities and internal provisions of BMI, the products and/activities have fulfilled the applicable provisions including sharia aspects. BMI's internal provisions have also been regularly updated in accordance with applicable regulations.*

*Several factors in the implementation of GCG that still need to be improved by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk include:*
1. *2 (two) members of the Board of Commissioners who have been appointed through the GMS are still in the process of fit and proper test and Compliance Assessment by the OJK.*
2. *There are multiple positions of members of the Board of Commissioners (still PKK processes) that have not met the applicable regulations.*
3. *The functions in the defense line starting from the first line, second line and third line of defense need to be increased as part of the internal control bank.*
4. *Transactions in order to strengthen the Bank's capital still need to be sought to be realized immediately.*
5. *The quality of reporting data still needs to be improved so that it can minimize fines imposed by the authorities.*

*The ranking of the aspects mentioned above is based on the performance of GCG implementation on the criteria set by the OJK. From the results of the Self-Assessment of Bank GCG implementation considering GCG assessment factors in a comprehensive and structured manner, including Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome, a ranking per factor is obtained.*

# Rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

## *Recommendations for Implementing the Corporate Governance Guidelines*

Bank Muamalat Indonesia Indonesia telah menindaklanjuti hasil penilaian Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagai berikut:

*Bank Muamalat Indonesia has followed up on the results of the evaluation of the Financial Services Authority Circular Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance, as follows:*

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Bank Muamalat Indonesia dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

*Conformity of the Development of GCG Implementation in the Scope of Bank Muamalat Indonesia with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines for Corporate Governance of the Public Company.*

| Tujuan | *Purpose* |
|---|---|
| 1. Penilaian Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bertujuan untuk mendorong Perusahaan Terbuka untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.<br>2. Pedoman Tata Kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola yang Baik.<br>3. Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola, paling sedikit memuat :<br>a. Pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola; dan/atau<br>b. Penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, yang paling sedikit memuat :<br>• Alasan belum diterapkannya; dan<br>• Alternatif pelaksanaannya (jika ada).<br>4. Dalam memberikan penjelasan tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola dan/atau penjelasan alasan penggunaan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Terbuka harus memastikan bahwa penjelasan yang diberikan cukup jelas, informatif, dan memadai sehingga investor dan pemangku kepentingan lainnya mengerti alasan Perusahaan Terbuka :<br>a. Tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola; dan/atau<br>b. Menggunakan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola. | *1. Evaluation of Public Company Governance Guidelines implementation to encourage Open Companies to implement good corporate governance as it is performed by the international practices.*<br>*2. The Governance Guidelines cover 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of good corporate governance, and 25 (twenty five) recommendations for the application of aspects and principles of good corporate governance.*<br>*3. Disclosure of the application of the Governance Guidelines, which at least containing:*<br>*a. Statement regarding the implementation of Governance Guidelines; and/or*<br>*b. Explanation if the implementation of Governance Guidelines has not been done, which at least contain:*<br>• *Reasons for not being applied; and*<br>• *Alternative implementation (if any).*<br>*4. When giving explanation about the failure to implement recommendations on the implementation of governance aspects and principles in the Governance Guidelines and/or an explanation of the reasons for using other methods in applying governance aspects and principles in the Governance Guidelines as referred to in number 3, the Public Company must ensure that the explanation should be given clearly enough, informative, and sufficient so that investors and other stakeholders understand the reasons for the Public Company:*<br>*a. The failure to implement recommendations on aspects and principles of governance in the Governance Guidelines; and/or*<br>*b. Applying other means of governance aspects and principles in the Governance Guidelines.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| A. | HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM<br>*Relationship Between the Public Company and Shareholders in Guaranteeing the Rights of the Shareholders* | | | |
| | Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<br>Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Ketentuan terkait RUPS bagi Perusahaan Terbuka telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Sedangkan ketentuan terkait RUPS bagi perusahaan tertutup diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. RUPS dapat diselenggarakan antara lain dengan adanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang memenuhi persyaratan, dilanjutkan dengan penyampaian mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan penyusunan risalah RUPS dan pengumuman ringkasan risalah RUPS. Dalam proses tersebut juga terdapat pelaksanaan pengumuman dan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham yang didalamnya mencantumkan mekanisme untuk mengusulkan mata acara oleh pemegang saham. Nilai dari penyelenggaraan RUPS tersebut dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya untuk mendorong kewajaran dan transparansi dalam rangka menjamin hak-hak dan kepentingan pemegang saham.<br><br>*Increase the Value of Implementing the General Meeting of Shareholders (GMS)*<br>*Shareholders have the right to participate in the management of the company through decision making in the RUPS as mentioned in the laws and regulations and the company's article of association. Provisions related to the GMS for Public Companies have been regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, Regulation of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions Number IX.J.1, Attachment to the Decision of the Chairperson The Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: KEP-179/BL/2008 dated May 14, 2008 concerning the Principles of the Company's Articles of Association Conducting Public Offering of Equity and Public Companies, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and budgets the company's foundation. While the provisions relating to the GMS for closed companies are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the company's article of association. The RUPS can be held with the request for the implementation of the RUPS of the shareholders who fulfill the requirements, followed by the submission of the agenda to the Financial Services Authority (FSA) Up to the preparation of the minutes of the RUPS and the announcement of the summary minutes of the RUPS. During the process there was also the implementation of the announcement and summons of the RUPS to the shareholders which included a mechanism to propose the agenda by the shareholders. The value of holding the RUPS to encourage fairness and transparency in order to guarantee the rights and interests of shareholders.* | | |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Rekomendasi :<br>Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.<br><br>Penjelasan<br>Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote).* Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting).* Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara *(voting)* tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting)* secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting)* secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting.*<br><br>*Recommendations:*<br>*The Public Company has a way or technical procedure of voting in public or in private, which will put forward the independence and interest of the shareholders.*<br><br>*Explanation*<br>*Each share has one vote. Shareholders may use their vote in decision making, especially by voting during the process of decision-making. However, the mechanism of decision-making by voting has not been arranged in a detailed manner whether it is in public or in private. The public company should have a voting procedure in decision-making according to the agenda of the GMS. The procedure should also maintain the independence and the freedom of the shareholders. For example, the public voting is done by raising hands according to the instruction of choice that has been offered by the Chairman of the meeting. On the other hand, private voting is done by either voter cards or electronic voting.* | Telah diterapkan<br><br>Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Prosedur Pelaksanaan RUPS sebagai berikut:<br>1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.<br>2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.<br>3. Pemungutan suara mengenai diri orang dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diatur sebagai berikut:<br>• Diri orang dilakukan secara tertulis dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani; dan<br>• Mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS<br><br>*Has Been Implemented*<br>*The Bank has established decision-making procedures through open or closed voting in the GMS either that promote independence and the interests of shareholders. These provisions are stipulated in the Bank's Articles of Association and the GMS's Implementation Procedures as follows:*<br>*1. GMS Decisions making deliberation is conducted deliberation.*<br>*2. In the event of a an unreached deliberation, the GMS decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights were present at the GMS, unless the legislation and/or the Articles of Association determine that decision is valid if approved by a greater affirmative vote.*<br>*3. A vote on self-person and voting on other matters is set as follows:*<br>*• The self-made in writing with a closed sound that is not signed; and*<br>*• Regarding the other things done orally, unless the Chairman of the GMS decides otherwise without objection from 1 (one) or more shareholders present at the GMS.* |
| | Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.<br><br>Penjelasan<br>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.<br><br>*The Board of Directors and Board of Commissioners of the public company are present in the AGMS.*<br><br>*Explanation*<br>*The presence of the Board of Directors and Board of Commissioners of the public company is required so that the Board of Directors and Board of Commissioners are able to observe, explain, and answer directly the agendarelated problems or questions that are given by the shareholders in the GMS.* | RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh Dewan Pengawas Syariah. Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, 2 (dua) orang hadir dalam RUPS. Sementara 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum lulus PKK, tidak hadir dalam RUPS.<br><br>*Annual General Meeting held on June 28, 2018 was attended by all members of the BOC and the rest of the Sharia Supervisory Board. Of three (3) members of the Board of Commissioners who have passed the Fit and Proper Test, two (2) persons present at the AGM. While the two (2) members of the Board of Commissioners who have not passed the PKK, was not present at the AGM.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.<br>Penjelasan<br>Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.<br><br>*The summary of meeting minutes of the GMS is available on the public company website for at least 1 (one) year.*<br><br>*Explanation*<br>*Based on Article 34 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company, the Public Company is obliged to make summary of meeting minutes of the GMS in Bahasa Indonesia and in a foreign language (at least in English). It must be announced in 2 (two) working days after the meeting is executed for the public through the public company website. The availability of the summary of meeting minutes provides an opportunity to absent shareholders to get important information during the meeting quickly and easily. The provisions of how long the summary of meeting minutes may be available is to determine the adequate time for shareholders to retrieve the information.* | Telah diterapkan<br><br>Bank telah menyusun ringkasan risalah RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui Situs Web Bank (www.bankmuamalat.co.id) pada menu hubungan investor-RUPS yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun.<br><br>*Has Been Implemented*<br><br>*The Bank has recorded the GMS resolution summary in Indonesian and English language and perform information disclosure to the public 2 (two) days after the GMS, one of the disclosure was performed through the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id) in Investor Relation-GMS menu). The information is available for more than 1 (one) year.* |
| | Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor<br>Perusahaan Terbuka harus terus meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham atau investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Komunikasi tersebut bermanfaat untuk mengetahui harapan dan pandangan dari pemegang saham atau investor, serta memperoleh saran dan masukan demi kepentingan dan kesinambungan usaha Perusahaan Terbuka.<br><br>*Increase the Quality of Communication Between the Public Company and Shareholders or Investors*<br><br>*Public companies must continue to enhance the role and participation of shareholders or investors through effective and continuous communication in order to achieve Public Company's goal. The communication is buid so that the company aware of shareholders and investors's hope and view, and to obtain advice and input for the benefits and sustainability of the business of the Public Company.* | | |
| | Rekomendasi :<br>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.<br>Penjelasan<br>Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.<br><br>*Recommendations:*<br>*The Company has a policy of open communication with shareholders or investors.*<br>*Explanation:*<br>*Communication between the Public Company with shareholders or investors meant that shareholders and investors gain a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as newsletters, information disclosure, condition or business prospects and performance, as well as the Public Company's implementation of corporate governance. In addition, shareholders or investors can also submit feedback and opinions to the management of the Public Company. Communication policy with shareholders or investors shows the commitment of the Public Company in carrying out communications with shareholders or investors. This policy may include strategy, program, and the timing of the communication, and guidance that supports shareholders or investors to participate in the communication.* | Telah diterapkan<br><br>Di Kebijakan GCG diatur bahwa dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:<br>• melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;<br>• menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;<br>• menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia; dan<br>• memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.<br><br>Bank Muamalat Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *website* Bank (www.bankmuamalat.co.id), e-mail helpdesk: investor.relations@bankmuamalat.co.id dan melalui surat menyurat dan/atau Fax.<br><br>*Has Been Implemented*<br><br>*In the GCG policy regulates that in carrying out the relationship with the Shareholder, Bank Muamalat Indonesia continues to encourage its application based on the following conditions:*<br>• *Protect the rights of shareholders in accordance with the legislation and the Articles of Association;*<br>• *Maintain the List of Shareholders in an orderly and organized matter in accordance with the legislation and the company's article of association;*<br>• *Provide information regarding the Company in a timely manner, and regularly to all shareholders, except the things that are secret;*<br>• *Provide a complete explanation and accurate information regarding the General Meeting of Shareholders;*<br>*Bank Muamalat Indonesia communicates with its shareholders with a medium of communication through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id), helpdesk email investor.relations@bankmuamalat.co.id and correspondence/Fax* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.<br>Penjelasan<br>Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.<br><br>*Public Company disclose communication policy between the Public Company and its shareholders or investors at website.*<br>*Explanation:*<br>*Disclosure of communication policy is a form of transparency for the commitment of the Public Company in providing equality for all shareholders and investors on the implementation of the communication. Disclosure of such information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in the implementation of communication programs of the Public Company.* | | Mekanisme komunikasi Pemegang Saham dengan Bank telah disiapkan salurannya sebagaimana dijelaskan pada *website* Bank.<br><br>*The communication mechanism of the Shareholders with the Bank has been prepared by its channel as described on the Bank's website.* |
| B. | FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS<br>*Functions and Roles of the Board of Commissioners* | | | |
| | Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris<br>Hal-hal terkait keanggotaan Dewan Komisaris telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sementara prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Namun demikian, dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak diuraikan bagaimana cara Perusahaan Terbuka menyusun keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris yang ideal demi mendukung kesinambungan perusahaan. Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris yang ideal tersebut harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan umum atas Perusahaan Terbuka dan pemberian nasihat kepada Direksi secara profesional, efektif, dan independen. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para *stakeholder.*<br><br>*Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners*<br>*The membership of the Board of Commissioners has been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, while the procedure for nominating members of the Board of Commissioners is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK. 04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. However, these provisions do not describe about how the Public Company ideal membership and composition of the Board of Commissioners to support the sustainability of the company. The ideal membership and composition of the Board of Commissioners must reflect the implementation of the general oversight function of the Public Company and the provision of advice to the Board of Directors in a professional, effective and independent manner. Efforts to strengthen the membership and composition of the Board of Commissioners are carried out through determining the appropriate number and composition in order to achieve the objectives of the Public Company, so as to build trust from stakeholders.* | | |
| | Rekomendasi :<br>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka<br>Penjelasan<br>Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris.<br>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.<br><br>*Recommendations:*<br>*Determination of number of the Board of Commissioners members considering the conditions of the Public Company.*<br>*Explanation*<br>*Number of the Board of Commissioners members may affect the effectiveness of the implementation of duties of the Board of Commissioners.*<br>*The determination of number of the Board of Commissioners members of the Public Company shall be based on the provisions of the prevailing laws and regulations. At least 2 (two) members based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the conditions of the Public Company which include characteristics, capacities and sizes, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Public Companies. However, the excessive number of the Board of Commissioners members may potentially disrupt the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners functions.* | | Telah diterapkan<br><br>Per Desember 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang di mana 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan berdomisili di Indonesia. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank.<br><br>*Has Been Implemented*<br>*As of December 2018, the total number of the Board of Commissioners members are 5 (five) members in which 3 (three) members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners and domiciled in Indonesia. The determination of number of the Board of Commissioners members has complied with the regulations and considered characteristics, capacities, sizes, and composition towards the Board of Directors as well as the achievement of objectives and fulfillment of the Bank's business needs.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan<br>Penjelasan<br>Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.<br><br>*Determination of the Board of Commissioners members composition pays attention to diversity of skills, knowledge, and experience required.*<br>*Explanation*<br>*Composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the Board of Commissioners organs and members of the Board of Commissioners individually, in accordance with the needs of the Public Company. Such characteristics may be reflected in the determination of skills, knowledge, and experience required for the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners. Composition which has taken into account the needs of the Public Company is a positive thing, especially regarding decision-making in the context of the implementation of supervisory functions which are performed by taking into account various broader aspects.* | Telah diterapkan<br><br>Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian pada bidang:<br>• Ekonomi makro<br>• Perbankan syariah<br>• Pasar modal dan investasi<br>• Industri keuangan<br>• Manajemen strategis<br>• Keuangan<br><br>*Has Been Implemented*<br>*The composition of the Board of Commissioners members takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required where such diversity is reflected in the skills and experience of each member of the Board of Commissioners. Each of the 5 (five) members of the Board of Commissioners has different skills such as:*<br>• *Macroeconomics*<br>• *Sharia Banking*<br>• *Capital and Investment Markets*<br>• *Financial Industry*<br>• *Strategic Management*<br>• *Finance* |
| | Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.<br>Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup antara lain strategi dan rencana penting perusahaan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Komite dimaksud diantaranya adalah Komite Audit, sebagaimana yang telah diwajibkan pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.<br><br>*Improve the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.*<br>*The Board of Commissioners is responsible for supervising the management policy, and the management in general, as well as advising the Directors, as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies. Supervision and provision of advice by the Board of Commissioners includes, among others, important company strategies and plans, integrity of financial statements, internal control systems and risk management, reporting and information disclosure, compliance, and corporate governance. The Board of Commissioners must carry out its duties in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit of the Public Company and in accordance with the intent and purpose of the Public Company. In order to support the effectiveness of its duties, the Board of Commissioners should form committees. These committees include the Audit Committee, as required by the laws and regulations in the Capital Market sector which regulates the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK. 04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.* | | |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Rekomendasi:<br>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.<br>Penjelasan<br>Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment)* Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self-Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self-Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.<br>Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.<br><br>*Recommendations:*<br>*The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.*<br>*Explanation*<br>*The Board of Commissioners' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the collective performance of the Board of Commissioners. Self-assessment is conducted by each member to assess the performance of the Board of Commissioners collectively, rather than assessing the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this self-assessment is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to improve the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis.*<br>*The policy may include assessment activities undertaken along with their aims and objectives, periodic implementation time, and benchmark or criteria of assessment used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration functions of the Public Company, in which the functionality has been required by the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.* | Telah diterapkan<br><br>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.<br><br>*Has Been Implemented*<br>*The Board of Commissioners has a policy of self-assessment.* |
| | Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.<br>Penjelasan<br>Pengungkapan kebijakan *Self-Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.<br><br>*The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.*<br>*Explanation*<br>*Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to give confidence to shareholders or investors for the efforts to improve the Board of Commissioners' performance. With the disclosure, shareholders or investors know the mechanism of check and balance on the performance of the Board of Commissioners.* | Telah diterapkan<br><br>Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.<br><br>*Has been Implemented*<br>*Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Bank's Annual Report.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.<br>Penjelasan<br>Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br><br>*The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in a financial crime.*<br>*Explanation*<br>*The resignation policy of the Board of Commissioners members who involved in a financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust towards the Public Companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is required to assist in the smooth running of legal process and to ensure that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Companies. Such policy may be covered in the Guideline or Code of Conduct applicable to the Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by involved in a financial crime is the status of convicted person against the members of the Board of Commissioners from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in the financial services as well as Money Laundering Crime Act as referred to in Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.* | Telah diterapkan<br><br>Dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia di bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan diatur bahwa anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.<br><br>*Has Been Implemented*<br>*In the Board Manual of Bank Muamalat Indonesiain the chapter of Ethics Related to Bribery and Financial Crimes are stipulated that the member of the Board of Commissioners who involved in financial crimes as convicted person shall resign from his position as a member of the Board of Commissioners.* |
| | Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.<br>Penjelasan<br>Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.<br><br>*Board of Commissioners or Committee who run the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the Nomination process of the Board of Directors members.*<br>*Explanation*<br>*Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee who run the nomination function has the duty to develop policy and criteria required in the Nomination process of candidates for the Board of Directors members. One of the policies that can support the Nomination process is the succession policy of the Board of Directors members. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration process or leadership cadre in the company in order to maintain business sustainability and long-term objectives of the company.* | Telah diterapkan<br><br>Bank telah memiliki dan menerapkan program *Talent Management* dan *Succession Plan*. *Talent Management* mempersiapkan *Pool of Talent* dari Bank sebaga upaya menyediaan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk penyiapan kader-kader terbaik dari *Pool of Talent* Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritikal termauk posisi Direksi.<br><br>Bank telah memiliki database *Pool of Talent* dan *Successor* berdasarkan proses identifikasi talent dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas *Talent* dan Suksesor baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level dibawah Direksi dan Region Head.<br><br>Database ini diperbaharui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi Karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi.<br><br>*Has Been Implemented*<br>*The Bank has owned and implemented Talent Management and Succession Plan program. Talent Management prepares Pool of Talent from the Bank as an effort to provide and strengthen Human Resources at the Bank. Succession is implemented to prepare the best cadres from the Bank's Pool of Talent who are ready to occupy critical positions including the Board of Directors position.*<br>*The Bank already has database of the Pool of Talent and Successor based on the talent and successor identification process using a methodology prepared by the Bank. The validation and calibration process is carried out on both Talent and Successor at the Directorate level as well as the Board of Directors level for strategic positions, one level position below the Board of Directors and Region Head.*<br>*This database is updated annually and becomes the reference of Management in rotation and promotion of Employees and for the needs of nomination of strategic positions including the Board of Directors.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| C. | FUNGSI DAN PERAN DIREKSI<br>*Functions and Role of the Board of Directors* | | | |
| | Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.<br>Hal-hal terkait keanggotaan Direksi telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak diuraikan bagaimana cara Perusahaan Terbuka menyusun keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal demi mendukung kesinambungan perusahaan. Keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal tersebut harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Terbuka secara profesional, efektif, dan efisien. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Direksi tersebut dapat dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.<br><br>*Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.*<br>*Hal-hal terkait keanggotaan Direksi telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak diuraikan bagaimana cara Perusahaan Terbuka menyusun keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal demi mendukung kesinambungan perusahaan. Keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal tersebut harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Terbuka secara profesional, efektif, dan efisien. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Direksi tersebut dapat dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.* | | |
| | Rekomendasi:<br>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.<br>Penjelasan<br>Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.<br><br>*Recommendations:*<br>*Determination of number of the Board of Directors members considering the Public Companies conditions and the effectiveness of decision making.*<br>*Explanation*<br>*As the organ of the Company authorized in the management of the Company, determination of number of the Board of Directors members greatly affects the performance of the Public Companies. Thus, the determination of number of the Board of Directors members shall be conducted through careful consideration and shall be subject to the provisions of the applicable Laws and Regulations, under the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.34/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies shall consist of at least 2 (two) members. In addition, the determination of number of the Board of Directors members shall be based on the requirement to achieve the aims and objectives of the Public Companies and adjusted to the conditions of the Public Companies which include characteristics, capacities, and sizes of the Public Companies and how to achieve the effectiveness of the Board of Directors' decision-making.* | Telah diterapkan<br><br>Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Per Desember 2018, jumlah Direksi sebanyak 5 (lima) orang dengan pembagian tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis Ritel, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Direktur Kepatuhan. Direksi memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.<br><br>*Has been implemented*<br>*Composition of the Board of Directors has been in accordance with the regulations and has considered the characteristics, capacities, and business scale of the Bank. As of December 2018, total number of the Board of Directors are 6 (six) members which duties are President Director, Corporate Banking Director, Retail Banking Director, Finance Director, Human Resources Director concurrent as Operation Director and the Compliance and Risk Management Director. The Board of Directors has the skills and experience in accordance with their respective duties.* | |
| | Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.<br>Penjelasan<br>Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.<br><br>*Determination of composition of the Board of Directors members considers the diversity of skills, knowledge, and experience required.*<br>*Explanation*<br>*Similarly like the Board of Commissioners, the diversity of composition of the Board of Directors members is a combination of desirable characteristics both in terms of organ of the Board of Directors and members of the Board of Directors individually, in accordance with the needs of the Public Companies. The combination is determined by taking into acount the appropriate skills, knowledge and experience on the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the objectives of the Public Companies. Therefore, the consideration of characteristics combination will have an impact in the accuracy of the nomination process and the individual appointment of the Board of Directors members or the Board of Directors collectively.* | Telah diterapkan<br><br>Komposisi anggota Direksi juga memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank.<br><br>*Has been implemented*<br>*Composition of the Board of Directors members also takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required by which devide in function,, duties and authorities of the Board of Directors in achieving the Bank's objectives.* | |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.<br>Penjelasan<br>Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders)* sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.<br><br>*Member of the Board of Directors who is in charge of accounting or finance has the skills and/or knowledge in accounting.*<br>*Explanation*<br>*Financial Statements is management's accountability report on the management of resources owned by the Public Companies, which must be prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the related Financial Services Authority regulations, including the laws and regulations on Capital Market sector governing the presentation and disclosure of Financial Statements of Public Companies. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector governing the responsibilities of the Board of Directors on the Financial Statements, the Board of Directors is jointly responsible for the Financial Statements signed by the President Director and member of the Board of Directors who is in charge of accounting and finance.*<br>*Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will largely depend on the experise, and/or knowledge of the Board of Directrors, especially member of the Board of Directors who is in charge of accounting or finance. The existence of skills and/or knowledge qualification in the field of accounting which at least possess by member of the Board of Directors can provide confidence in the preparation of Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied by the stakeholders as the basis for economic decision making related to the Public Companies. Such skills and/or knowledge can be proven by educational background, certificates of training, and/or related work experience.* | Telah diterapkan<br><br>Direktur yang membawahkan bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman berkarir di akuntan publik Ernst & Young (1993-2003). Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) dan Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia; terakhir menjabat sebagai CFO & Finance Director PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012-2015) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Muamalat Indonesia yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015.<br><br>*Has been implemented*<br>*Board of Directors member who is in charge of accounting or finance has an educational background and work experience in accounting and finance, obtained Accounting degree from the University of Indonesia and has career experience in public accountant Ernst & Young (1993-2003). Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) and Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia; last served as CFO & Finance Director of PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012-2015). Before serving as Finance Director of Bank Muamalat Indonesia, he was appointed through Extraordinary GMS on September 7th, 2015.* |
| | Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.<br>Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Tugas pengurusan oleh Direksi dimaksud mencakup, antara lain efektivitas dan efisiensi sumber daya, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan berkelanjutan (*sustainability),* komunikasi dengan para pemangku kepentingan termasuk melalui sekretaris perusahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Terbuka berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dilakukan demi pengurusan Perusahaan Terbuka yang efisien.<br><br>*Improve the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.*<br>*The Board of Directors is authorized and fully responsible for the management of the Public Company for the benefit of the Public Company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies. The managerial duties by the Directors among other things are, the effectiveness and efficiency of resources, the implementation of internal controls, risk management, sustainability, communication with stakeholders including through the company secretary, preparation of accountability reports, and implementation of corporate governance. The Board of Directors must carry out its duties in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit of the Public Company based on the applicable provisions of the legislation and the articles of association of the company. The division of tasks and management authority among members of the Board of Directors is carried out for the efficient management of the Public Company.* | | |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Rekomendasi:<br>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.<br>Penjelasan<br>Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment)* Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self-Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self-Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.<br><br>*Recommendations:*<br>*The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.*<br>*Explanation*<br>*Similarly like the Board of Commissioners, self-assessment of the Board of Directors is a guideline used as a form of accountability for the assessment of the Board of Directors' performance collectively. Self-assessment is carried out by each member of the Board of Directors to assess the implementation of the Board of Directors' performance collectively, and not assessing the individual performance of each member of the Board of Directors. With this self-assessment is expected that each member of the Board of Directors can contribute to improve the performance of the Board of Directors on an ongoing basis. Such policy may include assessment activities undertaken along with the purposes and objectives, periodic implementation time, and benchmark or criteria of assessment used in accordance with the recommendations given the Public Companies' nomination and remuneration functions, in which the formation of such functions shall be required in the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.* | Telah diterapkan<br><br>Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.<br><br>Direksi dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi.<br><br>Selain itu *Self-Assessment* kinerja Direksi juga dilakukan secara berkala terhadap *governance structure, process* dan *outcome* di level Direksi. Berdasarkan hasil *Self-Assessment* tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja ke depan.<br><br>*Has been implemented*<br>*Self-assessment of the Board of Directors performance has been conducted periodically against governance structure, process and outcome at the Board of Directors level. Based on the self-assessment results, efforts that need to be improved for future performance improvement have been performed.* |
| | Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.<br>Penjelasan<br>Pengungkapan kebijakan *Self-Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.<br><br>*Self-assessment policy to assess the Board of Directors' performance is disclosed in the Public Companies' Annual Report.*<br>*Explanation*<br>*Disclosure of self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information on the improvement efforts in the management of the Public Companies. Such information is very useful to provide confidence to the shareholders or investors on certainty of corporate management continues to be carried out in a better direction. With the disclosure, shareholders or investors know the mechanism of check and balance on the performance of the Board of Directors.* | Telah diterapkan<br><br>Kebijakan *Self-Assessment* atas kinerja Direksi diungkapkan dalam bagian Penilaian Kinerja Direksi di Laporan Tahunan.<br><br>*Has been implemented*<br>*Self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is disclosed in the Board of Directors' Performance Evaluation section in the Annual Report* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.<br>Penjelasan<br>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br><br>*The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in a financial crime.*<br>*Explanation*<br>*The resignation policy of the Board of Directors members who involved in a financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust towards the Public Companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is required to assist in the smooth running of legal process and to ensure that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Companies. Such policy may be covered in the Guideline or Code of Conduct applicable to the Board of Directors. Furthermore, what is meant by involved in a financial crime is the status of convicted person against the members of the Board of Commissioners from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in the financial services as well as Money Laundering Crime Act as referred to in Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.* | | Telah diterapkan<br><br>Dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia Dalam bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan bagi Direksi antara lain diatur bahwa:<br>1. Direksi dilarang melakukan tindakan manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.<br>2. Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Direksi.<br><br>*Has been implemented*<br>*In the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia in the chapter of Ethics Related to Bribery and Financial Crimes for the Board of Directors, among others stipulated that:*<br>*1. The Board of Directors is prohibited from performing any manipulation actions and any forms of embezzlement in the financial services activities and the criminal act of money laundering as referred to in Law No. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering.*<br>*2. Member of the Board of Directors who involved in financial crimes as a convicted person shall resign from his position as a member of the Board of Directors.* |
| D. | PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN<br>*Stakeholders Participation* | | | |
| | Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.<br>Tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup keseluruhan aspek penting dalam Perusahaan Terbuka. Disamping itu, tata kelola perusahaan yang baik juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan kerjasama dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang.<br><br>*Improve the Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation.*<br>*Good corporate governance must cover all important aspects of a public company. Furthermore, good corporate governance must also be able to recognize roles, and require cooperation from stakeholders in creating long-term business continuity.* | | | |
| | Rekomendasi:<br>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.<br>Penjelasan<br>Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.<br><br>*Recommendations:*<br>*Public Companies have a policy to prevent the occurrence of insider trading.*<br>*Explanation*<br>*A person who has inside information is prohibited from engaging in a Securities transaction by using inside information as referred to in the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policy, for example by strictly separating confidential data and/or information with public information, as well as dividing the duties and responsibilities for the management of such information in a proportionate and efficient manner.* | | Telah diterapkan<br><br>Dalam kebijakan GCG Bank, diatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip *equal treatment*. Jajaran Perseroan dilarang untuk membeli atau menjual saham (*common stock*) atau surat berharga Perseroan lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Perseroan.<br><br>Sebagai informasi bahwa meskipun Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka, namun tidak melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sehingga potensi terjadinya *insider trading* sangat rendah.<br><br>*Has been implemented*<br>*In the Bank's GCG policy, it is stipulated that the Bank always provides sufficient, accurate, reliable and timely information to all stakeholders by prioritizing the principle of equal treatment. The Company's ranks are prohibited from buying or selling shares (common stock) or other securities of the Company when it is responsible for important information that is not intended for public consumption that may affect the value of the Company's share price and securities.*<br><br>*For information that although Bank Muamalat Indonesia is a Public Company, but every public offering of shares is carried out in the capital market which makes the potential for insider trading to be very low.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.<br>Penjelasan<br>Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent,* dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks), fraud,* suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.<br><br>*Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies*<br>*Explanation*<br>*Anti-corruption policy is useful to ensure that the Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy may be part of the code of conduct or in its own form. In the policy may include among others the programs and procedures undertaken in overcoming practices of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Public Companies. The scope of the policy should illustrate the prevention of the Public Companies against any corrupt practices of either giving or receiving from others.* | Telah diterapkan<br><br>Ketentuan terkait anti korupsi dan anti *fraud* telah diatur dalam Board Manual dan Prosedur<br><br>Bank telah menyusun Prosedur Anti *Fraud* yang secara umum mengatur tugas dan tanggung jawab unit kerja Anti *Fraud*, wewenang anti *fraud*, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi tindak lanjut dan *whistle blowing system*.<br><br>*Has been implemented*<br>*Anti-corruption and anti fraud related provisions are set out in the Board Manual and Procedure.*<br>*The Bank has drawn up Anti-Fraud Procedures which generally governs the tasks and responsibilities of the Anti Fraud work unit, anti fraud authority, prevention, detection, investigation, reporting, sanction, monitoring, follow-up evaluation and whistle blowing system.* |
| | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.<br>Penjelasan<br>Kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain)* berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau *vendor* dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan.<br>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau *vendor,* mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor,* dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau *vendor.*<br><br>*Public Companies have a policy on the selection and improvement of ability of suppliers or vendors.*<br>*Explanation*<br>*Policy on the selection of suppliers or vendors is useful to ensure that the Public Companies acquire the necessary goods or services at competitive prices and good quality. While the policy of improving the skills of supplers or vendors is useful that the supply chain is running efficiently and effectively. The ability of suppliers and vendors in supplying/fulfilling goods or services required by the Company will affect the quality of the Company's output.*<br>*Thus, the implementation of such policies can ensure the continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the Public Companies. Scope of such policies include criteria in the selection of suppliers or vendors, transparent procurement mechanism, efforts to improve the ability of suppliers or vendors, and the fulfillment of rights related to suppliers or vendors.* | Telah diterapkan<br><br>Kebijakan GCG mengatur bahwa Bank dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Bank senantiasa menjalin hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Dalam menjalin hubungan antara Bank dengan Penyedia Barang/ Jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.<br><br>Dalam melaksanakan hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa, Bank senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:<br>• Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakukan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis yang telah memenuhi syarat/kriteria tertentu dari Perseroan.<br>• Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan Perseroan.<br>• Memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.<br><br>Mekanisme seleksi pemasok atau vendor telah diatur secara detil dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.<br><br>*Has been implemented*<br>*GCG policies regulate that the Bank in interacting with Providers of Goods/ Services among others with suppliers and other parties who conduct business transactions witth the Bank establish good relationship based on the basis of professionalism, trust, honesty, mutual respect and equal opportunity in obtaining relevant information in accordance with the business relationship with the Bank so that each party may make a decision on the basis of fair and reasonable consideration. In establishing relationship between the Bank and Providers of Goods/Services, all parties are obliged to keep the confidentiality of information and protect the interests of each party.*<br>*In establishing relationship with Providers of Goods/Services, the Bank always prioritizes the following principles:*<br>• *Procurement of goods/services shall be made through fair selection and competition by providing equal treatment to all prospective business partners who have met certain terms/criteria from the Bank.*<br>• *All provisions and information on procurement of goods/services including technical administrative requirements, evaluation procedures and evaluation results shall be submitted to prospective business partners who will conduct business with the Bank.*<br>• *Provide equal treatment to all prospective business partners proportionately without any intention to benefit a particular party in any way.*<br>*Suppliers or vendors selection mechanism has been set up in detail in the Procurement of Goods and Services Procedures.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.<br>Penjelasan<br>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.<br><br>*Public Companies have a policy on the fulfillment of creditor rights*<br>*Explanation*<br>*Policy on the fulfillment of creditor rights is used as a guide in lending to creditors. Purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain the creditors' trust to the Public Companies. The policy includes consideration in making agreements, as well as follow-up in fulfilling the obligations of the Public Companies to the creditors.* | Telah diterapkan<br><br>Pemenuhan hak-hak kreditur telah diatur pada prosedur produk Bank serta tercantum dalam perjanjian.<br><br>*Has been implemented*<br>*Fulfillment of creditors' rights that have been regulated in the Bank's product procedures and contained in the agreement.* |
| | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.<br>Penjelasan<br>Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing,* cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.<br><br>*Public Companies have a whistleblowing system policy.*<br>*Explanation*<br>*A well-structured whistleblowing system policy will provide assurance of protection to witnesses or whistleblowers for an indication of infringement by the employee or the management of the Public Companies. Implementation of the system policy will have an impact on the establishment of a good corporate governance culture. Whistleblowing system policy includes types of violations that can be reported through the whistleblowing system, complaints, protection and secrecy of whistleblowers, complaints handling, complaints management, and the results of the handling and follow-up of complaints.* | Telah diterapkan<br><br>Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan *Whistleblowing System* sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG dan Prosedur Anti *Fraud* yang mencakup:<br>• Perlindungan kepada *Whistleblower.*<br>• Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower.*<br>• Pengaduan indikasi *fraud*.<br>• *Contact Center whistleblowing system.*<br><br>*Has been implemented*<br>*The Bank already has a Whistleblowing System policy as stipulated in the GCG Policy and Anti-Fraud Procedures which includes:*<br>• *Protection to Whistleblower.*<br>• *Reporting System and Follow-up Mechanism of Whistleblower's Report.*<br>• *Fraud indication complaints.*<br>• *Contact Center of whistleblowing system* |
| | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.<br>Penjelasan<br>Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.<br><br>*Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Board of Directors and employees*<br>*Explanation*<br>*Long-term incentives are incentives based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plans have a rationale that the long-term performance of the Company is reflected by the growth in the value of shares or other long-term targets of the Company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and motivate the Board of Directors and employees to improve their performance or productivity that will impact on improving the Company's performance over the long-term. The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Companies to encourage the implementation of providing long-term incentives to the Board of Directors and Employees on terms, procedures and forms that are tailored to the long-term objectives of the Public Companies. Such policy may include mean and objectives of providing long-term incentives, terms and procedures for incentives, as well as conditions and risks that the Public Companies should pay attention to in providing incentives. The policy may also be included in the existing remuneration policy of the Public Companies.* | LTIP ini dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep *Talent Management* dan *Succession Plan* di Bank. *Talent* dan *Successor Pool* yang tersedia merupakan karyawan terpilih yang diharapkan menjadi penggerak utama proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya untuk mempertahankan mereka adalah melalui program retensi baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Program LTIP merupakan salah satu program retensi dari sisi finansial dimana skema yang dibuat mengacu pada pencapaian kinerja atas KPI jangka panjang dengan syarat dan kondisi khusus. Beberapa skema ditetapkan dalam beberapa opsi yaitu *upfront payment system* dengan *bonding period* dan mekanisme *clawback* serta opsi *deferred incentive*. Masing-masing terikat dengan syarat dan ketentuan yang relevan.<br><br>*LTIP is developed as part of the implementation of Talent Management and Succession Plan concept in the Bank. Available Talent and Successor Pool are selected employees who are expected to be the main drivers of the Company's business processes. One effort to maintain them is through retention program both financial and non-financial. The LTIP program is one of the financial retention programs in which the scheme was made by referring to the performance achievement of long-term KPIs under special terms and conditions. Some schemes are set up in several options: upfront payment system with bonding period and clawback mechanism as well as deferred incentive option. Each is bound by the relevant terms and conditions.* |

| No. | Prinsip & Rekomendasi | *Principles & Recommendations* | Analisis | *Analysis* |
|---|---|---|---|---|
| E. | KETERBUKAAN INFORMASI<br>*Disclosure of Information* | | | |
| | Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.<br>Keterbukaan informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu mengenai semua informasi penting perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perusahaan Terbuka.<br><br>*Improve the Disclosure of Information.*<br>*Keterbukaan informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu mengenai semua informasi penting perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perusahaan Terbuka.* | | |
| | Rekomendasi:<br>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.<br>Penjelasan<br>Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.<br><br>*Recommendations:*<br>*Public Companies utilize the use of information technology more broadly than the Website as a medium of information disclosure.*<br>*Explanation*<br>*The use of information technology can be useful as a medium of information disclosure. The disclosure of information is not only limited to information that has been regulated in the laws and regulations but also other information related to the Company that is felt useful to be known by the shareholders or investors. With the utilization of information technology that is more broadly than the Website is expected that the Company can improve the effectiveness of the dissemination of corporate information. Nevertheless, the utilization of information technology still pays attention to the benefits and costs of the company.* | | Telah diterapkan<br><br>Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada *Stakeholders* melalui media teknologi informasi selain *website* Bank. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan pelayanan dan *update* kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah melalui media sosial yaitu Youtube, Facebook, Twitter dan Instagram.<br><br>*Has been implemented*<br>*The Bank continuously strives to improve the quality of information disclosure to Stakeholders through information technology media other than the Bank's website. In order to carry out its services and to update information to customers or potential customers, the Bank also uses social media such as Youtube, Facebook, Twitter and Instagram.* |
| | Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.<br>Penjelasan<br>Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.<br><br>*Annual Report of the Public Companies discloses the ultimate beneficial owner of the Public Companies' shares ownership of at least 5% (five percent), other than the disclosure of the ultimate beneficial owners in the shares ownership of the Public Companies through main and controlling shareholders.*<br>*Explanation:*<br>*Laws and regulations in the Capital Market sector that regulate the submission of the Public Companies' Annual Report has set out obligation to disclose information concerning shareholders with 5% (five percent) or more ownership of the Public Companies' shares, as well as the obligation to disclose information on main and controlling shareholders of the Public Companies either directly or indirectly up to the ultimate beneficial owner in the shares ownership. In this Governance Guideline is recommended to disclose the ultimate beneficial owner on the Public Companies' shares ownership of at least 5% (five percent), beside to disclose ultimate beneficial owner from the shares ownership by the main and controlling shareholders.* | | Telah diterapkan<br><br>Bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% (lima) persen atau lebih saham Perseroan kepada Regulator dan Masyarakat (melalui *website* Bank). Pengungkapan informasi tersebut telah diungkapkan pada bagian ikhtisar saham dalam Laporan Tahunan ini.<br><br>*Has been implemented*<br>*The Bank has disclosed information regarding shareholders with ownership of more than 5% (five percent) or more shares of the Bank to the Regulator and Public (through the Bank's website). The disclosure of information has been disclosed in the shares highlights in this Annual Report.* |

# Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

## *Socialization of Corporate Governance Policy*

Pada Tahun 2018, Bank melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi GCG di lingkungan Perusahaan. Sosialisasi dilakukan melalui aplikasi Muamalat Human Power (MHP) yang dapat diakses oleh seluruh karyawan. Selain itu melalui sistem MHP karyawan juga diwajibkan untuk menyetujui pernyataan anti *fraud* sebagai salah satu komitmen karyawan dalam bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan kode etik karyawan Bank. Selain itu dalam rangka meningkatkan *awareness* GCG, Bank juga melakukan sosialisasi GCG melalui *email blast* yang disampaikan kepada seluruh karyawan.

*In 2018, the Bank socializing Corporate Governance with the aim of providing a thorough understanding of GCG Implementation within the Company. Socialization is done through the application Muamalat Human Power (MHP), which can be accessed by all employees. Also through the CRM system employees are also required to agree with the statement as one of the anti-fraud committed employees act and behave in accordance with the code of conduct of employees of the Bank. In addition, in order to improveawareness GCG, the Bank also conducts GCG socialization through email blast communicated to all employees.*

# Struktur dan Mekanisme GCG

## *GCG Structure and Mechanism*

### Struktur GCG

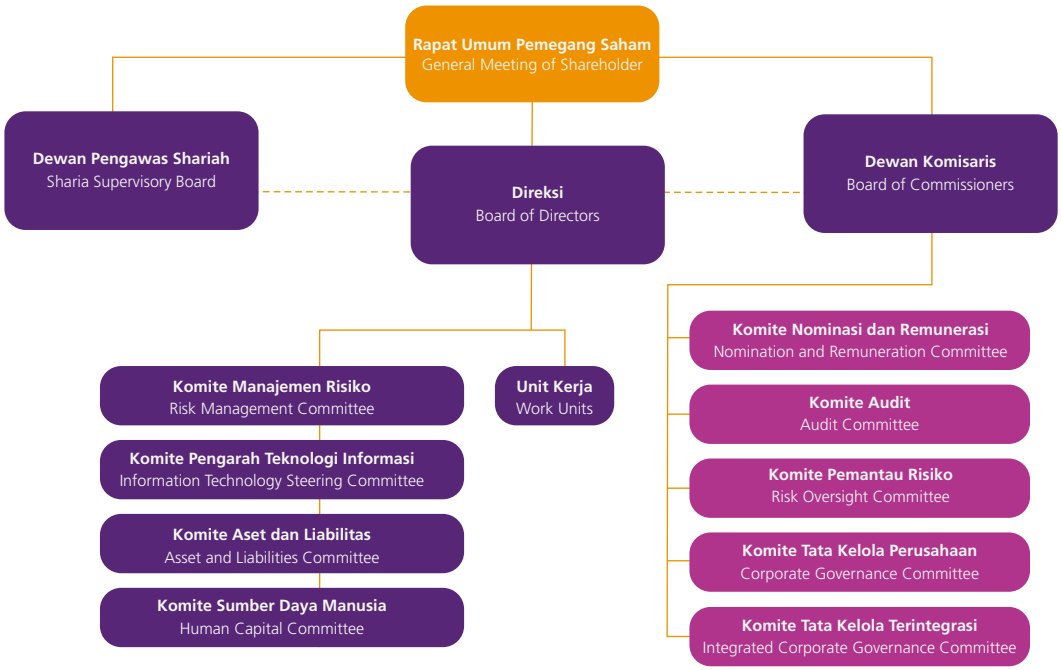
Struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh elemen ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

### *GCG Structure*

*The governance organizational structure of Bank Muamalat Indonesia consists of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors. All of these elements perform their duties and responsibilities in accordance with their respective functions.*

### Struktur Tata Kelola Perusahaan

### *Corporate Governance Structure*




Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, Bank Muamalat Indonesia memiliki infrastuktur berupa Kebijakan/Prosedur sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya antara lain:

*In order to support GCG implementation, Bank Muamalat Indonesia has infrastructure in the form of Policy/Procedure as a guide in carrying out its functions and duties such as:*

1. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia
2. Board Manual Bank Muamalat Indonesia
3. Kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia
4. Prosedur Pelaksanaan rapat Direksi
5. Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
6. Piagam Komite Audit
7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
8. Piagam Komite Pemantau Risiko
9. Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan
10. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
11. Piagam Komite Aset dan Liabilitas
12. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi
13. Piagam Komite Manajemen Risiko
14. Pedoman dan Prosedur Anti *Fraud*
15. Piagam Internal Audit
16. Pedoman dan Prosedur Kepatuhan
17. Kebijakan dan Prosedur penerapan APU-PPT

## Mekanisme GCG

*Governance Mechanism* merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, kebijakan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control* (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Penerapan GCG dilakukan secara berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan usaha di Bank Muamalat Indonesia. Penerapan GCG terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana dalam struktur GCG Bank Muamalat Indonesia, organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur GCG Bank Muamalat Indonesia, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Tata Kelola Perusahaan; dan
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Bank Muamalat Indonesia, dibantu oleh Komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:
1. Komite Aset dan Liabilitas;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi ;
3. Komite Manajemen Risiko; dan
4. Komite Sumber Daya Manusia.

1. *Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia*
2. *Board Manual of Bank Muamalat Indonesia*
3. *GCG Policy of Bank Muamalat Indonesia*
4. *Board of Directors Meeting Procedure*
5. *General Meeting of Shareholders Procedure*
6. *Audit Committee Charter*
7. *Nomination and Remuneration Committee Charter*
8. *Risk Oversight Committee Charter*
9. *Corporate Governance Committee Charter*
10. *Integrated Governance Committee Charter*
11. *Assets and Liabilities Committee Charter*
12. *Information Technology Steering Committee Charter*
13. *Risk Management Committee Charter*
14. *Anti-Fraud Guideline and Procedure*
15. *Internal Audit Charter*
16. *Compliance Guideline and Procedure*
17. *APU-PPT Policy and Procedure*

## *GCG Mechanism*

*Governance Mechanism is a GCG implementation mechanism that is reflected in a strong system. This is important, because GCG implementation is not enough just to rely on the pillars of governance structure, but there is a need for clear rules in the form of mechanism. Governance mechanism can be defined as the rules of the game, policies, procedures and clear relationship between the parties who make decisions with the parties who control (oversee) such decision.*

*GCG implementation is carried out continuously so that the GCG principles become a reference in business activities at Bank Muamalat. GCG implementation is manifested from the interaction of all organs of the Bank, in which within the GCG structure of Bank Muamalat, the main organs consist of General Meeting of Shareholders (GMS) who possess the highest position, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. To maximize the function of main organs in the GCG structure of Bank Muamalat, the implementation will be assisted by supporting organs consisting of Committees at the level of the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Committees at the level of the Board of Directors and Internal Audit.*

*Committees at the level of the Board of Commissioners are established to assist and improve the oversight function undertaken by the Board of Commissioners. Committees at the level of Bank Muamalat's Board of Commissioners are as follows:*
1. *Audit Committee;*
2. *Risk Oversight Committee;*
3. *Nomination and Remuneration Committee;*
4. *Corporate Governance Committee; and*
5. *Integrated Governance Committee.*

*The Board of Directors and management of the Bank are tasked to manage, control and responsible for the implementation of GCG at Bank Muamalat Indonesia, assisted by the Committees at the Board of Directors level consisting of:*
1. *Assets and Liabilities Committee;*
2. *Information Technology Steering Committee;*
3. *Risk Management Committee; and*
4. *Human Resources Committee.*

Hubungan kerja yang baik antar organ perseroan sangat penting agar masing-masing organ dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Masing-masing organ menghormati fungsi dan peranannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

*A good working relationship between the Bank Muamalat Indonesia's organs is very important so that each organ can work effectively and efficiently according to their respective functions and responsibilities. Each organ respects its functions and roles respectively in accordance with the laws and regulations as well as the Articles of company's article of association.*

# Rapat Umum Pemegang Saham

## *General Meeting of Shareholders*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi di Bank Muamalat Indonesia merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut antara lain mencakup meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi terkait dengan pengawasan dan pengurusan Bank Muamalat Indonesia, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

*General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest organ at Bank Muamalat Indonesia is a forum for shareholders in making decisions and has the authority that is not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits specified in the Articles of Association and the applicable laws and regulations. Such authority include requiring accountability to the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and the Board of Directors in relation to the supervision and management of Bank Muamalat Indonesia, amending the Articles of Association, appointing and dismissing members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and the Board of Directors.*

Dalam RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

*In the GMS, Shareholders may exercise their rights to express opinions and obtain information relating to the Bank from the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and/or the Board of Directors as long as in line with the meeting agenda and not against the interests of the Company.*

Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Perseroan.

*In conducting GMS, the Bank refers to following provisions:*

1. *Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies.*
2. *POJK No. 32/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders.*
3. *Company's article of association.*

### Penyelenggaraan RUPS

### *Annual GMS*

#### Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPSLB Tahun 2018

#### *Annual GMS and Extraordinary GMS in 2018*

Selama tahun 2018, Bank Muamalat Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yaitu tanggal 28 Juni 2018 dan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di Jakarta.

*Throughout 2018, Bank Muamalat Indonesia has held its Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 28th, 2018 and Extraordinary GMS on October 11th, 2018 held in Jakarta.*

1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tanggal 28 Juni 2018
   a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan
      i. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu)

1. *Annual GMS on June 28th, 2018*
   a. ***Submission of Annual GMS Plan Announcement***
      i. *Announcement to shareholders regarding the Notice of the Meeting has been conducted by placing an advertisement on 1 (one) Indonesian*

surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "*Investor Daily*" yang terbit pada tanggal 22 Mei 2018. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman website Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 22 Mei 2018.

ii. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "*Investor Daily*" yang terbit pada tanggal 6 Juni 2018. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman website Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 6 Juni 2018.

*daily newspaper, namely "Investor Daily" published on May 22st, 2018. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded the Meeting announcement ads, both in Bahasa Indonesia and in English, through the website of Bank Muamalat Indonesia on May 22st, 2018.*

*ii. Notice to shareholders regarding the holding of the Meeting has been implemented by placing an adverstisement on the same (1) daily newspaper, namely "Investor Daily" published on June 6th, 2018. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded the Notice of the Meeting and explanation of the Meetings explanation both in Bahasa Indonesia or in English through the website of Bank Muamalat Indonesia on June 6th, 2018.*

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Tahunan

Mengacu pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Umum Investor Daily pada tanggal 6 Juni 2018, RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:

***b. Day/Date, Place, Time and the Annual GMS***

*Referring to the Notice of the Annual General Meeting of Shareholders of Bank Muamalat Indonesia which has been published in the Investor Daily newspaper on* June 6th, 2018*, the Annual GMS has been hold on:*

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal<br>*Day/Date* | Kamis, 28 Juni 2018<br>*Thursday, June 28th, 2018* |
| Waktu<br>*Time* | Pukul 10:05 WIB sampai dengan pukul 15:03 WIB<br>*From 10:05 Western Indonesia Time until 15:03 Western Indonesia Time* |
| Tempat<br>*Place* | Hotel JS Luwansa, Jalan Haji Rasuna Said No. Kav. C-22, RT 2/RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia. |

Susunan mata acara rapat adalah sebagai berikut:

i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
ii. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Baku 2017;
iii. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan,
iv. Pergesahan dan persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain;
v. Persetujuan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset Perseroan dalam rangka penguatan modal Perseroan;
vi. Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang penerbitan 80 Miliar lembar saham untuk segera dijual untuk menambah modal dasar menjadi 11 Triliun;
vii. Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016;
viii. Rencana *listing* Saham Perseroan,
ix. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

*Composition of the meeting agenda is as follows:*

*i. Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for 2017 Fiscal Year and the ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2017;*
*ii. Approval of the Company's Net utilization Profit for 2017 Year;*
*iii. Appointment of the Public Accountant Office in order to audit the Company's Financial Statements for 2018 and other audits required by the Company,*
*iv. Dissolution and approval of the guarantee assets of the Company's assets as debt collateral for financing facilities provided by PT Sarana Multigriya Financial and/or other parties,*
*v. Approval of actions to buy, sell, transfer and/or exchange Company assets in order to strengthen the Company's capital;*
*vi. Report on the implementation of the General Meeting of Shareholders on September 20, 2017 concerning the issuance of 80 billion shares to be immediately sold to increase the authorized capital to 11 trillion;*
*vii. Report on the implementation of the General Meeting of Shareholders on September 20, 2017 concerning the payment of dividends for the 2016 financial year;*
*viii. Plan the listing of the Company's Shares,*
*ix. Changes in the composition of the Company's Management.*

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

*c. Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board Present at the Meeting*

| | |
|---|---|
| **Dewan Komisaris**<br>*Board of Commissioners* | |
| Komisaris Independen<br>*Independent Commissione* | Iggi Haruman Achsien |
| Komisaris Independen<br>*Independent Commissione* | Edy Setiadi |
| **Sharia Supervisory Board**<br>*Sharia Supervisory Board* | |
| Ketua<br>*Chairman* | K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin |
| Anggota<br>*Member* | DR. H. Oni Sahroni, MA |
| Anggota<br>*Member* | Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| **Board of Directors**<br>*Board of Directors* | |
| Direktur Utama<br>*President Director* | Achmad Kusna Permana |
| Direktur<br>*Director* | Hery Syafril |
| Direktur Kepatuhan<br>*Director of Compliance* | Andri Donny |
| Direktur<br>*Director* | Indra Yurana Sugiarto |
| Direktur<br>*Director* | Purnomo Budiwibowo Soetadi |
| Direktur<br>*Director* | Awaldi |

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.491.883.255 (Sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau 92,988% (sembilan puluh dua koma sembilan delapan delapan persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.491.893.785 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham atau 92,988% (sembilan puluh dua koma sembilan delapan delapan persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang tendiri dari:

i. saham Seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan

*d. Number of Shares with Voting Rights Present at the Meeting*

*The number of shareholders and/or proxy of the shareholders present at the Meeting amounted to 9,491,883,255 (Nine billion four hundred ninety one million eight hundred eighty three thousand two hundred fifty five) shares or 92.988% (ninety two point nine eight percent) of the total Series A and Series B shares with voting rights that have been issued by the Company. Nevertheless, after the Meeting is opened and up to the voting session for the First Agenda there are still additional holders and/or power of shareholders present at the Meeting to become amounting to 9,491,893,785 (nine billion four hundred ninety-one million eight hundred ninety three thousand seven hundred eighty five) shares or 92.988% (ninety two point nine eight eight percent) of the total Series A and Series B shares with rights votes issued by the Company totaling 10,207,702,335 (ten billion two hundred and seven million) uh hundred two thousand three hundred thirty five) shares which are from:*

*i. The amount of Series A shares is 826,649,175 (eight hundred twenty six million six hundred forty nine thousand one hundred seventy five) shares; and*

ii. saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham:

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1, Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK 32/2014") Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat
Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat
   i. Sebanyak 4 (empat) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Pertama;
   ii. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Kedua;
   iii. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Ketiga;
   iv. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Keempat;
   v. Sebanyak 3 (tiga) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan lisan pada Mata Acara Kelima;
   vi. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Keenam;
   vii. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan lisan pada Mata Acara Ketujuh; dan
   viii. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Kesembilan.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

*ii. The amount of Series B shares totaling 9,381,053,160 (nine billion three hundred eighty one million fifty three thousand one hundred sixty) shares:*

*by observing the Register of Shareholders of the Company as of June 5, 2018 up to 16.00 West Indonesia Time, therefore the quorum required in Article 11 paragraph 1, Article 11 paragraph 2 and Article 13 paragraph 4 of the Company's Article of Association juncts Article 26, Article 27 and Article 28 of the Regulation Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014 ("POJK 32/2014") concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company as amended by the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017 has been fulfilled and the Meeting is legitimate and has the right to make legal and binding decisions regarding matters discussed in accordance with the agenda of the Meeting.*

*e. Opportunity to Submit Questions and/or Opinions at the Meeting*
*In the Meeting agenda, the shareholders and/or power of shareholders have been given the opportunity to raise questions and express opinions.*

*f. Number of Shareholders and/or Proxy of Shareholders Submitting Questions and/or Opinions at the Meeting*

*i. A total of 4 (four) shareholders submit questions written at the First Agenda;*

*ii. As many as 1 (one) shareholder submits a written question at the Second Agenda;*
*iii. A total of 1 (one) shareholder submits a written response to the Third Agenda;*
*iv. A total of 1 (one) shareholder submits a written question and 1 (one) shareholder submits a written response to the Fourth Agenda;*

*v. A total of 3 (three) shareholders submit written questions and 1 (one) shareholder submits an oral response to the Fifth Agenda;*

*vi. A total of 1 (one) shareholder submits a written question and 1 (one) shareholder submits a written response to the Sixth Agenda;*

*vii. A total of 1 (one) shareholder submits a written question, 1 (one) shareholder submits a written response and 1 (one) shareholder submits an oral response to the Seventh Agenda; and*

*viii. As many as 1 (one) shareholder submits a written question and 1 (one) shareholder submits a written response to the Ninth Agenda.*

*g. Decision Making Mechanism*
*The decision making mechanism in the meeting is conducted by deliberation to reach consensus. However, if the consensus meeting is not reached, then the decision making will be carried out by means of open voting. Unless voting on the person is carried out by a closed letter that is not signed, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any*

ditandatangani, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

h. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)
Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat termasuk Mata Acara Rapat Kesembilan, kecuali untuk Mata Acara Pertama dari Rapat yang juga diputuskan dengan suara bulat namun tanpa mufakat.

i. Keputusan Rapat
Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama Rapat:**
Rapat dengan suara bulat namun tanpa mufakat memutuskan:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, termasuk mereka yang berakhir masa jabatannya di Tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 setelah Pajak sebesar Rp26,115,563,000,- (dua puluh enam miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.

**Mata Acara Ketiga Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada

*objection from 1 (one) or more shareholders present at the Meeting.*

*h. Decision Making Results at Meetings Conducted by Voting*
*Decision making for the Meeting agenda is unanimously decided by a forum to reach consensus including the Agenda of the Ninth Meeting, except for the First Agenda of the Meeting which is also decided unanimously but without consensus.*

*i. Meeting Decision*
*In the meeting the following decisions were taken:*

*First Agenda of the Meeting:*
*The meeting was unanimous but without consensus decided:*
*Approve the Company's Annual Report for 2017 including the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board Supervisory Task Report 2017 and ratify the Company's Financial Report for Fiscal Year 2017. Furthermore with the approval of the Company's Annual Report 2017 including the Board of Commissioners and Supervisory Supervisory Task Report Sharia for the Fiscal Year 2017 and the ratification of the Company's Financial Report for Fiscal Year 2017, it means that the Meeting has provided full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for management and supervision The Company has been running during the 2017 Financial Year, including those who end their term of office in 2017, this action is reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the Fiscal Year of 2017 and not a criminal act or violation of the applicable legislation.*

*Second Agenda of the Meeting:*
*A unanimous meeting on the basis of forum for consensus decided:*
*Has approved the Company's net profit for the 2017 Financial Year after the Tax of Rp26,115,563,000, - (twenty six billion one hundred fifteen million five hundred sixty three thousand rupiah), all of which are used for the Company's reserves, so that dividends are not paid for the Company's net profit for the Book Year 2017.*

*Third Agenda of the Meeting*
*A unanimous on the basis of deliberation decided:*

*Agreed to grant authority to the Board of Commissioners to appoint, terminate and/or replace public accounting firm included a rating of 10 (ten) are great to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018 and/or other audit needs of the Company as well as determine the honorarium and conditions of appointment more reasonable for the public accounting firm. Granting authority to the Board of Commissioners is proposed for the effectiveness*

Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai D e w a n Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.

*of the appointment process termination and/or replacement of public accounting firm in accordance with the condition of the Company to be carried out with the criteria/restrictions as deemed appropriate BOC with the condition of the Company.*

**Mata Acara Keempat Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan dan/ atau aset Perseroan lainnya yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada Tahun 2018 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 yang akan datang baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).

*Fourth Agenda of the Meeting:*
*A unanimous meeting on the basis of forum for consensus decided:*
*Has approved Company Assets to be Guaranteed. The Company's Assets To Be Guaranteed are the Company's financing bills and/or other Company assets that the Company will pledge to PT Sarana Multigriya Financial (Persero) and/or other parties in 2018 until the 2019 Annual General Meeting of Shareholders will arrive in one or more guarantee transactions, the maximum amount of which is Rp3,000,000,000,000 (three trillion rupiahs).*

**Mata Acara Kelima Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan:

i. Transaksi penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset lainnya senilai Rp6.000.000.000.000, (enam triliun rupiah) kepada Tameer Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan;
ii. Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk *Trust Certificate* senilai Dolar Amerika Serikat setara dengan Rp8.000.000.000.000; (delapan triliun rupiah) oleh Perseroan dari Najah Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan dimana Sukuk *Trust Certificate* antara lain memiliki karakteristik ber-*underlying* Sukuk/ Obligasi pemerintah Republik Indonesia dan tidak berbagi hasil);
iii. Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah oleh Perseroan kepada Mawthuq SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan senilai Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah) yang akan diterbitkan melalui penawaran terbatas (*private placement*) dan bersifat bilateral; dan
iv. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan transaksi dimaksud.

*Fifth Agenda of the Meeting:*
*A unanimous meeting on the basis of forum for consensus decided:*
*Approve the Company's plan to implement:*

*i. The sale of the Company's assets in the form of financing receivables, foreclosed assets and other assets valued at Rp6,000,000,000,000 (six trillion rupiahs) to SPC Limited's Tameer Sukuk or other financial investors approved by the Company;*

*ii. Securities purchase transactions in the form of Sukuk Trust Certificates worth US Dollars are equivalent to Rp8,000,000,000,000; (eight trillion rupiah) by the Company from Najah Sukuk SPC Limited or other financial investors approved by the Company where the Sukuk Trust Certificate includes, among others, the underlying characteristics of the Government of the Republic of Indonesia Sukuk/Bonds and does not share results);*
*iii. The Mudharabah Subordinated Sukuk issuance transaction by the Company to Mawthuq SPC Limited or other financial investors approved by the Company worth Rp1,600,000,000,000 (one trillion six hundred billion rupiahs) will be issued through a private placement and is bilateral ; and*

*iv. Giving authority to the Board of Directors of the Company to carry out the transaction and all actions deemed necessary in carrying out the transaction.*

Mata Acara Keenam Rapat:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

i. Menyelujui Penurunan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp4.400.000.000.000,- (empat triliun empat ratus miliar Rupiah), sehingga Modal Dasar serta Modal ditempatkan dan Disetor Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT; dan

*Sixth Agenda of the Meeting:*
*A unanimous meeting on the basis of forum for consensus decided:*

*i. Approve the Decrease of the Company's authorized capital as muc as Rp4,400,000,000,000 (four trillion four hundred billion Rupiah), so that the Company's authorized capital and issued and paid-up capital are in compliance with the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company Law; and*

ii. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penurunan Modal Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*ii. Giving authority to the Board of Directors of the Company to carry out all and every action required in connection with the reduction in the Company's authorized capital, including but not limited to declaring/deciding the decrees made before the Notary, to amend and/rearrange the provisions Article 4 The Company's Articles of Association as a whole are in accordance with the decree (including affirming the composition of the shareholders in the deed when needed), as required by and in accordance with applicable laws and regulations, making or ordering the making and signing of deeds and letters and the required documents are present before the competent authorities/parties including the notary, and subsequently to obtain approval and/or deliver notification of the Meeting's decision and/or amendments to the Company's Articles of Association in the Meeting's decision, and do all and every action taken not, in accordance with applicable laws and regulations.*

Mata Acara Ketujuh Rapat:
Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu mengenai Laporan Pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen Tahun Buku 2016.

*The Seventh Meeting Agenda:*
*No decision was made because of its nature as a report. It is a meeting about the Implementation of the General Meeting of Shareholders report on September 20, 2017 concerning the payment of dividends for the Fiscal Year 2016.*

Mata Acara Kedelapan Rapat:
Tidak diambil keputusan karena sifatnya penyampaian, yaitu mengenai rencana *listing* Perseroan pada Bursa Efek Indonesia.

*Eighth Agenda of the Meeting:*
*No decision was made because of the nature of the submission. It is a meeting about the plan of the Company's listing on the Indonesia Stock Exchange.*

Mata Acara Kesembilan Rapat:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

i. Mengesahkan pengunduran diri Masa Paskalis Lingga disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan;
ii. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Prof. DR. Anwar Nasution selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Prof. DR. Anwar Nasution untuk segenap tindakan pengawasan Perseroan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Tahun 2019;
iii. Menyetujui pengangkatan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Ilham Akbar Habibie memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan

*Ninth Agenda of the Meeting:*
*A unanimous meeting on the basis of forum for consensus decided:*

*i. Validating the resignation of the Paspalal Lingga Period accompanied by gratitude for his services so far for the progress of the Company;*

*ii. Approve a respectful dismissal of Prof. DR. Anwar Nasution as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company. Repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to Prof. DR. Anwar Nasution for all of the Company's supervisory actions from 1 January 2018 until the closing of the Meeting, will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2019;*
*iii. Approved the appointment of Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the remaining term of office of members of the Board of Commissioners, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2019. The appointment provisions will be effective after Ilham Akbar Habibie obtained a determination to pass the Capability and Compliance Assessment*

Kepatutan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dari OJK;

iv. Penetapan Iggi Haruman Achsien sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Komisaris Utama Perseroan terhitung sajak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya jabatan Komisaris Utama Perseroan yang baru.

Maka susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

*as the President Commissioner and Independent Commissioner of the OJK;*

*iv. Determination of Iggi Haruman Achsien as task executor of The President Commissioner of the Company since the Meeting closed until the effective position of the new President Commissioner of the Company.*

*Then the complete composition of the members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Company's Directors are as follows:*

| Dewan Komisaris<br>*Board of Commissioner* | |
|---|---|
| Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen<br>*President Commissioner & Independent Commissioner* | Ilham Akbar Habibie* |
| Komisaris Independen sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Komisaris Utama | Iggi Haruman Achsien |
| Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | Edy Setiadi |
| Komisaris<br>*Commissioner* | Mohamed Hedi Mejai* |
| Komisaris<br>*Commissioner* | Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh* |
| **Dewan Pengawas Syariah**<br>*Sharia Supervisory Board* | |
| Ketua<br>*Chairman* | Prof. DR. (HC) KH Ma'ruf Amin |
| Anggota<br>*Member* | DR. H. Oni Sahroni, MA |
| Anggota<br>*Member* | Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| **Direksi**<br>*Directors* | |
| Direktur Utama<br>*President Director* | Achmad Kusna Permana |
| Direktur<br>*Director* | Hery Syafril |
| Direktur Kepatuhan<br>*Director of Compliance* | Andri Donny |
| Direktur<br>*Director* | Indra Yurana Sugiarto |
| Direktur<br>*Director* | Purnomo Budiwibowo Soetadi |
| Direktur<br>*Director* | Awaldi |

*Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
*Effective after passing the Fit and Proper Test of the Financial Services Authority (FSA)*

Menyetujui pernberian kuasa kepada Direksi Perseroan guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian dengan Ilham Akbar Habibie sehubungan dengan pengangkatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan.

*Approved the authority power to the Board of Directors of the Company to represent the Company signing an agreement with Ilham Akbar Habibie regarding his appointment as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company.*

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

*Approved the authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to restate the decision regarding changes in the composition of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of the Company to the Notary deed and notify the relevant authorities and to do everything necessary in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.*

**2. Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tanggal 28 Juni 2018**

*2. Follow-Up to the Annual GMS Results June 28, 2018*

| RUPS Tahunan Tanggal 28 Juni 2018<br>*GMS dated June 28, 2018* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Resolutions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Has (v)/Has Not Been Implemented (x)* | Tindak Lanjut<br>*Follow-up* |
| Agenda 1<br>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.<br>*Agenda 1*<br>*Approve the Company's Annual Report for the Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year 2017 and ratify the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2017.* | V | Laporan Tahunan Perseroan telah disampaikan kepada OJK tanggal tanggal 26 April 2018<br>*The Annual Report of the Company has been submitted to OJK on April 26, 2018* |
| Agenda 2<br>Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 setelah Pajak sebesar Rp26,115,563,000,- (dua puluh enam miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.<br>*Agenda 2*<br>*Approved the Company's net profit for the 2017 Financial Year after the Tax of Rp26,115,563,000, - (twenty six billion one hundred fifteen million five hundred sixty three thousand rupiah), all of which are used for the Company's reserves, so that dividends are not paid for the Company's net profit for the Book Year 2017.* | V | Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tidak dibagikan dan masuk sebagai komponen modal.<br>*The Company's net profit for the 2017 Financial Year was not shared and entered as a component of capital.* |
| Agenda 3<br>Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.<br>*Agenda 3*<br>*Gave authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint, terminate and/or replace the Public Accountant Office which includes the top 10 (ten) to audit the Company's Financial Statements for 2018 Book Year and/or other audits required by the Company and determine the honorarium and decided other reasonable requirements for the Public Accountant Office.* | V | Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan berdasarkan surat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK tanggal 18 Desember 2018.<br>*The Board of Commissioners has appointed a Public Accountant Office which is included in the top 10 (ten) to audit the Company's Financial Statements for 2018 based on recommendations from the Audit Committee. The appointment was based on a letter of the Board of Commissioners dated December 10, 2018 and has been reported to OJK on December 18, 2018.* |
| Agenda 4<br>Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan dan/atau aset Perseroan lainnya yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada Tahun 2018 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 yang akan datang baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).<br>*Agenda 4*<br>*Agreed upon Company Assets to be Guaranteed. The Company's Assets To Be Guaranteed are the Company's financing bills and/or other Company assets that the Company will pledge to PT Sarana Multigriya Financial (Persero) and/or other parties in 2018 until the next Annual General Meeting of Shareholdersnext year or more guarantee transactions, the maximum amount of which is Rp3,000,000,000,000 (three trillion rupiahs).* | V | Telah dicatat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 28 Juni 2018.<br>*It has been noted in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 dated 28 June 2018.* |

| RUPS Tahunan Tanggal 28 Juni 2018<br>*GMS dated June 28, 2018* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Resolutions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Has (v)/Has Not Been Implemented (x)* | Tindak Lanjut<br>*Follow-up* |
| Agenda 5<br>• Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan:<br>• Transaksi penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset lainnya senilai Rp6.000.000.000.000, (enam triliun rupiah) kepada Tameer Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan;<br>• Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk *Trust Certificate* senilai Dolar Amerika Serikat setara dengan Rp8.000.000.000.000; (delapan triliun rupiah) oleh Perseroan dari Najah Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan dimana Sukuk *Trust Certificate* antara lain memiliki karakteristik ber-*underlying* Sukuk/ Obligasi pemerintah Republik Indonesia dan tidak berbagi hasil);<br>• Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah oleh Perseroan kepada Mawthuq SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan senilai Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah) yang akan diterbitkan melalui penawaran terbatas (*private placement*) dan bersifat bilateral; dan<br>• Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan transaksi dimaksud.<br>*Agenda 5*<br>• *Agreed to the Company's plan to implement:*<br>• *Sold the Company assests in the form of financing credits, foreclosed assets and other assets worth Rp6,000,000,000,000 (six trillion rupiahs) to SPC Limited's Tameer Sukuk or other financial investors approved by the Company;*<br>• *Securities purchase transactions in the form of Sukuk Trust Certificates worth US Dollars are equivalent to Rp8,000,000,000,000; (eight trillion rupiah) by the Company from Najah Sukuk SPC Limited or other financial investors approved by the Company where the Sukuk Trust Certificate has the underlying characteristics of the Government of the Republic of Indonesia Sukuk/Bonds and does not share results);*<br>• *The Mudharabah Subordinate Sukuk issuance transaction by the Company to Mawthuq SPC Limited or other financial investors approved by the Company worth Rp1,600,000,000,000 (one trillion six hundred billion rupiahs) will be issued through a private placement and is bilateral ; and*<br>• *Giving authority to the Board of Directors of the Company to carry out the transaction and any actions necessary in order to carry out the transaction.* | V | 1. Transaksi penjualan aset Perseroan berupan piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset tetap lainnya telah direalisasikan.<br>2. Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk *Trust Certificate* senilai Rp8 T telah direalisasikan.<br>3. Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah senilai Rp1,6T diterbitkan melalui penawaran terbatas (*private placement*) dan bersifat bilateral.<br>4. Direksi Perseroan telah mengupayakan direalisasikannya transaksi sebagaimana angka 1 sampai dengan 3 di atas.<br>*1. The sale of the assets of the Company has financing receivables, assets taken over and other fixed assets have been realized.*<br>*2. Securities purchase transactions in the form of Trust Certificate Sukuk worth Rp8 T has been realized.*<br>*3. Subordinated Sukuk Mudharabah issuance of Rp1,6T issued through limited offering (private placement) and are bilateral.*<br>*4. The Board of Directors of the Company has attempted to realize the transaction as numbered 1 to 3 above.* |
| Agenda 6<br>1. Menyelujui Penurunan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp4.400.000.000.000,- (empat triliun empat ratus miliar Rupiah), sehingga Modal Dasar serta Modal ditempatkan dan Disetor Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT; dan<br>2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penurunan Modal Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan).<br>*Agenda 6*<br>*1. Approved the Decrease of the Company's authorized capital to become Rp4,400,000,000,000 (four trillion four hundred billion Rupiah), so that the Company's authorized capital and issued and paid-up capital are in accordance with the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company Law; and*<br>*2. Gave authority to the Board of Directors of the Company to carry out all and every action related to the reduction of the Company's authorized capital, such as to declare/decide the decrees made before the Notary, to amend and/rearrange the provisions Article 4 The Company's Articles of Association as a whole are in accordance with the decision (including confirming the composition of the shareholders in the deed when needed).* | V | 1. Penurunan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp4,4T telah dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan pemberitahuannya telah diterima Kemenkumham tanggal 1 September 2018.<br>2. Direksi telah menyatakan/ menuangkan keputusan penurunan Modal Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan menyusun kembali ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan RUPS.<br>*1. Decreased in the Company's authorized capital to Rp4.4T has been stated in the deed made before a Notary and the notification has been received by the Kemenkumham on September 1, 2018.*<br>*2. The Board of Directors has stated/issued a decision to reduce the Company's Authorized Capital in the deed made before the Notary and rearranges the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association in accordance with the resolution of the GMS.* |

| RUPS Tahunan Tanggal 28 Juni 2018<br>*GMS dated June 28, 2018* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Resolutions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Has (v)/Has Not Been Implemented (x)* | Tindak Lanjut<br>*Follow-up* |
| Agenda 9<br>1. Mengesahkan pengunduran diri Masa Paskalis Lingga disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan;<br>2. Menyelujui pemberhentian dengan hormat Prof. DR. Anwar Nasution selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Prof. DR. Anwar Nasution untuk segenap tindakan pengawasan Perseroan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Tahun 2019;<br>3. Menyetujui pengangkatan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Ilham Akbar Habibie memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dari OJK;<br>4. Penetapan Iggi Haruman Achsien sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Komisaris Utama Perseroan terhitung sajak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya jabatan Komisaris Utama Perseroan yang baru.<br>5. Menyetujui pernberian kuasa kepada Direksi Perseroan guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian dengan Ilham Akbar Habibie sehubungan dengan pengangkatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan.<br>6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku<br>*Agenda 9*<br>*1. Validated the resignation of the Paspalal Lingga accompanied by gratitude for his services so far for the progress of the Company;*<br>*2. Approved respectful dismissal of Prof. DR. Anwar Nasution as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company. Repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to Prof. DR. Anwar Nasution for all of the Company's supervisory actions from 1 January 2018 until the closing of the Meeting, will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2019;*<br>*3. Approved the appointment of Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the remaining term of office of members of the Board of Commissioners, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2019, with the provisions of the appointment effective after Ilham Akbar Habibie obtained a determination to pass the Capability and Compliance Assessment as the President Commissioner and Independent Commissioner of the OJK;*<br>*4. Appointed Hargi Achsien Iggi as a tasks executor ofThe President Commissioner of the Company as of the closing of the meeting until the position of the new President Commissioner of the Company was effective.*<br>*5. Approved the authorization to the Board of Directors of the Company to represent the Company to sign an agreement with Ilham Akbar Habibie in connection with his appointment as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company.*<br>*6. Approved the authorization to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to restate the decision regarding changes in the composition of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of the Company to the Notary deed and notify the relevant authorities and to do everything necessary in accordance with the provisions of applicable laws and regulations* | V | Perubahan pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 28 Juni 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK.<br>*Management changes have been recorded in the Deed of Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 dated June 28, 2018 and has been reported to OJK.* |

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana
*v = have been done | x = have not been done*

**3. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Oktober 2018**

a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa

i. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Suara Pembaruan" yang terbit pada tanggal 4 September 2018. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 4 September 2018.

ii. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian "Suara Pembaruan" yang terbit pada tanggal 19 September 2018. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 19 September 2018.

*3. Organized an Extraordinary RUPS on October 11, 2018*

*a. Submission of Notification of Extraordinary RUPS Plan*

*i. Has announced shareholders regarding the Meeting has been conducted by placing advertisements on 1 (one) Indonesian language daily newspaper, namely "Suara Pembaruan" which was published on September 4, 2018. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded advertisement for the Meeting announcement, both in Indonesian and in English, through the Bank Muamalat Indonesia website on September 4, 2018.*

*ii. Called shareholders regarding the Meeting has been conducted by placing advertisements on 1 (one) "Suara Pembaruan" daily newspaper which was published on September 19, 2018. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded advertisements for summoned meetings as well as explanations of the agenda items, both in Indonesian and in English, through the Bank Muamalat Indonesia website on September 19, 2018.*

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mengacu pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Umum Suara Pembaruan pada tanggal 19 September 2018, RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

*b. Day/Date, Place, Time and Program Agenda of the Extraordinary RUPS*

*Referred to the announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, which was published on Harian Suara Pembaharuan on September 19, 2018. The Extraordinary RUPS was held on:*

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal<br>*Day/Date* | Kamis, 11 Oktober 2018<br>*Thursday, October 11th, 2018* |
| Waktu<br>*Time* | Pukul 10:10 WIB sampai dengan pukul 11:51 WIB<br>*From 10:10 Western Indonesia Time until 11:51 Western Indonesia Time* |
| Tempat<br>*Place* | Muamalat Tower Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18 Jakarta 12940, Indonesia |

Susunan mata acara rapat adalah sebagai berikut:

i. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);

ii. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan

iii. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

*The composition of the meeting agenda was as follows:*

*i. Approval of the VI Limited Public Offering Plan by provided Pre-emptive Right (HMETD);*

*ii. Approval of changes to the Company's Articles of Association; and*

*iii. Changes in the Management Structure of the Company.*

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

*c. Board of Directors, Board of Commisioners, and Sharia Supervisory Board who Attended the Meeting*

| Dewan Komisaris<br>*Board of Directors* | |
|---|---|
| Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen<br>*President Commissioner & Independent Commissioner* | Ilham Akbar Habibie* |
| Komisaris Independen sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Komisaris Utama<br>*Independent Commisioner as well as tasks executor of President Commisioner* | Iggi Haruman Achsien |
| Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | Edy Setiadi |
| **Dewan Pengawas Syariah**<br>*Sharia Supervisory Board* | |
| Anggota<br>*Member* | DR. H. Oni Sahroni, MA |
| Anggota<br>*Member* | Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |

| Direksi<br>*Directors* | |
|---|---|
| Direktur Utama<br>*President Director* | Achmad Kusna Permana |
| Direktur<br>*Director* | Hery Syafril |
| Direktur Kepatuhan<br>*Director of Compliance* | Andri Donny |
| Direktur<br>*Director* | Purnomo Budiwibowo Soetadi |
| Direktur<br>*Director* | Awaldi |

*Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
*Effective after passing the Fit and Proper Test of the Financial Services Authority (FSA)*

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

i. Pemegang saham dan/atau kuasa dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili sejumlah 9.486.106.410 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus sepuluh) saham atau 92,931% (sembilan puluh dua koma sembilan tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan saham Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga seluruh saham yang terwakili dalam Rapat menjadi berjumlah 9.591.848.545 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima) saham atau 93,966% (sembilan puluh tiga koma sembilan enam enam persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham Seri A ; dan
- 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham Seri B ;
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32") telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

*d. Number of Shares with Voting Rights Present at the Meeting*

*i. The shareholders and/or power of attorney of the shareholders present at the Meeting represented a total of 9,486,106,410 (nine billion four hundred eighty six million one hundred six thousand four hundred ten) shares or 92.931% (ninety two point nine three one percent) from the total number of Series A shares and Series B shares with voting rights that have been issued by the Company, but after the Meeting was opened up to the first voting agenda, there were still additional shareholders and/or power of shareholders present at the Meeting so that all shares represented in the Meeting amounting to 9,591,848,545 (nine billion five hundred ninety one million eight hundred forty eight thousand five hundred and forty five) shares or 93.966% (ninety three point nine six six percent) of the total Series A shares and Series B with voting rights issued by the Company, totaling 10,207,702,335 (ten billion) two hundred seven million seven hundred two thousand three hundred thirty five shares consisting of:*

- *826,649,175 (eight hundred twenty six million six hundred forty nine thousand one hundred seventy five) Series A shares; and*
- *9,381,053,160 (nine billion three hundred eighty one million fifty three thousand one hundred sixty) Series B shares;*
- *by observing the Register of Shareholders of the Company as of September 18, 2018 until 16.00 WIB, as required in Article 11 paragraph 1 and Article 11 paragraph 2 of the Company's Articles of Association junctions Article 26 and Article 27 of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company as amended by the Financial Services Authority Regulation Number: 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32") which has been fulfilled and the Meeting is legal and entitled to take valid and binding decisions concerning matters discussed in accordance with the agenda of the Meeting.*

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat
Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

*e. Opportunity to Submit Questions and/or Opinions at the Meeting*
*In the agenda of the Meeting, the shareholders and/or power of shareholders have been given the opportunity to raise questions and express opinions.*

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada:
i. Sebanyak 7 (tujuh) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara pertama;
ii. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara kedua; dan
iii. Sebanyak 2 (dua) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara ketiga.

*f. Number of Shareholders and/or Proxy of Shareholders Submitting Questions and/or Opinions at the Meeting*

*The number of shareholders and/or power of shareholders who raise questions and/or opinions on:*

*i. A total of 7 (seven) shareholders submit questions in writing to the first agenda item;*

*ii. A total of 1 (one) shareholder submits a question in writing to the second agenda item; and*

*iii. A total of 2 (two) shareholders submit questions in writing to the third agenda item.*

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertulis dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan ketentuan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

*g. Meeting Decision Making Mechanism*
*The decision making mechanism in the meeting is conducted by forum to reach consensus. However, if the consensus was not reached, then the decision making in the Meeting is carried out by means of open voting. Unless voting on the person is carried out in writing with a closed letter that is not signed, with provisions except if the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders present at the Meeting.*

h. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (Voting)
i. Untuk mata acara pertama Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka, dengan hasil sebagai berikut:

*h. Decision Making Results at Meetings Conducted by Voting*
*i. For the first agenda of the Meeting, decision-making was carried out by open voting, with the following results:*

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah saham yang setuju<br>*Number of shares that agree* | : | 9.591.765.255 saham atau 99,9% dari jumlah saham yang hadir<br>*9,591,765,255 shares or 99.9% of the number of shares present* |
| Jumlah saham yang tidak setuju<br>*Number of shares that do not agree* | : | 83.290 saham atau 0,0008% dari jumlah saham yang hadir.<br>*83,290 shares or 0,0008% of the total shares present.* |
| Jumlah saham yang *abstain*<br>*Number of shares that abstained* | : | 0 saham 0% dari jumlah saham yang hadir.<br>*0 shares 0% of the total shares present.* |

ii. Untuk mata acara kedua Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

*ii. For the second agenda of the Meeting, decision-making was carried out unanimously by forum to reach consensus.*

iii. Untuk mata acara ketiga Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara tertulis dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan hasil sebagai berikut:

*iii. For the third agenda of the Meeting, decision making was carried out by means of voting in writing with a closed letter that is not signed, with the following results:*

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah saham yang setuju<br>*Number of shares that agree* | : | 9.591.765.255 saham atau 99,9% dari jumlah saham yang hadir<br>*9,591,765,255 shares or 99.9% of the number of shares present* |
| Jumlah saham yang tidak setuju<br>*Number of shares that do not agree* | : | 83.290 saham atau 0,0008% dari jumlah saham yang hadir.<br>*83,290 shares or 0,0008% of the total shares present.* |
| Jumlah saham yang *abstain*<br>*Number of shares that abstained* | : | 0 saham 0% dari jumlah saham yang hadir.<br>*0 shares 0% of the total shares present.* |

i. Keputusan Rapat
Dalam Rapat tersebut telah di ambil keputusan sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama Rapat**
"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.591.765.255 saham atau 99,9% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

i. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
   - Penerbitan Saham baru Perseroan sampai dengan jumlah paling banyak 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang dan jumlah keseluruhan harga pelaksanaan diatas nilai nominal saham akan dibukukan sebagai agio saham.
   - Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Rasio jumlah HMETD dengan jumlah saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang.
   - Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen.
   - Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*).
   - Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, maka terhadap seluruh saham yang tersisa tersebut dapat diambil seluruhnya atau sebagian oleh Pembeli Siaga. Jika seluruh saham yang tersisa hanya diambil sebagian oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan/atau Pembeli Siaga, tidak jadi dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan belum akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini di Bursa Efek Indonesia.
   - Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD¬nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau terdilusi.

*i. Meeting Decision*
*The decision was taken in the Meeting as follows:*

*First Agenda of the Meeting*
*"The meeting with the most votes, namely 9,591,765,255 shares or 99.9% of the total votes issued at the Meeting decided:*

*i. Aproved the implementation of the Limited Public Offering (VI) by providing Preemptive Rights (HMETD), with the following terms and conditions:*
   - *Issuance of the Company's new Shares up to a maximum of 20,000,000,000 (twenty billion) Series B Shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share, with an implementation price that will be informed in the upcoming PUT VI prospectus and the total price the implementation above the nominal value of the shares will be recorded as premium stock.*
   - *Issuance of new shares will be carried out by issuing HMETD to the Company's Shareholders. The ratio of the number of Rights with the number of shares to be issued will be informed in the upcoming PUT VI prospectus.*
   - *The number of shares offered in PUT VI by issuance of HMETD was the maximum number of new shares to be issued by the Company from the portfolio with due observance of the applicable laws and regulations. The shares resulting from the implementation of this LPO VI have equal and equal rights in all matters with shares that have been fully paid in other, including the right to obtain dividends.*
   - *Each HMETD in the form of a fraction will be rounded down.*
   - *If all shares offered in PUT VI are not taken by HMETD holders, then the remaining shares will be allocated to other shareholders who make orders greater than their rights proportionally, based on the amount of HMETD exercised by each shareholder requesting additional shares based on order prices. If after the allocation there were still remaining shares that have not been taken, then all the remaining shares can be taken in whole or in part by the Standby Buyer. If all remaining shares were partially taken by the Standby Buyer, then the remaining shares not taken part by the HMETD holder and/or the Standby Buyer will not be issued from the port. As additional information, the Company will not yet register the shares offered in this VI PUT on the Indonesia Stock Exchange.*
   - *Old shareholders who did not exercise their rights to purchase new shares offered in this VI PUT in accordance with their HMETD will experience a decrease in the percentage of share ownership or diluted.*

- Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta bagi peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

ii. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:
- Bp. IGGI HARUMAN ACHSIEN;
- Bp. EDY SETIADI;

untuk bersama-sama dengan:
- Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE;
- Bp. MOHAMED HEDI MEJAI;
- Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH.

untuk menyetujui secara bulat penetapan harga pelaksanaan HMETD atas saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT VI Perseroan, sebagaimana yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.

iii. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT VI;
- melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal; dan
- menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- *Funds obtained from the results of PUT VI after deducting emissions costs, will be used to strengthen the Company's capital structure, in order to develop Islamic financing activities that were part of the Company's main business activities and for other purposes that can support the Company's business growth.*

*ii. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners whose current effective members consist of:*
- *Mr. IGGI HARUMAN ACHSIEN;*
- *Mr. EDY SETIADI;*

*Together with:*
- *Mr. ILHAM AKBAR HABIBIE;*
- *Mr. MOHAMED HEDI MEJAI;*
- *Mr. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH.*

*Uunanimously approved the price of HMETD of the Company's new shares which will be issued in the framework of the Company's LPO VI, as will be included in the PUT VI Prospectus.*

*iii. Aproved the authorization to the Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out every action required in connection with the LPO VI, including but not limited to:*

- *did every action needed in connection with the issuance of new shares in the framework of PUT VI;*
- *did every action needed in connection with PUT VI, without any action being excluded, all by taking into account the provisions of applicable legislation, including regulations in the Capital Market sector; and*
- *declare/put forth the decision in the deed made before the Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole according to the decision (including affirming the composition of shareholders in the deed when needed), as required in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, make or order to make and sign deeds and letters or required documents, present before the competent authorities/parties including the notary, and subsequently to submit an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Articles of Association of the Company in this Meeting's decision, and carry out all and every action required, in accordance with the applicable laws and regulations.*

Dengan ketentuan bahwa khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

iv. a. menyetujui penambahan dan/atau penguatan modal lainnya pada Perseroan selain PUT VI dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) melalui penempatan dana setoran modal, penerbitan surat berharga subordinasi dan/atau transaksi lainnya di luar mekanisme Penawaran Umum Terbatas, di Tahun 2018 maupun yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
b. memberikan mandat kepada mereka yang disebut dalam keputusan butir 2 dari mata acara pertama Rapat ini untuk memberikan persetujuan pada bentuk pelaksanaan penambahan dan/atau penguatan modal lainnya tersebut.

v. Dengan memperhatikan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan yang telah diputuskan pada mata acara kelima dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2018, Rapat menyetujui dan menerima penjelasan serta menyetujui langkah yang diperlukan manajemen untuk melakukan perbaikan serta mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan transaksi (termasuk transaksi *asset swap*) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemegang saham pada mata acara kelima pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Juni 2018."

**Mata Acara Kedua Rapat:**
"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

i. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha (Perseroan).
ii. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."

**Mata Acara Ketiga Rapat:**
"Rapat dengan suara terbanyak 9.591.765.255 saham atau merupakan 99,9% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan, menyetujui:

i. Menerima pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO, selaku anggota Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 9 Oktober 2018.
ii. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut untuk segenap tindakan pengurusan Perseroan

*With the provision that specifically for the determination of the amount of issued and paid-up capital and changes in authorized capital (if needed) was carried out by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.*

*iv. a. approve the addition and/or strengthening of other capital to the Company other than PUT VI with a value of up to IDR 2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah) through placement of capital deposit funds, issuance of subordinated securities and/or other transactions outside the mechanism of the Limited Public Offering, in Year 2018 or which will be implemented in the future in accordance with applicable laws and regulations; and*

*b. gave mandate to those referred to in decision item 2 of the first agenda of this Meeting to give approval on the form of the implementation of the addition and/or strengthening of other capital.*

*v. Took into account the authorization of the Board of Directors of the Company which was decided in the fifth agenda at the Annual General Meeting of Shareholders on June 28 2018, the Meeting approved and accepted the explanation and the steps needed by management to make improvements and obtain the Financial Services Authority's approval regarding the transaction (including asset swap transactions) that were previously approved by the shareholders in the fifth agenda at the Company's Annual General Meeting of Shareholders on June 28, 2018. "*

*Second Agenda of the Meeting:*
*"The meeting was unanimous on the basis of forum for consensus to decide:*

*i. Approved changes to Article 3 paragraph 2 of the Company's Articles of Association concerning Business Activities (the Company).*
*ii. Approved the authorization of the Company's Board of Directors with substitution rights, restated a decision regarding the amendment and rearrangement of all provisions of the Articles of Association to the Notary deed and delivered notification of the amendment to the authorized parties and in connection with this matter to do everything needed is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. "*

*Third Agenda of the Meeting:*
*"A meeting with the most votes of 9,591,765,255 shares or constituting 99.9% of the total votes issued at the Meeting has decided and agreed:*

*i. Accepting the resignation of Mr. INDRA YURANA SUGIARTO, as a member of the Company's Board of Directors as stated in his resignation letter dated October 9, 2018.*
*ii. Provided repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. INDRA YURANA SUGIARTO for all Company management actions that have been carried out during 2018, as*

yang telah dilakukannya selama tahun 2018, sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan Tahun 2018 disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2019, serta sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut, susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

*long as the annual report and financial statements of the Company in 2018 are approved and ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2019, and to the extent that the management actions are reflected in the Report Annual and Financial Statements of the Company for Book Year 2018 and not a criminal offense or violation of the provisions of applicable laws and regulations. Furthermore, the resignation of Mr. INDRA YURANA SUGIARTO, the full composition of the members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Company's Directors are as follows:*

| Dewan Komisaris<br>*Board of Commissioner* | |
|---|---|
| Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen<br>*President Commissioner & Independent Commissioner* | Ilham Akbar Habibie* |
| Komisaris Independen sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Komisaris Utama<br>*Independent Commisioner as well as tasks executor of President Commisioner* | Iggi Haruman Achsien |
| Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | Edy Setiadi |
| Komisaris<br>*Commissioner* | Mohamed Hedi Mejai* |
| Komisaris<br>*Commissioner* | Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh* |
| **Dewan Pengawas Syariah**<br>*Sharia Supervisory Board* | |
| Ketua<br>*Chairman* | Prof. DR. (HC) KH Ma'ruf Amin |
| Anggota<br>*Member* | DR. H. Oni Sahroni, MA |
| Anggota<br>*Member* | Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| **Direksi**<br>*Director* | |
| Direktur Utama<br>*President Director* | Achmad Kusna Permana |
| Direktur<br>*Director* | Hery Syafril |
| Direktur Kepatuhan<br>*Director of Compliance* | Andri Donny |
| Direktur<br>*Director* | Purnomo Budiwibowo Soetadi |
| Direktur<br>*Director* | Awaldi |

Dengan ketentuan, pengangkatan Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE, Bp. MOHAMED HEDI MEJAI dan Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH tersebut selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

*With the appointment of Mr. ILHAM AKBAR HABIBIE, Mr. MOHAMED HEDI MEJAI and Mr. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH as a member of the Board of Commissioners of the Company will be effective after the concerned has obtained a appointment to pass the Fit and Proper Assessment from the OJK. If the concerned person*

(*Fit and Proper Assessment*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham

iii. Menyetujui pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."

*was failed to pass the Fit and Proper Assessment, then the appointment concerned will be canceled, without the need for a decision from the General Meeting of Shareholders.*

*iii. To approve the Company's Board of Directors with substitution rights, to restate the decision regarding changes in the composition of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Directors of the Company to the Notary deed and notify the relevant authorities and to do everything required in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. "*

**4. Tindak Lanjut Hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Oktober 2018**

*4. Extraordinary RUPS result follow up on October 11, 2018*

| RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Oktober 2018<br>*EGMS dated October 11, 2018* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Resolutions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Has (v)/Has Not Been Implemented (x)* | Tindak Lanjut<br>*Follow-up* |
| Agenda 1<br>1. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.<br>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:<br>- Bp. IGGI HARUMAN ACHSIEN;<br>- Bp. EDY SETIADI;<br>untuk bersama-sama dengan:<br>- Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE;<br>- Bp. MOHAMED HEDI MEJAI;<br>- Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH.<br>untuk menyetujui secara bulat penetapan harga pelaksanaan HMETD atas saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT VI Perseroan, sebagaimana yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.<br>3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:<br>• melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT VI;<br>• melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal; dan<br>• menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan)<br>• Dengan ketentuan bahwa khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.<br>4. a. menyetujui penambahan dan/atau penguatan modal lainnya pada Perseroan selain PUT VI dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) melalui penempatan dana setoran modal, penerbitan surat berharga subordinasi dan/atau transaksi lainnya di luar mekanisme Penawaran Umum Terbatas, di Tahun 2018 maupun yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan<br>b. memberikan mandat kepada mereka yang disebut dalam keputusan butir 2 dari mata acara pertama Rapat ini untuk memberikan persetujuan pada bentuk pelaksanaan penambahan dan/atau penguatan modal lainnya tersebut.<br>5. Dengan memperhatikan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan yang telah diputuskan pada mata acara kelima dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2018, Rapat menyetujui dan menerima penjelasan serta menyetujui langkah yang diperlukan manajemen untuk melakukan perbaikan serta mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan transaksi (termasuk transaksi *asset swap*) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemegang saham pada mata acara kelima pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Juni 2018. | V | Proses Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI") masih berlanjut. Bank sedang melakukan komunikasi dengan beberapa investor yang berminat untuk berinvestasi di Bank Muamalat Indonesia. |

| RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Oktober 2018<br>*EGMS dated October 11, 2018* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Resolutions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Has (v)/Has Not Been Implemented (x)* | Tindak Lanjut<br>*Follow-up* |
| *Agenda 1*<br>*1. Approved the implementation of the Limited Public Offering (VI) by providing Preemptive Rights (HMETD), with applicable terms and conditions.*<br>*2. Approved the authorization to the Board of Commissioners whose current effective members consist of:*<br>*- Mr. IGGI HARUMAN ACHSIEN;*<br>*- Mr. EDY SETIADI;*<br>*together with:*<br>*- Mr. AKBAR HABIBIE ILHAM;*<br>*- Mr. MOHAMED HEDI MEJAI;*<br>*- Mr. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH.*<br>*unanimously approve the price of HMETD of the Company's new shares which will be issued in the framework of the Company's LPO VI, as will be included in the PUT VI Prospectus.*<br>*3. Approved the authorization to the Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every action required in connection with the LPO VI, including but not limited to:*<br>• *do all and every action needed related to the issuance of new shares in the framework of PUT VI;*<br>• *do all and every action that is needed related to PUT VI, without any action being excluded, all of them taking into account the provisions of applicable laws and regulations, including regulations in the Capital Market sector; and*<br>• *declared the decision into a deed made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole according to the decision (including affirming the composition of the shareholders in the deed when needed)*<br>• *With the provision that specifically for the determination of the amount of issued and paid-up capital and changes in authorized capital (if needed) is carried out by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.*<br>*4. a. Approved the addition and/or strengthening of other capital to the Company other than PUT VI with a value of up to IDR 2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah) through placement of capital deposit funds, issuance of subordinated securities and/or other transactions outside the mechanism of the Limited Public Offering, in Year 2018 or which will be implemented in the future in accordance with applicable laws and regulations; and*<br>*b. Gave mandate to those referred to in decision item 2 of the first agenda of this Meeting to give approval on the form of the implementation of the addition and/or strengthening of other capital.*<br>*5. Took into account the authorization of the Board of Directors of the Company which was decided in the fifth agenda at the Annual General Meeting of Shareholders on June 28 2018, the Meeting approved and accepted the explanation and approved the steps needed by management to make improvements and obtain the Financial Services Authority's approval regarding the transaction (including asset swap transactions) which were previously approved by the shareholders in the fifth agenda at the Company's Annual General Meeting of Shareholders on June 28, 2018.* | V | *The process of the Rights Issue VI with Pre-emptive Rights ("Rights Issue") ("PUT VI") is still ongoing, the Bank is in communication with several investors who are interested in investing in Bank Muamalat Indonesia.* |
| Agenda 2<br>• Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha (Perseroan).<br>• Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<br>*Agenda 2*<br>• *Approved changes to Article 3 paragraph 2 of the Company's Articles of Association concerning Business Activities (the Company).*<br>• *Approved the authorization of the Company's Board of Directors with substitution rights, to restate a decision regarding the amendment and rearrangement of all provisions of the Articles of Association to the Notary deed and deliver notification of the amendment to the relevant authorities and in connection with this everything needed is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.* | V | Perubahan Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha (Perseroan) telah dinyatakan dalam akta notaris dan pemberitahuannya telah diterima Kemenkumham tanggal 9 November 2018.<br>*The amendment to the Articles of Association concerning Business Activities (the Company) has been stated in the notary deed and the notification has been received by the Kemenkumham on November 9, 2018* |

| RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Oktober 2018<br>*EGMS dated October 11, 2018* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Resolutions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Has (v)/Has Not Been Implemented (x)* | Tindak Lanjut<br>*Follow-up* |
| Agenda 3<br>• Menerima pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO, selaku anggota Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 9 Oktober 2018.<br>• Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut untuk segenap tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukannya selama tahun 2018, sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan Tahun 2018 disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2019, serta sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<br>*Agenda 3*<br>• *Accepted the resignation of Mr. INDRA YURANA SUGIARTO, as a member of the Company's Board of Directors as stated in his resignation letter dated October 9, 2018.*<br>• *Provided repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. INDRA YURANA SUGIARTO for all Company management actions that have been carried out during 2018, as well as the annual report and financial statements of the Company in 2018 are approved and ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2019, and extented that the management actions are reflected in the Report Annual and Financial Statements of the Company for Book Year 2018 and not a criminal offense or violation of the provisions of applicable laws and regulations.* | V | Pengunduran diri Bapak Indra Yurana Sugiarto telah dinyatakan dalam akta notaris dan telah dilaporkan kepada OJK.<br>*Resignation of Mr. Indra Yurana Sugiarto has been stated in the notary deed and has been reported to OJK.* |

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana
*v = have been done | x = have not been done*

5. Keputusan dan Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahun Sebelumnya
Sebagai forum tertinggi yang berfungsi mengambil keputusan terkait kepentingan pemegang saham/pemilik modal, hasil keputusan RUPS menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Manajemen Perusahaan. Belum terlaksananya sebuah hasil keputusan RUPS akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban Manajemen terhadap pemegang saham terkait pengelolaan Perusahaan. Selama tahun 2017, Bank Muamalat Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yaitu tanggal 30 Maret 2017 dan RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017 bertempat di Jakarta.

*5. Decisions and Follow-Up Actions of the Previous Annual General Meeting of Shareholders*
*As the highest forum that functions to make decisions related to the interests of shareholders/capital owners, the results of RUPS must be carried out by Company Management. If the decisions has not been implemented yet, it would be part of Management's accountability to shareholders regarding the management of the Company. During 2017, Bank Muamalat Indonesia held an Annual General Meeting of Shareholders (GMS), which was dated March 30, 2017 and the Extraordinary GMS on September 20, 2017 took place in Jakarta.*

6. Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017
Bank Muamalat Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yaitu tanggal 30 Maret 2017 dan telah dilakukan pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Media Indonesia" yang terbit pada tanggal 21 Februari 2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 21 Februari 2017.

Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, yang terbit pada tanggal 8 Maret 2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman website Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 8 Maret 2017.

*6. Annual RUPS Follow up Results March 30, 2017*
*Bank Muamalat Indonesia has held an Annual General Meeting of Shareholders (RUPS), which was dated March 30, 2017. An announcement has been made to shareholders regarding the the Meeting by placing advertisements in 1 (one) Indonesian language daily newspaper, namely "Media Indonesia" which was published on February 21, 2017. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded advertisement for the announcement of the Meeting, both in Indonesian and in English, through the website page of Bank Muamalat Indonesia on February 21, 2017.*

*Summons to shareholders regarding the holding of the Meeting have been conducted by placing advertisements on 1 (one) of the same daily newspaper mentioned above, which was published on March 8, 2017. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded an advertisement for summoning the Meeting and an explanation of the agenda of the Meeting in Indonesian and in English, through the Bank Muamalat Indonesia website on March 8, 2017.*

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2017 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut:

*The results of the 2017 Annual RUPS and its follow-up by the Company Management are as follows:*

| RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017<br>*Annual RUPS March 30. 2017* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Decisions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Have/have not been done* | Tindak Lanjut<br>*Follow up* |
| Agenda 1<br>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sebagaimana tercantum dalam laporan nomor R1.11003-6A/BMI102/17 tertanggal 17 Februari 2017.<br>*Agenda 1*<br>*Approvd the 2016 Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2016 and ratified the Company's Financial Report for the Fiscal Year audited by Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali Public Accountants as stated in the report number R1.11003-6A/BMI102/17 dated February 17, 2017.* | V | Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Maret 2017.<br>*Financial Statements and Annual Reports have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) on March 8, 2017.* |
| Agenda 2<br>Menyetujui usulan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 akan diputuskan pada RUPS Luar Biasa yang terdekat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br>*Agenda 2*<br>*Approved the proposed of the Company's net profit used for the Fiscal Year 2016 and will be decided at the closest Extraordinary RUPS, with regard to the applicable laws and regulations.* | V | Menjadi salah satu agenda dan telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017.<br>*Became one of the agendas and has been discussed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 20, 2017.* |
| Agenda 3<br>Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.<br>*Agenda 3*<br>*Approved authorization the Board of Commissioners of the Company to appoint, terminate and/or replace the Public Accounting Firm which is included in the top 10 (ten) to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2017 and/or other audits required by the Company.* | V | Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2017 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.<br>*The Board of Commissioners has appointed KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbd & a) to audit the Financial Statements for the 2017 financial year based on recommendations from the Audit Committee.* |
| Agenda 4<br>1. Menyetujui penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dengan nilai maksimum sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah);<br>2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut; dan<br>3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kepada Direksi untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut.<br>*Agenda 4*<br>*1. 1. Approved the issuance of Sustainable Subordinated Sukuk with a maximum value of Rp1,700,000,000,000 (one trillion seven hundred billion Rupiah);*<br>*2. 2. Gave authorization to the Board of Commissioners on behalf of the Meeting to carry out the issuance of the said Sustainable Subordinated Sukuk, including determining the structure, scheming and contract of the Sustainable Subordinate Sukuk; and*<br>*3. Furthermore, the Board of Commissioners on behalf of the Meeting delegated the Board of Directors to carry out activities related to the planned issuance of the Sustainable Subordinate Sukuk.* | V | Bank telah menerbitkan *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi (MTNS Subordinasi) sebagai upaya untuk meningkatkan modal sedangkan penerbitan sukuk subordinasi masih dalam proses.<br>*The Bank has issued a Medium Term Notes Sharia Subordination (MTNS Subordination) as an effort to increase capital while the issuance of subordinated sukuk is still in process.* |
| Agenda 5<br>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan termasuk diantaranya mencari Investor Strategis Baru (*New Strategic Investor*) yang akan menempatkan dananya sebagai modal pada Perseroan dan diprioritaskan kepada pemegang saham Indonesia minimal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).<br>2. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud.<br>3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Direksi guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud.<br>*Agenda 5*<br>*1. Approved the Company's plan to carry out additional capital of the Company including to look for New Strategic Investors who will place their funds as capital in the Company and prioritized to Indonesian shareholders of at least Rp1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah).*<br>*2. Submited authorization to the Board of Commissioners on behalf of the Meeting to carry out activities in order to increase the capital of the said Company.*<br>*3. Furthermore, the Board of Commissioners on behalf of the Meeting may delegate authority to the Board of Directors to carry out activities in the framework of adding the Company's capital.* | V | Bank masih dalam proses mencari Investor Strategis Baru (*New Strategic Investor*) yang akan menempatkan dananya sebagai modal pada Perseroan.<br>*Bank is still in the process of seeking a New Strategic Investor who will place its funds as capital for the Company.* |

| RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017<br>*Annual RUPS March 30. 2017* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Decisions* | Sudah (V)/Belum Terlaksana (X)<br>*Have/have not been done* | Tindak Lanjut<br>*Follow up* |
| Agenda 6<br>1. Mengesahkan penjaminan Aset Perseroan Yang Telah Dijaminkan berupa tagihan pembiayaan KPR iB milik Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF") sebelumnya; dan<br>2. Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan kepada PT SMF. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan KPR iB milik Perseroan yang akan dijaminkan Perseroan pada tahun 2017 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang akan datang kepada PT SMF baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kekayaan bersih Perseroan berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan terakhir yang disahkan Rapat Umum Pemegang Saham.<br><br>*Agenda 6*<br>*1. Ratified the guaranteed Assets of the Company in the form of the Company's iB KPR financing bill to the previous PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"); and*<br>*2. Approved the Company's Assets to be guaranteed to PT SMF. The Company's Assets to be Guaranteed are the Company's iB KPR financing bills which will be pledged by the Company in 2017 until the 2018 Annual General Meeting of Shareholders will come to PT SMF either in one guarantee transaction or more, the maximum amount of which is 75% (seventy-five percent) of the Company's net worth based on the results of the latest Financial Statement Audit that was ratified by the General Meeting of Shareholders.* | V | Telah dicatat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 47 tanggal 30 Maret 2017.<br>*It has been noted in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 47 dated 30 March 2017.* |
| Agenda 7<br>• Menyetujui pengunduran diri Bapak Djaja Masurhun Tambunan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.<br>• Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Saleh Ahmed Al-Ateeqi tersebut dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.<br>• Menyetujui pengangkatan Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019.<br>• Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Komisaris.<br>Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<br><br>*Agenda 7*<br>• *Approved the resignation of Mr. Djaja Masurhun Tambunan from his position as the Independent Commissioner of the Company.*<br>• *Approved the dismissal of Mr. Saleh Ahmed Al-Ateeqi with respect from his position as a member of the Board of Commissioners of the Company.*<br>• *Approved the appointment of Mr. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh as a member of the Board of Commissioners of the Company, from the closing of the Meeting up to the remaining term of office of Commissioners who are still in office, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2019.*<br>• *Approved the authorization to the Board of Directors of the Company to represent shareholders to sign agreements with members of the Board of Commissioners in connection with their appointment as members of the Board of Commissioners.*<br>*Approved the authorizationto the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the decision regarding changes in the composition of the Company's Board of Commissioners to the Notary deed and notify the competent authorities and in relation to the matter in accordance with the provisions of the laws and regulations apply.* | V | • Perubahan Pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 05 tanggal 6 April 2017 dan pemberitahuannya telah diterima Kementerian Hukum dan HAM tanggal 29 April 2017.<br>• Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.<br>• Pemberian kuasa kepada Direksi telah direalisasikan.<br>• *Changes of the Management have been recorded in the Deed of Decision of the Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 05 April 6, 2017 and the notification was received by the Ministry of Justice and Human Rights on April 29, 2017.*<br>• *Mr. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh is still in the process of the Capability and Compliance Assessment by OJK.*<br>• *Giving power to the Board of Directors has been realized.* |

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana
*v = have been done | x = have not been done*

**7. Tindak Lanjut Hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017**

Di tahun 2017, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 20 September 2017. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Investor Daily" yang terbit pada tanggal 14 Agustus

*7. Follow-Up to Extraordinary GMS Results on September 20, 2017*

*In 2017, the Company held 1 (one) Annual RUPS on September 20, 2017. In order to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 32/ POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company, Announcement to the shareholders regarding of the Meeting has been conducted by placing advertisements on 1 (one) Indonesian language daily newspaper, namely "Investor Daily" which was published on August 14, 2017. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded advertisement*

2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2017.

*for the announcement of the Meeting, both in Indonesian and in English, through the website page of Bank Muamalat Indonesia on August 14, 2017.*

Sedangkan pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas yang terbit pada tanggal 29 Agustus 2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman website Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2017.

*Whereas the summons to the shareholders regarding of the Meeting was conducted by placing advertisements on 1 (one) of the same daily newspaper mentioned above which was published on 29 August 2017. Bank Muamalat Indonesia has also uploaded an advertisement for summoning the Meeting and an explanation of the meeting agenda in Indonesian and in English, through the Bank Muamalat Indonesia website on August 29, 2017.*

Hasil Keputusan RUPSLB 2017 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut:

*On the decision made 2017 general shareholders ' meeting and the follow-up by the management of the company is as follows:*

| RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017<br>*Extraordinary RUPS September 20, 2017* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Decisions* | Sudah/Belum Terlaksana<br>*Have/have not been done* | Tindak Lanjut<br>*Follow up* |
| Agenda 1<br>Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan, dan sisa dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 tersebut secara keseluruhan akan dipergunakan untuk cadangan umum Perseroan. Dengan demikian pemegang saham asing melepaskan haknya atas dividen tersebut.<br>*Agenda 1*<br>*Approved the distribution of dividends to Indonesian Shareholders in the amount of 5% (five percent) of the Company's Net Profit for 2018 Year, regarding of the necessary approvals, and the remainder of the Company's Net Profit for the Fiscal Year as a whole will be used for the Company's general reserves. Thus foreign shareholders give up their rights to the dividend.* | V | Pada tahun 2017 terdapat pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 20 September 2017.<br>*In 2017 there was a cash dividend for the 2016 financial year in accordance with the results of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 20, 2017.* |

| RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017<br>*Extraordinary RUPS September 20, 2017* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Decisions* | Sudah/Belum Terlaksana<br>*Have/have not been done* | Tindak Lanjut<br>*Follow up* |
| Agenda 2<br>• Pemberhentian Bapak Ayuoob Akbar Qadri selaku Komisaris Perseroan.<br>• Pengangkatan Bapak Mohamed Hedi Mejai sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru menggantikan Bapak Ayuoob Akbar Qadri dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Mohamed Hedi Mejai memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dari OJK.<br>• Mengusulkan nama Bapak Jimly Asshiddiqie untuk dipertimbangkan dalam penominasian berikutnya pada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk POJK tentang Komite yang Menjalankan Fungsi Nominasi.<br>• Pengangkatan Bapak Edy Setiadi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Edy Setiadi memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Komisaris Independen Perseroan dari OJK.<br>• Pemberhentian Bapak Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau selama ini unluk kemajuan Perseroan.<br>• Pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Bapak Achmad Kusna Permana memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan sebagai Direktur Utama Perseroan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana Bapak Achmad Kusna Permana bekerja disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut.<br>• Penetapan Bapak Purnomo Budiwibowo Soetadi sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Direktur Utama Perseroan.<br>• Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Mohamed Hedi Mejai dan Bapak Edy Setiadi sehubungan dengan pengangkatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Achmad Kusna Permana sehubungan dengan pengangkatannya selaku Direktur Utama Perseroan.<br>• Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan sagala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<br>*Agenda 2*<br>• *Dismissal of Mr Ayuoob Akbar Qadri as Commissioner of the Company.*<br>• *The appointment of Mr. Mohamed Hedi Mejai as a member of the Board of Commissioners who recently replaced Mr Ayuoob Akbar Qadri. The appointment will be effective after Mr. Mohamed Hedi Mejai obtained a determination to pass the Capability and Compliance Assessment as a member of the Board of Commissioners of the OJK*<br>• *Propose Mr. Jimly Asshiddiqie to be nominated in the Nomination and Remuneration Committee of the Company as a Member of the Board of Commissioners while observing the laws and regulations including POJK regarding the Committee that Performs Nominating Functions.*<br>• *The appointment of Mr. Edy Setiadi as an Independent Commissioner of the Company will be effective after Mr. Edy Setiadi obtained a determination to pass the Capability and Compliance Assessment as an Independent Commissioner of the Company from the OJK.*<br>• *Dismissal of Mr. Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman as President Director of the Company as of the closing of the Meeting accompanied by gratitude and appreciation for his services so far for the progress of the Company.*<br>• *Appointed Mr. Achmad Kusna Permana as President Director of the Company. It will be effective after Mr. Achmad Kusna Permana obtained a determination to pass the Compliance and Compliance Assessment as President Director of the Company from OJK and after Mr. Achmad Kusna Permana's resignation from the previous company where Mr. Achmad Kusna Permana worked approved by the company's General Meeting of Shareholders.*<br>• *Determination of Mr. Purnomo Budiwibowo Soetadi as Acting (Acting) Director of the Company.*<br>• *Gave authorization to Directors of the Company to represent shareholders to sign agreements with Mr. Mohamed Hedi Mejai and Mr. Edy Setiadi in connection with his appointment as a member of the Company's Board of Commissioners and to represent shareholders to sign an agreement with Mr. Achmad Kusna Permana in connection with his appointment as President Director Company.*<br>• *Approved authorization to the Company's Board of Directors with substitution rights, to restate the decision regarding changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Notary deed and notify the competent party and in connection with the matter in accordance with provisions of applicable laws and regulations.* | V | • Perubahan pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 08 tanggal 9 Oktober 2017.<br>• Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bapak Mohamed Hedi Mejai masih dalam proses.<br>• Bapak Edy Setiadi telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 2 Maret 2018.<br>• Bapak Bapak Achmad Kusna Permana telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 27 Februari 2018.<br>• Pemberian kuasa kepada Direksi telah direalisasikan.<br>• *Changes to management have been recorded in the Deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 08 dated 9 October 2017.*<br>• *Capability and Compliance Assessment Mr. Mohamed Hedi Mejai is still in the process.*<br>• *Mr. Edy Setiadi has passed the OJK's Capability and Compliance Assessment on March 2, 2018.*<br>• *Mr. Bapak Achmad Kusna Permana has passed the OJK's Capability and Compliance Assessment on February 27, 2018.*<br>• *Giving authorization to the Board of Directors has been realized.* |

| RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017<br>*Extraordinary RUPS September 20, 2017* | | |
|---|---|---|
| Hasil Keputusan<br>*Decisions* | Sudah/Belum Terlaksana<br>*Have/have not been done* | Tindak Lanjut<br>*Follow up* |
| Agenda 3<br>• Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp11.000.000.000.000 (sebelas trilyun rupiah) dengan cara menerbitkan saham baru Seri B yang akan ditambahkan dan ditempatkan dalam portepel sebanyak 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham.<br>• Dengan catatan dari pemegang saham Indonesia, untuk rencana peningkatan Modal Dasar tersebut, jika diperlukan, Perseroan akan mangeluarkan dahulu sebanyak 18.965.648.490 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) saham Seri B yang ada dalam portopel saat ini dan/atau menerbitkan *subordinate debt*.<br>• Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI").<br>• Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:<br>• Prof. DR. Anwar Nasution; dan<br>• Iggi Haruman Achsien.<br>• untuk bersama-sama dengan:<br>• Edy Setiadi;<br>• Mohamed Heidi Mejai;<br>• Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh; dan<br>• Abdulwahab Abed;<br>• menyetujui dengan suara bulat penetapan harga pelaksanaan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.<br>• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI.<br>• Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor serta perubahan Modal Dasar Perseroan (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.<br>*Agenda 3*<br>• *Approved the increase in the Company's capital to become Rp11,000,000,000,000 (eleven trillion rupiah) by issuing new Series B shares which will be added and placed in a port as much as 80,000,000,000 (eighty billion) shares. With a note from the Indonesian shareholders, for the planned increase in the Basic Capital, the Company will first issue 18,965,648,490 (eighteen billion nine hundred sixty five million six hundred forty eight thousand four hundred and ninety) Series B shares which is in the current porter and/or issues a subordinate debt.*<br>• *Approved the implementation of the Rights Issue VI with Preemptive Rights (HMETD) ("PUT VI").*<br>• *Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners whose current effective members consist of:*<br>• *Prof. DR. Anwar Nasution; and*<br>• *Iggi Haruman Achsien*<br>• *together with:*<br>• *Edy Setiadi;*<br>• *Mohamed Heidi Mejai;*<br>• *Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh; and*<br>• *Abdulwahab Abed;*<br>• *Unanimously approved the implementation of pricing that will be included in the Prospective Prospectus VI.*<br>• *Gave authorizationto the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to do every action needed in connection with PUT VI.*<br>• *Spesificallyfor the determination of the amount of Issued and Paid-up Capital as well as changes in the Company's authorized capital (if needed) is carried out by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners. V* | V | • Peningkatan modal Perseroan telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 35 tanggal 16 Oktober 2017, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Oktober 2017.<br>• Proses Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI") masih berlanjut. Bank sedang melakukan komunikasi dengan beberapa investor yang berminat untuk berinvestasi di Bank Muamalat Indonesia.<br>• *The increase of the Company's capital has been recorded in the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 35 dated 16 October 2017, and was approved by the Ministry of Law and Human Rights on 26 October 2017.*<br>• *The process of the Rights Issue VI with Pre-emptive Rights ("Rights") continues. "The Bank is in communication with several investors who are interested in investing in Bank Muamalat Indonesia.* |

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana
*v = have been done | x = have not been done*

# Dewan Pengawas Syariah

## *Sharia Supervisory Board*

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

*The 2008 Law No. 21 on Sharia Banking stipulates that all sharia banking transactions must comply with sharia principles, which are the fatwas issued by the National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"). DSN-MUI assigns Sharia Supervisory Board in every Sharia Bank as an organ in charge of providing recommendations and suggestion to the Board of Directors and supervising the Banks' activities so that the Banks' activities are in compliance with Sharia principles. The supervision results of Sharia Supervisory Board are reported to President Director to be further submitted to OJK every semester.*

### Dasar Hukum

Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

### *Legal Basis*

*Establishment and execution of duties of Bank Muamalat's Sharia Supervisory Board are based on several provisions as follows:*

1. *The 2007 Law No. 40 on Limited Liability Company.*
2. *The 2008 Law No. 21 on Sharia Banking.*
3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation no. 15/13/PBI/2013.*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
5. *The Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.*

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia yang mencakup Fungsi, Persyaratan, Komposisi, Pengangkatan, Rangkap Jabatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian, Program Orientasi Dan Peningkatan Kapabilitas, Standar Etika Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah, Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah, Rapat Dewan Pengawas Syariah, Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaporan Dewan Pengawas Syariah, Hak Kompensasi Dewan Pengawas Syariah dan Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah.

### *Guidelines and Work Rules of the Sharia Supervisory Board*

*Guidelines and work rules of the Sharia Supervisory Board are contained in the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia covering Functions, Requirements, Composition, Appointment, Concurrent Position, Term and Dismissal, Orientation and Capability Development Program, Sharia Supervisory Board's Code of Ethics, Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board, Work Rules of Sharia Supervisory Board, Segregation of Duties of Sharia Supervisory Board, Sharia Supervisory Board Meeting, Work Relationship with Board of Commissioners and Board of Directors, Report of Sharia Supervisory Board, Sharia Supervisory Board's rights for compensation, Rights, and Performance Evaluation of Sharia Supervisory Board.*

### Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
5. memiliki keahlian di bidang fiqih mu'amalah;
6. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
7. jika diperlukan anggota DPS dapat pula memiliki keahlian selain fiqih mu'amalah, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
8. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet; dan

### *Criteria for the Sharia Supervisory Board Members*

1. *Have a good character and moral;*
2. *Have a commitment to complying with sharia banking regulations and other applicable laws and regulations;*
3. *Have a high commitment to the development of a healthy and sustainable Bank;*
4. *Not included in the Disqualified List as regulated in the stipulations concerning the fit and proper test determined by by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority;*
5. *Have expertise in fiqih mu'amalah;*
6. *Have knowledge and experience in the field of sharia mu'amalah and knowledge in banking and/or finance in general;*
7. *If required members of Sharia Supervisory Board (SSB) may also have expertise other than fiqih mu'amalah, but must have experience in banking and or sharia financial institution;*
8. *Not included in the list of non-performing loan/financing; and*

9. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

*9. Never been declared bankrupt or become a shareholder, a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.*

## Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/ PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 (1) bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Mempertimbangkan skala bisnis Bank Muamalat Indonesia dan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap jumlah anggota Direksi, Bank Muamalat Indonesia menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) orang dengan susunan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia telah efektif menjabat karena seluruhnya telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

## *Sharia Supervisory Board Composition*

*Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 dated 29 January 2009 concerning Sharia Commercial Banks Article 36 (1) that the number of members of the Sharia Supervisory Board is at least 2 (two) people or a maximum of 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Directors. Considering the business scale of Bank Muamalat and the composition of members of the Sharia Supervisory Board on the number of members of the Board of Directors, Bank Muamalat determines the number of the Sharia Supervisory Board are 3 (one) chairman and 2 (two) members and all members of the Supervisory Board Syariah Bank Muamalat has been effectively officiate because all of them have obtained approval from the Financial Services Authority.*

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:

*Composition of Bank Muamalat Indonesia Sharia Supervisory Board members for the 2018 period is as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* |
|---|---|
| Prof.DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin | Ketua<br>*Chairman* |
| DR. H. Oni Sahroni MA | Anggota<br>*Member* |
| Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si | Anggota<br>*Member* |

## Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan menjaga agar dalam melaksanakan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Pasal 36 (2), anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Dalam rangka memenuhi ketentuan rangkap jabatan tersebut, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga dengan rincian sebagai berikut:

## *Independence and Concurrent Position of Sharia Supervisory Board*

*Sharia Supervisory Board ("SSB") of Bank Muamalat Indonesia upholds the principle of independence in performing its duties to supervise the Bank's activities in accordance with sharia principles. The Sharia Supervisory Board always prioritizes the interests of the Bank above personal interests and keeps the performance of its duties not being influenced by any party.*

*In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 Article 36 (2), members of the Sharia Supervisory Board can only hold concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at most 4 (four) other Islamic financial institutions. In order to fulfill the Concurrent Positions provisions, the Bank Muamalat Sharia Supervisory Board concurrently serves as a member of the Sharia Supervisory Board in other sharia financial institutions not more than 4 (four) institutions with the following details:*

| Nama<br>*Name* | Nama Lembaga / Perusahaan<br>*Name of Institution / Company* | Bidang Usaha<br>*Business Field* |
|---|---|---|
| Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin | PT Bank BNI Syariah | Perbankan<br>*Banking* |
| | PT Bank Mega Syariah Indonesia | Perbankan<br>*Banking* |
| | PT Bank Mandiri Syariah | Perbankan<br>*Banking* |
| | PT BNI Life Insurance | Asuransi<br>*Insurance* |
| Dr. Oni Sahroni, MA. | PT Adira Dinamika Multifinance Tbk | Multifinance<br>*Multifinance* |
| | PT BNP Paribas Investment Partners | Manajer Investasi<br>*Investment Manager* |
| | PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Unit Usaha Syariah) | Perbankan<br>*Banking* |
| Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si | Indo Mobil Finance Indonesia Syariah | Multifinace<br>*Multifinance* |
| | Suzuki Finance Indonesia Syariah | Multifinace<br>*Multifinance* |
| | PT Reasuransi Syariah Indonesia (dikenal dengan ReINDO Syariah) | Reasuransi<br>*Reinsurance* |
| | PT Bank Maybank Syariah Indonesia | Perbankan<br>*Banking* |

## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.
3. Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank Muamalat Indonesia yang belum ada fatwanya.
6. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
7. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia.
8. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Muamalat Indonesia.

## *Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board*

*SSB members shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. SSB has the following duties and responsibilities:*

1. *Give counsel and advice to the Board of Directors regarding matters related to sharia aspects;*
2. *Assess and ensure the sharia principles compliance of operational guidelines and products issued by Bank Muamalat Indonesia;*
3. *Act as a mediator between Bank Muamalat Indonesia with DSN-MUI in communicating the proposals and suggestions on development of products and services of Bank Muamalat Indonesia that require further recomendation and fatwa from DSN-MUI;*
4. *Supervise the development process of new products and activities of Bank Muamalat Indonesia to comply with the fatwas of DSN-MUI;*
5. *Propose for fatwas from DSN-MUI for new products of Bank Muamalat Indonesia for which no fatwa has been issued;*
6. *As representatives of DSN-MUI assigned at Bank Muamalat Indonesia, the SSB is obliged to report the results of their supervision to the DSN-MUI and the Financial Services Authority once in every 6 (six) months;*
7. *Provide comprehensive opinions from sharia perspectives on the entire Bank Muamalat Indonesia operations in the Bank's publication reports;*
8. *Conduct periodic review of compliance with sharia principles in the context of fund raising and fund distribution as well as services offered by Bank Muamalat Indonesia;*

9. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/ penyimpangan yang dijumpai oleh Unit Kerja Internal Audit.
10. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal hal sebagai berikut:
1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank Muamalat Indonesia yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI,
   a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN- MUI.
   b. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
3. Me*review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Menetapkan jumlah uji petik (*sampel*) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing- masing kegiatan.
3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (*sampel*) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
   a. Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah.
   b. Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
5. Melakukan review terhadap prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

## Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah melakukan pembagian tugas sebagai berikut:

9. *Provide opinions from sharia perspectives on findings/ deviation found by the Internal Audit; and*
10. *Request data and information related to sharia aspects of work units at Bank Muamalat Indonesia for the purpose of implementing their duties.*

*In supervising the development process of new products to be provided by Bank Muamalat Indonesia, the SSB do the following:*

1. *Ask for explanation from Bank Muamalat Indonesia's competent authorities on purpose, characteristics, and covenants that are used in new products to be provided;*
2. *Examine whether the akad (covenant) used for a new product has obtained the fatwa from DSN-MUI;*
   a. *SSB shall make analysis of the conformity of a new product akad with DSN-MUI's fatwas.*
   b. *In the event no fatwa is available, then the SSB shall propose to the Board of Directors to complete the new product akad with fatwa from DSN-MUI.*
3. *Review systems and procedures for new products to be offered in terms of comply with Sharia Principles; and*
4. *Give sharia opinions new products to be offered;*

*In supervising the activities of Bank Muamalat Indonesia, the SSB performs the following activities accordingly:*

1. *Analyze the reports submitted by and/or requested by the Board of Directors, the internal audit function and/or compliance function to know the quality of the fulfillment of Sharia Principles on funding, financing and services of the Bank;*
2. *Determine the number of sample transactions to be examined with due regard to the quality of implementation of Sharia Principle fulfillment from each activity;*
3. *Examine the transaction documents that have been tested (sample) to ensure comply with Sharia Principles as required in the SOP, including:*
   a. *The presence or absence of proof of purchase of goods, to murabahah contract as proof of fulfillment of terms of buying and selling murabahah.*
   b. *The presence or absence of a customer's business report, for mudharabah/ musyarakah contract, as the basis for calculating the distribution of profit sharing.*
4. *Conduct inspections, observations, inquiries and/or confirmation to Bank Muamalat Indonesia's employees and/ or clients to strengthen the results of the examination of documents, when deemed necessary;*
5. *Review the procedures related to sharia aspects when there is indications of discrepancy in the implementation of Sharia Principle on the referred activities;*
6. *Give sharia opinion on funding and financing activities as well as the Bank's services; and*
7. *Report the result of supervision conducted by SSB to the Board of Directors and Board of Commissioners.*

## *Segregation of Sharia Supervisory Board Duties*

*In order to carry out its duties and responsibilities, SSB segregates its tasks with details as follows:*

1. Ketua Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas:
   a. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah.
   b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya.
   c. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah.
   d. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas:
   a. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.
   b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.

*1. SSB Chairman is obliged to:*
   *a. Lead all activities of SSB members.*
   *b. Arrange SSB work programs implementation.*
   *c. Chairman SSB meetings.*
   *d. Determine segregation of duties among SSB members.*

*2. The members of the SSB are obliged to:*
   *a. Assist the SSB Chairman in carrying out his duties according to the job descriptions set by the SSB Chairman.*
   *b. Perform other tasks assigned by the SSB Chairman.*

Dewan Pengawas Syariah senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

*SSB must always ensure that all transactions made by Bank Muamalat Indonesia are executed in accordance with the fatwa's issued by the National Sharia Council, and shall maintain the Bank's business activities and give opinions on the clarity of the adopted sharia principles.*

## Hubungan Kerja Antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan Bank Muamalat Indonesia serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Muamalat dalam jangka panjang tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank Muamalat Indonesia sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (*comply*) terhadap prinsip syariah Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (*internal control*) dan manajemen risiko (*risk management*);
3. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;
4. Terpenuhinya pelaksanaan *Good Corporate Governance*; dan
5. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas Manajemen di semua lini organisasi.

## *Work Relationships Between Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors*

*Work relationship between Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and Board of Directors is a check and balance relationship with the ultimate goal of achieving Bank Muamalat Indonesia's advancement and operational implementation comply with with sharia principles and prevailing laws and regulations, including the implementation of GCG. Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with their respective functions have responsibility to maintain the business sustainability of Bank Muamalat Indonesia in the long-term as reflected in:*

*1. Bank Muamalat Indonesia's soundness in accordance with the principle of prudence and comply to the principles of Islamic sharia and regulations and legislation in force;*
*2. the implementation of both internal control and risk management;;*
*3. The fairly protection of the interests of stakeholders;*
*4. the fulfillment of the implementation of Good Corporate Governance; and*
*5. Succession of leadership and continuity of Management in all lines of organization.*

## Kebijakan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Sharia Compliance Officer sebagai *liaison officer* yang antara lain bertugas untuk mendokumentasikan rincian kegiatan dengan baik melalui kertas kerja pengawasan. Kertas kerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah periode semesteran yang disampaikan kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia, DSN - MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

## *Supervision Policy of Sharia Supervisory Board*

*In conducting supervision, the Sharia Supervisory Board is assisted by the Sharia Compliance Officer as liaison officer who, among other, is tasked with documenting the details of the activity well on the supervision working paper. The working papers are then set forth in the Supervisory Report of Sharia Supervisory Board submitted to the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI and the Financial Services Authority.*

## Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarkan rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai Board Manual Bank Muamalat Indonesia Syariah antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil review produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan review aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.

Frekuensi dan rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

## *Sharia Supervisory Board Meeting*

*In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Bank Muamalat Manual Board, Sharia Supervisory Board must hold Sharia Supervisory Board meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month.*

*The materials discussed in the Sharia Supervisory Board meeting according to the Muamalat Syariah Bank's Manual Board include:*

1. *Matters relating to the development of new products and the results of existing product reviews include the objectives, characteristics and contracts used in accordance with sharia principles.*
2. *Submission of new activities and review of Bank activities that have been running from sharia aspects.*
3. *Problems arising from the activities of the Bank that require opinions from the DPS.*
4. *Sharia findings from auditors, both external auditors and internal auditors.*

*Decision making on DPS meetings is based on consensus agreement. If there are differences of opinion in the decision-making process, the differences of opinion are included in the minutes of the meeting along with the reasons.*

*The frequency and recapitulation of the attendance of Sharia Supervisory Board members at the Sharia Supervisory Board Meeting are as follows:*

### *Frequency and Attendance of Sharia Supervisory Board Meetings*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Jumlah Rapat<br>*Number of Meeting* | Jumlah Kehadiran<br>*Number of Attendance* | Tingkat Kehadiran<br>*Percentage of Attedance*<br>(%) |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin | Ketua<br>*Chairman* | 12 | 11 | 92% |
| DR. H. Oni Sahroni MA | Anggota<br>*Mamber* | 12 | 12 | 100% |
| Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si | Anggota<br>*Mamber* | 12 | 12 | 100% |

Selama tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 12 (dua belas) kali.

*Throughout 2018, the Sharia Supervisory Board has held a Shariah Supervisory Board meeting of 12 (twelve) times.*

### Agenda dan peserta rapat Dewan Pengawas Syariah

### *Agenda and Participants of the Sharia Supervisory Board Meeting*

| Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Rapat<br>*Participant* |
|---|---|---|
| 10 Januari 2018 | • Pembahasan tentang Tsaman berupa Perjumpaan Utang (Bai' Al Muqashshah)<br>• *Discussion of the Tsaman in the form of a Debt Encounter (Bai 'Al Muqashshah)* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |

| Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Rapat<br>*Participant* |
|---|---|---|
| 2 Februari 2018 | • Laporan *Financial Highlight* BMI Posisi Desember 2017<br>• Layanan Satu Atap Kemenag<br>• Laporan Konsultasi Syariah Periode September – Desember 2017<br>• *MI Highlight Financial Report Position December 2017*<br>• *Ministry of Religion One stop service*<br>• *Sharia Consultation Report September - December 2017* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 15 Maret 2018 | • Sukuk Mudharabah Subordinasi Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018<br>• Special Pricing Deposito<br>• e-Masjid<br>• Implementasi Akad Qardh pada Produk Tabungan & Giro di Cabang Kuala Lumpur<br>• *Benefit Free Transfer*, Biaya Layanan VA/CMS & Buku Cek/BG<br>• Laporan Konsultasi Syariah periode Januari - Februari 2018<br>• *Sukuk Bank Muamalat Indonesia in 2018*<br>• *Special Pricing of Deposits*<br>• *e-Masjid*<br>• *Implementation of the Qardh Agreement on Savings & Current Products at the Kuala Lumpur Branch*<br>• *Free Transfer Benefits, VA/CMS Service Fees & Check/BG Books*<br>• *Sharia Consultation Report period January - February 2018* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 30 April 2018 | • Skema Transaksi Mudharabah Muqayyadah dengan *Underlying* Sukuk Pemerintah<br>• Obyek MMQ *Refinancing*<br>• Penyerahan Laporan Realisasi Bagi Hasil Akad Musyarakah/Mudharabah<br>• Usulan Pengembangan Produk MMQ Non Aset<br>• Usulan Akad Qardh pada Produk Tabungan & Giro<br>• Ketentuan Penggunaan Asuransi Konvensional<br>• *The Muqayyadah Mudharabah Transaction Scheme with Government Sukuk Underlying*<br>• *MMQ Refinancing Object*<br>• *Submission of Realization of Musyarakah/Mudharabah Contract Realization Report*<br>• *Proposed MMQ Non Asset Product Development*<br>• *Proposed Qardh Agreement on Savings & Current Products*<br>• *Provisions for the Use of Conventional Insurance* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 31 Mei 2018 | • Laporan Konsultasi Syariah Periode Maret - April 2018<br>• *Sharia Consultation Report for the period March - April 2018* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 29 Juni 2018 | • Penetapan Lokasi Uji Petik DPS di Semester II 2018<br>• Perpanjangan program *Income Smoothing* Deposito Super Berkah<br>• *Determination of DPS sample test Locations in Semester II 2018*<br>• *Extension of the Income program Smoothing Super Blessing Deposit* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 23 Juli 2018 | • Praktek Perjumpaan Utang Pada Fasilitas LF Murabahah Revolving<br>• Laporan Konsultasi Syariah Periode Januari - Februari 2018<br>• Inisiatif ILHAM (Investasi Logam mulia Halal Muamalat)<br>• *Debt Encounter Practices at the Revolving LF Murabahah Facility*<br>• *Sharia Consultation Report for the period January - February 2018*<br>• *ILHAM Initiative (Muamalat Halal Metal Investment)* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 6 Agustus 2018 | • Deposito on Call<br>• Percepatan Transaksi 2nd Leg Repo Syariah<br>• *Deposit on Call*<br>• *Acceleration of Transactions in Sharia 2nd Leg Repo* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 24 September 2018 | • Tabungan Prima Berhadiah Wakaf<br>• Pemberian Bonus Deposito<br>• Program Sponsorship 2018<br>• Pemberitaan Kasus *Fraud* kepada Karyawan<br>• Kumpulan Permasalahan dalam Implementasi Fatwa DSN<br>• *Prime Savings with Waqf Prizes*<br>• *Provision of Deposit Bonuses*<br>• *2018 Sponsorship Program*<br>• *Reporting on Fraud Cases to Employees*<br>• *series of Problems in the Implementation of DSN Fatwa* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |

| Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Rapat<br>*Participant* |
|---|---|---|
| 29 Oktober 2018 | • Pembahasan Skema *Buyback* Repo BPKH<br>• Laporan Konsultasi Syariah Periode Juli – Oktober 2018<br>• *Discussion of the BPKH Repo Buyback Scheme*<br>• *Report on Sharia Consultation for the period July - October 2018* | DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 28 November 2018 | • Pertukaran aset underlying mudharabah muqayadah SMF<br>• Skema MMQ pencairan bertahap<br>• Pencantuman formulasi nisabah dan angsuran MMQ<br>• Program tabungan ultimate prima dan giro super berkah<br>• Program hadiah atas pembelian sukuk pemerintah<br>• *Exchange of SMF underlying mudharabah muqayadah assets*<br>• *Gradual liquefaction MMQ scheme*<br>• *Inclusion of nisabah formulations and MMQ installments*<br>• *The ultimate prime savings program and super blessed current account*<br>• *Prize program for purchasing government sukuk* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |
| 28 Desember 2018 | • Perpanjangan implementasi deposito *income smoothing*<br>• Mekanisme tukar tambah obyek KPR/KPA inden<br>• Laporan Konsultasi Syariah Periode November – Desemer 2018<br>• *Extension of the implementation of income smoothing deposits*<br>• *Mechanism of exchange of KPR/KPA indent objects*<br>• *Report on Sharia Consultation for the November Period - Desemer 2018* | Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin<br>DR. H. Oni Sahroni MA<br>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si |

Selain rapat rutin DPS, rapat DPS bersama dengan Direksi dan rapat DPS bersama dengan Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan rapat DPS bersama dengan Direksi dan rapat DPS bersama dengan Dewan Komisaris dilakukan secara gabungan. Dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi dibahas mengenai kondisi Bank Muamalat Indonesia dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

*In addition to SSB regular meetings, SSB joint meetings with the Board of Directors and Board of Commissioners are organized as needed. Implementation of SSB joint meetings with the Board of Directors and Board of Commissioners shall be conducted simultaneously. The condition of Bank Muamalat Indonesia and adherence to the principles of sharia were discussed in the SSB joint meeting with the Board of Commissioners and Board of Directors.*

## Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah di Tahun 2018

## *Implementation of Sharia Supervisory Board Activity in 2018*

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Pengawasan tersebut kemudian disampaikan oleh Manajemen Bank Muamalat Indonesia kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

*The Sharia Supervisory Board submits the Sharia Supervisory Report to the Management of Bank Muamalat Indonesia every 6 (six) months. The Supervision Report was submitted by the Management of Bank Muamalat Indonesia to DSN - MUI and the Financial Services Authority.*

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester I Tahun 2018 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 067/BMI-DIR/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester II Tahun 2018 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 015/B/CPD-SRT/II/2019 tanggal 27 Februari 2018.

*The first semester of 2018 Sharia Supervisory Board Supervision Report has been submitted to the Financial Services Authority through a letter from Bank Muamalat Indonesia No. 067/BMI-DIR/VIII/2018 dated August 27, 2018 and the Supervisory Board of Sharia Supervisory Board II semester 2018 was submitted to the Financial Services Authority through a letter from Bank Muamalat Indonesia No. 015/B/CPD-SRT/III/2019 dated February 27, 2018.*

Kegiatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 3 (tiga) *liasion officer* dari unit Kepatuhah Syariah. Berikut adalah rincian pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan selama tahun 2018.

*The supervisory activities of the Sharia Supervisory Board were included supervision of the implementation of the Sharia Principles in fund raising activities and the distribution of funds and services. In conducting supervision, the Sharia Supervisory Board was assisted by 3 (three) liasion officers from the Shariah Compliance unit. The following is the details of the supervision of the Sharia Supervisory Board on the implementation of the Sharia Principles in the collection and distribution of funds as well as services provided during 2018.*

## Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

## *Supervision on Funding Activities*

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai produk penghimpunan dana di bawah ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

*Based on the results of supervision by the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia's funding product, the Sharia Supervisory Board assessed that the funding products below have complied with the fatwa of the National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).*

### Produk Penghimpunan Dana

### *Funding Products*

| Jenis Produk<br>*Type of Products* | Nama Produk<br>*Name of Products* |
|---|---|
| Tabungan<br>*Saving Account* | Tabungan iB Hijrah<br>Tabungan iB Hijrah Haji<br>Tabungan iB Hijrah Rencana<br>Tabungan iB Hijrah Valas<br>Tabungan iB Hijrah Prima<br>Tabungan iB Hijrah Bisnis<br>Tabungan iB Muamalat Sahabat<br>TabunganKu<br>Tabungan Simple iB<br>Corporate Debit Card<br>Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB |
| Giro<br>*Current Account* | Giro iB Hijrah Attijary<br>Giro iB Hijrah Ultima |
| Deposito<br>*Deposit* | Deposito iB Hijrah |

## Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana

## *Supervision on Financing Activities*

Selama tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pengawasan terhadap produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

1. KPR iB Hijrah
2. Pembiayaan Pensiun iB Hijrah
3. Pembiayaan iB Multiguna Hijrah
4. Pembiayaan iB *Asset Refinance* Hijrah
5. Pembiayaan iB Modal Kerja Hijrah
6. Pembiayaan iB Modal Kerja Konstruksi Developer Hijrah
7. Pembiayaan iB Modal Kerja LKS Hijrah
8. Pembiayaan iB Investasi Hijrah
9. Pembiayaan iB Properti Bisnis Hijrah
10. Pembiayaan iB Pembiayaan Rekening Koran Syariah Hijrah
11. Pembiayaan iB Koperasi Segmen Konsumer Hijrah
12. Pembiayaan iB Multifinance Hijrah

*Throughout 2018, the Sharia Supervisory Board also supervised financing product of Bank Muamalat Indonesia as follows:*

1. *KPR iB Hijrah*
2. *Financing Pension iB Hijrah*
3. *Financing iB Multiguna Hijrah*
4. *Financing IB Asset Refinance HIjrah*
5. *Financing IB Modal Kerja Hijrah*
6. *Financing IB Modal Kerja Konstruksi Developer Hijrah*
7. *Financing iB Modal Kerja LKS Hijrah*
8. *Financing iB Investasi Hijrah*
9. *Financing IB Properti Bisnis Hijrah*
10. *Financing IB Pembiayaan Rekening Koran Syariah Hijrah*
11. *Financing IB Koperasi Segmen Konsumer Hijrah*
12. *Financing iB Multifinance Hijrah*

Dewan Pengawas Syariah menilai produk penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

*The Sharia Supervisory Board assessed that the distribution of funds was in accordance with the fatwa of the National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).*

## Pengawasan Terhadap Layanan

## *Supervision on Services Activities*

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap layanan jasa Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

*The Sharia Supervisory Board oversees the services of Bank Muamalat Indonesia as follows:*

| Jenis Layanan<br>*Type of Service* | Nama Layanan<br>*Name of the Services* |
|---|---|
| Remittance<br>*Remittance* | Remittance iB Muamalat<br>Remittance BMI-MayBank<br>Remittance BMI-BMMB<br>Remittance BMI-NCB |
| Trade Finance<br>*Trade Finance* | Bank Garansi<br>Trade Finance – Ekspor<br>Trade Finance – Impor<br>SBLC (Standby L/C)<br>Letter of Credit<br>SKBDN |

| Jenis Layanan<br>*Type of Service* | Nama Layanan<br>*Name of the Services* |
|---|---|
| Layanan Lainnya<br>*Other Services* | Muamalat Cash Management<br>Jasa Layanan Escrow<br>Cash Pick Up & Delivery<br>Muamalat Mobile<br>Internet Banking<br>ATM Muamalat<br>Gerai Muamalat<br>SalaMuamalat<br>Virtual Account/MPOM<br>Muamalat Foreign Exchange<br>Muamalat Multicurrency<br>Muamalat Investment Service<br>Money Market & Fixed Income |

Berdasarkan hasil pengawasan atas layanan jasa Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai layanan jasa tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI).

*Based on the results of supervision on the services of Bank Muamalat Indonesia, Sharia Supervisory Board assessed that the service has been in accordance with the fatwa of the National Sharia Board - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).*

## Uji Petik dan Kunjungan Dewan Pengawas Syariah

Melalui program uji petik, Dewan Pengawas Syariah melakukan kunjungan, pengamatan dan/atau *sharing session* kepada karyawan Bank pada beberapa Kantor Cabang. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode uji petik dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah sebagai *Liaison Officer* Dewan Pengawas Syariah. Rangkaian uji uji petik Dewan Pengawas Syariah diakhiri dengan dengan *sharing session* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada karyawan. Di tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik ke beberapa cabang yaitu:

## *Sampling and Visits of the Sharia Supervisory Board*

*Through the sampling program, the Sharia Supervisory Board conducts visits, observations and/or sharing sessions to Bank employees at several Branch Offices. In addition, the Sharia Supervisory Board also conducts checks on transaction documents to ensure comply with Sharia principles. The examination was conducted by the sampling method assisted by the Sharia Compliance Unit as the Liaison Officer of the Sharia Supervisory Board. The Sharia Supervisory Board test series is concluded by sharing session conducted by the Sharia Supervisory Board to the employees. In 2018, the Sharia Supervisory Board has conducted sampling tests to several branches, namely:*

| Periode<br>*Period* | Cabang<br>*Branch* |
|---|---|
| Semester I 2018<br>*First Semester 2017* | Cabang \| *Branch* Kalimalang |
| | Cabang \| *Branch* Roxy |
| | Cabang \| *Branch* Bintaro |
| | Cabang \| *Branch* Arthaloka |
| | Cabang \| *Branch* Semarang |
| Semester II 2018<br>*Second Semester 2017* | Cabang \| *Branch* Serang |
| | Cabang \| *Branch* Medan |
| | Cabang \| *Branch* Lampung |
| | Cabang \| *Branch* Surabaya Darmo |
| | Cabang \| *Branch* Cilegon |

## *Review, Endorsement* Atas Kebijakan dan *Standard Operational Procedure* (SOP)

Di tahun 2018 Dewan Pengawas Syariah dibantu dengan Unit Kepatuhan Syariah melakukan *review* dan/atau *endorsement* terhadap kebijakan dan prosedur Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI).

## *Review and endorsement the policies and Standard Operational Procedures (SOP)*

*In 2018 DPS is assisted by the Sharia Compliance Unit to review and/or endorsement the policies and procedures of Bank Muamalat Indonesia to comply with the fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).*

# Dewan Komisaris

## *Board of Commissioners*

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

*The Board of Commissioners is the part of the Company whose duty is to carry out supervision in general and/or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to the Directors.*

### Dasar Hukum

Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
7. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

### *Legal Basis*

*The establishment and duties implementation of Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners are based on several provisions as follows:*

1. *The 2007 Law No. 40 on Limited Liability Company.*
2. *The 2008 Law No. 21 on Sharia Banking.*
3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 15/13/PBI/2013.*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning GCG Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
5. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
6. *Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector.*
7. *Bank Muamalat Indonesia's Articles of Association.*

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Pengungkapan Board Manual)

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia yang mencakup Fungsi, Komposisi dan Persyaratan, Pengangkatan dan Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian, Komisaris Independen, Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas, Etika Jabatan, Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris, Komite-Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

### *Board of Commissioners Code of Conduct Guideline (Board Manual Disclosure)*

*The guidelines and code of conduct of the Board of Commissioners are contained in the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia covering Functions, Composition and Requirements, Appointment and Term of Office, Concurrent Positions, Resignation and Termination, Independent Commissioner, Orientation and Capability Improvement Program, Ethics, Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners, Rights and Authorities of the Board of Commissioners, Board of Commissioners Meeting, Work Relationships between Board of Commissioners and Board of Directors, Performance Evaluation of Board of Commissioners, Committees and Secretary to the Board of Commissioners.*

### Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
3. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS.
5. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank, dengan berupaya untuk

### *Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*

*Duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:*

1. *Carry out duties and responsibilities in accordance with GCG principles.*
2. *Work under guidelines and rules that are binding upon each of its members that include at least work time and meeting arrangements.*
3. *Exercise supervision over the implementation of GCG within all business activities of the Bank at all levels of the organization.*
4. *Adhere to the provisions of all applicable regulations, the Bank's Articles of Association and decisions of AGM's.*
5. *Have a good intention by always holding prudential principles and responsibilities in performing their duties in BMI's interests and business and do their best to prevent*

mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan/atau terjadinya kepailitan.

6. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan internal Bank dan memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
8. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Bank.
9. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai rencana bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
11. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
13. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
14. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
15. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Bank Muamalat Indonesia.
16. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
19. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
20. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
22. Menyetujui kebijakan APU & PPT serta mengawasi pelaksanaan program APU & PPT.
23. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Intern sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
24. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Ekstern, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Ekstern.

*losses or stop losses from continuing and to prevent the Bank from experiencing bankruptcy.*

6. *Carry out supervisory roles over the Board of Directors in managing the Bank, including the execution of Corporate Plans, Business Plans as well as the Bank's Articles of Association and General Meeting of Shareholders and all applicable regulations.*
7. *Supervise the Board of Directors to ensure its comply with the Bank's internal regulations and give advise to the Board of Directors with regards to the Bank's management.*
8. *Advise the Board of Directors and all of its staff with regards to management of the Bank.*
9. *Advice the Board of Directors and all of its staff with regard to the preparation of BMI's vision, mission and other strategic plans BMI as stipulated in the Bank's Articles of Association.*
10. *Give advice and suggestion and also approval on Business Plan submitted by Board of Directors.*
11. *Conduct research and review of the reports submitted by BOD and staff, particularly with regard to the specific tasks that have been jointly decided.*
12. *Review the reports submitted by Committees under the Board of Commissioners.*
13. *Keep abreast of the progress of the Bank's activities reported by the Bank's Management or obtained external information released by the media or from other sources.*
14. *Attend work/coordination meetings with the Board of Directors and all of its staffs.*
15. *Endeavor to ensure that the Board of Directors and staff have complied with the provisions of all applicable regulations in managing Bank Muamalat Indonesia.*
16. *Prepare work plans for the current year.*
17. *Monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.*
18. *Monitor the effectiveness of GCG practices, including by organizing regular meetings with the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.*
19. *Establish at least three committees namely Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Audit Committee, and ensure the established committees perform their duties effectively.*
20. *The Board of Commissioners shall carry out its duties and responsibilities independently, in the sense of performing its duties objectively and freely from the pressures and interests of any party, including in relation to each other or relationship with the Board of Directors.*
21. *The Board of Commissioners is required to exercise active oversight of the implementation of the Compliance Function.*
22. *Approve APU & PPT policy and oversee the implementation of APU & PPT programs.*
23. *Assess the effectiveness of the internal control system, by assessing the competence and amount of resources, scope of duties and authority and independence of the Internal Auditor in accordance with the Standards for Implementation of Commercial Bank Internal Audit Function (SPFAIB) issued by Bank Indonesia/Financial Services Authorities.*
24. *Examine the effectiveness of execution of the External Auditor's duties, by assessing the Competence, Independence and scope of duties of the External Auditor.*

## Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris melalui Dewan Komisaris.
3. Pembagian kerja dan keanggotaan Komite di antara para Anggota Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
5. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang memberikan kekuasaan sementara untuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris, jika oleh sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong dan/atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai yang ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## *Rights and Authorities of the Board of Commissioners*

*In performing its duties, the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia has the following rights and authorities:*

1. *Members of the Board of Commissioners, whether jointly or separately, at all times are entitled to enter the buildings and the courtyards or other places used or controlled by the Bank.*
2. *Members of the Board of Commissioners, whether jointly or separately, shall be entitled to inspect the books, letters of evidence, inventory of goods, inspect and match the state of the cash (for verification purposes) and other securities and to know all actions taken by the Board of Directors.*
3. *If necessary, the Board of Commissioners at the expense of the Bank for a limited period of time may seek the assistance of experts to conduct an inspection in accordance with its duties and authorities.*
4. *The Board of Commissioners members shall be entitled to seek an explanation and to question all matters relating to the duties of the Board of Commissioners and Board of Directors, and the Board of Directors shall submit an explanation of all matters asked by the Board of Commissioners.*
5. *Members of the Board of Commissioners shall be entitled to require all information related to the Bank to the Board of Directors, and the Board of Directors has to provide all information pertaining to the Bank as required by the Board of Commissioners.*
6. *The segregation of duties and membership of the Committee among the Commissioners shall be governed by the members of the Board of Commissioners themselves, and for the smooth functioning of the Board of Commissioners may be assisted by the Secretary appointed by the Board of Commissioners at the expense of the Bank.*

## Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

## *Criteria of the Board of Commissioners' Members*

*The requirements for the candidates of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia are as follows:*

1. *Have good character and morals;*
2. *Able to conduct legal action;*
3. *Within 5 (five) years prior to the appointment has never been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who during their term of office:*
   a. *Never held an annual GMS;*
   b. *His/her responsibility as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners is not accepted by the GMS or never present accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners before the General Meeting of Shareholders; and*
   c. *Has ever caused a company with license, approval or registration from the Financial Services Authority fail to fulfill its obligation to submit its Annual Report and/or Financial Report to the Financial Services Authority.*
4. *Has never been convicted of a criminal offense referred to the 2010 Law No. 8 on Criminal Acts of Money Laundering, a criminal offense which is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, within the last 20 (twenty) years before being nominated;*

5. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
7. tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
8. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
9. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
10. memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BMI agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
11. memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko;
12. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
13. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

*5. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations;*
*6. Have a commitment to the developing of a soundness Sharia Bank operations;*
*7. Never been directly or indirectly engaged in misconduct behaviour and ilegal practices, breach of contract and other acts which may be detrimental to the ba where he/she works or worked;*
*8. Not listed in the Disqualified List (DTL);*
*9. Have knowledge in banking and sharia banking that is adequate and relevant to his/her position;*
*10. Have the willingness and ability to supervise the business activities of BMI in accordance with the prudential principles and sharia principles in the field of sharia banking;*
*11. Have knowledge and understanding of risk management implementation;*
*12. Have no non-performing loan/financing record; and*
*13. Has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt, within the last 5 (five) years prior to being nominated.*

## Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia serta Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada periode 1 Januari 2018 - 28 Juni 2018, Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.

Susunan Anggota Dewan Komisaris periode 1 Januari - 28 Juni 2018

## *Membership Composition of the Board of Commissioners*

*The Bank has complied with the composition of number of the Board of Commissioners' members in accordance with the provisions stipulating that the number of the Board of Commissioners' members shall be at least 3 (three) persons and at most equal to the number of the Board of Directors' members, at least 1 (one) member of the Board of Commissioners shall be domiciled in Indonesia and less 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.*

*During the January 1, 2017 - March 30, 2017 period, the Board of Commissioners consists of 4 (four) persons consisting of 2 (two) Independent Commissioners and 2 (two) Commissioners. From the 4 (four) members of the Board of Commissioners, 2 (two) members are Independent Commissioners domiciled in Indonesia.*

*Composition of the Board of Commissioners' Members from January 1 to June 28, 2018*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Dasar Pengangkatan<br>*Appointment Letter* | Tanggal Efektif<br>*Effective Date* |
|---|---|---|---|
| Prof. DR. Anwar Nasution | Komisaris Utama/ Komisaris Independen<br>*President Commissioner/Independent Commissioner* | RUPS Tahunan<br>23 Juni 2014<br>*AGMS June 23, 2014* | 19 Nov 2014<br>*November 19, 2014* |
| Iggi H. Achsien | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | RUPS Tahunan<br>23 Juni 2014<br>*AGMS June 23, 2014* | 25 Nov 2014<br>*November 25, 2014* |
| Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*) | Komisaris<br>*Commissioner* | RUPS Tahunan<br>30 Maret 2017<br>*AGMS March 30, 2017* | - |
| Mohamed Hedi Mejai*) | Komisaris<br>*Commissioner* | RUPSLB Tanggal<br>20 September 2017<br>*EGMS September 20, 2017* | - |
| Edy Setiadi | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | RUPSLB Tanggal<br>20 September 2017<br>*EGMS September 20, 2017* | 2 Maret 2018<br>*March 2, 2018* |

**) efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK*

**) shall be effective after passing the Financial Services Authority's Fit and Proper Test.*

Pada tanggal 28 Juni 2018, Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan RUPS Tahunan yang hasil keputusannya antara lain menyetujui penggantian Komisaris Utama, sehingga komposisi Dewan Komisaris tidak berubah yaitu berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris.

*On June 28, 2018, Bank Muamalat Indonesia held an Annual General Meeting of Shareholders which resulted the replacement of the President Commissioner, so that the composition of the Board of Commissioners did not change; 5 (five) people which consist of 3 (three) Independent Commissioners and 2 (two) Commissioners .*

Susunan Anggota Dewan Komisaris periode 28 Juni 2018 - 31 Desember 2018

*The composition of the Board of Commissioners for the period 28 June 2018 - 31 December 2018*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Dasar Pengangkatan<br>*Appointment Letter* | Masa Jabatan<br>*Term of Office* | Tanggal Efektif<br>*Effective Date* |
|---|---|---|---|---|
| Ilham Akbar Habibie* | Komisaris Utama/ Komisaris Independen<br>*President Commissioner/ Independent Commissioner* | RUPS Tahunan 28 Juni 2018<br>*GMS June 28, 2018* | 1 tahun<br>*1 year* | 26 Maret 2019<br>*March 26, 2019* |
| Iggi H. Achsien | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | RUPS Tahunan 23 Juni 2014<br>*GMS June 23, 2014* | 5 tahun<br>*5 year* | 25 Nov 2014<br>*November 25, 2014* |
| Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**) | Komisaris<br>*Commissioner* | RUPS Tahunan 30 Maret 2017<br>*GMS March 30, 2017* | 2 tahun<br>*2 year* | - |
| Mohamed Hedi Mejai**) | Komisaris<br>*Commissioner* | RUPSLB Tanggal 20 September 2017<br>*AGMS June 20, 2017* | 1,5 tahun<br>*1,5 year* | - |
| Edy Setiadi | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | RUPSLB Tanggal 20 September 2017<br>*AGMS September 20, 2017* | 1,5 tahun<br>*1,5 year* | 2 Maret 2018<br>*March 2, 2018* |

**) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019*
***) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK*

**) Has passed the Fit and Proper Test on 26 March 2019*

***) Shall be effective after passing the Financial Services Authority's Fit and Proper Test.*

## Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perseroan merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Pada periode 2018, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

## The Board of Commissioners Composition Diversity Policy

*The recommendation of the Financial Services Authority as set forth in the Attachment of Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines of Public Company's Corporate Governance provides that the determination of the composition of the Board of Commissioners shall take into account the diversity of skills, knowledge and experience required. The diversity of the composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of Board of Commissioners and individual Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Bank. Such characteristics may be reflected in the determination of the skills, knowledge, and experience required in the implementation of supervisory and advising duties by the Board of Commissioners of the Bank. Compositions that have taken into consideration the needs of the Bank is a positive thing, especially related to decision making in the context of the implementation of supervisory functions undertaken by considering various wider aspects.*

*In the 20189 period, the composition diversity of the Board of Commissioners was reflected in education, work experience and age, which can be seen in the table below:*

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris *Composition Diversity of Board of Commissioners*

| Nama *Name* | Jabatan *Position* | Usia *Age* | Pendidikan *Education* | Pengalaman Kerja *Work Experience* | Keahlian *Expertise* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilham Akbar Habibie *) | Komisaris Utama/ Komisaris Independen<br>*President Commissioner/ Independent Commissioner* | 56 | • MBA Business<br>• Dr.Ing Tehnik<br>• Dipl.Ing Tehnik | • Mengawasi pekerjaan Direksi agar sesuai dgn Rencana Kerja Perusahaan.<br>• Menjalankan operasi Perusahaan agar sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan, termasuk membentuk dan mengawasi Peru Mengawasi/ mengontrol Direksi menjalankan Rencana Kerja Perusahaan.<br>• *Oversee the work of the Directors to fit the Work Plan Company.*<br>• *Operate the Company to be in accordance with the Work Plan Companies, including forming and supervise Peru Supervise/ control the Directors run Company Work Plan.* | Ekonomi bisnis, Tehnik Pesawat, Teknologi Informasi |
| Iggi H. Achsien | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | 42 | • S1 Ekonomi<br>• MBA, Global Leadership Executive<br>• *Bachelor of Economics*<br>• *MBA, Global Leadership Executive* | • Terlibat dalam penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002<br>• terlibat proses penerbitan Sukuk Negara tahun 2008<br>• *involved in the issuance of the Indosat Mudharabah Syariah Bonds in 2002*<br>• *involved in the Government Sukuk issuance in 2008w* | perbankan syariah, pasar modal dan asuransi<br>*Sharia Banking, Capital Market and Insurance* |
| Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**) | Komisaris<br>*Commissioner* | 53 | S1 Administrasi Bisnis<br>*Bachelor of Business Administration* | • Deputy CEO, Boubyan Bank<br>• Board Member, Boubyan Takaful Insurance<br>• Board Member, United Capital Bank (Sudan-Khartoum)<br>• Vice Chairman, Boubyan Capital<br>• Regional Manager, National Bank of Abu Dhabi – Kuwait Branch<br>• Head of Domestic Corporate Banking Division, NBK | Perbankan, Asuransi, Manajemen Investasi Syariah<br>*Banking, Insurance, Sharia Investment Management* |
| Mohamed Hedi Mejai***) | Komisaris<br>*Commissioner* | 49 | • S1 Ekonomi<br>• MBA, Manajemen Strategis dan Keuangan<br>• *Bachelor of Economics*<br>• *MBA, Strategic Management and Finance* | • Direktur of the Enterprise Department, IDB<br>• Chief Executive Officer & Board Member, Oryx Capital Ltd. (OC), Dubai, UAE<br>• Executive Director, Investment & Business Development, IIB, Manama, Kingdom of Bahrain<br>• Division Chief, Investment Operation and Marketing, IDB Group | Ekonomi, Keuangan<br>*Economics, Finance* |
| Edy Setiadi | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | 61 | • S1 Peternakan<br>• S2 Ekonomi Pertanian<br>• *Bachelor of Animal Husbandry*<br>• *Master of Agricultural Economics* | • Deputi Komisioner, IKNB, OJK<br>• Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK<br>• Direktur Eksekutif DPBS, BI<br>• *Deputy Commissioner, IKNB, OJK*<br>• *Head of Department of Islamic Banking, OJK*<br>• *Executive Director of DPBS, BI* | Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank<br>*Banking and Non-Bank Financial Industry* |
| Prof. DR. Anwar Nasution ****) | Komisaris Utama/ Komisaris Independen<br>*President Commissioner/ Independent Commissioner* | 75 | • S1 Ekonomi<br>• S2 Administrasi Publik<br>• S3 Ekonomi<br>• *Bachelor of Economics*<br>• *Master of Public Administration*<br>• *Doctor of Economics* | • Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia<br>• Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia<br>• Dekan Fakultas Ekonomi<br>• Advisory Group International (Shadow-20)<br>• *Chairman of the Indonesia's Audit Board Agency*<br>• *Senior Deputy Governor of Bank Indonesia*<br>• *Dean of the Faculty of Economics of Indonesia University*<br>• *Advisory Group International (Shadow-20)* | Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional<br>*Applied Macro Economics, Monetary Economics and International Economics* |

*) *Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019*

**) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

***) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

****) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018

*) *Has passed the Fit and Proper Test on March 26, 2019*

**) *Appointed through the AGMS on March 30, 2017 and effective after obtaining a determination to pass the Capability and Compliance Assessment from OJK*

***) *Appointed through the EGMS on September 20, 2017 and effective after obtaining a decree passed the OJK Capability and Compliance Assessment*

****) *Stop serving as of June 28, 2018*

## Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali, meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

## *Independence of Board of Commissioners*

*Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia upholds the principle of independence in carrying out its duties and responsibilities and always prioritizes the interests of the Bank above the personal interests of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also keeps the implementation of its duties unaffected by any party.*

*Affiliation between members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Controlling Shareholders, includes:*

1. *Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.*
2. *Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
3. *Affiliation between members of the Board of Directors and the Main Shareholders and/or controllers.*
4. *Affiliation between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and*
5. *Affiliation between members of the Board of Commissioners and the Main and/or controlling Shareholders.*

*Affiliation between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, Controlling Shareholders and other members of the Board of Commissioners can be seen as the table below:*

### Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

### *Affiliation of Board of Commissioners*

| Nama *Name* | Hubungan Keluarga dengan *Family Affiliation* | | | | | | Hubungan Keuangan dengan *Family Affiliation* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dewan Komisaris *Board of Commissioners* | | Direksi *Board of Directors* | | Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders* | | Dewan Komisaris *Board of Commissioners* | | Direksi *Board of Directors* | | Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders* | |
| | Ya *Yes* | Tidak *No* | Ya *Yes* | Tidak *No* | Ya *Yes* | Tidak *No* | Ya *Yes* | Tidak *No* | Ya *Yes* | Tidak *No* | Ya *Yes* | Tidak *No* |
| Ilham Akbar Habibie *) | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v |
| Iggi H. Achsien | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v |
| Edy Setiadi | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v |
| Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**) | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v | v | - |
| Mohamed Hedi Mejai***) | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v | v | - |

*) *Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019*

**) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

***) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

**) Has passed the Fit and Proper Test on 26 March 2019*

***) Appointed through the AGMS on March 30, 2017 and effective after obtaining a determination to pass the Capability and Compliance Assessment from OJK*

****) Appointed through the EGMS on September 20, 2017 and effective after obtaining a decree passed the OJK Capability and Compliance Assessment*

## Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan llingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

1. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
2. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Sejalan dengan regulasi tersebut di atas, maka Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia selain memenuhi persyaratan Dewan Komisaris secara umum, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia baik saat diangkat maupun selama menjabat sebagai Komisaris Independen, sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

## *Independent Commissioner*

*The existence of Independent Commissioners is intended to encourage the creation of a more objective work climate and environment and to place fairness and equity among various interests including the interests of minority shareholders and other stakeholders.*

*In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Bank, Independent Commissioner is a member of Board of Commissioners who has no financial affiliation, management, share ownership and/or family affiliation with fellow members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholder or affiliation with the Bank, which may affect his/her ability to act independently.*

*As mentioned in Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have:*

1. *financial, management, share ownership and/or family relations relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or*
2. *financial relationship and/or relationship of share ownership with the Bank, so that it can support its ability to act independently.*

*Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners The Issuer or Public Company defines an Independent Commissioner as a member of the Board of Commissioners outside the Issuer or Public Company and fulfills the requirements as an Independent Commissioner as follows:*

1. *is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period;*
2. *do not have shares directly or indirectly with the Issuer or Public Company;*
3. *has no Affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the major shareholders of the Issuer or Public Company; and*
4. *does not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company.*

*In accordance with the regulations above, Bank Mualamat's Independent Commissioner have to meet the requirements of the Board of Commissioners in general and must fulfill the requirements as stated in the Bank Muamalat Indonesia Board Manual both when appointed and while serving as an Independent Commissioner, as follows:*

1. *not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company in the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;*

2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
5. wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan bagi calon anggota Komisaris Independen yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia kecuali jabatan sebelumnya sebagai Direksi Bank Muamalat Indonesia yang melakukan fungsi pengawasan.

*2. does not have shares directly or indirectly with the Company;*
*3. has no Affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders;*
*4. does not have a business relationship directly or indirectly related to the Company's business activities; and*
*5. must undergo a cooling off period of at least 6 (six) months for candidates for Independent Commissioners who previously served as members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia except for the previous position as Directors of Bank Muamalat Indonesia who carry out the supervisory function.*

## Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Setiap Komisaris Independen menandatangi surat pernyataan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komsaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

## *Independence Statement of Each Independent Commissioner*

*Each Independent Commissioner signs a statement of not having affiliation with the Bank, a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, or ultimate shareholder of the Bank and has no direct or indirect business affiliation related to the Bank's business activities.*

## Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Adapun rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## *Concurrent Positions of Board of Commissioners*

*Board of Commissioners' Members may only concurrently serve as:*

| Nama<br>*Name* | Posisi di Bank<br>*Position in the Bank* | Posisi di Perusahaan Lain<br>*Position in other Company* | Perusahaan/Badan Organisasi<br>*Company/Organization* | Bidang Usaha<br>*Business Line* |
|---|---|---|---|---|
| Ilham Akbar Habibie *) | Komisaris Utama/ Komisaris Independen<br>*President Commissioner / Independent Commissioner* | Komisaris<br>*Commissioner*<br>Direktur Utama<br>*President Director* | PT. Inter Media Capital Tbk<br>PT. Ilthabi Rekatama | Perusahan Media Keuangan dan Investasi<br>*Financial and Investment Media Company* |
| Iggi H. Achsien | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | | - | - |
| Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**) | Komisaris<br>*Commissioner* | Deputy CEO<br>Board Member<br>Board Member<br>Vice Chairman | Boubyan Bank<br>Boubyan Takaful Insurance<br>United Capital Bank<br>Boubyan Capital | Perbankan \| *Banking*<br>Asuransi \| *Insurance*<br>Perbankan \| *Banking*<br>Investasi \| *Investment* |
| Mohamed Hedi Mejai***) | Komisaris<br>*Commissioner* | Direktur<br>*Director* | IDB | Islamic Bank |
| Edy Setiadi | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* | - | - | - |

*) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019
**) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
***) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

**) Has passed the Fit and Proper Test on 26 March 2019*
***) Appointed through the AGMS on March 30, 2017 and effective after obtaining a determination to pass the Capability and Compliance Assessment from OJK*
****) Appointed through the EGMS on September 20, 2017 and effective after obtaining a decree passed the OJK Capability and Compliance Assessment*

## Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali rapat.

## *Board of Commissioners Meetings*

*In accordance with OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014, the Articles of Association of the Company and the Manual Board of Bank Muamalat Indonesia, the Board of Commissioners must hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months and hold meetings with the Board of Directors at least once in 4 (four) months. During 2018 the Board of Commissioners held 7 (seven) Board of Commissioners meetings and 12 (twelve) meetings with the Board of Commissioners and Directors.*

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

*The frequency and attendance of Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Directors are as follows:*

| No. | Nama *Name* | Rapat *Meeting* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dewan Komisaris (7 kali) *BOC (7 times)* | Tingkat Kehadiran *Attendance Rate* | Dewan Komisaris bersama Direksi (12 kali) *BOC and BOD (12 times)* | Tingkat Kehadiran *Attendance Rate* |
| 1. | Prof. DR. Anwar Nasution *) | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
| 2. | Iggi H. Achsien | 7/7 | 100% | 12/12 | 100% |
| 3. | Edy Setiadi | 7/7 | 100% | 11/12 | 92% |
| 4. | Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**) | 4/7 | 57% | 4/12 | 33% |
| 5 | Mohamed Hedi Mejai***) | 4/7 | 57% | 7/12 | 58% |
| 6 | Ilham Akbar Habibie****) | 4/5 | 80% | 7/11 | 64% |

*) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018
**) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
***) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
****) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019

**) Resign in June 28, 2018*
***) Appointed through the AGMS on March 30, 2017 and will be effective after obtaining a passing determination of the OJK Compliance and Compliance Assessment*
****) Appointed through the EGMS on September 20, 2017 and will be effective after obtaining a passing determination of the Compliance and Compliance Assessment from OJK*
*****) Has passed the Fit and Proper Test on March 26, 2019*

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

*Throughout 2018, the agenda, date and participants of the Board of Commissioners 'Meetings and the Board of Commissioners' Meeting with the Directors are as follows:*

### Rapat Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Meeting*

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Peserta Dewan Komisaris *Members of Board of Commissioners* |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Februari 2018<br>*February 05, 2018* | • Rencana RUPS<br>• *Annual GMS Plan*<br>• Pembahasan mengenai anak perusahaan<br>• *Discussion of subsidiaries* | Prof. DR. Anwar Nasution *)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) |
| 2 | 08 Maret 2018<br>*March 08, 2018* | Proposal *Financing Facility*<br>*Proposal Financing Facility* | Prof. DR. Anwar Nasution *)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Mohamed Hedi Mejai***) |
| 3 | 09 Juli 2018<br>*July 09, 2018* | Amandemen Keanggotaan Komite Level BOC<br>*Change in Membership of the BOC Level Committee* | Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) |

| No. | Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Dewan Komisaris<br>*Members of Board of Commissioners* |
|---|---|---|---|
| 4 | 03 Oktober 2018<br>*October 03, 2018* | Pembahasan hasil RUPS<br>*Discussion of the RUPS agenda* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) |
| 5 | 26 Oktober 2018<br>*October 26, 2018* | Pembahasan Hasil Keputusan RUPS ALIF<br>*Discussion about the Results of Subsidiary's RUPS Decision* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi |
| 6 | 04 Desember 2018<br>*December 04, 2018* | • Pembahasan *Right Issue*<br>• Agenda lainnya<br>• *Discussion of Right Issue*<br>• *Other agendas* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi |
| 7 | 10 Desember 2018<br>*December 10, 2018* | Pembahasan mengenai APU PPT<br>*Discussion about APU - PPT* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**) |

*) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018
**) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
***) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
****) *Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019*

**) Resign in June 28, 2018*
***) Appointed through the AGMS on March 30, 2017 and will be effective after obtaining a passing determination of the OJK Compliance and Compliance Assessment*
****) Appointed through the EGMS on 20 September 2017 and will be effective after obtaining a passing determination of the OJK Compliance and Compliance Assessment*
*****) Has passed the Fit and Proper Test on 26 March 2019*

### Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

### *Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings*

| No. | Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Dewan Komisaris<br>*Board of Commissioners* | Kehadiran (Ya/Tidak)<br>*Attendance (Yes/No)* | Direksi<br>*Board of Directors* | Kehadiran (Ya/Tidak)<br>*Attendance (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6-Feb-2018 | • Pembahasan *Right Issue*<br>• Pemaparan aspek Keuangan<br>• Kepatuhan dan Laporan yang diwajibkan regulasi<br>• Rencana Strategi BMI<br>• Inisiatif Bad Bank dan Good Bank<br>• Beberapa inisiatif New Bank<br>• Informasi terkini IT<br>• *Discussion aboutRight Issue*<br>• *2017 Financial Performance*<br>• *Compliance and regulatory report*<br>• *BMI Strategic Plan*<br>• *Initiatives and Good Bank Bad Bank*<br>• *Some initiatives New Bank*<br>• *IT updates* | Anwar Nasution *)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Dewan Komisaris *Board of Commissioners* | Kehadiran (Ya/Tidak) *Attendance (Yes/No)* | Direksi *Board of Directors* | Kehadiran (Ya/Tidak) *Attendance (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 9-Jul-2018 | • Update Transaksi Permodalan<br>• Update *Bad Bank*<br>• *Capital transaction Update*<br>• *Bad Bank update* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Tidak/No<br>Ya/Yes |
| 3 | 18-Jul-2018 | • Pembahasan rapat dengan OJK<br>• *The meeting with OJK* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Tidak/No | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No |
| 4. | 26-Jul-2018 | • Rencana Permodalan<br>• Persiapan Meeting dengan OJK dan *Majority Shareholders*<br>• *Capital plan update*<br>• *Preparations for Meeting with OJK and Majority Shareholders* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Tidak/No<br>Tidak/No | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 5. | 15-Aug-2018 | • Informasi terkini ALIF<br>• Rencana Permodalan<br>• *ALIF latest info*<br>• *Capital planning* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Tidak/No | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 6. | 23-Aug-2018 | • Agenda rutin rapat Komisaris Independen dengan Direksi<br>• Informasi terkini ALIF<br>• Informasi terkini atas permodalan<br>• *Routine Agenda Meetings of Independent Commissioner and Director*<br>• *ALIF latest info*<br>• *Capital transaction update* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Tidak/No | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 7. | 4-Sep-2018 | • Finalisasi Laporan Ke OJK<br>• *Finalization of the report on improvement plans to OJK* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Tidak/No | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 8. | 10-Oct-2018 | • Action Points<br>• Kinerja Keuangan<br>• Informasi terkini *Good Bank* dan *Bad Bank*<br>• Perkembangan permodalan dan Investor<br>• *Financial performance*<br>• *Update on good corporate & retail segment banks*<br>• *Bad bank and collection updates*<br>• *Development of capital and investors* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes Con-call | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Indra Yurana Sugiarto<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 9. | 12-Nov-2018 | • Publikasi Laporan Keuangan<br>• Penyampaian informasi Sumber Daya Manusia<br>• *Publication of Financial Statements*<br>• *Update on Human Resources* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes Con-call<br>Ya/YesCon-call | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 10. | 22-Nov-2018 | • Rencana Bisnis Bank 2019<br>• *2019 Bank Business Plan* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes (ConCall) | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Dewan Komisaris *Board of Commissioners* | Kehadiran (Ya/Tidak) *Attendance (Yes/No)* | Direksi *Board of Directors* | Kehadiran (Ya/Tidak) *Attendance (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 28-Nov-2018 | • Cost Saving & Efficiency<br>• Update calon investor<br>• Asset Swap Transaction<br>• Update ALIF<br>• *Cost Saving & Efficiency*<br>• *Update potential investors*<br>• *Asset Swap transaction*<br>• *Update ALIF* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Con-call<br>Ya/Yes<br>Con-call | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Herry Syafril<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes |
| 12. | 10-Dec-2018 | • Investor baru, right issue, dan RUPS<br>• persetujuan pendanaan ALIF<br>• Update likuiditas dan antisipasi akhir tahun 2018<br>• update pembiayaan<br>• *New investors, Right Issue and RUPS*<br>• *Approval of ALIF funding*<br>• *Liquidity updates and anticipation towards the end of 2018*<br>• *Financing updates* | Ilham A. Habibie****)<br>Iggi Haruman Achsien<br>Edy Setiadi<br>Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh**)<br>Mohamed Hedi Mejai***) | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes (Con-call)<br>Tidak/No (Memberikan Kuasa kepada Edy Setiadi) | Achmad Kusna Permana<br>Purnomo B. Soetadi<br>Hery Syafril<br>Awaldi<br>Andri Donny` | Ya/Yes<br>Tidak/No<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Tidak/No |

*) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018
**) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
***) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
****) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019

**) Resign in June 28, 2018*
***) Appointed through the AGMS on March 30, 2017 and will be effective after obtaining a passing determination of the OJK Compliance and Compliance Assessment*
****) Appointed through EGMS on September 20, 2017 and will be effective after obtaining a passing determination of the OJK Capability and Compliance Assessment*
*****) Has passed the Fit and Proper Test on 26 March 2019*

## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Bank Muamalat Indonesia

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank Muamalat Indonesia, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

## *Shareholdings of Board of Commissioners in Bank Muamalat Indonesia and Other Companies*

*Until 31 december 2018, no member of the board of commissioners Bank Muamalat indonesia which has shares either on behalf of myself and together 5 ( above percent from five percent ) paid-up capital in Bank Muamalat Indonesia, as presented in the table below:*

| Nama *Name* | Jumlah Kepemilikan Saham *Total Share Ownership* | | Jumlah Nominal Saham *Total Share Amount* | |
|---|---|---|---|---|
| | Seri A *Serie A* | Seri B *Serie B* | Seri A *Serie A* | Seri B *Serie B* |
| Prof. DR. Anwar Nasution *) | - | - | - | - |
| Dr Ing Ilham Akbar Habibie, MBA | - | - | - | - |
| Iggi H. Achsien | - | - | - | - |
| Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh | - | - | - | - |
| Mohamed Hedi Mejai | - | - | - | - |
| Edy Setiadi | - | - | - | - |

## Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

## *Competence Development Program of the Board of Commissioners*

*In order to improve competence, throughout 2017 the Board of Commissioners has attended and participated in various workshops and seminars as follows:*

| No. | Nama *Name* | Jabatan *Position* | Workshop | Penyelenggara *Organizer* | Waktu *Date* | Tempat *Venue* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilham A. Habibie *) | Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner / Independent Commissioner* | Islamic Banking for Executive | Muamalat Institue | 6 Aug 2018 | Jakarta |
| | | | Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 | LSPP | 11 Aug 2018 | Jakarta |
| | | | Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 | LSPP | 27 Aug 2018 | Jakarta |
| 2. | Anwar Nasution**) | Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner / Independent Commissioner* | - | - | - | - |
| 3. | Iggi H Achsien | Komisaris Independen *Independent Commissioner* | Fact - Finding Mission on Swiss Fintech | Kedutaan Besar RI | 6 – 10 Nov 2018 | Swiss |
| 4. | Abdulsalam Mohammad Al-Saleh***) | Komisaris *Commissioner* | - | - | - | - |
| 5. | Mohamed Hedi Mejai****) | Komisaris *Commissioner* | | | | -- |
| 6. | Edy Setiadi | Komisaris Independen *Independent Commissioner* | | | | |

*) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 26 Maret 2019
**) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018
***) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

**) Has passed the Fit and Proper Test on March 26, 2019*

***) Stop served as of June 28, 2018*
****) Appointed by the AGMS on March 30, 2017 and effective upon the determination of pass Fit and Proper Test of the FSA*

*****) Appointed by the EGMS on September 20, 2017 and effective upon the determination of pass Fit and Proper Test from OJK*

## Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi, saran dan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris juga disampaikan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi penting selama tahun 2018, diantaranya:

1. Merekomendasikan fokus bisnis Bank Muamalat Indonesia ke depan harus memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan rentabilitas dan penyelesaian pembiayaan secara agresif, efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis yang moderat harus terefleksi dalam peningkatan profitabilitas Perseroan di masa yang akan datang.
2. Mendorong manajemen untuk mempercepat terealisasinya rencana penambahan modal tahun 2019 dan memperbaiki kualitas aset pembiayaan.
3. Berupaya meningkat pendapatan bank untuk memperbaiki kinerja bank.
4. Mendorong manajemen untuk melakukan strategi percepatan pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan strategi optimalisasi modal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.
5. Perlunya peningkatan penyaluran dana serta perbaikan kualitas portofolio pembiayaan secara *bankwide*.

## *Board of Commissioners Supervision and Recommendation*

*In keeping with its core functions, the Board of Commissioners to supervise the performance of Bank Muamalat Indonesia, as well as recommendations, suggestions and advice to the Board of Directors. Supervision and advice The Board also conveyed through the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee, Corporate Governance Committee and Integrated Governance Committee discussed at board meetings. As for some important recommendations for 2018, including:*

1. *Bussiness focus recommendation of Bank Muamalat Indonesia in the future should have a positive impact on profitability improvement and completion of financing aggressively, operational efficiency and business growth should moderate to reflect the Company's improved profitability in the future.*
2. *Encourage management to accelerate the realization of a capital increase in 2019 and improve the quality of financial assets.*
3. *Attempting to increase revenue flow to improve the bank's performance.*
4. *Encourage management to accelerate business growth strategy in line with the capital optimization strategy with regard to the precautionary principle bank.*
5. *Need for increased distribution of funds and improvement of the quality of the financing portfolio bankwide.*

6. Meningkatkan memonitoring aspek kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku.
7. Melakukan *review* dan menyempurnakan ketentuan internal bank yang berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah.
8. Memberikan arahan atas realisasi pemantauan rekomendasi hasil audit.
9. Memantau perkembangan inisiatif optimalisasi dan efisiensi biaya melalui *cost efficiency* program yang telah dilakukan sehingga pencapaian indikator profitabilitas Bank semakin meningkat.

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai mekanisme antara lain penilaian oleh RUPS dan *Self-Assessment* GCG.

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan yang mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Assessment* GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Self-Assessment* GCG dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria *Self-Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG Dewan Komisaris dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 20 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 8 indikator.

Faktor-faktor positif ketiga aspek yang ada pada Dewan Komisaris sesuai dengan *Self-Assessment* GCG Periode 31 Desember Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan ketentuan.
2. Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

*6. Improve monitoring of bank compliance aspects of the regulations in force.*
*7. To review and enhance the bank's internal regulations that could potentially lead to financing problems.*
*8. Provide direction on the realization of the monitoring of audit recommendations.*
*9. Monitor the development of optimization initiatives and cost efficiency through cost efficiency program that has been done so that the achievement of the Bank's profitability indicators increased.*

## *Performance Assessment of the Board of Commissioners*

*Performance Assessment of the Board of Commissioners is conducted through various mechanisms, among others, by the AGMS and GCG self-assessment.*

## *Performance Assessment of the Board of Commissioners By the GMS*

*The Performance assessment of the Board of Commissioners shall be conducted by the Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders at the time of submission of the Bank Muamalat Indonesia's Annual Report which includes the report of the supervisory duties of the Board of Commissioners, which based on the report of the GMS provides full (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners for action supervision made within the Fiscal Year ending at the end of the year.*

### *Performance Assessment of the Board of Commissioners through GCG Assessment*

*The performance evaluation of Board of Commissioners was conducted through the GCG Self Assessment held every semester and reported to the Financial Services Authority.*
*The Board of Commissioners' Self Assessment Criteria related to its GCG implementation is divided into 3 (three) aspects namely Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome. Governance structure consists of 14 indicators, Governance Process consists of 20 indicators while Governance Outcome consists of 8 indicators.*

*The positive factors of the three aspects of the Board of Commissioners in accordance with the GCG Self Assessment for the Period of December 31, 2017 are as follows:*

*1. The composition of Bank Muamalat Indonesia's Board of Commissioners is in accordance with the provisions.*
*2. Members of Bank Muamalat Indonesia's Board of Commissioners has adequate competence and relevant to his/her position to carry out his/her dutiesw and responsibilities and able to implement the competencies he/she has in the implementation of duties and responsibilities.*
*3. The Board of Commissioners already has guidelines for the implementation of its duties and responsibilities in accordance with its functions.*
*4. The appointment and/or replacement of members Bank Muamalat Indonesia's Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors has complied with the provisions and has taken into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.*

5. Rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan Bank.

6. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris secara rutin telah menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai ketentuan rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
7. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank.
8. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek GCG, antara lain melengkapi keanggotaan komite level Dewan Komisaris dan menyelenggarakan rapat-rapat sesuai ketentuan.
9. Rapat-rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan telah menetapkan beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian dan fokus perbaikan Bank Muamalat Indonesia.

*5. Coordination meetings between the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia have been conducted as a form of supervision on the Bank's activities.*
*6. In order to carry out its duties and functions, the Board of Commissioners has routinely held meetings and joint meetings with the Board of Directors in accordance with the provisions of the meeting to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors.*
*7. Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia has approved and supervised the Bank's Business Plan.*

*8. The Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia has made efforts in order to improve the implementation of GCG aspect, including to complement membership of Board of Commissioners-level committees and to hold meetings in accordance with the provisions.*
*9. Meetings of the Audit Committee, Risk Oversight Committee, Corporate Governance Committee and Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia have been conducted in accordance with the provisions and have established several recommendations of concern and focus of improvement of Bank Muamalat Indonesia.*

# Organ Pendukung Dewan Komisaris

## *Board of Commissioner's Supporting Organ*

Komite pada level Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia dibentuk sesuai pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan, Bank Muamalat Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap peningkatan penerapan tata kelola perusahaan, Bank Muamalat Indonesia telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terpisah dengan Komite Tata Kelola Perusahaan.

*The Committee on the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia, established in accordance with Article 11 of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Sharia, that in order to support the effective implementation of the tasks and responsibilities, the Board shall forming at least:*

1. *Audit Committee;*
2. *Risk Oversight Committee;*
3. *Remuneration and Nomination Committee.*

*As Major Entities in the financial conglomerate, Bank Muamalat Indonesia also have an obligation to establish Integrated Governance Committee as stipulated in article 14 of the Financial Services Authority regulation No. 18/POJK.03/2014 on the Application of Integrated Governance for Financial conglomerate which stipulates that in order to support the effectiveness implementation BoC Top Entities are required to establish the Integrated Governance Committee.*

*In order to meet the commitment to improving the implementation of corporate governance, Bank Muamalat Indonesia has established the Integrated Governance Committee separate from the Corporate Governance Committee.*

## Komite Audit

## *The Audit Committee*

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank.

*BOC established an Audit Committee to assist the Board in evaluating the implementation of internal audit and monitoring of follow-up results of the audit in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the Bank's financial reporting process.*

### Dasar Pembentukan Komite Audit

### *Basic Establishment of Audit Committee*

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

*Establishment of Audit Committee based on the following rules:*

1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
2. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
3. *Regulation of the Financial Services Authority No. 55 / POJK.04/2015 dated December 29, 2015 on the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee.*
4. *Articles of Association of the Bank on the role and authority of the Board of Commissioners.*

### Piagam Komite Audit

### *Audit Committee Charter*

Komite Audit Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 02 Mei 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

*The Audit Committee of Bank Muamalat Indonesia has had a charter that governs the structure and membership, membership requirements, duties and responsibilities, authorities, meetings, tours of duty, working time and reporting. The Charter has been last updated on May 2, 2017 and will be updated in accordance with applicable regulatory developments as well as the current condition of the Bank.*

## Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

## *Future Tasks of the Audit Committee*

*Audit Committee member terms should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for one term.*

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas Komite Audit sesuai Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Menunjuk, menetapkan fungsi-fungsi dan standar Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, yang meliputi perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit, serta memastikan independensi fungsi audit intern.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
6. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

## *Duties and Responsibilities of Audit Committee*

*The task of the Audit Committee according to the Charter of the Audit Committee include:*

1. *To evaluate the implementation of internal audit in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.*
2. *Appoint, assign functions and standards of the External Auditor (Public Accounting Firm).*
3. *To evaluate the implementation of the tasks performed by the internal audit function, including planning the audit, the audit scope, the audit process and reporting the results of the audit, as well as ensuring the independence of the internal audit function.*
4. *To evaluate the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the audit findings and/or recommendations of the supervision of the Financial Services Authority, the internal auditor, the Sharia Supervisory Board and/or the external auditor, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
5. *Reviewing the financial information that will be issued by the Bank to the public and/or authorities, among others, financial statements, projections, and other statements related to the Bank's financial information.*
6. *Reviewing compliance with laws and regulations relating to the activities of the Bank.*
7. *Provide independent opinion in the event of disagreements between management and accounting for services rendered.*
8. *Provide recommendations to the Board on the appointment of accountants based on independence, the scope of the assignment, and fees.*
9. *Examine complaints relating to accounting and financial reporting processes of the Bank.*
10. *Reviewing and providing advice to the Board in relation to the potential conflict of interest of the Bank.*

## Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## *Authority of the Audit Committee*

*In performing its duties, the Audit Committee has the authority as set out in the Charter of the Audit Committee as follows:*

1. *Accessing documents, data, and information about the Bank's employees, funds, assets and resources of the company are required.*
2. *Communicating directly with the employees, including the Board of Directors and those who perform the function of internal audit, risk management, and accounting-related duties and responsibilities of the Audit Committee.*
3. *Involve independent parties outside the Audit Committee members needed to assist the performance of its duties.*
4. *Perform other powers granted by the Board of Commissioners.*

## Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

## *Audit Committee Membership Requirements*

*Terms of the Audit Committee from the Commissioner of the Independent and Independent Parties as set out in the Charter of the Audit Committee include:*

1. *Required to have integrity and good financial reputation.*
2. *Are required to have the ability, knowledge, experience in accordance with the field work, and able to communicate well.*
3. *Mandatory understand financial statements, in particular the company's business-related services or the Bank's business activities, the audit process, risk management, and legislation in the field of capital market and legislations related.*
4. *Shall comply with the code of conduct established by the Audit Committee of the Bank.*
5. *Are required to have at least one member whose educational background and expertise in the field of accounting and/or finance.*
6. *Are required to have at least one member who has expertise in the field of Islamic banking.*
7. *Not a person in a public accounting firm, the Office of Legal Counsel, Office of Public Appraisal Service or others who provide assurance services, services of non-assurance, appraisal and/or services other consultation to the Issuer or Public Company concerned within 6 (six) last month.*
8. *Not the people who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervise the activities of the Bank within six (6) months unless the Independent.*
9. *Do not have a direct or indirect stake in the Bank.*
10. *Do not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholders of Bank Muamalat Indonesia.*
11. *Do not have a good business relationship, directly or indirectly related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.*

## Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Sesuai pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen;
2. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
3. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Pada periode tahun 2018, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Audit yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003/B/DIR-KPTS/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

## *Structure and Membership of the Audit Committee*

*In accordance with Article 36 Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit, Member of the Audit Committee consist of at least:*

1. *An Independent Commissioner;*
2. *An independent party with expertise in the field of financial accounting; and*
3. *An independent party with expertise in the field of Islamic banking.*

*On period in year 2018, there were changes in the structure and membership of the Audit Committee previously established by the Decree of Directors No. 003/B/DIR-KPTS/III/2018 dated February 1, 2018 on the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Anwar Nasution | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Iggi H Achsien | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Achmad Arifin | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |
| Herbudhi S. Tomo | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |

Sehubungan dengan penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyesuaikan keanggotaan Komite Audit dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 023/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

*In connection with the replacement of members of the Board of Commissioners, Board of Commissioners adjust the Audit Committee and has been established by the Decree of Directors No. 023/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018 on the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Iggi H Achsien | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Achmad Arifin | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |
| Herbudhi S. Tomo | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |

Perubahan keanggotaan Komite Audit tersebut tetap sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

*The Audit Committee membership changes fixed in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit and the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 date December 29, 2015 on the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee.*

## Independensi Komite Audit

## *Audit Committee Independence*

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

*All members of the Audit Committee from the independent party has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.*

## Profil Komite Audit

## *Profile of the Audit Committee*

Profil anggota Komite Audit disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

*Profile member of the Audit Committee are presented in the appendix in this report.*

## Rapat Komite Audit

## *Audit Committee Meeting*

Selama tahun 2018, Komite Audit telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Audit, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

*During 2018, the Audit Committee has held 10 (ten) meetings with at least one meeting agenda for each meeting, including a discussion of the minutes of meetings, as well as things that need to be followed up from the previous meeting and some other discussion. Based on the minutes of the meeting of the Audit Committee, the presence of each member of the Audit Committee at the meeting are as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Total Rapat<br>*Total Meeting* | Jumlah Kehadiran<br>*Total Meeting* | Persentase<br>*Percentage* |
|---|---|---|---|---|
| Anwar Nasution*) | Ketua<br>*Chairman* | 5 | 5 | 100% |
| Iggi H. Achsien**) | Ketua/Anggota<br>*Chairman/Member* | 10 | 9 | 90% |
| Achmad Arifin | Anggota<br>*Member* | 10 | 10 | 100% |
| Herbudhi S. Tomo | Anggota<br>*Member* | 9 | 9 | 100% |

*) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018
**) Sesuai SK Direksi No. 023/B/DIR-KPTS/VIII/2018 Tentang Komite Audit, telah ditunjuk Iggi H. Achsien sebagai Ketua Komite Audit sejak tanggal 9 Agustus 2018

**) Stop served as of June 28, 2018*
***) In accordance with the Decree of Directors No. 023/B/DIR-KPTS/VIII/2018 About the Audit Committee, has been appointed IGGI H. Achsien as Chairman of Audit Committee since August 9, 2018*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Audit dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan audit laporan keuangan tahun 2017.
2. Pokok-pokok temuan audit 2017, Rencana Kerja dan anggaran Internal Audit Tahun 2017.
3. Presentasi KAP tentang Hasil Audit Laporan Keuangan per 31 Des 2017 dan per Desember 2017.
4. Pemaparan pembiayaan yang besar dan hasil temuan audit triwulan I 2018.
5. Presentasi tindak lanjut *Fraud* tahun 2017 dan 2018.
6. Presentasi tentang progress report nasabah pembiayaan.
7. Laporan Hasil Audit semester I 2018.
8. Kegiatan Audit Internal sampai dengan 31 Agustus 2018.
9. Pembahasan penunjukkan KAP untuk Laporan Keuangan BMI per 31 Desember 2018.
10. Pembahasan beberapa laporan hasil audit.

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Selama tahun 2018 Komite Audit telah melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Review Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank
   Sebagai perangkat kerja Dewan Komisaris maka Komite Audit secara rutin melakukan review dan pengawasan terhadap rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Bank, melalui penelaahan terhadap komponen Pengendalian Internal dan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit. Hasil review dimaksud dipergunakan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal, maupun melaksanakan operasional Bank.

2. Review Aktivitas Fungsi Internal Audit
   Review terhadap aktivitas fungsi Internal Audit dimaksudkan sebagai proses penilaian atas peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi terhadap rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

   Perencanaan Audit Tahunan di-review oleh Komite Audit dan Laporan Hasil Audit oleh fungsi Internal Audit secara rutin dikomunikasikan dalam rapat bulanan kepada Komite Audit. Selama tahun 2018, fungsi Internal Audit telah melaksanakan audit sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) obyek audit atau 195% dari targetnya, yang meliputi 22 (dua puluh dua) audit khusus (yang tidak ditargetkan) dan audit reguler sebanyak 17 (tujuh belas) obyek audit.

   Beberapa Rekomendasi yang disampaikan untuk peningkatan pengendalian internal Bank diantaranya:
   a. Pelaksanaan audit agar lebih difokuskan pada area yang memiliki risiko tinggi, yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
   b. Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak manajemen untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.
   c. Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
   d. Untuk meningkatkan mutu audit, maka perlu dilakukan pemberian training pengetahuan operasional perbankan bagi auditor yang ada, serta mengikutsertakan pada pendidikan sertifikasi internal audit seperti QIA, CIA, CBA, CISA, dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

*Discussion undertaken by the Audit Committee meetings during 2018, are as follows:*

1. *The development of financial audit in 2017.*
2. *The principal findings of the audit in 2017, the Work Plan and budget of the Internal Audit Year 2017.*
3. *KAP Presentation of Results of Audit of Financial Statements as at 31 Des, 2017 and by December 2017.*
4. *Exposure large financing and results of the audit findings of the first quarter of 2018.*
5. *Follow-up presentations Fraud in 2017 until 2018.*
6. *Presentation of the progress report customer financing.*
7. *Audit Reports of the first half of 2018.*
8. *Internal Audit activities until August 31, 2018.*
9. *KAP's discussion of the appointment of BMI per Financial Statements December 31, 2018.*
10. *Discussion of some of the audit report.*

## *Report of the Audit Committee*

*During 2018, the Audit Committee has carried out several activities in order to carry out the functions, duties and responsibilities, as follows:*

1. *Effectiveness Review of Internal Control Systems Bank*
   *As a working tool the BOC the Audit Committee regularly review and oversight of the design and implementation of the Internal Control System the Bank, through a review of the components of Internal Control and Audit Reports conducted by the Internal Audit function. The results of the reviews is used as an input to the Board to provide guidance to the management of the establishment and implementation of internal control systems, as well as carry out the operations of the Bank.*

2. *Activities Review Internal Audit Function*
   *Review on the activities of the Internal Audit function is intended as a process of assessment of the role and implementation of the Internal Audit function in evaluating the design and implementation of internal control systems, risk management and governance processes.*

   *Annual Audit Plan reviewed by the Audit Committee and the Audit Report by the Internal Audit function regularly communicated in the monthly meeting of the Audit Committee. During 2018, the Internal Audit function has carried out audits at least 39 (thirty-nine) the object of the audit or 195% of the target, which included 22 (twenty two) special audit (untargeted) and regular audits by 17 (seventeen) objects audit.*

   *Recommendations were submitted to the increase in the Bank's internal control include:*
   a. *The audit to be more focused on areas that have a high risk, such as credit risk, market risk and operational risk.*
   b. *The weaknesses found during the audit to be submitted to the management for immediate follow-up.*
   c. *Follow-up results of the audit to be monitored its implementation so as to provide added value to the achievement of the objectives of the Bank.*
   d. *To improve audit quality, it is necessary to the provision of training for the auditor's knowledge of banking operations there, as well as engage in internal audit certification education like QIA, CIA, CBA, CISA, and certification organized by the Banking Profession Certification Institute (LSPP).*

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal
   Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap proses pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, mengawasi dan mereview pelaksanaan auditnya dan mereview hasil audit laporan keuangan.

   Untuk audit laporan keuangan posisi 31 Desember 2018, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), dengan beberapa pertimbangan sesuai wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pertimbangan *fee* yang diajukan, serta mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017.

4. Review Penyajian Laporan Keuangan Publikasi.
   Komite Audit secara periodik melakukan review terhadap laporan keuangan triwulanan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan review tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran figure yang disajikan.

5. Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2018
   Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2018 adalah sebanyak 10 kali, dari rencana sebanyak 6 kali, yaitu 5 kali rapat dengan Internal Audit, 1 kali dengan Anti *Fraud* dan 4 kali dengan KAP.

3. *Supervision of the Implementation of External Audit*
   *The Audit Committee shall supervise the implementation of External Audit, through the evaluation of the selection process will be public accounting firm commissioned to audit the annual financial statements, supervise and review the implementation of the audit and review of the results of the audit of financial statements.*

   *To audit the financial statements of December 31, 2018, has been appointed Public Accountant Office of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dada & Ali (DBSD & A), with some consideration of the appropriate authority granted by the General Meeting of Shareholders and consideration fee proposed, and referring to the Circular Financial Services authority No. 36/SEOJK.03/2017 dated July 11, 2017.*

4. *Presentation Review Condensed Financial Statements.*
   *The Audit Committee periodically conduct a review of the quarterly financial reports prior to publication. Implementation of the review is intended to assess the reasonableness of the figures presented.*

5. *Meetings Realization of the Audit Committee for 2018*
   *Implementation of the Audit Committee Meeting for the year 2018 is as much as 10 times, of the plan for 6 times, ie 5 meetings with Internal Audit, 1 time with Anti Fraud and 4 times with KAP.*

## Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.

## *Committee Oversight Risk*

*Risk Oversight Committee established by the Board of Commissioners in order to support the effective implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in particular in order to evaluate the risk management policy and implementation, and evaluation of the implementation of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.*

### Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

### *Basic Formation Risk Oversight Committee*

*Establishment of Risk Monitoring Committee based on the following rules:*
1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
2. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
3. *Articles of Association of the Bank on the role and authority of the Board of Commissioners.*

### Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat, pelaporan kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

### *Risk Monitoring Committee Charter*

*Risk Monitoring Committee of Bank Muamalat Indonesia has had a charter that governs the structure and membership, membership requirements, future tasks, duties and responsibilities, authorities, ordinances and procedures for the meetings, reporting to the Board of Commissioners. Risk Monitoring Committee Charter last updated on September 19, 2017 and will be updated in accordance with applicable regulatory developments as well as the current condition of the Bank.*

### Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam

### *Term Risk Oversight Committee*

*The term of members of the Risk Oversight Committee is not longer than the term of office of the Board of Commissioners as*

Piagam Komite Pemantau Risiko dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas Komite Pemantau Risiko sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi manajemen risiko.
7. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
3. Jika diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Memiliki integritas, reputasi keuangan, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

*set out in the Charter of the Risk Oversight Committee and may be reelected only for 1 (one) next period.*

## *Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee*

*The task of the Risk Oversight Committee according to the Charter of the Risk Oversight Committee are:*

1. *To evaluate the risk management policies and strategies prepared management.*
2. *To evaluate the suitability of risk management policies and the implementation of the policy.*
3. *To evaluate the implementation of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.*
4. *To evaluate the steps taken by the Board of Directors in order fulfill authority Financial Services and other laws and regulations applicable in the context of the implementation of the precautionary principle, especially with regard to risk management.*
5. *To evaluate the requests for proposals the Board of Directors relating to the transaction or business activity that is beyond the authority of the Board of Directors to be used by the Board of Commissioners as a basis for decision making.*
6. *To evaluate the risk management organizational structure.*
7. *To evaluate the risk profile report and report both internally and externally Bank to comply with applicable regulations.*
8. *Ensuring that risk management units meet the criteria of independence in carrying out its duties and responsibilities.*

## *Authority Risk Oversight Committee*

*In performing its duties, the Risk Oversight Committee has the authority as set out in the Charter of the Risk Oversight Committee as follows:*

1. *Accessing documents, data, and information about the Bank's employees, funds, assets and resources of the company are required.*
2. *Communicating directly with the employees, including the Board of Directors, those who run the risk management function and other parties related to the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee.*
3. *If necessary, the Risk Oversight Committee may engage independent parties outside the Risk Monitoring Committee to assist in carrying out their duties.*
4. *Perform other powers granted by the Board of Commissioners.*

## *Risk Oversight Committee Membership Requirements*

*Risk Monitoring Committee membership requirements are derived from Independent Commissioners and Independent Parties as set out in the Charter of the Risk Oversight Committee are:*

1. *Have integrity, financial reputation, good character and moral values.*
2. *Have the educational background, skills, knowledge and adequate experience in finance and banking.*
3. *Being able to work together and have good communication skills as well as providing sufficient time to carry out their duties.*

4. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko secara umum.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank Muamalat Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.
12. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank Muamalat Indonesia.

*4. Have adequate knowledge regarding good corporate governance and risk management in general.*
*5. Have a sufficient knowledge of the laws and regulations in banking and legislation related.*
*6. Willing continuously improving competence through education and training.*
*7. Not a person in a public accounting firm, the Office of Legal Counsel, Office of Public Appraisal Service or others who provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to Bank Muamalat Indonesia within 6 (six) months.*
*8. Do not have a direct or indirect stake in Bank Muamalat Indonesia.*
*9. Do not have a personal interest that may pose a conflict of interest on the Bank Muamalat Indonesia.*
*10. Do not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholders of Bank Muamalat Indonesia.*
*11. Do not have a good business relationship, directly or indirectly related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.*
*12. Do not the one who came from employees of Bank Muamalat Indonesia.*

## Struktur dan Keanggotaan

Sesuai pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
1. seorang Komisaris Independen;
2. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan
3. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Pada periode 2018, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 004/B/DIR-KPTS/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

## *Structure and Membership*

*In accordance with Article 34 Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit, Member of Risk Monitoring Committee consist of at least:*
*1. An Independent Commissioner;*
*2. An independent party with expertise in the field of Islamic banking; and*
*3. An independent party with expertise in the field of risk management.*

*In the period of 2018, there were changes in the structure and membership of the Risk Oversight Committee of Bank Muamalat Indonesia previously been established by the Decree of Directors No. 004/B/DIR-KPTS/III/2018 dated February 1, 2018 of the Risk Oversight Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with membership as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Iggi H. Achsien | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh | Anggota<br>*Member* | Komisaris<br>*Commissioner* |
| Anwar Nasution | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Abdulwahhab Abed | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |
| Dece Kurniadi | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |

Sehubungan dengan penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyesuaikan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 024/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

*In connection with the replacement of members of the Board of Commissioners, Board of Commissioners adjust Membership Risk Monitoring Committee and has been established by the Decree of Directors No. 024/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018 of the Risk Oversight Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with membership as following:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Edy Setiadi | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh | Anggota<br>*Member* | Komisaris<br>*Commissioner* |
| Iggi H. Achsien | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Abdulwahhab Abed | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |
| Dece Kurniadi | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |

## Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

## *The independence of Risk Oversight Committee*

*All members of the Risk Oversight Committee which comes from an independent party has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.*

## Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Audit disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

## *Risk Oversight Committee Profile*

*Profile member of the Audit Committee are presented in the appendix to this report.*

## Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama periode tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pemantau Risiko, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat adalah sebagai berikut:

## *Risk Oversight Committee Meeting*

*During the period of 2018, the Risk Oversight Committee has held 6 (six) meetings with at least one meeting agenda for each meeting, including a discussion of the minutes of meetings, as well as things that need to be followed up from the previous meeting and some other discussion. Based on the minutes of the meeting of the Risk Oversight Committee, the presence of each member of the Risk Oversight Committee in the meeting are as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Total Rapat<br>*Total Meeting* | Jumlah Kehadiran<br>*Total Attendance* | Persentase<br>*Percentage* |
|---|---|---|---|---|
| Edy Setiadi | Ketua<br>*Chairman* | 4 | 4 | 100% |
| Iggi H. Achsien **) | Ketua/Anggota<br>*Chairman/Member* | 6 | 5 | 84% |
| Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh | Anggota<br>*Member* | 6 | 5 | 84% |
| Anwar Nasution *) | Anggota<br>*Member* | 2 | 2 | 100% |
| Abdulwahhab Abed | Anggota<br>*Member* | 6 | 4 | 67% |
| Dece Kurniadi | Anggota<br>*Member* | 6 | 4 | 67% |

*) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018
**) Sesuai SK Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/VIII/2018 Tentang Komite Pemantau Risiko, telah ditunjuk Edy Setiadi sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 9 Agustus 2018

**) Stop served as of June 28, 2018*
***) In accordance with the Decree of Directors No. 024/B/DIR-KPTS/VIII/2018 About the Risk Oversight Committee, has been appointed Edy Setiadi as the Chairman of the Risk Oversight Committee since August 9, 2018*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan bank berdasarkan Profil Risiko posisi Desember 2017.
2. Profil Risiko Bank Muamalat Indonesia per Maret 2018.
3. Membangun kembali infrastruktur risiko yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.
4. Performance portofolio bad bank.
5. Tindak lanjut perbaikan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank.
6. Evaluasi pembiayaan Korporasi.
7. Proyeksi atas profil risiko Desember 2018.

*Discussion undertaken by the Risk Monitoring Committee meetings during 2018, are as follows:*

1. *Of the bank's risk profile is based on the position in December 2017.*
2. *Risk profile of Bank Muamalat Indonesia per March 2018.*
3. *Rebuilding a strong risk infrastructure to support sustainable business growth.*
4. *Performance portfolio of bad banks.*
5. *Follow-up improvements to the rating of the bank.*
6. *Corporate financing evaluation.*
7. *Projections on the risk profile in December 2018.*

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

## *Report of the Risk Oversight Committee*

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Komite, yang dibuat setahun sekali mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite.

*During 2018, the Risk Monitoring Committee has been carrying out activities in accordance with the Work Plan Committee, which is made once a year, referring to the duties and responsibilities of the Committee as contained in the Charter Committee.*

## Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

## *Meeting Implementation of Risk Oversight Committee*

Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) rapat Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

*During 2018, the Risk Oversight Committee has held 6 (six) Risk Monitoring Committee meetings in accordance with the provisions of the charter of the Risk Oversight Committee.*

### Hal-Hal Penting yang Dibahas dalam Rapat Komite Pemantau Risiko

### *The Important Things Were Discussed in the Meeting Risk Oversight Committee*

1. Tingkat Kesehatan Bank
   Bank telah melakukan *Self-Assessment* tingkat kesehatan bank periode Juni dan September 2018 dengan memperhatikan 4 (empat) komponen utama yaitu Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Profitabilitas dan Permodalan. Tingkat Kesehatan Bank merupakan masalah yang selalu didiskusikan pada setiap pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko. Bank agar melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank.

   *1. Bank Health Level*
   *Bank has conducted a self-assessment of the bank between June and September 2018 with attention to 4 (four) main components namely Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Profitability and Capital. Banks is an issue that is always discussed at every session of the Risk Oversight Committee meeting. Bank in order to make efforts to improve the health of banks.*

2. Profil Risiko Bank
   Bank agar memberikan *concern* pada tiga jenis risiko, sebagai berikut:
   a. Risiko operasional pada aspek sumber daya manusia, kelemahan dalam hal kontrol dan pengawasan serta kesadaran risiko dan budaya risiko.
   b. Risiko likuiditas memiliki pada rasio aset likuid terhadap simpanan non-inti dan konsentrasi simpanan non-inti.
   c. Risiko kredit terkait tingkat NPF, aset pembiayaan berkualitas rendah, dan jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi.

   Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk memantau dan meningkatkan portofolio *bad bank*, antara lain:
   a. Melakukan pertemuan mingguan untuk memantau kondisi terkini kinerja *bad bank* pada setiap segmen.
   b. Menetapkan strategi *collection*, termasuk meningkatkan jumlah mitra balai lelang swasta.

   Pengawasan pembiayaan berkualitas rendah agar dilakukan oleh Direktur terkait dan dipantau secara berkala.

   *2. The Risk Profile*
   *Bank to give concern to the three types of risk, as follows:*
   *a. Operational risk aspects of human resources, weaknesses in terms of control and supervision and risk awareness and risk culture.*
   *b. Liquidity risk have the liquid assets to deposits ratio of non-core and non-core deposits concentration.*
   *c. Credit risk related to the level of NPF, low-quality financial assets, and the amount of financing restructured.*

   *Several initiatives have been taken to monitor and improve the portfolio of bad banks, among others:*
   *a. Conducting weekly meetings to monitor the current condition of the bank bad performance in each segment.*
   *b. Establish collection strategies, including increasing the number of private auction house partners.*

   *Low-quality financing supervision to be carried out by the relevant Director and periodically monitored.*

3. Beberapa *concern* yang harus ditingkatkan adalah:
   a. Bank perlu memiliki sistem *alert* untuk mengingatkan pemenuhan dokumen yang telah jatuh tempo.
   b. Bank harus berhati-hati dalam menyediakan pembiayaan untuk kegiatan bisnis yang bukan bisnis inti nasabah.

4. Inisiatif dan Rencana Tindakan Terkait dengan Profil Risiko Bank

   Beberapa rencana tindakan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko Bank. Beberapa contoh tindakan yang diambil oleh Bank meliputi:
   a. Dalam aspek risiko kredit, Bank telah mempercepat penyelesaian *bad bank* melalui penambahan balai lelang swasta.
   b. Bank sedang dalam proses meningkatkan proses pembiayaan *end to end*, yang meliputi peningkatan dokumentasi, serta untuk meningkatkan target pasar untuk segmen korporasi.
   c. Dalam aspek risiko operasional, Bank, antara lain, telah memprakarsai program *Operational Risk Champion* (ORION), untuk memperkuat tiga lini pertahanan dalam risiko operasional.
   d. Dalam aspek risiko likuiditas, Bank telah mengembangkan beberapa program untuk meningkatkan pendanaan dengan insentif, khususnya di segmen Retail dan melakukan upaya untuk menerbitkan produk pendanaan alternative.
   e. Dalam hal risiko reputasi, Bank akan mengembangkan sistem dan aplikasi sehingga penanganan keluhan pelanggan dapat dilakukan secara komprehensif.

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Nominasi dan Remunerasi guna menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan Sistem Nominasi dan Remunerasi telah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara teratur dan konsisten, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi mengenai kesesuaian antara sistem Nominasi dan Remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di internal Bank dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Ketentuan peraturan yang berlaku.

### Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

*3. Some concern that should be improved are:*
   *a. Banks need to have a system of alerts to remind the fulfillment of a document that has matured.*
   *b. Banks should be careful in financing providing for business activities that are not core business customers.*

*4. Initiative and Action Plan Related to the Bank's risk profile*

*Several action plans have been made to improve the quality of risk management of the Bank. Some examples of actions taken by the Bank include:*
   *a. In the aspect of credit risk, the Bank has accelerated the settlement of bad bank through additional private auction.*
   *b. The Bank is in the process of improving the financing process end to end, including improving the documentation, as well as to increase the target market for the corporate segment.*
   *c. In the aspect of operational risk, the Bank, among others, has initiated a program of Operational Risk Champion (ORION), to strengthen the three lines of defense in operational risk.*
   *d. In the aspect of liquidity risk, the Bank has developed several programs to increase funding with incentives, particularly in the retail segment and make the effort to publish alternative funding products.*
   *e. In terms of reputation risk, the Bank will develop systems and applications so that customer complaint handling can be done comprehensively.*

## *Nomination and Remuneration Committee*

*BOC have established a Nomination and Remuneration Committee to assess, monitor, evaluate and ensure that the implementation of the System of the Nomination and Remuneration Committee are running as expected and in accordance with the applicable provisions regularly and consistently, provide recommendations to the Board on the results of the evaluation of the compatibility between systems Nomination and Remuneration with the implementation of the policy on the internal Bank and perform other duties given by the Board of Commissioners along still within the scope of duties and obligations hereunder BOC regulations.*

### *Forming the Basis of the Nomination and Remuneration*

*Establishment of Nomination and Remuneration Committee based on the following rules:*
1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
2. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated 30 April, 2010 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
3. *Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 dated December 2014 on the NRC Public Company.*
4. *Articles of Association of the Bank on the role and authority of the Board of Commissioners.*

## Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, masa tugas, persyaratan keanggotaan, rapat komite, kode etik, tugas dan tanggung jawab, hubungan dengan pihak-pihak terkait, program kerja, pelaporan, remunerasi dan anggaran dan evaluasi kinerja. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

## *Nomination and Remuneration Committee's Charter*

*Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia has had a charter that governs the structure and membership, tenure, membership requirements, committee meetings, the code of ethics, duties and responsibilities, relationships with stakeholders, work programs, reporting, remuneration and budget and performance evaluation , Nomination and Remuneration Committee Charter last updated on September 19, 2017 and will be updated in accordance with applicable regulatory developments as well as the current condition of the Bank.*

## Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

## *The Period of the Nomination and Remuneration Committee's Tasks*

1. *Term of office of the Nomination and Remuneration Committee is not longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the statutes.*
2. *Nomination and Remuneration Committee members shall be appointed for specified and may be reappointed.*
3. *Replacement of the Nomination and Remuneration Committee members who did not come from the Board of Commissioners made no later than 60 (sixty) days from the Nomination and Remuneration Committee members referred can no longer perform its function.*

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
   b. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
   g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

2. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

## *Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee*

*Nomination and Remuneration Committee has the role of helping the implementation of the tasks of the Board and is responsible to the Board of Commissioners, with details as follows:*

1. *Related to nomination policies:*
   *a. Provide recommendations to the Board regarding the systems and procedures and/or replacement of members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.*
   *b. Propose candidates who qualify as members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners to be submitted to the AGMS.*
   *c. Provide recommendations to the Board regarding policies and criteria required in the process of nomination and performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.*
   *d. Assist the Board to assess the performance of members of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners based on benchmarks that had been developed as an evaluation.*
   *e. Provide recommendations to the Board regarding the capacity building program of the Directors and/or member of the Board of Commissioners.*
   *f. Provide recommendations to the Board of Commissioners on prospective members of the Board of Commissioners, Directors and/or the Sharia Supervisory Board.*
   *g. Provide recommendations to the Board regarding the independent candidate who would be a member of the Committee.*

2. *Related to remuneration policies*
   *a. To evaluate the remuneration policy.*
   *b. To evaluate the suitability of the remuneration policy to the implementation of the policy.*

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:
1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset.
3. Kewajaran dengan peer group.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

## Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Bank Muamalat Indonesia.
2. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:
1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Bank Muamalat Indonesia secara umum.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
   a. Peraturan Perundang-undangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan, perbankan, *Good Corporate Governance*).
   b. Proses bisnis perbankan syariah.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki sikap yang independen, objektif dan profesional.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko maupun pengendalian.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia, seperti:
   a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan staf dan pegawai atau Jajaran Manajemen Bank Muamalat Indonesia.
   b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Bank Muamalat Indonesia, pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan perundang- undangan maupun peraturan lain yang berlaku.

c. *Provide recommendations to the Board regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, Executive Officers and employees as a whole.*

*Nomination and Remuneration Committee in performing its duties and responsibilities associated with at least the remuneration policy shall take into account:*
1. *Financial performance.*
2. *Fulfillment formation Allowance for Assets.*
3. *Fairness to the peer group.*
4. *Consideration of long-term goals and strategies of the Bank.*

## *Authority of Nomination and Remuneration Committee*

*In performing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has the authority as follows:*
1. *Accessing documents, data and information required from Bank Muamalat Indonesia.*
2. *If necessary, the Nomination and Remuneration Committee may involve independent outside members of the Nomination and Remuneration Committee to assist the implementation of their duties.*
3. *Perform other powers granted by the Board of Commissioners.*

## *Membership Requirements of Nomination and Remuneration Committee*

*Terms of the Nomination and Remuneration Committee membership from the Commissioner of the Independent and Independent Parties as set out in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee are:*
1. *Nomination and Remuneration Committee members together have a balance between expertise and experience with a background of broad understanding of business processes in general Muamalat.*
2. *Nomination and Remuneration Committee members are required to have integrity, good character and moral values.*
3. *Members of the Nomination and Remuneration Committee has the competence and experience in the field:*
   a. *Legislation (in-depth understanding of the concept and practice of legislation, banking, Good Corporate Governance).*
   b. *Islamic banking business processes.*
4. *Nomination and Remuneration Committee members must have the attitude of an independent, objective and professional.*
5. *Nomination and Remuneration Committee members must have the dedication, a good understanding of the organization, business environment, risk assessment and control.*
6. *Nomination and Remuneration Committee members must have good communication skills.*
7. *Nomination and Remuneration Committee members do not have interest/private linkages that may cause negative impacts and conflicts of interest on the Bank Muamalat Indonesia, such as:*
   a. *Is concerned by blood and by marriage to the second degree either vertically or horizontally with the staff and employees or Board of Management of Bank Muamalat Indonesia.*
   b. *Have links with partner of Bank Muamalat Indonesia, other parties are prohibited by statutory provisions and other applicable regulations.*

8. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen wajib memenuhi syarat:
   a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank Muamalat Indonesia, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
   b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
   c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.

*8. Nomination and Remuneration Committee members are derived from independent parties must fulfill the following requirements:*
   *a. Do not have affiliation with Bank Muamalat Indonesia, a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or majority shareholder of Bank Muamalat Indonesia.*
   *b. Have experiences related to the Nomination and/or Remuneration Committee.*
   *c. Do not have concurrent positions as other committee members of the Bank Muamalat Indonesia.*

## Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

## *Structure and Membership of the Nomination and Remuneration Committee*

Sesuai pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari:
1. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
2. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

*In accordance with Article 35 Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit, Member of the Nomination and Remuneration Committee at least consist of:*
*1. 2 (two) Independent Commissioners; and*
*2. an Executive Officer in charge of human resources.*

Selain itu, pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
   a. anggota Dewan Komisaris;
   b. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
   c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

*In addition, Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 of the Nomination and Remuneration Public Company stipulates that Nomination and Remuneration Committee members consist of at least 3 (three) members, provided that:*
*1. 1 (one) chairman and members, who are Independent; and*

*2. other members may come from:*
   *a. The Board of Commissioners' members;*
   *b. those who come from outside the Public Company in question; or*
   *c. those who occupy managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.*

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 006/B/DIR-KPTS/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

*As for the structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia has been established by the Decree of Directors No. 006/B/DIR-KPTS/II/2018 dated January 31, 2018 concerning the Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Anwar Nasution | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Iggi H Achsien | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Edy Setiadi | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Mohamed Hedi Mejai | Anggota<br>*Member* | Komisaris<br>*Commissioner* |
| Sri Juni Kuntari | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |
| Riksa Prakoso | Anggota<br>*Member* | Pejabat Eksekutif Bank<br>*Bank's Executive Officers* |

Sehubungan dengan penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyesuaikan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 025/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat

*In connection with the replacement of members of the Board of Commissioners, Board of Commissioners adjust the membership of the Nomination and Remuneration Committee and has been established by the Decree of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018 of the Nomination and*

Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

*Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with membership as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Iggi H Achsien | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Edy Setiadi | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Mohamed Hedi Mejai | Anggota<br>*Member* | Komisaris<br>*Commissioner* |
| Sri Juni Kuntari | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent party* |
| Riksa Prakoso | Anggota<br>*Member* | Pejabat Eksekutif Bank<br>*Bank's Executive Officers* |

## Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

## *Independence of the Nomination and Remuneration Committee*

*Nomination and Remuneration Committee members from the independent party has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.*

## Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

## *Profile NRC*

*Profile members of the Nomination and Remuneration Committee are presented in the appendix to this report.*

## Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat adalah sebagai berikut:

## *Nomination and Remuneration Committee Meeting*

*During 2018, the Nomination and Remuneration Committee has held 5 (five) meetings with at least one meeting agenda for each meeting, including a discussion of the minutes of meetings, as well as things that need to be followed up from the previous meeting and some other discussion. Based on the minutes of the meeting of the Nomination and Remuneration Committee, the presence of each member of the Nomination and Remuneration Committee in the meeting are as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Total Rapat<br>*Total Meeting* | Jumlah Kehadiran<br>*Total Attendance* | Persentase<br>*Percentage* |
|---|---|---|---|---|
| Iggi H Achsien *) | Ketua<br>*Chairman* | 5 | 5 | 100% |
| Anwar Nasution**) | Ketua<br>*Chairman* | 3 | 3 | 100% |
| Edy Setiadi | Anggota<br>*Member* | 5 | 5 | 100% |
| Mohamed Hedi Mejai | Anggota<br>*Member* | 5 | 5 | 100% |
| Sri Juni Kuntari | Anggota<br>*Member* | 5 | 5 | 100% |
| Riksa Prakoso | Anggota<br>*Member* | 5 | 5 | 100% |

*) Sesuai SK Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VIII/2018 Tentang Komite Pemantau Risiko, telah ditunjuk Iggi H Achsien sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 9 Agustus 2018

**) Berhenti menjabat per tanggal 28 Juni 2018

**) In accordance with the Decree of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VIII/2018 About the Risk Oversight Committee, has been appointed IGGI H Achsien as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee since the date of August 9, 2018*

***) Stop served as of June 28, 2018*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai penunjukan Direksi baru
2. Pembahasan mengenai usulan nama kandidat anggota komisaris independen dan komisaris Utama
3. Pembahasan pemberhentian komisaris Utama
4. Pembahasan pemberhentian Direksi
5. Penetapan pejabat sementara Komisaris Utama
6. Update mengenai struktur organisasi Bank
7. Update mengenai VESPa II (*Voluntary Employment Separation Program* II)

*Discussion undertaken by the Nomination and Remuneration Committee meetings for 2018, as follows:*

1. *The discussion on the appointment of a new Board of Directors*
2. *Discussion of the proposed name of the candidates for the independent directors and commissioners Top*
3. *Discussion dismissal of commissioners Top*
4. *Discussion on the dismissal of the Board of Directors*
5. *Determination of the acting Commissioner*
6. *Update on the organizational structure of the Bank*
7. *Update on the Vespa II (Voluntary Separation Employment Program II)*

### Laporan Pelaksanaan Tugas Nominasi dan Remunerasi

### *The Nomination and Remuneration Report*

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi, latar belakang dan pengalaman, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Direktur Operasional dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi, latar belakang dan pengalaman calon untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Memberikan masukan terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan masukan atas rencana pelaksanaan program *Voluntary Employment Separation Program* II yang akan dilakukan.

*During 2018, the Nomination and Remuneration Committee has been carrying out activities and provide some recommendations are as follows:*

1. *Provide an assessment and recommendations to the Board on candidates for the Board of Commissioners to consider the integrity, expertise, competence, background and experience, for further discussed in the General Meeting of Shareholders (GMS).*
2. *Provide an assessment and recommendations to the Board on the appointment of the Director of Operations to consider the integrity, expertise, competence, background and experience of candidates for further discussed in the General Meeting of Shareholders (GMS).*
3. *Provide input regarding changes to the Board of Commissioners.*
4. *Provide feedback on program implementation plan Employment Voluntary Separation Program II will do.*

## Komite Tata Kelola Perusahaan

## *Corporate Governance Committee*

Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

*Corporate Governance Committee formed by the Board of Commissioners with the purpose of assisting the Board in ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in all business activities of the Bank at all levels of the organization.*

### Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan

### *Basic Formation of Corporate Governance Committee*

Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

*Formation of Corporate Governance Committee based on the following rules:*

1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
2. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
3. *Articles of Association of the Bank on the role and authority of the Board of Commissioners.*

### Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan

### *Corporate Governance Committee Charter*

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur prinsip-prinsip GCG, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat komite, masa tugas, waktu kerja, dan pelaporan. Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan

*Corporate Governance Committee Charter Bank Muamalat Indonesia have had the governing principles of good corporate governance, structure and membership, membership requirements, duties and responsibilities, authority, committee meetings of duty, working time, and reporting. Corporate Governance Committee*

terakhir dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

*Charter last updated on September 19, 2017 and will be updated in accordance with applicable regulatory developments as well as the current condition of the Bank.*

## Masa Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

## *Corporate Governance Committee's Tasks*

*The term of Corporate Governance Committee members should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for one term.*

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.
2. Memastikan pelaksanaan kebijakan GCG dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia.
3. Secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan GCG.
5. Mengkaji laporan *Self-Assessment* GCG dan laporan tahunan GCG yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian *endorsement* Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.
7. Menyusun dan mengkinikan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat Indonesia.

## *Duties and Responsibilities of Corporate Governance Committee*

*Corporate Governance Committee has the role of helping the implementation of the tasks of the Board and is responsible to the Board of Commissioners, with details as follows:*

1. *Conduct an evaluation of the structure, governance and policy framework GCG Bank Muamalat Indonesia.*
2. *Ensuring the implementation of GCG policy in the activities of Bank Muamalat Indonesia.*
3. *Periodically review and assess the implementation of corporate governance principles of Bank Muamalat Indonesia and deliver recommendations for improvement to the Board of Commissioners.*
4. *Submit a report to the Board of Commissioners of Bank activities that are not in accordance with the implementation of GCG.*
5. *Reviewing reports self assessment GCG GCG and annual reports issued by Bank Muamalat Indonesia in order to ensure transparency and accuracy of the report and recommend improvements to the Board.*
6. *Delivering the recommendation in order to award endorsement BOC statements and policies of GCG GCG Bank Muamalat Indonesia.*
7. *Develop and update the Corporate Governance Committee charter periodically.*
8. *Maintain confidentiality of all documents, data and information of Bank Muamalat Indonesia.*

## Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan.
3. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## *Authority of Corporate Governance Committee*

*In performing its duties, the Corporate Governance Committee has the authority as follows:*

1. *Accessing documents, data, and information about the Bank's employees, funds, assets and resources of the company are required.*
2. *Communicate directly with employees, including directors and other parties related to duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee.*
3. *If necessary, the Corporate Governance Committee may engage independent parties outside the Corporate Governance Committee members needed to assist the performance of its duties.*
4. *Perform other powers granted by the Board of Commissioners.*

## Persyaratan Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan

Persyaratan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan adalah:

1. Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

## *Membership Requirements of Corporate Governance Committee*

*Membership Requirements of Corporate Governance Committee from the Independent Commissioners and Independent Parties as set out in the Charter of Corporate Governance Committee are:*

1. *Required to have integrity and good financial reputation.*
2. *Required to have the ability, knowledge, experience in accordance with the field work, and well to communicate.*

3. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance,* jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

*3. Shall to comply with the code of conduct set by the Bank.*
*4. Willing continuously improving competence through education and training.*
*5. Not a person in a public accounting firm, the Office of Legal Counsel, Office of Public Appraisal Service or others who provide assurance services, services of non-assurance, appraisal and/or services other consultation to the Issuer or Public Company concerned within 6 (six) last month.*
*6. Not a person who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervise the activities of the Bank within 6 (six) months unless the Independent.*
*7. Do not have a direct or indirect stake in Bank Muamalat Indonesia.*
*8. Do not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholders of Bank Muamalat Indonesia.*
*9. Do not have a good business relationship, directly or indirectly related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.*

## Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/B/DIR-KPTS/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

## *Membership Structure and Corporate Governance Committee*

*The structure and membership of the Committee on Corporate Governance established by the Board of Directors Decree No. 005/B/DIR-KPTS/II/2018 dated January 31, 2018 on Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Iggi H Achsien | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Edy Setiadi | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Mohamed Hedi Mejai | Anggota<br>*Member* | Komisaris<br>*Commissioner* |
| Sri Hartati Rahayu | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent Party* |

Sehubungan dengan penggantian anggota Dewan Komisaris, Di bulan Agustus 2018, Dewan Komisaris menyesuaikan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 026/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

*In August 2018, the Board of Commissioners adjust Membership Corporate Governance Committee and has been established by the Decree of Directors No. 026/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018 concerning Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with membership as following:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Edy Setiadi | Ketua<br>*Chairman* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Iggi H Achsien | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen<br>*Independent Commissioner* |
| Mohamed Hedi Mejai | Anggota<br>*Member* | Komisaris<br>*Commissioner* |
| Sri Hartati Rahayu | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent Party* |

## Independensi Komite Tata Kelola Perusahaan

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

## *Corporate Governance Committee Independence*

*Corporate Governance Committee member who comes from an independent party has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.*

## Profil Komite Tata Kelola Perusahaan

Profil anggota Komite Tata Kelola Perusahaan disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

## *Profile of Corporate Governance Committee*

*Profile Corporate Governance Committee members are presented in the appendix to this report.*

## Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Kehadiran dari masing-masing anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat adalah sebagai berikut:

## *Corporate Governance Committee Meeting*

*During 2018, Corporate Governance Committee has held 2 (two) meetings with at least one meeting agenda for each meeting, including a discussion of the minutes of meetings, as well as things that need to be followed up from the previous meeting and some other discussions. Presence of each member of the Committee on Corporate Governance in the meeting are as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Total Rapat<br>*Total Meeting* | Jumlah Kehadiran<br>*Total Attendance* | Persentase<br>*Percentage* |
|---|---|---|---|---|
| Edy Setiadi | Ketua<br>*Chairman* | 2 | 2 | 100% |
| Iggi H Achsien *) | Ketua/Anggota<br>*Chairman/Member* | 2 | 2 | 100% |
| Mohamed Hedi Mejai | Anggota<br>*Member* | 2 | 2 | 100% |
| Sri Hartati Rahayu | Anggota<br>*Member* | 2 | 2 | 100% |

*) Sesuai SK Direksi Nomor 026/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Edy Setiadi ditetapkan sebagai Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan sejak tanggal 9 Agustus 2018

**) In accordance with the Board of Directors Decree No. 026/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018 on Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Edy Setiadi designated as Chairman of the Corporate Governance Committee since August 9, 2018*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Pemenuhan kelengkapan anggota komite level Dewan Komisaris.
3. Pemenuhan rapat Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris.
4. Penyusunan jadwal rapat selama 1 (satu) tahun buku.
5. Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan anggota Dewan Komisaris.
6. Kewajiban penyampaian laporan evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP atas laporan keuangan posisi akhir tahun ke OJK.
7. Perlunya penyusunan kebijakan remunerasi serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.
8. Laporan tindak lanjut atas hasil rapat Komite Tata Kelola Perusahaan sebelumnya.

*Discussion undertaken by the Corporate Governance Committee meetings during 2018, are as follows:*

1. *Fulfillment of Compliance and Corporate Governance.*
2. *Fulfillment of the completeness of the committee members the Board of Commissioners.*
3. *Fulfillment of board meetings and the Committee of the Board of Commissioners.*
4. *Preparation of the meeting schedule for 1 (one) financial year.*
5. *Process Fit and Proper Test Commissioners.*
6. *The obligation to submit an evaluation report by the accounting firm audit the financial statements to the year-end position of the FSA.*
7. *The need for the preparation of the remuneration policy and the implementation of regular evaluation.*
8. *Follow-up report on the meeting of the previous Corporate Governance Committee.*

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Perusahaan telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris selama tahun 2018 antara lain:

1. Mengkomunikasikan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Dewan Komisaris yang masih berjalan kepada OJK.
2. Menyesuaikan keanggotaan komite level Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
3. Direksi menyusun kebijakan remunerasi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi.
4. Perlu dilakukan program induksi terutama kepada Komisaris dari luar negeri terkait dengan regulasi di Indonesia.
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh KAP atas laporan keuangan posisi akhir tahun ke OJK.
6. Menjaga dan memenuhi beberapa rasio terkait aspek kepatuhan terhadap regulasi.
7. Agar disusun jadwal rapat 1 (satu) tahun ke depan beserta agendanya untuk rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, komite-komite level Dewan Komisaris dan komite-komite level Direksi serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dan DPS.

## *Report of the Committee on Corporate Governance*

*During 2018, Corporate Governance Committee has conducted activities refer to the duties and responsibilities of the Committee as contained in the Charter Committee. Some of the activities and recommendations of the Corporate Governance Committee to the Board during 2018 include:*

1. *Communicating the Fit and Proper Test candidates for the Board of Commissioners are still running to the FSA.*
2. *Adjusting the level of the committees Board in relation to changes in the composition of the Board of Commissioners.*
3. *Directors remuneration policy formulation and the Board of Commissioners to supervise the implementation of remuneration policies.*
4. *Induction program needs to be done, especially to the Commissioner of overseas-related regulations in Indonesia.*
5. *BOC evaluation of the audit by the firm to the financial statements year end position to the FSA.*
6. *Maintain and comply with certain ratios compliance with regulatory related aspects.*
7. *To be arranged meeting schedule 1 (one) year ahead along with the agenda for the meeting of the Board of Commissioners, Directors, DPS, committees of the Board of Commissioners and the Board of Directors level committees and a joint meeting of the Board of Commissioners along with the Board of Directors and DPS.*

## Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola dalam konglomerasi keuangan sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

## *Integrated Governance Committee*

*BOC have established Integrated Governance Committee aims to assist the Board of Bank Muamalat Indonesia as Major Entities in monitoring the implementation of corporate governance in the financial conglomerate in accordance with the Integrated Governance Policies, laws and regulations in force and the principles of sharia.*

## Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

## *Basic Formation Integrated Governance Committee*

*Establishment of Audit Committee based on the following rules:*

1. *Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 18/POJK.03/2014 regarding Implementation of Integrated Governance for Financial conglomerate.*
2. *Circular of the Financial Services Authority No. 15/SEOJK.03/2015 on the Application of Integrated Governance for Financial conglomerate.*

## Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, sekretaris komite, rapat, kuorum dan keputusan komite, pemanggilan, kehadiran dan pelaksanaan rapat komite, keputusan di luar rapat komite, masa tugas, serta kajian berkala dan pelaporan. Piagam Komite Tata Kelola

## *Integrated Governance Committee Charter*

*Corporate Governance Committee Integrated Bank Muamalat Indonesia has had a charter that governs the structure and membership, duties and responsibilities, the secretary of the committee, meetings, quorum and the committee's decision, calling, presence and implementation committee meeting, a decision outside committee meetings, tours of duty, as well*

Terintegrasi terakhir dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

*as periodic review and reporting. Integrated Governance Committee Charter last updated on September 19, 2017 and will be updated in accordance with applicable regulatory developments as well as the current condition of the Bank.*

## Masa Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Entitas Utama dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

## *Future Integrated Governance Committee's Tasks*

*The term of Integrated Governance Committee members should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners Top Entity as set out in the Articles of Association Main Entity and may be re-elected only for one term.*

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

## *Duties and Responsibilities of Integrated Governance Committee*

*Integrated Governance Committee's tasks appropriate with Governance Committee Charter are:*

1. *Evaluating the implementation of Integrated Governance, among others through the assessment of the adequacy of internal controls and the implementation of the compliance function in an integrated manner; and*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners Prominent Entities for the improvement of Integrated Governance Guidelines.*

## Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 055/B/DIR-KPTS/XI/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

## *Structure and Membership Committee Integrated Governance*

*The structure and membership of the Integrated Governance Committee has been established by the Decree of the Board of Directors last No. 027/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018 on Integrated Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Keterangan<br>*Information* |
|---|---|---|
| Iggi H. Achsien | Ketua (merangkap anggota)<br>*Chairman (and member)* | Komisaris Independen BMI<br>*Independent Commissioner BMI* |
| Dr. H. Oni Sahroni | Anggota<br>*Member* | DPS BMI<br>*DPS BMI* |
| Sri Hartati Rahayu | Anggota<br>*Member* | Pihak Independen<br>*Independent Party* |
| Maulana Ibrahim | Anggota<br>*Member* | Komisaris Independen ALIF<br>*Independent Commissioner ALIF* |

*) telah mengundurkan diri dari Komisaris Independen ALIF bulan Oktober 2018

**) Has resigned from the Independent Commissioner ALIF in October 2018*

## Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

## *Integrated Governance Committee Independence*

*All members of the Integrated Governance Committee which comes from an independent party has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.*

### Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Tata Kelola Terintegrasi disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

### *Integrated Governance Committee Profile*

*Integrated Governance member profile presented in the appendix on this report.*

## Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

## *Integrated Governance Committee Meeting*

*During 2018, the Integrated Governance Committee has held 2 (two) meetings with at least one meeting agenda for each meeting, including a discussion of the minutes of meetings, as well as things that need to be followed up from the previous meeting and some other discussion. Based on the minutes of the meeting Integrated Governance Committee, the presence of each member of the Audit Committee at the meeting are as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Total Rapat<br>*Total Meeting* | Jumlah Kehadiran<br>*Total Attendance* | Persentase<br>*Percentage* |
|---|---|---|---|---|
| Iggi H. Achsien | Ketua<br>*Chairman* | 2 | 2 | 100% |
| Dr. H. Oni Sahroni | Anggota<br>*Member* | 2 | 2 | 100% |
| Sri Hartati Rahayu | Anggota<br>*Member* | 2 | 2 | 100% |
| Maulana Ibrahim | Anggota<br>*Member* | - | - | 0% |

*) telah mengundurkan diri dari Komisaris Independen ALIF bulan Oktober 2018

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Laporan hasil audit ALIF oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
2. Pembahasan terkait penilaian sendiri Tata Kelola ALIF.
3. Ketentuan dan persiapan RUPS.
4. Pembahasan mengenai kondisi ALIF.

**) Has resigned from the Independent Commissioner ALIF in October 2018*

*Discussion undertaken by the Integrated Governance Committee meetings during 2018, are as follows:*

1. *Audit report by the Internal Audit Unit Integrated of ALIF.*
2. *The discussion on its own assessment of ALIF Governance.*
3. *Provision and preparation of the AGM.*
4. *Discussion about ALIF conditions.*

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2018 antara lain:

1. ALIF agar melakukan evaluasi terhadap penyaluran pembiayaan.
2. ALIF agar melakukan komunikasi dengan OJK sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPS ALIF.
3. ALIF memenuhi kepengurusan agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan baik.
4. ALIF agar menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
5. ALIF agar memenuhi beberapa parameter yang belum dipenuhi dalam *Self-Assessment* ALIF.

## *Report of the Integrated Governance Committee*

*During 2018, the Integrated Governance Committee has conducted activities refer to the duties and responsibilities of the Committee as contained in the Charter Committee. Some of the activities and recommendations of the Integrated Governance Committee during 2018 include:*

1. *ALIF have to evaluate the distribution of funding.*
2. *ALIF have to communicate with the FSA in relation to the implementation of the GMS ALIF plan.*
3. *ALIF fullfiled the management in order to run their businesses properly.*
4. *ALIF have to follow up on audit recommendations Integrated Internal Audit Unit.*
5. *ALIF have to fullfiled some of the parameters that have not fullfiled in the ALIF self-assessment.*

# Direksi

## *The Board of Directors*

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

*The Board of Directors is the organ of the company which is authorized and fully responsible for the management of the company for the benefit of the company in accordance with the purposes and objectives of the company and to represent the company, both inside and outside the court in accordance with its rules. In performing its duties, the Board of Directors is accountable to the AGM. Accountability of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of the Company management accountability in accordance with the principles of good corporate governance.*

### Dasar Hukum

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Direksi Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

### *Legal Basis*

*Establishment and operation of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia assignment based on some of the following conditions:*

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.*
2. *Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking.*
3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 on Islamic Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 15/13/PBI/2013.*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Islamic Business Unit.*
5. *Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Listed Company.*
6. *Regulation of the Financial Services Authority No. 46/POJK.03/2017 on the Implementation of Commercial Bank Compliance Function.*
7. *Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.*

### Pedoman Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi tertuang dalam *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia yang mencakup Fungsi, Komposisi dan Persyaratan, Pengangkatan dan Masa Jabatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian, Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas, Independensi (Kemandirian) Direksi, Etika Jabatan, Tugas dan Kewajiban Direksi, Hak dan Wewenang Direksi, Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi, Pendelegasian Wewenang di antara Direktur Perusahaan, Pembagian Tugas Direksi, Rapat Direksi, Komite-Komite Direksi, Hubungan Kerja, Hubungan Dengan Profesi Pasar Modal dan Penggunaan Saran Profesional.

*Board Manual* disusun berdasarkan, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

### *Working Guidelines for Directors*

*Guidelines and work rules the Board of Directors set out in the Board Manual Bank Muamalat Indonesia which include functions, composition and conditions, Appointment and Term of Office, Resignation and Termination, Program Orientation and Improvement Capability, Independence (Independence) Board of Directors, the Ethics Position, Duties and Liabilities of Directors, rights and Privileges of Directors, Corporate Management Policy Determination by the Board of Directors, the Delegation of Authority between the Company Director, division of Tasks Board of Directors, meeting of the Board of Directors Committees, Labor Relations, Relationships and Capital Market Professional Use Professional advice.*

*Manual Board organized by the provisions of the Statutes, regulations and the provisions of the applicable legislation and best practices (best practices) GCG.*

### Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertanggung jawab atas tugas dan fungsi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Pembagian tugas Direksi ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS atau keputusan rapat Direksi. Untuk itu, setiap anggota Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya masing-masing.

### *Duties and Responsibilities of Directors*

*The Board of Directors has responsible for the duties and functions perform maintenance and management of the Company. The division of duties of Directors determined in accordance with the legislation in force, the Articles of Association, the decision of the AGM or the Board of Directors meeting decisions. To that end, each member of the Board of Directors responsible for the execution of their respective duties.*

Dalam melakukan tugasnya, Direksi berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan serta didasari oleh itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan.
Tugas dan kewajiban Direksi Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dan menyosialisasikannya kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Bank Muamalat Indonesia serta memuatnya secara lengkap dalam situs web Bank Muamalat Indonesia.
2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Kepatuhan.
6. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank Muamalat Indonesia.
7. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
8. Mematuhi tata urutan peraturan internal Bank.
9. Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat Indonesia untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat Indonesia.
10. Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat Indonesia di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
11. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Bank Muamalat Indonesia.
12. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Muamalat Indonesia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
13. Memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat Indonesia.
14. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Muamalat Indonesia dalam mencapai maksud dan tujuannya.
15. Mewakili Bank Muamalat Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan.
16. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank Muamalat Indonesia serta mengikat Bank Muamalat Indonesia dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank Muamalat Indonesia, dengan pembatasan tertentu.
17. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
18. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
19. Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen Bank Muamalat Indonesia lainnya.

*In performing its duties, the Board of Directors is authorized to carry out management of the Company in accordance with policies deemed appropriate, within the limits prescribed in the legislation in force and/or the Articles of Association of the Company and are based on good faith and full responsibility for the interests of the Company.*
*Duties and obligations of Directors of Bank Muamalat Indonesia as follows:*

1. *Arrange up a code of conduct which applies to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employer/employee, as well as supporting organ owned by Bank Muamalat Indonesia and disseminating to all employees/employee who works at Bank Muamalat Indonesia and load it in full in the website of Bank Muamalat Indonesia.*
2. *Fully responsible for the management of the Bank based on the precautionary principle and the Sharia.*
3. *Managing the Bank in accordance with the authority and responsibility stipulated in the Articles of Bank Association and the legislation in force.*
4. *Implement GCG in every business activity of Bank Muamalat Indonesia at all levels of the organization.*
5. *In order to implement good corporate governance, the Board of Directors shall have at least the function of Internal Audit, Risk Management Committee and Risk Management, and Compliance.*
6. *In good faith and responsibly perform tasks for the benefit and business of the Bank Muamalat Indonesia.*
7. *Subject to the provisions of applicable law, the Articles of Association and decisions of the AGM as well as ensuring that all activities of the Bank in accordance with the provisions of the legislation in force, the Constitution and the decision of the GMS.*
8. *Obey the order of the Bank's internal regulations.*
9. *Carry out the maintenance of the bank to the interests and objectives of Bank Muamalat Indonesia.*
10. *Bank Muamalat Indonesia establish organization structure in central, regional and branch complete with the performance of its duties.*
11. *Act as the leader in the management of Bank Muamalat Indonesia.*
12. *Directors must disclose to employees of Bank Muamalat Indonesia policies that are positioned in the field of personnel.*
13. *Maintain and manage the wealth of Bank Muamalat Indonesia.*
14. *Take full responsibility in performing their duties for the benefit of Bank Muamalat Indonesia in achieving goals and objectives.*
15. *Representing Muamalat both inside and outside the court.*
16. *Perform all acts and deeds, both concerning the management and ownership of the wealth of Bank Muamalat Indonesia and bind the other party with Bank Muamalat Indonesia, with certain restrictions.*
17. *Board of Directors' member may give general authority to another party that resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.*
18. *The Board of Directors should be accountable for implementation of its duties to shareholders by the General Meeting of Shareholders.*
19. *Directors must to create and maintain the entire list of shareholders, the Special Register, the minutes of the AGM and the minutes of meetings of the Board of Directors as well as financial documents and other documents of Bank Muamalat Indonesia.*

20. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
21. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Bank Muamalat Indonesia apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
22. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
23. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
24. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Selain melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, Direksi juga memiliki tugas dan kewajiban secara spesifik terkait strategi dan rencana kerja, pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, hubungan dengan para pemangku kepentingan, sistem akuntansi dan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

## Wewenang Direksi

1. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan BMI, berikut penentuan struktur organisasi BMI.
2. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BMI.
3. Mewakili BMI di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan Perseroan.
5. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan.
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
7. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BMI termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi Karyawan BMI berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mengangkat, memberi penghargaan dan sanksi serta memberhentikan Karyawan BMI berdasarkan peraturan kepegawaian BMI.
9. Memastikan kompetensi Sumber Daya Insani yang terkait.
10. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan
11. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan

*20. Board of Directors' members either individually or jointly prohibited from owning shares of more than 25% of the paid up capital of another company.*
*21. Each member of the Board of Directors personally responsible for damages if the relevant Bank Muamalat Indonesia guilty or negligent in performing their duties.*
*22. Board of Directors' member must to disclose shareholdings of 5% (five percent) or better than other Bank which concerned as well as the Banks and other companies located inside and outside the country.*

*23. The Board of Directors is obliged to provide the data and information that is accurate, relevant and timely to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.*
*24. Each of the Board's decision is binding and the responsibility of all members of the Board of Directors.*

*In addition to implementing the tasks and responsibilities mentioned above, the Board of Directors also has duties and obligations are specifically related strategies and action plans, implementation of compliance, risk management, internal control systems, transparency and confidentiality of information, relationships with stakeholders, accounting and bookkeeping system, implementation of the principle of knowing customers and the Eradication of Money Laundering/Suspicious Financial Transactions.*

## *Authority of the Board of Directors*

*1. Establish policies in the management of BMI, BMI following organizational structure determination.*
*2. Refused to register the transfer of shares in the Register of Shareholders if the transfer does not fullfiled the provisions of the Articles of Association of BMI.*
*3. Representing BMI inside and outside the court.*
*4. Perform all actions, both regarding the management and the ownership of the Company.*
*5. Bind the Company with the other party and the other party to the Company, with restrictions.*
*6. Arrange the handover of Directors to represent the Company within and outside the Court to the person or persons specifically appointed Director for it or to someone or some company employees either individually or jointly, or to another person or entity.*

*7. Set the provisions on BMI employment including determination of salaries, pensions, old age security and income for BMI employees is based on the applicable regulations.*
*8. Lift, reward and sanction and dismiss BMI employees are based on employment regulations.*

*9. Ensure the competence of human resources involved.*
*10. Removing the bad debt book be reported and accounted in the Annual Report*

*11. Buying part or all of the collateral, either through auctions or outside the auction based on voluntary transfer by the Debtor or by the power to sell outside of the auction of the collateral where the Debtor does not fullfil its obligations to the Company, provided collateral purchased shall be disbursed as soon as possible, with due regard to applicable laws and regulations.*

*12. Activities outside the Company which are not directly related to the Company's interests such as teaching, the*

seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.

13. Jika diperlukan, mempergunakan saran profesional.
14. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS.
15. Apabila BMI mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS
16. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
17. Direksi berhak menerima fasilitas yang ditetapkan Perseroan.

*caretaker of business associations and the like allowed limited use reasonable time and the knowledge of the Director or other Directors.*

13. *If necessary, use professional advice.*
14. *The following facilities received a salary and other benefits, including half-position compensation the amount determined by the General Meeting or the Board of Commissioners by delegation of authority from the AGM.*
15. *If the BMI reaches the level of profits, the Board of Directors may receive incentives as a reward for his performance as determined by the AGM*
16. *Using the means and facilities of the Company's activities related to the interests of the Company, in accordance with legislation and Company policy.*
17. *Directors are entitled to receive a regulated facility of the Company.*

## Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris.
2. Membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya sama atau lebih besar dari nilai transaksi material sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang (*corporate guarantor*).
4. Mendirikan suatu badan usaha baru.
5. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku.
6. Membeli atau melepaskan saham Perseroan dalam perusahaan lain.
7. Mengambil tindakan-tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan secara materiil sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

## *The Authority of the Board of Directors to be Approved by the Board of Commissioners*

1. *Borrow or lend money on behalf of the Company a sum of money that is beyond the authority of the Board of Directors from time to time be specified in writing by the Board of Commissioners.*
2. *Buy, sell, or otherwise relinquish rights over fixed assets (land and/or building) and weigh companies or assets of the Company whose value is equal to or greater than the value of material transactions in accordance with prevailing capital market regulations.*
3. *Tying the Company as guarantor/underwriter of debt (corporate guarantor).*
4. *Establishing a new business entity.*
5. *Transfer, dispose of rights or as security, all or most of the assets of the Company either in 1 (one) transaction or several transactions a stand alone or are related to one another that occurred within 1 (one) financial year.*
6. *Purchase or otherwise dispose of the Company shares in other companies.*
7. *Taking legal actions or strategic transactions that may influence the Company's business is materially in accordance with the prevailing capital market regulations, legal action or transaction types from time to time be determined by the Board of Commissioners.*

## Kriteria Anggota Direksi

Persyaratan bagi calon anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan Integritas
   a. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang:
      i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

## *Criteria Member of the Board of Directors*

*Requirements for candidates for the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia as follows:*

1. *Integrity Requirements*
   a. *Has a good character and morals;*
   b. *Legally competent;*
   c. *Within 5 (five) years prior to appointment and during his tenure, was never a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners which:*
      i. *Ever does not hold the Annual Meeting;*
      ii. *Responsibility as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners have not accepted by the GMS or ever not to give an account as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and*

iii. pernah menyebabkan perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

f. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;

g. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;dan

h. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

2. Kompetensi
   a. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
   b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;
   c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan
   d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.

3. Reputasi Keuangan
   a. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet;dan
   b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Selain memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping (termasuk menantu dan ipar) dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Board Manual. Jabatan Direksi akan berakhir, jika anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.

*iii. Eever led the Bank that acquired the license, approval, or registration from the Financial Services Authority does not fulfill the obligation to submit an annual report and/or financial reports to the Financial Services Authority;*

*d. Never convicted of a predicate offenses referred in Law No. 8 of 2010 on Money Laundering, an offense that is detrimental to the country's financial and/or related to the financial sector, within 20 (twenty) years prior nominated;*

*e. Committed to complying with laws and regulations;*

*f. Committed to the development of a healthy Islamic Bank operations;*

*g. Never directly or indirectly involved in engineering works and abusive practices, injury appointments and other actions that harm the Company in which you were working or had worked; and*

*h. Not listed in the Register of Disqualified (DTL).*

*2. Competence*
   *a. Have knowledge and understanding in the field of Islamic banking operations sufficient;*
   *b. Have experience and expertise in banking operations, Islamic banking, finance or Islamic financial;*
   *c. Have the ability to conduct the strategic management of the Bank in order to develop a healthy and resilient; and*
   *d. Have knowledge and understanding in the application of risk management.*

*3. Financial reputation*
   *a. Do not have credit/financing loss; and*
   *b. Do not declared bankrupt or become a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty in causing a company to go bankrupt, within 5 (five) years prior to nomination.*

*In addition to meeting the requirements of integrity, competence and reputation of Finance, member of the Board of Directors should fullfil the requirements do not have a family relationship to the second degree, both vertically and horizontally (including law and law) with fellow members of the Board of Directors, a member of the Sharia Supervisory Board and/or members of the Board of Commissioners.*

## *Appointment and Dismissal of Directors*

*Member of the Board of Directors appointed by the General Meeting with regard to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the legislation. Appointment of Directors must meet general and specific requirements set forth in the Board Manual. Position of the Board of Directors will expire, if the members of the Board who is dismissed by decision of the AGM, resigned, no longer qualify as a member of the Board of Directors under the provisions of the Constitution and the legislation in force, dies or the term ends.*

## Susunan Keanggotaan Direksi

## *Membership Composition of the Board of Directors*

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang, setiap Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

*Bank has fulfilled the composition of the members of the Board of Directors in accordance with the provisions governing that the number of members of the Board of Commissioners at least three (3) persons, each Board of Directors must be domiciled in Indonesia and the Bank should have one (1) Compliance Director, who is appointed by the General Meeting of Shareholders.*

Pada periode 1 Januari 2018 - 11 Oktober 2016, Direksi berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

*In the period from January 1, 2018 - October 11, 2016 the Board of Directors of 6 (six) with the following details:*

Jumlah dan komposisi Direksi pada periode 1 Januari 2018 - 11 Oktober 2018

*The amount and composition of the Board of Directors in the period January 1, 2018 - October 11, 2018*

| No. | Nama Direksi<br>*Name of Directors* | Jabatan<br>*Position* | Dasar Pengangkatan<br>*Basic Appointment* | Tanggal Efektif<br>*Effective Date* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmad Kusna Permana | Direktur Utama<br>*President Director* | RUPS Luar Biasa 20 September 2017<br>*Extraordinary General Meeting September 20, 2017* | 27 Feb 2018 |
| 2 | Indra Yurana Sugiarto*) | Direktur Bisnis Korporasi<br>*Director of Corporate Business* | RUPS Tahunan 23 Juni 2014<br>*Annual General Meeting June 23, 2014* | 18 Sept 2014 |
| 3 | Purnomo B. Soetadi | Direktur Bisnis Ritel<br>*Director of Retail Banking* | RUPS Luar Biasa 7 September 2015<br>*Extraordinary General Meeting 7 September 2015* | 21 Maret 2016 |
| 4 | Hery Syafril | Direktur Keuangan<br>*Director of Finance* | RUPS Luar Biasa 7 September 2015<br>*Extraordinary General Meeting May 23, 2016* | 21 Maret 2016 |
| 5 | Awaldi | Direktur Operasional<br>*Director of Operations* | RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016<br>*Extraordinary General Meeting May 23, 2016* | 24 Maret 2017 |
| 6 | Andri Donny | Direktur Kepatuhan<br>*Director of Compliance* | RUPS Tahunan 29 Juni 2016<br>*Annual General Meeting June 29, 2016* | 29 Juni 2016 |

*) Pengunduran diri selaku anggota Direksi sesuai dengan surat pengunduran diri ybs tertanggal 9 Oktober 2018 dan ditetapkan oleh RUPS Luar Biasa tanggal 11 Oktober 2018

**) Resign as member of the Board of Directors has been established through the EGM dated October 11, 2018*

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Oktober 2018 terdapat pengunduran diri salah seorang anggota Direksi sehingga keanggotaan Direksi menjadi sebagai berikut:

*At the General Meeting of Shareholders of Extraordinary dated October 11, 2018 there is the resignation of one member of the Board of Directors so that the membership of the Board of Directors to be as follows:*

Jumlah dan komposisi Direksi pada periode 11 Oktober 2018 - Desember 2018

*The amount and composition of the Board of Directors in the period from October 11, 2018 - December 2018*

| No. | Nama Direksi<br>*Name of Directors* | Jabatan<br>*Position* | Dasar Pengangkatan<br>*Basic Appointment* | Tanggal Efektif<br>*Effective Date* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmad Kusna Permana | Direktur Utama<br>*President Director* | RUPS Luar Biasa 20 September 2017<br>*Extraordinary General Meeting September 20, 2017* | 27 Feb 2018 |
| 2 | Purnomo B. Soetadi | Direktur Bisnis Ritel<br>*Director of Retail Banking* | RUPS Luar Biasa 7 September 2015<br>*Extraordinary General Meeting 7 September 2015* | 21 Maret 2016 |
| 3 | Hery Syafril | Direktur Keuangan<br>*Director of Finance* | RUPS Luar Biasa 7 September 2015<br>*Extraordinary General Meeting May 23, 2016* | 21 Maret 2016 |
| 4 | Awaldi | Direktur Operasional<br>*Director of Operations* | RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016<br>*Extraordinary General Meeting May 23, 2016* | 24 Maret 2017 |
| 5 | Andri Donny | Direktur Kepatuhan<br>*Director of Compliance* | RUPS Tahunan 29 Juni 2016<br>*Annual General Meeting June 29, 2016* | 29 Juni 2016 |

## Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia memiliki integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan kelulusan seluruh anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## *Fit and Proper Test of Directors*

*All members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia have integrity, competence, financial reputation and the experience and expertise needed to carry out the functions and duties of each. This is evidenced by all members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia has passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.*

## Independensi Direksi

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga antar anggota Direksi, anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mampu bertindak secara independen. Berikut ini adalah tabel hubungan keluarga dan hubungan keuangan Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

## *Independence of Directors*

*Directors are set to perform all acts of management of the Company or the relationship with the other party independently without the interference of others or in violation of laws and regulations and the Articles of Association of the Company which is material can interfere with objectiveness and independence of duties of Directors which is run solely for the Company's interests.*

*There is no financial relationship, relationship management, ownership and family relationships between members of the Board of Directors, members of the Board of Directors by the Board of Commissioners and members of the Board of Directors with the Controlling Shareholder, so that in carrying out its duties and responsibilities the Board of Directors capable to act independently. Here is a table of family relationships and financial relationships with the Board of Directors of the Board of Commissioners, Directors and/or controlling shareholders of the Company.*

**Hubungan Afiliasi Direksi** *Affiliate Relations Board of Directors*

| No. | Nama *Name* | Hubungan Keluarga dengan *Family Relationship with* | | | | | | Hubungan Keuangan dengan *Financial Relationship with* | | | | | | Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain *The Management Relationship with Another Company* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dewan Komisaris *Board of Commissioners* | | Direksi *Directors* | | Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders* | | Dewan Komisaris *Board of Commissioners* | | Direksi *Directors* | | Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders* | | | |
| | | Ya/ Yes | Tidak/ No | Ya/ Yes | Tidak/ No | Ya/ Yes | Tidak/ No | Ya/ Yes | Tidak/ No | Ya/ Yes | Tidak/ No | Ya/ Yes | Tidak/ No | Ya/ Yes | Tidak/ No |
| 1 | Achmad Kusna Permana | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v | - | v |
| 2 | Indra Y. Sugiarto *) | - | v | - | v | - | v | - | V | - | v | - | v | - | v |
| 3 | Purnomo B. Soetadi | - | v | - | v | - | v | - | V | - | v | - | v | - | v |
| 4 | Hery Syafril | - | v | - | v | - | v | - | V | - | v | - | v | - | v |
| 5 | Andri Donny | - | v | - | v | - | v | - | V | - | v | - | v | - | v |
| 6 | Awaldi | - | v | - | v | - | v | - | V | - | v | - | v | - | v |

*) Pengundurann diri dari jabatan anggota Direksi telah ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018

**) Resign as member of the Board of Directors has been established through the EGM dated October 11, 2018*

## Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, kecuali seorang Direktur yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di Perusahaan Anak. Rangkap jabatan tersebut masih sesuai dengan regulasi. Dibawah ini tabel rangkap jabatan Direksi.

## *Concurrent Positions*

*All members of the Board of Directors does not have a Concurrent Positions, except a Director who doubled as Commissioner of the Subsidiary. The Concurrent Positions is still in accordance with the regulations. Below is a table of Concurrent Positions of Directors.*

| No. | Nama<br>*Name* | Posisi di Bank Muamalat Indonesia<br>*Positions in Bank Muamalat* | Jabatan di Perusahaan/ Instansi Lain<br>*Position in Company / Other Agencies* | Nama Perusahaan/ Instansi<br>*Company name/ agency* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmad Kusna Permana | Direktur Utama<br>*President Director* | - | - |
| 2 | Indra Y. Sugiarto *) | Direktur Bisnis Korporasi<br>*Director of Corporate Business* | - | - |
| 3 | Purnomo B. Soetadi | Direktur Bisnis Ritel<br>*Director of Retail Banking* | Komisaris<br>*Commissioner* | PT Al Ijarah Indonesia Finance |
| 4 | Hery Syafril | Direktur Keuangan<br>*Director of Finance* | - | - |
| 5 | Awaldi | Direktur Operasional<br>*Director of Operations* | - | - |
| 6 | Andri Donny | Direktur Kepatuhan<br>*Director of Compliance* | - | |

*) Pengundurann diri dari jabatan anggota Direksi telah ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018

**) Resign as member of the Board of Directors has been established through the EGM dated October 11, 2018*

## Rapat Direksi

## *Board of Directors' Meeting*

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

*Accordance with the Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014, Articles of Association and Board Manual Bank Muamalat Indonesia, the Board of Directors should convene regular meetings at least 1 (one) time in every month.*

Selama tahun 2018 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 45 (empat puluh lima) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

*During 2018 the Board of Directors has held internal meetings about 45 (forty-five) times. In detail, the number of attendance of each member of the Board of Directors at the Meeting of the Board of Directors for 2018 Internal is as follows:*

| No. | Nama<br>*Name* | Jumlah Rapat<br>*Total Meetings* | Jumlah Kehadiran<br>*Total Attendance* | Persentase<br>*Percentage* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmad Kusna Permana | 45 | 43 | 96% |
| 2 | Indra Yurana Sugiarto *) | 36 | 34 | 94% |
| 3 | Purnomo B. Soetadi | 45 | 39 | 87% |
| 4 | Hery Syafril | 45 | 36 | 80% |
| 5 | Awaldi | 45 | 42 | 93% |
| 6 | Andri Donny | 45 | 40 | 89% |

*) Pengundurann diri dari jabatan anggota Direksi telah ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018

**) Resign as member of the Board of Directors has been established through the EGM dated October 11, 2018*

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

*Frequency and Board of Directors Meeting Attendance*

| No. | Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Direksi<br>*Directors Participants* | Kehadiran (Ya/ Tidak)<br>*The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2018 | *Bad Bank Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Right Issue Update* | Purnomo B. Soetadi | Tidak/No |
| | | *Call Option Sukuk Subordinasi Mudharabah* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Annual Report dan Sustainability Report 2017* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | Draft Agenda Rapat BOC dan BOD | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *BMM Overview update performace tahun 2017* | Andri Donny | Ya/Yes |
| | | *AOPI Progress Update* | | |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Peserta Direksi *Directors Participants* | Kehadiran (Ya/Tidak) *The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17/01/2018 | *Bad Bank Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Right Issue Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Financial Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Muamalat Institute* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 3 | 23/01/2018 | *Pembahasan Materi BOC-BOD Meeting* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Right Issue Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Independent Appraisal and Notary Update* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | *Financing Proccess Improvement & LSMK* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *HC Committee - Most Important Goals/KPI BoD* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *New Bank Updates* | Andri Donny | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Updates* | | |
| 4 | 30/01/2018 | *Audit Process Review* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Right Issue Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Equinox Project Update & Moana Project Approval* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Pembahasan Materi Agenda BoC-BoD Meeting* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *Financial Highlights* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 5 | 13/02/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *AOPI Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | KJPP *& Notary Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Value Chain System* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Idle Property Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 6 | 20/02/2018 | Persetujuan Back to Back TPB | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 7 | 27/02/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Financing Proccess Improvement Phase 2* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | DPLK *Budget* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Peserta Direksi *Directors Participants* | Kehadiran (Ya/Tidak) *The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 06/03/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | Update Pembukaan Rekening Bersama Ustad Yusuf Mansur | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *HC Committee* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bank Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | Acara Milad dan Peluncuran Buku Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin *Annivarsary launches of biography book Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | Acara Milad dan Peluncuran Buku Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin *Annivarsary launches of biography book Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 9 | 15/03/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | Pengelolaan Risiko Reputasi *Reputation Risk Management* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 10 | 20/03/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Financing Portfolio Performance Anlytic* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 11 | 28/03/2018 | *Treasury Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 12 | 03/04/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | Kajian Penyelesaian AYDA menjadi Asset Ijarah | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Retail Banking Follow Up for Financing Portfolio Performance Analytic* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Corporate Banking Follow Up for Financing Portfolio Performance Analytic* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Tidak/No |
| 13 | 10/04/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Follow Up for Financing Portfolio Performance Analytic* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *HC Committee* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Tidak/No |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |

| No. | Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Direksi<br>*Directors Participants* | Kehadiran (Ya/ Tidak)<br>*The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17/04/2018 | *Right Issue Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Follow up for Performance Analytic (Low Quality Financing)* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *SISCOM Update* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 15 | 24/04/2018 | *Capital Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Financial Report* & Publikasi | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 16 | 02/05/2018 | *BoD Action Points*<br>*Capital Update* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update*<br>*Bad Bank Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | | Indra Yurana Sugiarto*)<br>Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Tidak/No |
| 17 | 08/05/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Tidak/No |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Update Project Moana dan Project Sniper (FPI Phase 2)* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 18 | 15/05/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Tidak/No |
| 19 | 22/05/2018 | *BoD Action Point* | Achmad Kusna Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Update Project Bankwide* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Peserta Direksi *Directors Participants* | Kehadiran (Ya/Tidak) *The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30/05/2018 | *BoD Action Point* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Tidak/No |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Revisi RBB* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Cost Saving Program* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update & BOD Update* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 21 | 05/06/2018 | *BoD Action Point* | Achmad K Permana | Tidak/No |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *HC Committee* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 22 | 26/06/2018 | *BoD Action Point* | Achmad K Permana<br>Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Update* Persiapan RUPS | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Awaldi | Tidak/No |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 23 | 03/07/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 24 | 10/07/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 25 | 17/07/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Tidak/No |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *IT Updates* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Tidak/No |

| No. | Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Direksi<br>*Directors Participants* | Kehadiran (Ya/Tidak)<br>*The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24/07/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Muamalat Institutes Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 27 | 30/07/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 28 | 07/08/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*)<br>Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 29 | 14/08/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Tidak/No |
| | | Implementasi *ORION* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 30 | 20/08/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *RBB 2019 – 2020* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Capital Updates* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | *GPN & SNTC Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Tidak/No |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 31 | 28/08/2018 | *BoD Actions Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Stress Test* Portfolio Pembiayaan Juni 2018 | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | Peringatan Hari Pelanggan Nasional | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *HC Committee* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 32 | 03/09/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Peserta Direksi *Directors Participants* | Kehadiran (Ya/ Tidak) *The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| | | *Project Update (SPEED & Avengers)* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *TBO/ER Improvement Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Tidak/No |
| 33 | 10/09/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *1st Draft RBB* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| | | | Purnomo B.Soetadi | Tidak/No |
| 34 | 17/09/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana<br>Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | Target Rencana Bisnis Bank 2019 | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Awaldi<br>Andri Donny | Ya/Yes<br>Ya/Yes |
| 35 | 25/09/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *BOC Meeting Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Update RUPSLB* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Follow Up of Exit Meeting Update* | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | *ALIF Action Plan* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Andri Donny | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | | |
| 36 | 9/10/ 2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *RUPSLB Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Preparation of BoC-BoD Meeting* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | | Indra Yurana Sugiarto*) | Ya/Yes |
| | | | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 37 | 17/10/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Follow Up BOC-BOD Action Points* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *ALIF Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |

| No. | Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* | Peserta Direksi<br>*Directors Participants* | Kehadiran (Ya/ Tidak)<br>*The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 23/10/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Tidak/No |
| | | *Liquidity Update* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *ALIF Update* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | *Dukcapil Progress Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 39 | 30/10/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Management Report* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *RBB 2019 - 2021 Update* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | *Bad Bank Update* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *ALIF Update* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 40 | 06/11/2018 | *BoD Action Point* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Laporan P&L Oktober 2018* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | Laporan Keuangan Publikasi Q3 2018 | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *RBB 2019* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 41 | 13/11/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Invesment Cost 2019* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *RBB 2019* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *LASATAP (Nucleous Project)* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | | Andri Donny | Ya/Yes |
| 42 | 21/11/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Management Report* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Bad Bank Update*<br>*- Bad Bank Portfolio for All Directorate* | Awaldi | Tidak/No |
| | | *- Proyeksi dan realisasi NPF* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 43 | 27/11/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Business Banking Update*<br>*- Retail Banking* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *- Corporate Banking* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | Pemenuhan Rasio Pembiayaan UMKM BMI 2018 | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *ALIF Update* | Andri Donny | Ya/Yes |
| 44 | 11/12/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Management Update* | Purnomo B. Soetadi | Tidak/No |
| | | Review dan Usulan *Risk Appetite Tahun 2019* | Hery Syafril | Tidak/No |
| | | *Proposal Wealth Management:*<br>- Pemilihan Mitra Bancassurance<br>- Pembaharuan Wealth Management System | Awaldi | Ya/Yes |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* | Peserta Direksi *Directors Participants* | Kehadiran (Ya/Tidak) *The Presence (Yes/No)* |
|---|---|---|---|---|
| 45 | | *Bad Bank Updates*<br>*VESPA II Updates* | Andri Donny | Ya/Yes |
| | 20/12/2018 | *BoD Action Points* | Achmad K Permana | Ya/Yes |
| | | *Update LDD TOP 10 Bad Bank* | Purnomo B. Soetadi | Ya/Yes |
| | | *Update Proyek TBO/ER* | Hery Syafril | Ya/Yes |
| | | *Update Tim dari Retail Banking mengenai ALIF* | Awaldi | Ya/Yes |
| | | *Capital Update* | Andri Donny | Ya/Yes |
| | | *Liquidity Update* | | |

*) Pengunduran diri dari jabatan anggota Direksi telah ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018

**) Resign from the position of member of the Board of Directors has been determined through the EGMS on October 11, 2018*

## Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

## *Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners*

Selama tahun 2018, Direksi juga mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

*Throughout 2018, the Board of Directors also held 12 (twelve) joint meetings with the Board of Commissioners with the following attendance level:*

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

### *Frequency and Attendance Meeting Level of the Board of Directors and the Board of Commissioners*

| No. | Nama *Name* | Jumlah Rapat *Total Meeting* | Jumlah Kehadiran *Total Presence* | Persentase *Percentage* |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Achmad Kusna Permana | 12 | 12 | 100% |
| 2. | Indra Yurana Sugiarto*) | 8 | 5 | 63% |
| 3. | Purnomo B. Soetadi | 12 | 7 | 58% |
| 4. | Hery Syafril | 12 | 12 | 100% |
| 5. | Awaldi | 12 | 9 | 75% |
| 6. | Andri Donny | 12 | 10 | 83% |

*) Pengunduran diri selaku anggota Direksi sesuai dengan surat pengunduran diri ybs tertanggal 9 Oktober 2018 dan ditetapkan oleh RUPS Luar Biasa tanggal 11 Oktober 2018

**) Resignation as member of the Board of Directors in accordance with Resign letter of the concerned person dated October 9, 2018 and it was determined by the Extraordinary Meeting of Shareholders on October 11, 2018.*

Adapun tanggal dan agenda pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris disajikan pada sub bab rapat Dewan Komisaris.

*Date and agenda of the performed meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners is presented in sub-chapter of Meetings of the Board of Commissioners.*

## Kepemilikan Saham Direksi Pada Bank Muamalat Indonesia

## *Shares Ownership of the Board of Directors in Bank Muamalat Indonesia*

Pada tahun 2018, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2018, members of the Board of Directors having shares in the Corporate are as follows:

| No. | Nama *Name* | Jabatan *Position* | Jumlah Kepemilikan Saham *Ownership of Total Shares* | | Jumlah Nominal Saham *Total Nominal Shares* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Seri A *Series A* | Seri B *Series B* | Seri A *Series A* | Seri B *Series B* |
| 1 | Achmad Kusna Permana | Direktur Utama<br>*President Director* | - | - | - | - |

| No. | Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Jumlah Kepemilikan Saham<br>*Ownership of Total Shares* | | Jumlah Nominal Saham<br>*Total Nominal Shares* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Seri A<br>*Series A* | Seri B<br>*Series B* | Seri A<br>*Series A* | Seri B<br>*Series B* |
| 2 | Indra Yurana Sugiarto *) | Direktur Bisnis Korporasi<br>*Corporation Business Director* | - | - | - | - |
| 3 | Purnomo B. Soetadi | Direktur Bisnis Ritel<br>*Retail Banking Director* | - | - | - | - |
| 4 | Hery Syafril | Direktur Keuangan<br>*Finance Director* | - | - | - | - |
| 5 | Awaldi | Direktur Sumber Daya Manusia<br>*Human Capital Director* | - | - | - | - |
| 6 | Andri Donny | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko<br>*Compliance and Risk Management Director* | 14.545 | 870 | Rp2.909.000 | Rp87.000 |

*) Pengundurann diri dari jabatan anggota Direksi telah ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018

**) Resignation from the position of member of the Board of Directors has been determined in RUPSLB dated October 11, 2018*

## Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2018 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

## *Competency Development Program of the Board of Directors*

*In the course of improving competency, throughout 2018 the Board of Directors participated in various training and seminars as follows:*

| Nama<br>*Name* | Jabatan<br>*Position* | Workshop/ Training/ Seminar | Penyelenggara<br>*Event Organizer* | Waktu<br>*Date* | Tempat<br>*Venue* |
|---|---|---|---|---|---|
| Achmad Kusna Permana | Direktur Utama<br>*President Director* | Asian Global Leadership Program : Leadership Imperative | SRW | 15 – 19 Oct 2018 | London |
| Indra Yurana Sugiarto*) | Direktur Bisnis Korporasi<br>*Corporation Business Director* | - | - | - | - |
| Purnomo B. Soetadi | Direktur Bisnis Ritel<br>*Retail Banking Director* | Prospek Bisnis Mortgage Setelah Relaksasi LTV | Infobank Learning Center | 12 Jul 2018 | Jakarta |
| Hery Syafril | Direktur Keuangan<br>*Finance Director* | Risk Management Refreshment | LSPP | 12 Apr 2018 | Jakarta |
| Awaldi | Direktur Sumber Daya Manusia<br>*Human Capital Director* | Risk Management Refreshment | LSPP | 12 Apr 2018 | Jakarta |
| | | Certified Profesional Coach Program | LOOP Institute of Coaching | 21 – 23 Nov 2018 | Jakarta |
| Andri Donny | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko<br>*Compliance and Risk Management Director* | Risk Management Refreshment | LSPP | 9 Aug 2018 | Jakarta |
| | | Uji Kompetensi Bidang Compliance Level 3 | LSPP | 6 Oct 2018 | Jakarta |

*) Pengunduran diri dari jabatan anggota Direksi telah ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018

**) The resignation from the post of member of the Board of Directors has been established through the EGM dated October 11, 2018*

## Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai mekanisme antara lain penilaian oleh RUPS dan *Self-Assessment* GCG.

## *Performance Assessment of the Board of Directors*

*Performance Assessment of the Board of Commissioners is made in various mechanisms, that is assessment by the General Meeting of Shareholders and Self-Assessment of GCG.*

## Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

## Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Assessment* GCG

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *Self-Assessment* GCG dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria *Self-Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 15 indikator, *Governance Process* terdiri dari 15 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 14 indikator.

Faktor-faktor positif ketiga aspek yang ada pada Direksi sesuai dengan *Self-Assessment* GCG Periode 31 Desember Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* atau Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Komposisi anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan ketentuan.
3. Anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Direksi telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
5. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Direksi Bank Muamalat Indonesia telah menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
7. Rapat Direksi telah diselenggarakan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.
8. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
9. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Muamalat Indonesia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
10. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

## *Performance Assessment of the Board of Directors by the General meeting of Shareholders*

*Performance Assessment of the Board of Directors is made by Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholder at the time of submitting the Annual Report of the Corporate, in which based on such report, the General Meeting of Shareholders gives discharge and release from fully responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for action of managing the Corporate made in the Fiscal Year at the end of year.*

## *Performance Assessment of the Board of Directors through Assessment of GCG*

*The performance assessment of the Board of Directors is also made in the Self-Assessment of GCG held in each semester and reported to the Finance Service Authority. Criteria of the Self-Assessment of the Board of Directors related to implementation of GCG of the Board of Directors divided into 3 (three) aspects, that is Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome. Governance structure comprises 15 indicators, Governance Process comprises 15 indicators while the Governance Outcome comprises 14 indicators.*

*Positive factors of the three aspects existing in the Board of Directors in accordance with Self-Assessment of GCG on December 31, 2018 among others:*

1. *All members of the Board of Directors passed the fit and proper test (PKK) and have obtained an approval letter from the Finance Service Authority.*
2. *Composition of members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia conformed to the provisions.*
3. *Members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia had sufficient and relevant competency with their position to run their duties and responsibilities as well as are able to implement the competency owned in the implemented duties and responsibilities.*
4. *The Board of Directors had guidance in the implementation of duties and responsibilities and their responsibilities in accordance with their functions.*
5. *Appointment and/or change of members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia conformed to the provisions and considered recommendation of theh Nomination and Remuneration Committee.*
6. *The Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia performed its duties and functions without intervention from the shareholders and been fully responsible for the implemented management of the Bank based on prudence principles and Sharia principles.*
7. *Meeting of the Board of Directors was routinely held once in a week.*
8. *The Board of Directors continously made efforts to improve the Bank's performance by considering aspects of prudence and good governance.*
9. *The Board of Directors explained Bank Muamalat Indonesia's strategic policies in the field of personnel and communication to employees relating to the Bank's business direction in order to reach Bank's mission and vission.*
10. *The Board of Directors performed Good Corporate Governance principles in each Bank's business activity at all levels or organization levels.*

# Organ Pendukung Direksi

## *Supporting Organ of the Board of Directors*

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 021/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Muamalat Indonesia maka Direksi telah membentuk 4 (empat) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)
2. Komite Aset dan Liabilitas Committee ( *Assets & Liabilities Committee*)
3. Komite Risk Management (*Risk Management Committee*)
4. Komite Sumber Daya Manusia (*Human Capital Committee*)

Komite-komite Direksi dijelaskan sebagai berikut:

*According to Decree of the Board of Directors No. 021/B/DIR-KPTS/VIII/2018 regarding Organizational Structural Improvement of Muamalat Indonesia, the Board of Directors has formed 4 (four) Executive Committee directly chaired by President Director and/or related Director, that is as follows:*

1. *IT Steering Committee*
2. *Assets & Liabilities Committee*
3. *Risk Management Committee*
4. *Human Capital Committee*

*Committees of the Board of Directors are as follows:*

## Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

## *IT Steering Committee*

### Dasar Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi

### *IT Steering Committee Forming Base*

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia.

*The IT Steering Committee Formation is based on the following rules:*

1. *Financial Service Authority regulations Number 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016 regarding Risk Management Application in the Use of Information Technology by Commercial Bank.*
2. *Charter of Information technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia.*

### Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi

### *Charter of IT Steering Committee*

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, aturan dasar, wewenang dan tanggung jawab, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi terakhir dikinikan pada tanggal 31 Oktober 2016 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

*The IT Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia has a Charter ruling structure and membership, basic rules, authority and responsibility, time work and reporting. The IT Steering Committee's last charter updated on October 31, 2016 and will be updated in accordance with the development of prevailing regulations as well as the last condition of the Bank.*

### Struktur dan Keanggotaan Pengarah Teknologi Informasi

### *Structure and Membership of the IT Steering Committee*

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia sekurang-kurangnya beranggotakan:

1. Direktur yang membawahkan satuan kerja Teknologi Informasi (TI).
2. Direktur yang membawahkan satuan kerja Manajemen Risiko.
3. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi (TI).
4. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi (TI).

*The IT Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia has member at least:*

1. *Director supervising the IT working unit.*
2. *Director supervising Risk Management working unit.*
3. *The highest officer supervising the IT steering working unit.*
4. *The highest officer supervising the IT user working unit.*

### Peran Ketua dan Wakil Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Mengusulkan agenda untuk setiap rapat dengan masukan dari anggota Komite.
2. Memastikan bahwa agenda rapat dan bahan pembahasan yang relevan didistribusikan kepada semua anggota komite setidaknya satu hari kerja sebelum rapat.
3. Menjaga fokus topik pembahasan dalam rapat.
4. Memastikan rapat dimulai dan diakhiri tepat waktu.

### *Role of Chairman and Deputy Chairman of IT Steering Committee*

1. *To propose agenda for each meeting with input from committee members.*
2. *To ensure that meeting agenda and relevant discussion materials are distributed to all committee members at least one working day prior to the meeting.*
3. *To keep a topic focused on the meeting discussion.*
4. *To ensure the meeting will begin and end on time.*

5. Berperan sebagai penghubung antara satuan kerja IT dengan satuan kerja pengguna IT dengan Direksi.

## Peran Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Menyiapkan dan mendokumentasikan risalah rapat dari setiap rapat dalam format hardcopy dan/atau format elektronik yang sesuai.
2. Menyediakan daftar tindakan yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti serta dibuatkan pemaparan, penanggung jawab dan estimasi waktu penyelesaian rapat.
3. Mendistribusikan risalah rapat dan daftar yang perlu ditindaklanjuti kepada seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan satuan kerja terkait.

## Peran Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Menghadiri rapat Komite Pengarah teknologi Informasi tepat waktu.
2. Menjaga kerahasian atas pembahasan topik yang sensitif yang dibahas dalam rapat Komite.
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang dibahas dalam rapat.
4. Menindaklanjuti keputusan rapat Komite Pengarah teknologi Informasi.
5. Anggota Komite diharapkan untuk menghadiri setiap pertemuan dan menginformasikan apabila tidak dapat hadir dala rapat komite.

## Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berwenang menyampaikan saran-saran kepada Direksi tentang rencana strategis teknologi informasi, proyek yang sedang berlangsung saat ini maupun proyek yang akan datang, inisiatif dan menyampaikan rekomendasi kepada Direksi.

Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, dengan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank.
2. Sumber daya yang dibutuhkan.
3. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
4. Perumusan Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi.
5. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
6. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana proyek yang disepakati dalam *service level agreement*.
7. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
8. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi.
9. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya.
10. Upaya penyelesaian permasalahan teknologi informasi.
11. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

*5. To have role as liason officer between IT working unit and IT user working unit and the Board of Directors.*

## *Role of Secretary for IT Steering Committee*

*1. To prepare and document minutes of meeting from each meeting in hardcopy format and/or suitable electronic format.*
*2. To prepare list of action which should be discussed and followed up as well as make explanation, responsible person and estimation of meeting completion time.*
*3. To distribute the minutes of meeting and the list which should be followed up to all members of the IT Steering Committee and related working unit.*

## *Role of Members of the IT Steering Committee*

*1. To present the IT Steering Committee meeting on time.*

*2. To maintain secrecy of sensitive topic discussion made in the Committee meeting.*
*3. To maintain secret information discussed in the meeting.*

*4. To follow up the meeting decisions of the IT Steering Committee.*
*5. Committee Members are expected to attend in each meeting and inform if they can not attend in the Committee meeting.*

## *Authority and Responsibility of IT Steering Committee*

*The IT Steering Committee has authority to submit advices to the Board of Director regarding information technology strategic plan, project being carried out now and the future projects, to have initiative and give recommendation to the Board of Directors.*

*The IT Strategic Plan which conforms to the Bank's business activity strategic plan, by considering efficient, effectivity factors and the following matters:*

*1. Roadmap Plan to reach information technology needs supporting the Bank business strategy.*

*2. Human resources needed.*
*3. Advantage/benefit obtained when the plan is applied.*

*4. Formulation of Information Technology Policy and Procedures.*
*5. Conformity of Information Technology projects approved by the Information Technology Strategic Plan.*
*6. Conformity of the performed dInformation Technology project approved by the project plan agreed in the service level agreement.*
*7. Conformity of Information Technology to the management information system needs to support the Bank business management.*
*8. Effectivity of risk minimizing steps to the Bank investment in Information Technology sector.*
*9. Monitoring of Information Technology performance and effort of its improvement.*
*10. Effort of information technology problem solution.*
*11. Adequacy and allocation of the Bank's resources.*

## Susunan dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

## *Composition and Membership of the Information Technology Steering Committee*

| Jabatan dalam Komite<br>*Position in the Committee* | Jabatan di Bank Muamalat Indonesia<br>*Position in Bank Muamalat Indonesia* |
|---|---|
| Penasehat dan Pengawas<br>*Advisor and Supervisor* | President Director<br>*President Director* |
| Ketua<br>*Chairman* | Operation Director<br>*Operation Director* |
| Wakil Ketua I<br>*Deputy Chairman I* | Compliance Director<br>*Compliance Director* |
| Wakil Ketua II<br>*Deputy Chairman II* | Finance Director<br>*Finance Director* |
| Wakil Ketua III<br>*Deputy Chairman III* | Retail Banking Director<br>*Retail Banking Director* |
| Wakil Ketua IV<br>*Deputy Chairman IV* | Chief Corporate Banking Officer<br>*Chief Corporate Banking Officer* |
| Wakil Ketua V<br>*Deputy Chairman V* | Chief Risk Officer<br>*Chief Risk Officer* |
| Sekretaris<br>*Secretary* | Head of Information Technology<br>*Head of Information Technology* |
| Anggota<br>*Member* | All Related Head of L1<br>*All Related Head of L1* |

## Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

## *IT Steering Committee Meeting*

Sesuai dengan piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib diselenggarakan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Selama tahun 2018, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite dalam rapat antara lain sebagai berikut:

*According to the charter of the IT Steering Committee, the IT Steering Committee meemting must be held at least once in 3 (three) months. Throughout 2018, the IT Steering Committee held 4 (four) meetings including discussion about minutes of meeting and the matters which should be followed up from the previous meetings and other several discussions. Based on the minutes of meeting, the IT Steering Committee, the discussion made by the Committee in the meeting is as follows:*

| No. | Tanggal<br>*Date* | Agenda Rapat<br>*Meeting Agenda* |
|---|---|---|
| 1. | 25 Mei 2018<br>*May 25, 2018* | • *Update* RBB IT 2018<br>• Sistem *Performance*<br>• Kesiapan sistem pada saat Hari Raya<br>• Siskohat<br>• *Update of RBB IT 2018*<br>• *Performance system*<br>• *System preparation on Holiday*<br>• *Siskohat* |
| 2. | 7 Agustus 2018<br>*August 7, 2018* | • *ITSC Charter*<br>• IT Operational Risk Assesment *(IT Security Management & IT DRC Capability, IT Lisence Gap)*<br>• *Update IT Further Initiative (IT OPEC Cost reduction, IT Dashboard)*<br>• *ITSC Charter*<br>• *IT Operational Risk Assesment (IT Security Management & IT DRC Capability, IT Lisence Gap)*<br>• *Update of IT Further Initiative (IT OPEC Cost reduction, IT Dashboard)* |
| 3. | 19 November 2018<br>*November 19, 2018* | • Frekuensi Pelaksanaan ITSC<br>• IT *Disaster Recovery Plan* (DRP)<br>• IT *System Availability*<br>• ITPMO *Project Bankwide*<br>• IT *Managed Service*<br>• *Performance frequency of ITSC*<br>• *IT Disaster Recovery Plan (DRP)*<br>• *IT System Availability*<br>• *ITPMO Project Bankwide*<br>• *IT Managed Service* |

| No. | Tanggal *Date* | Agenda Rapat *Meeting Agenda* |
|---|---|---|
| 4 | 19 Desember 2018<br>*December 19, 2018* | • Hasil Ujicoba *Environment IT*<br>• *Project* IT<br>• IT *Cost Saving*<br>• *Environment Trial Result of IT*<br>• *IT Projects*<br>• *IT Cost Saving* |

## Komite Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Committee/ALCO)

Komite dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI/OJK maupun strategi bisnis.

### Dasar Pembentukan ALCO

Pembentukan ALCO didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia.

### Piagam ALCO

ALCO Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksaaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikan pada bulan Desember 2016 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

### Tugas dan Wewenang ALCO

Tugas Komite Aset dan Liabilitas sesuai Piagam Komite Aset dan Liabilitas paling kurang meliputi:

1. Melakukan kajian atau tinjauan (review) terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan secara keseluruhan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan.
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Perseroan selaku Bank Umum Syariah.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja ALCO.

## *Asset and Liability Committee/ALCO*

*The Committed has been formed to assist duties performance of the Board of Directors to maintain a strong balance structure, covering analysis and formulation of policy and strategy, decision making, supervision in the management of liquidity risk, market risk and capitalizing in line with regulations of Bank Indonesia/Financial Service Authority and business strategy.*

### *Formation Base of ALCO*

*Formation of ALCO is based on the following regulations:*

1. *Regulation of Bank Indonesia Number 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Performance of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Bussiness Unit of Sharia.*
2. *Regulation of Financial Service Authority Number 65/POJK.03/2016 regarding Risk Management Application for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.*
3. *Circular of Bank Indonesia Number 12/13/DPbS dated 30 April 2010 regarding Performance of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.*
4. *Charter of ALCO of Bank Muamalat Indonesia.*

### *Charter of ALCO*

*ALCO Bank Muamalat Indonesia has a Charter organizing among others structure and Membership of Asset and Liability Committe, duty and authority, conditions and mechanism of the performed meeting, reporting and secretaria. The last Charter of the Risk Monitoring Committee is updated in accordance with development of applicable regulatioin as well as the last condition of the Bank.*

### *Duty and Authority of ALCO*

*Duty of the Asset and Liability Committee in accordance with the Charter of the Asset and Liability Committee at least covering:*

1. *To do review the entire policy and strategy of asset management and obligation of the Corporate.*
2. *To give recommendation to the Board of Directors related to policy and strategy of asset management and obligation of the Corporate.*
3. *To do evaluation to implementation/performance of policy and strategy of asset management and obligation of the Corporate in order to fulfill the applicable laws and regulations related to the performance of prudence principles by the Corporate as Sharia Commercial Bank.*
4. *To do evaluation of ALCO performance.*

## Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO

1. Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya 1 (satu) kali setiap bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan.
2. Rapat ALCO didahului oleh rapat ASG. Namun, dalam keadaan tertentu Rapat ALCO dapat langsung dilaksanakan tanpa didahului oleh rapat ASG dan dapat pula dilaksanakan di luar jadwal rapat ALCO yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan jadwal Direksi.
3. Setiap anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri rapat ALCO. Dalam hal Anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh *Senior Officer* dalam subordinatnya.
4. Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota ALCO serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Direktur Perseroan, yang terdiri dari Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO (jika Ketua ALCO berhalangan hadir) dan Direktur yang membawahi unit bisnis.
5. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO apabila Ketua ALCO berhalangan untuk menghadiri rapat ALCO.
6. Materi Rapat ALCO disiapkan oleh Sekretaris ALCO.
7. Hasil keputusan rapat ALCO adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ALCO yang memiliki hak suara yang menghadiri rapat ALCO.
8. Setiap rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO dan Wakil Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO.
9. Risalah rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO tersebut diatas, untuk selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
10. Seluruh dokumen rapat ALCO didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.
11. Hasil keputusan rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit bisnis ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit bisnis, Region Head, Branch Manager, dan Operation Manager serta diketahui oleh Direksi. Sementara hasil keputusan rapat ALCO yang harus ditindaklanjuti oleh unit bisnis terkait disampaikan melalui memorandum khusus.
12. Keputusan rapat ALCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

## *Conditions and Mechanism of ALCO Meeting Performance*

1. *ALCO meeting shall be held at least 1 (one) time each month according to the schedule and agenda made.*
2. *ASG meeting shall be previously held before ALCO meeting. However, in certain condition ALCO Meeting may be directly held without ASG meeting previously and outside schedule of ALCO meeting determined by conforming schedule of the Board of Directors.*
3. *Each member of ALCO shall be obliged to attend ALCO meeting. In the event that ALCO members may not attend ALCO Meeting, they must be represented by a Senior Officer and their subordinate.*
4. *ALCO Meeting may only be held if it is attended by at least 50% (fifty percent) of all ALCO members and attended at least two Directors of the Corporate, consisting of Chairman of ALCO, or Deputy Chairman of ALCO (if Chariman of ALCO is absent to present) and Director supervising business unit.*
5. *ALCO meeting shall be chaired by ALCO Chairman, or Deputy Chairman of ALCO if Chairman of ALCO is absent to present ALCO meeting.*
6. *Materials of ALCO Meeting shall be prepared by Secretary for ALCO.*
7. *Decision results of ALCO meeting is valid if they are decided by ALCO Members having vote to attend ALCO meeting.*
8. *Each ALCO meeting and its decision results shall be included in minutes of ALCO meeting made and submitted by Secretary for ALCO to Chairman of ALCO and Deputy Chairman of ALCO to be signed by Chairman of ALCO, Deputy Chairman of ALCO and Secretary for ALCO.*
9. *Minutes of ALCO meeting signed by Chairman of ALCO, Deputy Chairman of ALCO and Secretary for ALCO above, further to be distributed by Secretary for ALCO to related working unit.*
10. *All documents of ALCO meeting shall be documented by Secretary for ALCO.*
11. *ALCO meeting decision results related to all business units followed up by ALCO by submitting memorandum to all business units, Region Head, Branch Manager, and Operation Manager as well as acknowledged by the Board of Directors. Whilst, ALCO meeting decision results which must be followed up by the related business unit shall be submitted through a special memorandum.*
12. *ALCO meeting decision shall be made on the basis of amicable settlement.*

## Susunan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

## *Membership Composition of Asset and Liability Committee (ALCO)*

| Jabatan dalam Komite ALCO<br>*Position in ALCO Committee* | Jabatan di Bank Muamalat Indonesia<br>*Position in Bank Muamalat Indonesia* |
|---|---|
| Ketua<br>*Chairman* | President Director |
| Wakil Ketua<br>*Deputy Chairman* | Finance Director |
| Sekretaris (merangkap Anggota Tetap tanpa Hak Suara)<br>*Secretary (concurently serving as Permanent Member without voting rights)* | Head of Treasury |

| Jabatan dalam Komite ALCO<br>*Position in ALCO Committee* | Jabatan di Bank Muamalat Indonesia<br>*Position in Bank Muamalat Indonesia* |
|---|---|
| Anggota Tetap dengan Hak Suara<br>*Permanent Member with voting rights* | • Chief Corporate Banking Officer<br>• Retail Banking Director<br>• Compliance Director<br>• Operation Director<br>• Chief Human Capital Officer<br>• Chief Risk Officer |
| Anggota Tetap tanpa Hak Suara<br>*Permanent Member without Voting Rights* | • Head of Global Market<br>• Head of Consumer Banking Business<br>• Head of Special Asset Management<br>• Head of Distribution Network Management<br>• Head of Enterprise Risk Management<br>• Head of Corporate Strategic & Planning<br>• Head of Treasury (merangkap Sekretaris ALCO) |
| Anggota Tidak Tetap tanpa Hak Suara<br>*Non-permanent Member without Voting Rights* | • Kepala Unit Bisnis yang terkait dengan materi pembahasan dalam Rapat ALCO.<br>• Region Head atau Branch Manager yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat ALCO.<br>• *Head of Business Unit related to discussion materials in ALCO Meeting.*<br>• *Regional Head or Branch Manager related to discussion materials in ALCO meeting.* |

Susunan keanggotaan ALCO dimaksud mengikuti tugas dan fungsi dan wewenang yang melekat pada nama jabatan tersebut diatas, berikut dengan setiap perubahan penyebutan nama jabatan yang ditetapkan dikemudian hari oleh Perseroan.

*Membership composition of ALCO is intended to obey duties and authorities possessed in such position name above, along with each change of the mentioned position name determined in the future by the Corporate.*

## Rapat Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

## *Asset and Liability Committee (ALCO) Meeting*

Selama periode tahun 2018, Komite ALCO telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite ALCO, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite ALCO dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen risiko likuiditas
2. Manajemen risiko Forex
3. Manajemen Net Income Margin
4. Manajemen Permodalan
5. Kebijakan Penghimpunan Dana
6. Kebijakan Pembiayaan
7. Kebijakan FTP
8. Kebijakan Dropping Pembiayaan

*In the period of 2018, ALCO Committee held 12 (twelve) meetings with minimum one meeting agenda for each meeting including discussion about the minutes of meeting, as well as the matters which should be followed up from the previous meeting and other several discussions. Based on the minutes of meeting of ALCO Committee, the discussion held by ALCO Committee in the meeting throughout 2018, among others:*

1. *Liquidity risk management*
2. *Forex risk management*
3. *Net Income Margin Management*
4. *Capital management*
5. *Fund Raising Policy*
6. *Funding Policy*
7. *FTP policy*
8. *Dropping Policy Financing*

# Komite Manajemen Risiko

# *Risk Management Committee*

## Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko

## *Formation Base of Risk Management Committee*

Pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
3. Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
4. Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

*Formation of Risk Management Committee is based on the following regulations:*

1. *Regulation of Financial Service Authority Number 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 regarding Risk Management Application for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.*
2. *Regulation of Financial Service Authority Number 42/POJK.03/2017 regarding Composition and Implementation of Bank Credit or Loan Policy for Commercial Bank*
3. *General Policy of Risk Management of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*
4. *Charter of Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*

## Piagam Komite Manajemen Risiko

## *Charter of Risk Management Committee*

Komite Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur mengenai struktur dan keanggotaan, kewenangan dan tanggung jawab, rapat komite, sekretariat, kuorum dan keputusan komite, dan yang lainnya. Piagam Komite

*Risk Management Committee of Bank Muamalat Indonesia has a Charter arranging structure and membership, authority and responsibility, committee meeting, secretariat, quorum and decision of committee, etc. The last Charter of Risk Management*

Manajemen Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 4 Desember 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

## Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

1. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
   a. Mayoritas Direksi salah satunya adalah Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
   b. Pejabat Eksekutif yang memimpin antara lain unit kerja operasional dan unit kerja manajemen risiko.
   c. Pimpinan unit Internal Audit.
2. Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua merangkap anggota tetap, Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap, dan Sekretaris merangkap Anggota Tetap.

3. Anggota Komite Manajemen Risiko dibagi menjadi:
   a. Anggota tetap dengan hak suara;
   b. Anggota tetap tanpa hak suara; dan
   c. Anggota tidak tetap tanpa hak suara.

## Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sesuai dengan piagam Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
1. melakukan kajian atas eksposur risiko Bank secara keseluruhan dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
2. memberikan arahan dan rekomendasi antara lain:
   a. budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi bank.
   b. kebijakan, strategi dan prosedur penerapan manajemen risiko.
   c. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
   d. penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*).
3. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait dengan hal-hal yang diajukan kepada Komite Manajemen Risiko.
4. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, antara lain:
   a. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
   b. hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.
5. memberikan saran dan langkah perbaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

## Kewenangan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk:
1. Melaksanakan rapat berkala Komite Manajemen Risiko, termasuk menetapkan agenda pembahasan rapat dan peserta rapat khusus yang perlu menghadiri rapat dimaksud.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank Muamalat Indonesia serta melakukan kajian berkala dan memberikan masukan perbaikan apabila diperlukan.

*Committee was updated on December 4, 2017 and will be renewed in accordance with the development of applicable regulations as well as the last condition of Bank.*

## *Structure and Membership of Risk Management Committee*

1. *Membership of Risk Management Committee consists of:*
   a. *One of Majorities of the Board of Directors is Director supervising the Risk Management function.*
   b. *Executive Officer leading operational unit and risk management working unit.*
   c. *Head of Audit Internal Unit.*
2. *Risk Management Committee is chaired by a chairman concurently serving permanent member, Deputy Chairman concurently servicing Permanent Member, and Secretary concurently serving Permanent Member.*
3. *Members of the Risk Management Committee are divided into:*
   a. *Permanent members with voting rights;*
   b. *Permanent members without voting rights; and*
   c. *Non-permanent members without voting rights.*

## *Responsibility of Risk Management Committee*

*Responsibilities of the Risk Management Committee which conform to the charter of the Risk Management Committee are as follows:*
1. *To make review of entirely Bank risk exposure and ensure that the risk exposure is well managed.*

2. *To give direction and recommendation, among others:*
   a. *Risk management culture to all bank organization levels.*
   b. *policy, strategy and procedures for risk management application.*
   c. *Repair or completion of risk management performance based on evaluation results of the risk management performance.*
   d. *Justification of the matters related to business decision which does not conform to normal procedures (irregularities).*
3. *To give recommendation to President Director and all networks of the Board of Directors related to the matters lodged to the Risk Management Committee.*
4. *To submit a periodic written report to the Board of Directors with copy carbon to the Board of Commissioners, among others:*
   a. *Supervising results of the applied and performed Financing Policy of Bank Muamalat Indonesia.*
   b. *Monitoring and evaluation results in line with duties and responsibilities of Committee.*
5. *To give advices and steps of improvement to the Board of Directors related to the copy carbon to the Board of Commissioners.*
6. *In case of deviation in the performed Financing Policy of Bank Muamalat Indonesia related to the fulfilled principles of Sharia, the resport must also be submitted to Sharia Supervisory Board.*

## *Authority of Risk Management Committee*

*The Risk Management Committee has authority to:*
1. *Hold a periodic meeting of the Risk Management Committee, including determining discussion agenda of special meeting and meeting participants required to attend the meeting intended.*
2. *Supervise implementation of the policy and procedure of Bank Muamalat Indonesia and make periodic review and give input of improvement if required.*

3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait kerangka kerja, metodologi dan sistem pengelolaan risiko termasuk rencana kontijensi serta memastikan efektivitas penerapannya.
4. Melaksanakan kewenangan Komite Kebijakan yaitu:
   a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kegiatan Bank lainnya.
   b. Mengawasi agar Kebijakan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan.
   c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Kebijakan.
   d. Memantau dan mengevaluasi antara lain:
      i. Perkembangan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
      ii. Pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
      iii. Proses pembiayaan, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait Bank Muamalat Indonesia dan debitur besar tertentu.
      iv. Pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
      v. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku terkait pembiayaan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
      vi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
      vii. Upaya dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan yang dibentuk Bank Muamalat Indonesia.

*3. Give recommendation to President Director and all networks of the Board of Directors related to working frame, methodology and risk management system including a contingency plan as well as ensure effectivity of its application.*
*4. Perform authorities of Policy Committee, that is:*
   *a. To give input to the Board of Directors in the framework of policy composition particularly relating to the formulation of prudence principles for the purpose of financeing and other Bank's activities.*
   *b. To supervise that the Policy can be applied and performed consequently and consistently as well as formulate a settlement in case of obstacles in the applied Policy.*
   *c. To make a periodic review to the Policy and give advices to the Board of Directors if a changed/improved Policy is needed.*
   *d. To monitor and evaluate, among others:*
      *i. Development of the entire financing portfolio quality development and operation of Bank Muamalat Indonesia.*
      *ii. The performed authority decides financing and operation of Bank Muamalat Indonesia.*
      *iii. Financing process, financing development and quality provided to the party related to Bank Muamalat Indonesia and certain big debtor.*
      *iv. Provision Performance of the Maximum Financing Grant Limit (BMPP).*
      *v. Compliance with provisions of the applicable laws and regulations related to the financing and operation of Bank Muamalat Indonesia.*
      *vi. Settlement of the troubled financing in accordance with the Financing Policy of Bank Muamalat Indonesia.*
      *vii. Efforts to fulfill adequacy of total allowance for possible losses of financing made by Bank Muamalat Indonesia.*

## Sekretariat Komite Manajemen Risiko

1. Komite Manajemen Risiko dilengkapi Sekretaris, yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
2. Sekretaris Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab antara lain:
   a. Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan *calendar of events* Bank Muamalat Indonesia, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat Komite Manajemen Risiko.
   b. Menyampaikan materi rapat Komite Manajemen Risiko kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
   c. Mengundang peserta rapat Komite Manajemen Risiko termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
   d. Menyiapkan risalah rapat Komite Manajemen Risiko selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Manajemen Risiko.
   e. Mengirimkan risalah rapat kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan seluruh peserta yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
   f. Melaporkan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direksi dan/atau untuk kepentingan lainnya.

## *Secretariat of Risk Management Committee*

*1. Risk Management Committee assisted by Secretary, appointed and determined by Decree of the Board of Directors.*
*2. Secretary for the Risk Management Committee shall be responsible for, among others:*
   *a. To hold the Risk Management Committee meeting according to the schedule determined previously or based on calendar of events of Bank Muamalat Indonesia, including to prepare list of the Risk Management Committee meeting participants.*
   *b. To submit materials of the Risk Management Committee meeting to meeting participants invited no later than 1 (one) business day before the meeting is held.*
   *c. To invite the Risk Management Committee meeting participants including to make a coordination for the purpose of preparing materials to be discusused in the Risk Management Committee meeting.*
   *d. To prepare minutes of the Risk Management Committee meeting no later than 5 (five) business days after the meeting has been held to be signed by Chairman and Deputy Chairman of Risk Management.*
   *e. To submit minutes of meeting to all permanent members of the Risk Management Committee and all participants attending based on their interests to be followed up.*
   *f. To report the administering of the Risk Management Committee meeting to the Board of Directors and/or for other interests.*

g. Memantau tindak lanjut atas hasil rapat Komite Manajemen Risiko.

## Kuorum dan Keputusan Komite Manajemen Risiko

1. Rapat Komite Manajemen Risiko dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
   a. Dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2 n + 1) dari anggota tetap dan memiliki hak suara. Anggota tetap dan memiliki hak suara yang berhalangan hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota tetap dan memiliki hak suaranya lainnya, dan disampaikan kepada Sekretaris Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko.

      Anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara hanya dapat mewakili 1 (satu) suara anggota tetap dan memiliki hak suara lainnya, yang berhalangan hadir; dan

   b. Dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko atau *alternate* Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

2. Komite Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan atas kebijakan, metodologi, limit dan strategi terkait dengan manajemen risiko. Keputusan yang diambil oleh Komite Manajemen Risiko atas hal-hal tersebut diatas menjadi rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi.

3. Apabila dalam pembahasan rapat Komite Manajemen Risiko diperlukan pengambilan keputusan sesuai butir 2 diatas, maka keputusan diambil berdasarkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah (1/2 n + 1) anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite.

## Keputusan di Luar Rapat Komite Manajemen Risiko

1. Pengambilan keputusan oleh Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan secara sirkuler kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komite Manajemen Risiko.
2. Keputusan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara sirkular mengikat semua anggota atau unit kerja di Bank Muamalat Indonesia terkait dengan risiko.
3. Keputusan di luar rapat Komite Manajemen Risiko berlaku apabila telah disetujui oleh seluruh anggota tetap Komite dan memiliki hak suara, secara bulat atas usulan yang diajukan.

## Tindak Lanjut Keputusan Komite Manajemen Risiko

1. Apabila Komite Manajemen Risiko memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi, maka masukan dan rekomendasi Komite Manajemen Risiko harus ditindaklanjuti dengan memo

*g. To monitor the follow-up of the Risk Management Committee meeting results.*

## *Quorum and Decision of Risk Management Committee*

*1. Risk Management Committee meeting may be held and has rights to make binding decisions if:*
   *a. It is attended by more than half (1/2 n + 1) of permanent members with voting rights. The permanent members with voting rights who are prevented from attending may represent their votes to permanent members with other voting rights, and it is delivered to Secretary for the Risk Management Committee minimum 1 (one) day before the Risk Management Committee has not been held yet.*

      *Permanent members of the Risk Managnement Committee with voting rights may only represent 1 (one) vote of permanent member with other voting rights who is prevented from attending; and*

   *b. It is attended by Chairman and Deputy Chairman of the Risk Management Committee or alternate Director supervising Risk Management function.*

*2. The Risk Management Committee may make decision to policy, methodology, limit and strategy related to the risk management. The decision made by the Risk Management Committee for such matters above should be recommendation needed to obtain further decisions from the Board of Directors.*

*3. If in the Risk Management Committee meeting discussion, decision making according to point 2 above is needed, such decision should be made in consesus. If the consensus is not reached, the decision is deemed valid if it is agreed by more than half (1/2 n + 1) of permanent members with voting rights of the Risk Management Committee, who are present and/or represented in such meeting and approved by Chairman of Committee and Deputy Chairman of Committee.*

## *Decision Outside Risk Management Committee Meeting*

*1. Decision made by the Risk Management Committee may be circular to all permanent members with voting rights of the Risk Management Committee, based on previous approval from Chairman of the Risk Management Committee.*

*2. Decision of the Risk Management Committe circularly binding all members or working units in Bank Muamalat Indonesia related to the risk.*
*3. Decision outside the Risk Managemen Committee meeting shall be applied if it has been agreed by all permanent members with voting rights of the Committee unanimously for the proposal filed.*

## *Decision Follow-up of Risk Management Committee*

*1. If the Risk Management Committe gives input and recommendation needed to obtain further decision from the Board of Directors, the input and recommendation of the Risk Management Committee must be followed*

usulan yang ditujukan kepada Direksi untuk memperoleh keputusan lebih lanjut. Memo usulan disusun oleh unit kerja yang menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Apabila terdapat Unit Kerja yang melakukan presentasi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, maka rapat wajib dihadiri oleh Kepala Unit Kerja Level 1 (L1) atau pejabat yang setingkat.
3. Apabila diperlukan, keputusan Komite Manajemen Risiko dapat pula ditindaklanjuti dengan penerbitan memorandum atau ketentuan oleh unit kerja yang bertanggung jawab.
4. Sekretaris Komite Manajamen Risiko bertanggung jawab memantau pelaksanaan tindak lanjut dari keputusan Komite Manajemen Risiko.

*up based on memo of proposal directed to the Board of Directors to obtain further decision. The memo of proposal is composed by the working unit submitting such proposal in the Risk Management Committee.*
2. *In case of the Working Unit making presentation in the Risk Management Committee meeting, the meeting must be attended by Head of Working Unit Level 1 (L1) or an officer having the same level.*
3. *If required, decision of the Risk Management Committee may also be followed up by issuing memorandum or conditions by the responsible working unit.*
4. *Secretary for the Risk Management Committee is responsible to monitor the performed follow-up of the decisions of the Risk Management Committee.*

## Rapat Komite Manajemen Risiko

## *Risk Management Committee Meeting*

Selama periode tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Manajemen Risiko, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Laporan tingkat kesehatan bank - *Risk Based Bank Rating* (RBBR) posisi Desember 2017 dan *Risk Appetite Statement* (RAS)
2. *Update* risiko pembiayaan
3. *Update* risiko operasional
4. Kinerja pembiayaan retail
5. Laporan tingkat kesehatan bank - *Risk Based Bank Rating* (RBBR) posisi Juni 2018
6. *Watchlist* Nasabah *Corporate* dan *Commercial*
7. *Loss Event Database* (LED) dan risiko operasional
8. Review portofolio pembiayaan kepada multifinance

*Within the period of 2018, the Risk Management Committee held 7 (seven) meetings with minimum one meeting agenda for each meeting including discussion about minutes of meeting, as well as the matters which should be followed up from the previous meeting and other several discussions. Based on minutes of meeting of the Risk Management Committee, discussion held by the Risk Management Committee within the 2018 meetings, among others:*

1. *Risk Based Bank Rating (RBBR) for position in December 2017 and Risk Appetite Statement (RAS)*
2. *Financing risk Update*
3. *Operational risk Update*
4. *Retail financing performance*
5. *Risk Based Bank Rating (RBBR) position in June 2018*
6. *Watchlist of Corporate Customer and Commercial*
7. *Loss Event Database (LED) and operational risk*
8. *Review of financing portfolio to multifinance*

## Komite Sumber Daya Manusia

## *Human Capital Committee*

Perusahaan membentuk Komite Sumber Daya Manusia guna membantu Direksi dan *Senior Management* dalam memenuhi tanggung jawab *supervisory* terkait pengembangan organisasi, manajemen suksesi, dan implementasi kebijakan-kebijakan sumber daya manusia. Komite ini dibentuk pada tingkatan/level korporasi, Direktorat, kantor wilayah atau region dan pada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan kantor dan distribusi. Komite ini diharapkan dapat melakukan mitigasi risiko atas pengelolaan dan penyelesaian setiap masalah ketenagakerjaan.

*The Corporate forms Human Capital Committee in order to assist the Board of Directors and Senior Management to fulfill responsibility of supervision related to development of organization, succession management, and implementation of human capital policies. This Committee is form at corporation, Directorate, regional office levels and in working unit which is responsible for management of office network and distribution. This Committee may make risk mitigation of managemen and settlement of each manpower problem.*

## Dasar Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia

## *Formation Base of Human Capital Committee*

Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Piagam Komite Sumber Daya Manusia.

*Formation of Human Capital Committee is based on the following regulation:*

1. *Regulation of Bank Indonesia Number 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding the performed Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.*
2. *Charter of Human Capital Committee.*

## Tugas dan Kewenangan Komite Sumber Daya Manusia

## *Duty and Authority of Human Capital Committee*

Komite Sumber Daya Manusia mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Direksi dengan rincian sebagai berikut:

*The Human Capital Committee has role to assist the performed duties of the Board of Directors with the following detail:*

Komite Sumber Daya Manusia Level Korporasi:

1. Memberikan arahan atas strategi dan kebijakan dalam bidang sumber daya manusia.
2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi sumber daya manusia.
3. Menyetujui proposal penempatan sumber daya manusia untuk posisi-posisi atau jabatan pada unit business, region dan functional head sesuai hirarki yang berlaku.
4. Menyetujui promosi karyawan ke level Senior Management Team dan/atau yang lebih tinggi.
5. Menyetujui usulan khusus di bidang sumber daya manusia yang melebihi kewenangan Head of dan/atau kewenangan Direktur yang membidangi sumber daya manusia.

*Human Capital Committee at Corporate Level:*

1. *To give direction of strategy and policy in the field of human capital.*
2. *To agree the performed human capital remuneration program.*
3. *To agree the proposal of human capital allocation for positions or titles in business unit, region dan functional head according the prevailing hierarchy.*
4. *To approve employee promotion to Senior Management Team level and/or that of higher one.*
5. *To approve the special proposal in the field of human capital exceeding authority of Head and/or authority of Director subordinating human capital.*

Komite Sumber Daya Manusia Level Direktorat:

1. Memberikan arahan dalam perencanaan jumlah karyawan dan rencana pemenuhan kebutuhan karyawan (*capacity plan*) pada masing-masing Unit Kerja dibawah Direktorat.
2. Mambahas dan merekomendasikan pengembangan organisasi pada level Direktorat berdasarkan kebutuhan bisnis dan kebutuhan operasional masing-masing Unit Kerja.
3. Membahas dan merekomendasikan promosi/mutasi terhadap talent-talent yang dinominasikan oleh Region Head/Branch Manager/Head of, khususnya untuk posisi/jabatan kritikal.
4. Membahas dan merekomendasikan pengembangan karyawan, termasuk evaluasi terhadap program pelatihan yang diberikan.
5. Melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja karyawan pada masing-masing unit kerja di bawah Direktorat atau Regional/KC.
6. Menyetujui rencana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan organisasi, produktivitas maupun masalah hubungan industrial pada Region/unit kerja/Direktorat terkait.

*Human Capital Committee at Directorate Level:*

1. *To give direction in total employee plan and the fulfilled employee position plan in each Workign Unit under Directorate.*
2. *To discuss and recommend organization development at Directorate level based on business needs and operational needs of respective Working Unit.*
3. *To discuss and recommend promotion/mutation to the talents nominated by Region Head/Branch Manager/Head, particularly for critical position/title.*
4. *To discus and recommend employee development, including evaluation to the training program provided.*
5. *To carry out an evaluation to the assessed employee performance of each working unit under Directorate or Regional/KC.*
6. *To approve problem solving plan relating to the organization, productivity and industrial relation problems in the related Region/working unit /Directorate.*

Komite Sumber Daya Manusia level Unit Kerja Pengelolaan Jaringan Kantor:

1. Memberikan arahan terhadap perencanaan pemenuhan kebutuhan karyawan (*capacity plan*) pada masing-masing Region/KC/KCP/KK sesuai rencana yang telah ditentukan pada level Direktorat atau Korporasi.
2. Membuat usulan pengembangan organisasi pada level Region/KC/KCP/KK berdasarkan kebutuhan bisnis.
3. Membahas dan merekomendasikan promosi/mutasi terhadap talent-talent yang dinominasikan oleh Region Head, khususnya untuk posisi tertentu seperti Branch Manager.
4. Membahas dan merekomendasikan pengembangan karyawan di KC/KCP/KK yang diajukan oleh Region Head.
5. Melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja karyawan pada masing-masing Region atau KC/KCP/KK.
6. Menyetujui rencana yang berkaitan dengan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas dan lain sebagainya.

*Human Capital Committee at Office Network Management Working Unit Level:*

1. *To give direction to the fufilled employee position plan in each Region/KC/KCP/KK in accordance with the plan determined at Directorate or Corporate Level.*
2. *To give proposal of organization development at Region/KC/KCP/KK level based on business needs.*
3. *To discuss and recommend promotion/mutation to the talents nominated by Region Head, particularly for certain position as Branch Manager.*
4. *To discuss and recommend the employee development in KC/KCP/KK filed by Region Head.*
5. *To carry out an evaluation to the assessed employee performance at each Region or KC/KCP/KK.*
6. *To approve the plan relating to problems of organization, employee morale and productivity, etc.*

Komite Sumber Daya Manusia *level Region*

1. Melakukan evaluasi terhadap proses pemenuhan kebutuhan karyawan pada masing-masing KC/KCP/KK.
2. Membahas dan merekomendasikan promosi/mutasi terhadap talent-talent yang dinominasikan oleh Branch Manager/Sub Branch Manager.
3. Membuat rencana dan usulan pengembangan karyawan di KC/KCP/KK.
4. Melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja karyawan pada masing-masing KC/KCP/KK.
5. Menyetujui rencana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permasalahan organisasi, produktivitas dan lain sebagainya.

*Human Capital Committee at Region Level*

1. *To carry out evaluation to the fulfilled employee position in each KC/KCP/KK.*
2. *To discuss and recommend promotion/mutation to the tallents nominated by Branch Manager/Sub Branch Manager.*
3. *To make plan and proposal of employee development in KC/KCP/KK.*
4. *To carry out an evaluation to the assessed employee performance in each KC/KCP/KK.*
5. *To approve the problem solving plan relating to problems of organization, productivity, etc.*

## Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Struktur dan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. 023/R/DIR-KPTS/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

## *Structure and Membership of Human Capital Committee*

*Structure and membership of Human Capital Committee are stipulated in Decree of the Board of Directors Number No. 023/R/DIR-KPTS/VI/2017 dated June 6, 2017 regarding Human Capital Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:*

| Level Komite<br>*Committee Level* | Jabatan dalam Komite SDM<br>*Position in Human Capital Committee* | Jabatan di Bank Muamalat Indonesia<br>*Position in Bank Muamalat Indonesia* |
|---|---|---|
| Level Korporasi<br>*Corporate Level* | Ketua merangkap anggota<br>*Chairman concurently serving member* | President Director |
| | Sekretaris merangkap anggota<br>*Secretary concurently serving member* | Head of HC Strategy |
| | Anggota<br>*Member* | • Compliance Director<br>• Finance Director<br>• Operation Director<br>• Retail Banking Director<br>• Chief Corporate Banking Officer<br>• Chief Human Capital Officer<br>• Chief Risk Officer |
| Level Directorate<br>*Directorate Level* | Ketua merangkap anggota<br>*Chairman concurently serving member* | *Respective Director* |
| | Sekretaris merangkap anggota<br>*Secretary for member* | *Head of Respective HCBP* |
| | Anggota<br>*Member* | *Head of* L-1 |
| Unit Kerja Pengelolaan Jaringan Kantor<br>*Working Unit Pengelolaan Jaringan Kantor* | Ketua merangkap anggota<br>*Chairman concurently serving member* | *Head of Distribution Network Management* |
| | Sekretaris merangkap anggota<br>*Secretary concurently member* | *Head of HCBP Retail Banking* |
| | Anggota<br>*Member* | *Region Head* |
| Region<br>*Region* | Ketua merangkap anggota<br>*Chairman concurently serving member* | *Region Head* |
| | Sekretaris merangkap anggota<br>*Secretary concurently member* | *Head of HCBP Retail Banking* |
| | Anggota<br>*Member* | *Branch Manager*<br>*Region Operation Manager*<br>*Region Operation Control Manager* |

## Rapat dan Pengambilan Keputusan Komite Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Sumber Daya Manusia pada setiap level akan mengadakan rapat secara berkala dan mengambil keputusan dengan pengaturan sebagai berikut:

Ketentuan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite, dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komite.

## *Human Capital Committee Meeting and Decision Making*

*In the performance of its duties, responsibilities and authorities, the Human Capital Committee at each level will hold a periodic mmeeting and make decisions with the following arrangement:*

*Conditions of Human Capital Committee are as follows:*

1. *The Committee Meeting shall be held at least 1 (one) kali time in a month or at any time according to the needs.*
2. *The Meeting shall be chaired by the Committee Chairman, in the event that the Committee Chairman is prevented from attending, the meeting shall be chaired by one of Committee Members.*

3. Rapat memenuhi kourum dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih Anggota Komite (50% + 1) yang memiliki hak suara.
4. Rapat dapat dilakukan baik secara face to face dan/atau melalui video call/conference call.
5. Ketua dapat mengadakan rapat apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.
6. Komite berwenang mengundang Pimpinan Unit Kerja terkait sebagai terundang yang diperlukan untuk memberikan informasi dan klarifikasi yang diperlukan sehubungan dengan agenda yang dibicarakan di dalam Rapat Komite.

Pengambilan Keputusan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:
1. Keputusan Komite Sumber Daya Manusia harus diupayakan dicapai melalui musyawarah untuk mufakat dan tanpa melalui *voting*.
2. Pengambilan keputusan dianggap memenuhi kuorum dan sah jika dihadiri oleh Ketua Komite dan minimal separuh lebih Anggota Komite (50% + 1).
3. Keputusan atas penyelesaian masalah dapat disirkulasikan menggunakan Memorandum sebagai pendukung oleh Anggota Komite apabila tidak terdapat kebutuhan untuk diselesaikan dalam rapat.
4. Pimpinan unit kerja yang diundang khusus dalam Rapat Komite berperan sebagai nara sumber dan diperkenankan memberikan usulan atau rekomendasi, namun tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Pembahasan yang tidak dapat diputuskan oleh Komite pada suatu level dapat diajukan oleh Ketua Komite untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Komite pada level komite yang lebih tinggi.
6. Hasil dan keputusan dalam setiap Rapat Komite wajib disampaikan kepada Sekretaris Komite pada level Komite yang lebih tinggi dan kepada Head of HC Strategy.

*3. The meeting shall fulfill quorum and be deemed valid if it is attended by at least half and more Committee Member (50% + 1) with voting rights.*
*4. The meeting may be held in face to face and/or through video call/conference call.*
*5. The Chairman may hold meeting in case of urgent problem which must be discussed and decided by the Committee.*
*6. The Committee has authority to invite Chairman of Working Unit relating to one invited to give information and clarification needed relating to the agenda discussed in the Committee Meeting.*

*Human Capital Committee Meeting Decision Making is as follows:*
*1. Decision of Human Capital Committee must be tried to reach a mutual agreement and without voting.*
*2. The decision making is deemed to have fulfilled quorum and valid if it is attended by the Committee Chairman and minimum half and more of the Committee Members (50% + 1).*
*3. Decision to the solved problem may be circulated by a Memorandum as support of the Committee Members in case of no requirement to be settled in the meeting.*
*4. Chairman of the working unit invited particularly in the Committee Meeting having role as resource person and being allowed to give suggestion or recommendation, but the concerned person does not have voting rights in the decision making process.*
*5. The discussion which can not be decided by the Committee at a level can be filed by Chairman of the Commmittee to be discussed and decided in the Committee Meeting at a higher committee level.*
*6. Results and decision in each Committee Meeting shall be submitted to Secretary for the Committee at higher Committee level and to Head of HC Strategy.*

iB

Bank Muamalat

Pertama Murni Syariah




## Tabungan iB Hijrah Haji

# Hijrah itu Ibadah

## Nikmati langkah pertama menuju Baitullah

**#AyoHijrah**

Sesuai Syariah

Terpercaya

Mudah

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat **1500016** | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia BankMuamalat Bank.Muamalat BankMuamalat

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan

# Transparansi Informasi Tentang Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

*Information Transparancy Concerning Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors*

## Kebijakan Terkait Hubungan Kerja Antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai dengan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi. Ketiga manajemen kunci tersebut secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam Board Manual. Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi dan mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, etika, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direktur, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam beberapa hal-hal tertentu yang strategis menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi serta penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan satu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Bank Muamalat Indonesia, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Gabungåan Dewan Komisaris- Direksi, jika diperlukan juga diundang . Dewan Pengawas Syariah. Penyelenggara rapat berkala ini adalah guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya.

## *Policy Relating to Work Relation Between the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors*

*Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors have duties, responsibilities and authorities respectively in line with the functions as being included in the Articles of Association of the Corporate and the applicable laws and regulations. The Corporate's Leadership and management is performed by the Board of Directors, while Sharia Supervisory Board and the Board of Commissioners performs a supervision and give advice to actions done by the Board of Directors. The three key managements have joint responsibilities to maintain the Corporate's business continuity in the long term.*

*All procedures, guidance of work and relation between Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors have been stipulated in the Board Manual. This guidance binds each member of Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors and includes among others responsibility, obligation, authority, right, ethics, and arrangement of meeting and procedures for work relation between Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

*An informal relation may be carried out by each member of Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors, but it does not have a legal strength before it is decided through a valid mechanism in accordance with laws and regulations and Articles of Association. In several certain strategic matters relating to assets, loan, equity, organizational structure and penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal.*

*In order to combine opinion and decide an important issue relating to business continuity and operation of Bank Muamalat Indonesia, the Board of Commissioners and the Board of Directors have schedule to hold periodic meeting in Combined Meeting forum between the Board of Commissioners and the Board of Directors, if required the Sharia Supervisory Board is also invited. This periodic meeting organizing is to discuss various agenda relating to work plan, operation, business opportunity, and strategic issues requiring approval from the Board of Commissioners. This meeting is as coordination form in order to discuss periodic reports of the Board of Directors and to give response, notes and advices included in minutes of meeting.*

*Meeting decision is made based on principles of mutual agreement or on the basis of majority as well as binding to perform the follow-up.*

## Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat

## *Remuneration of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors*

*The granted remuneration of Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors refer to decisions of Shareholders as stipulated in the General Meeting*

Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek seperti:

1. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Bank.
2. Prestasi kerja individu.
3. Kewajaran dengan bank lainnya.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

*of Shareholders by considering review results made by the Corporate. Review in the determined remuneration considers the following aspects:*

1. *Financial performance and reach of Key Performance Indicator (KPI) Bank.*
2. *Individual work achievement.*
3. *Fairness with other banks.*
4. *Consideration of Bank's target and long-term strategy.*

## Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (Remuneration Package) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

## *Remuneration and Other Facilities (Remuneration Package) Stipulated in General Meetings of Shareholders for the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors*

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain :

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

*Remuneration policy and other facilities are stipulated in General Meeting of Shareholders, among others :*

1. *Remuneration, that is income in the form of money (non natura) among other salary, benefit, compensation in the form of shares, bonus and other remuneration forms, and*
2. *Other facilities that is facility accepted not in the form of money (natura), among others facilities of housing, transportation, health insurance, telecommunication, and other facilities ownable and not ownable.*

Selama tahun 2018, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut :

*Throughout 2018, total remuneration and other facilities are as follows:*

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya* *Remuneration Type and Other Facilities* * | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *Total Accepted within 1 Wear* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dewan Komisaris *The Board of Commissioners* | | Direksi *The Board of Directors* | | Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board* | |
| | Orang *Person* | Jutaan (Rp) *Millions (Rp)* | Orang *Person* | Jutaan (Rp) *Millions (Rp)* | Orang *Person* | Jutaan (Rp) *Millions (Rp)* |
| Remunerasi *Remuneration* | 5 | 7.911,40 | 6 | 22.002,10 | 3 | 1.036,62 |
| Fasilitas Lain *Other Facilities* | - | - | - | - | - | - |
| Dapat Dimiliki *Ownable* | - | - | - | - | - | - |
| Tidak Dapat Dimiliki *Not Ownable* | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 7.911,40 | 6 | 22.002,10 | 3 | 1.036,62 |

Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2018, yaitu :

*The Board of Commissioners and the Board of Directors accepting the remuneration package throughout 2018 are :*

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun<br>*Total Remuneration per Person within 1 Year* | Jumlah Komisaris<br>*Total the Board of Commissioners* | Jumlah Direksi<br>*Total the Board of Directors* | Jumlah Dewan Pengawas Syariah<br>*Total Sharia Supervisory Board* |
|---|---|---|---|
| Di atas Rp2 Miliar<br>*More than Rp2 Billion* | 1 | 6 | 0 |
| Di atas Rp1 Miliar s/d Rp2 Miliar<br>*More than Rp1 Billion to Rp2 Billion* | 4 | 0 | 0 |
| Di atas Rp500 juta s/d Rp1 Miliar<br>*More than Rp500 million to Rp1 Billion* | 0 | 0 | 0 |
| Rp500 juta ke bawah<br>*Rp500 million and less* | 0 | 0 | 3 |

## Rasio Gaji

## *Salary Ratio*

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat Indonesia sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

*The highest and lowest salary ration of Bank Muamalat Indonesia in accordance with maximum grade of each employee recorded as follows :*

| Rasio-Rasio<br>*Ratio* | Skala/Perbandingan<br>*Scale/Comparison* | |
|---|---|---|
| Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah<br>*The Highest and Lowest Salary Ratio of Employee* | 41,7 | : 1,0 |
| Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dan Terendah<br>*The Highest and Lowest Salary Ratio of Directors* | 2,4 | : 1,0 |
| Rasio Gaji Komisaris Tertinggi Dan Terendah<br>*The Highest and Lowest Salary Ratio of Commissioners* | 1,1 | : 1,0 |
| Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dan Pegawai Tertinggi<br>*The Highest Salary Ratio of Directors and Employee* | 2,3 | : 1,0 |

# Sekretaris Perusahaan

## *Corporate Secretary*

Menjalankan kewajiban sebagai perusahaan publik, dimana Bank Muamalat Indonesia harus membangun dan memelihara komunikasi dengan regulator, investor, kalangan pasar modal sekaligus masyarakat umum serta dalam rangka keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip GCG dan mendukung penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

*Performs obligation as public company, in which Bank Muamalat Indonesia shall develop and maintain communication with regulator, investor, capital market circle and also general public in the framework of information disclosure in line with GCG principles and support the Corporate operation by the Board of Directors and the Board of Commissioners, Bank Muamalat Indonesia has appointed a Corporate Secretary who is directly responsible to President Director.*

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia telah mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

*Formation of Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia has considered provisions and applicable regulation that is Regulation of Financial Service Authority (POJK) No. 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary for the Issuer Company or Public Company.*

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menjalankan fungsi menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

*Duties and responsibilities of Corporate Secretary for the Issuer Company or Public Company are:*

1. *To follow Capital Market development particularly regulation prevailing in the field of Capital Market.*
2. *To give input to the Board of Directors and the Board of Commissioners, issuers or Public Company to comply with provisions of laws and regulations in the field of Capital Market.*
3. *To assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the performance of corporate governance covering disclosure of information to public, including availability of information in website of Issuer or Public Company, submission of report to the Financial Service Authority on time, administering and documentation of General Meeting of Shareholders, administering and documentation of meeting of the Board of Directors and/or of Commissioners, and implementation of Corporate's orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.*
4. *As liason between Issuer or Public Company and issuer's shareholder or Public Company, Financial Service Authority, and other stakeholders.*
5. *To perform function of protecting confidentiality of documents, data and information except in order to fulfill obligations in accordance with the laws and regulations or otherwise specified in the laws and regulations.*

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
2. Bersama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
3. Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Muamalat Indonesia.
4. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
5. Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan dan mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksi korporasi, GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal.
7. Menyelenggarakan RUPS dan aksi korporasi.

*Detail of duties and responsibilities of Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia is as follows:*

1. *To represent the Board of Directors relating to governmental and private institutions.*
2. *Along with Compliance Division monitors the compliance of Bank Muamalat Indonesia to the provisions and rules regarding banking.*
3. *To support application and implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Bank Muamalat Indonesia.*
4. *To make list of shareholders including share ownership by 5% or more.*
5. *To monitor various activities of corporate secretariat and protocol, correspondence and home affairs related to the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
6. *To perform and supervise the rules relating to corporate actions, GCG, and compliance to capital market regulations.*
7. *To hold General Meeting of Shareholders and corporate actions.*

8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia.
11. Sebagai penghubung atau contact person antara Bank Muamalat Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat.
12. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank Muamalat Indonesia melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

*8. To do coordination with the related internal working unit and external party in order to expedite corporate activities and improve effectivity of working procedures related to activities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
*9. To coordinate/monitor activities relating to acceptance and delivery of corporate information as well as meeting performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
*10. To give service to stakeholders for information needed relating to conditon of Bank Muamalat Indonesia.*
*11. As liason or contact person between Bank Muamalat Indonesia and Financial Service Authority, Indonesia Exchange Stock, other capital market authority, and public.*
*12. To do activities supporting the performed openness principles particularly relating to performance of Bank Muamalat Indonesia through communication to the concerned parties.*

## Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Hayunaji sesuai dengan Surat Keputusan No. 010/HCE/KEP/XII/2018 dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Jakarta.

## *Corporate Secretary Profiles*

*Hayunaji is now taking office as Corporate Secretary in accordance with Decree No. 010/HCE/KEP/XII/2018 and it has been effective since December 14, 2018. Corporate Secretary is domiciled in Jakarta.*



Hayunaji
Sekretaris Perusahaan
*Corporate Secretary*

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 9 Desember 1971. Sebelum bergabung di Bank Muamalat Indonesia pernah menjabat sebagai Vice President, Board Office Head dan CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015-2018), Vice President, Strategy dan Performance Management Head (2014-2015), Senior Manager PT Bank Permata Tbk (2002-2006), Senior Assistant Manager PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Assistant Manager PT Bank Duta Tbk (1998-1999). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta.

*Indonesian Citizen, born in Jakarta on December 9, 1971. Before joining in Bank Muamalat Indonesia he took office as Vice President, Board Office Head dan CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015-2018), Vice President, Strategy and Performance Management Head (2014-2015), Senior Manager of PT Bank Permata Tbk (2002-2006), Senior Assistant Manager of PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Assistant Manager of PT Bank Duta Tbk (1998-1999). He graduated from Bachelor of Economy, Indonesia University, Jakarta.*

Posisi Sekretaris Perusahaan sebelumnya dijabat oleh Ali Akbar Hutasuhut dari tanggal 1 Januari sampai dengan 13 Desember 2018.

*Position of Corporate Secretary was previously served by Ali Akbar Hutasuhut from January 1 to December 13, 2018.*



Ali Akbar Hutasuhut
Sekretaris Perusahaan
*Corporate Secretary*

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 9 November 1970. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia sejak 8 Mei 2015. Sebelum bergabung di Bank Muamalat Indonesia pernah menjabat sebagai Deputy Director Business & Operation PT SOS Indonesia (2013-2015), Assistant Vice President, Corporate Affairs Head PT BRI Syariah (2009-2013), Senior Manager, Office Of The Board Head PT BII Tbk (Maybank) (1996-2009). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

*Indonesian citizen, born in Jakarta on November 9, 1970. Has served as Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia since May 8, 2015. Before joining in Bank Muamalat Indonesia he ever served as Deputy Director Business & Operation PT SOS Indonesia (2013-2015), Assistant Vice President, Corporate Affairs Head of PT BRI Syariah (2009-2013), Senior Manager, Office Of The Board Head PT BII Tbk (Maybank) (1996-2009). He graduated from Bachelor of Economy, Krisnadwipayana University, Jakarta.*

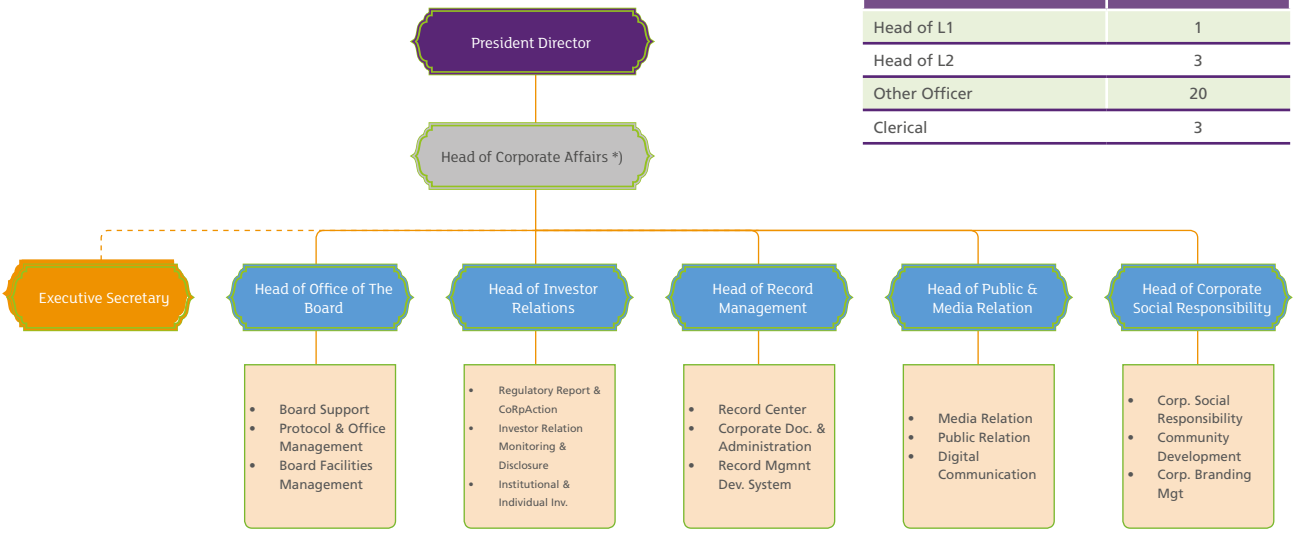
## Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di Bank Muamalat Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Perusahaan dibantu oleh karyawan sesuai struktur dibawah ini.

## *Corporate Secretary Structure*

*Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia shall be responsible to President Director for his duty performance. In the duty performance, Corporate Secretary is assisted by employee in accordance with the structure below.*

| Employee Composition | Corporate Secretary |
|---|---|
| Head of L1 | 1 |
| Head of L2 | 3 |
| Other Officer | 20 |
| Clerical | 3 |




Note:
*) Also act as Corporate Secretary
- Executive Secretary :
- Will be positioned in every Director & Commissioner
- Coordinate with Corporate Affairs

## Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2018, dengan dibantu unit kerja di bawahnya, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan Menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali serta membuat risalah hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
2. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan Bank yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018 di JS Luwansa, Jakarta serta RUPS Luar Biasa Bank yang telah diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Muamalat Tower, Jakarta.
3. Melakukan pelaporan-pelaporan yang menjadi kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka kepada regulator.
4. Melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam mengelola saham Bank Muamalat Indonesia.

## *Duty Performance of Corporate Secretary*

*Throughout 2018, assisted by the working unit he supervises, Corporate Secretary carried out several activities as follows:*

1. *Held and attended 45 (forty-five) meetings of the Board of Directors and 7 (seven) joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as made minutes of meeting related to results of the meetings of the Board of Directors and Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
2. *Assisted the Board of Directors to hold the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank on June 28, 2018 in JS Luwansa, Jakarta as well as the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank on October 11, 2018 in Muamalat Tower, Jakarta.*
3. *Made reports which are the Bank's obligation as open company to the regulator.*
4. *Did activity of Corporate Social Responsibility (CSR).*
5. *Coordinated with Securities Administrative Bureau (BAE) to manage shares of Bank Muamalat Indonesia.*

6. Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
7. Melakukan publikasi materi iklan korporasi selama tahun 2018.
8. Menerbitkan siaran pers ke media sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) kali antara lain Kompas, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily dan Republika.
9. Melakukan *self assesment* pelaksanaan GCG Semester I dan II tahun 2018 terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
10. Melakukan pengaturan protokoler untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Bank.

## Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi. Program yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 2: Investor Relations diselenggarkan oleh ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association) pada 7 - 8 November 2018.
2. 3th Indonesia Corporate Secretary Summit, yang diselenggarakan oleh Intipesan, pada 27-28 Maret 2018.
3. Sustainability Reporting Workshop, yang diselenggarakan oleh WWF-Indonesia, pada 18 Januari 2018.

Fungsi Investor Relations di Bank Muamalat Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan regulator dan para pemegang saham institusi dan individu serta lembaga penunjang pasar modal.
2. Melaksanakan penyampaian pelaporan keterbukaan informasi baik elektronik maupun non elektronik
3. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan memastikan seluruh informasi yang ditampilkan adalah akurat dan *disclosure* informasi terpenuhi sesuai regulasi.
4. Mengkoordinir dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dan aksi korporasi lainnya bersama dengan unit kerja terkait.
5. Menjalin hubungan dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam penanganan administrasi saham.

6. *Stored and manage List of Shareholders including share ownership by 5% or more.*
7. *Did corporate advertising material publication throughout 2018.*
8. *Issued 79 (seventy-nine) press conferences to media among others Kompas, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily and Republika.*
9. *Did a self-assesment of performance of GCG Semester I and II year 2018 related to duty and responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
10. *Did protocol to accompany and meet needs from the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
11. *Managed storage of active and non-active Bank document.*

## *Competency Development of Corporate Secretary*

*In order to support the implemented duty, Corporate Secretary shall take various Competency Development of Corporate Secretary. Program taken by Corporate Secretary throughout 2018 is as follows:*

1. *CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 2: Investor Relations was held by ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association) on November 7 – 8, 2018.*
2. *3th Indonesia Corporate Secretary Summit, held by Intipesan, on March 27-28, 2018.*
3. *Sustainability Reporting Workshop, held by WWF-Indonesia, on January 18, 2018.*

*Functions of Investor Relations in Bank Muamalat Indonesia are as follows:*

1. *To develop communication strategy and keep good relation with regulator and institution's and individual's shareholders as well as capital market supporting institutions.*
2. *To submit report on disclosure of electronic and non-electronic information*
3. *To coordinate the annual report writing and ensure all information displayed is accurate and disclosure of information is fulfilled in accordance with regulations.*
4. *To coordinate and hold general meeting of shareholders and other corporate actions along with the related working unit.*
5. *To have relation with Security Administration Bureau (BAE) in handling share administration.*

# Audit Internal

## *Internal Audit*

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan *(assurance)* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola perusahaan.

*Internal Audit is an assurance activity and independent and objective consultation, in order to increase value and improve the Corporate's operation, through sistematic approach, in the way of evaluating and improving risk management effectivity, internal control, and corporate governance process.*

Bank Muamalat Indonesia memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh 3 (tiga) lini pertahanan (*three line of defense*), yaitu Manajemen Bank dan Operation Control sebagai lini pertahanan pertama (*first line of defense*), Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai lini pertahanan kedua (*second line of defense*) dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defense*).

*Bank Muamalat Indonesia has Internal Control System (ICS) to perform a supervision mechanism made by various lines of the Corporate. In Dalam SPI system and procedure which is clear and stipulated by the Board of Directors and the Board of Commissioners. Whilst, supervision and evaluation to the performance of SPI are made in 3 (three) lines of defense, that is Bank Management and Control Operation as first line of defense, Compliance Working Unit and Risk Management Working Unit as second line of defense and Internal Audit Working Unit (SKAI) as third line of defense.*

## Dasar Hukum Penunjukkan

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Direksi No. 321/DIR/KPTS/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015/18 Syawal 1426 H yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat No. 033/BMI/KOM/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No.500/BMI/DIR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

## *Legal Basis of Appointment*

*The Internal Audit Working Unit (SKAI) was formed in accordance with Bank Regulation of Internal Audit Function Standard of Indonesia Commercial Bank (PBI) No. 1/6/PBI/1999 regarding Assigned Compliance Director and applied Internal Audit Function of Commercial Bank. Head of SKAI was appointed by President Director in accordance with Decree of the Board of Directors No. 321/DIR/KPTS/VIII/2015 dated August 03, 2015/18 Syawal 1426 H which has been approved by the Board of Commissioners in accordance with letter No. 033/BMI/KOM/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 as well as has been reported to the Financial service Authority based on Letter No.500/BMI/DIR/VIII/2015 dated August 13, 2015.*

## Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## *Structure and Position of SKAI*

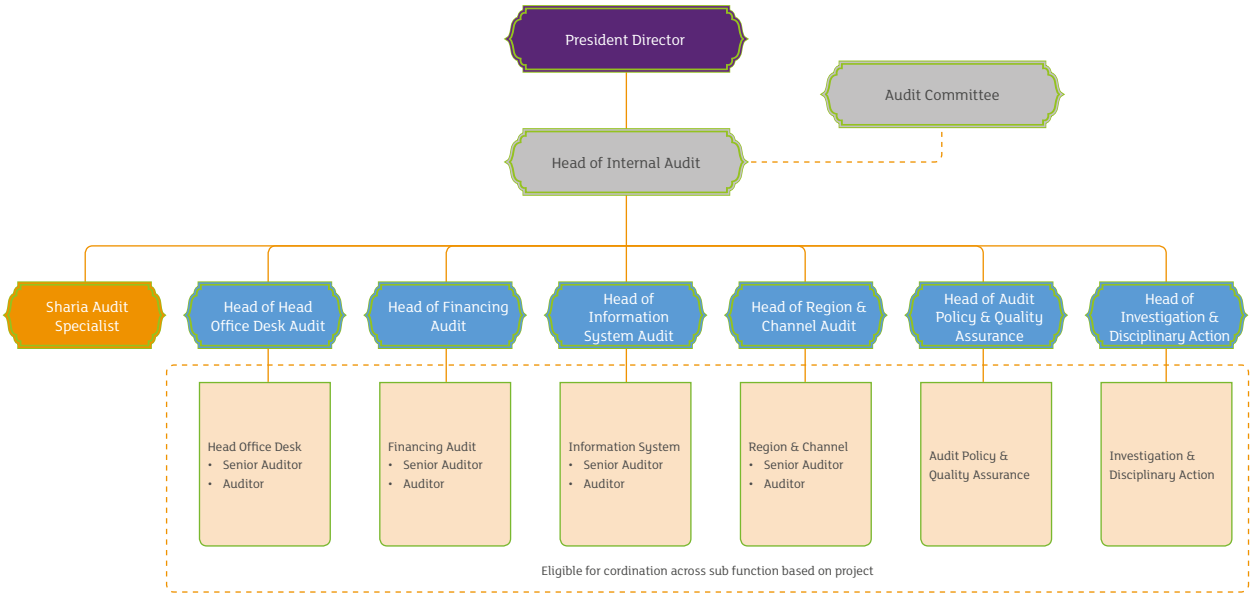
*SKAI is lead by Head of SKAI who is responsible to directly President Director and may communicate with the Board of Commissioners directly or through the Audit Committee to inform various matters relating to audit and perform function of supervision in order to realize the Bank's vission and mission. Head of SKAI is appointed and terminated by the Bank's President Director under an approval from the Board of Commissioners and then reported to the Financial Service Authority (FSA).*

Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang berisi tentang struktur dan kedudukan SKAI, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik audit intern, persyaratan auditor intern dan pertanggungjawaban SKAI.

*The Bank also has Internal Audit Charger containing structure and position of SKAI, duty and responsibility, authority, code of internal audit conduct, internal auditor requirements and accountability of SKAI.*

Struktur Organisasi SKAI per bulan Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

*Organizational Structure of SKAI per August 2018 is as follows:*




## Profil Kepala SKAI

## *Head Profile of SKAI*



Tindomora Siregar
Kepala Satuan Kerja Audit Intern
*Head of Internal Audit Working Unit*

Kepala SKAI PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. adalah Tindomora Siregar. Warga Negara Indonesia, lahir di Batuhorpak, Tapanuli Selatan memperoleh S2 Bidang Finance dari Universitas Birmingham, London. Bergabung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sejak 2015 sampai sekarang sebagai Kepala SKAI. Jabatan sebelumnya, tahun 2010 s/d 2014 sebagai Direktur Group Penjaminan di LPS. Tahun 1984 s/d 2010 sebagai Pengawas Bank Indonesia dengan berbagai jabatan, yaitu tahun 1984 s/d 1986 sebagai Pengawas Bank Indonesia wilayah kerja Padang, tahun 1992 sebagai Pengawas Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta, tahun 1993 s/d 1997 dimutasi ke kantor perwakilan Bank Indonesia London, tahun 1998 s/d 2003 dimutasi ke Bank Indonesia Pusat Jakarta, tahun 2005 sebagai Pemimpin Cabang Bank Indonesia KEPRI di Batam, tahun 2007 s/d. 2009 dimutasi ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia sebagai investigator madya.

*Head of SKAI in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Is Tindomora Siregar. Indonesian citizen, born in Batuhorpak, Tapanuli Selatan graduating master level (S2) in the field of Finance from Birmingham University, London. He has joined with PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. from 2015 up to now as Head of SKAI. Previous posision, from 2010 to 2014 was as Guarantee Group Director in LPS. From 1984 to 2010 he was as Supervisor of Bank Indonesia who had various position, that is form 1984 to 1986 as Supervisor of Bank Indonesia with working area of Padang, in 1992 as Supervisor of Bank Indonesia at Head Office Jakarta, from 1993 to 1997 he was mutated to representative office of Bank Indonesia London, from 1998 to 2003 he was mutated to Head Office of Bank Indonesia Jakarta, in 2005 as Branch Manager of Bank Indonesia KEPRI in Batam, from 2007 to 2009 he was mutated to Directorate of Investigation and Mediation of Bank Indonesia as senior investigator.*

## Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan tanggung jawab SKAI tercantum dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. Melakukan audit semua bidang kegiatan Bank secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
2. Audit dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disusun berdasarkan *Risk Based Audit (RBA)* yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta mendapat masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia *(Audit Charter)*.

## *Duties and Responsibilities of SKAI*

*Duties and responsibilities of SKAI are contained in the Internal Audit Charter and conform to Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia; that is:*

1. *To audit all fields of Bank's activities periodically based on priority scale and risk level.*
2. *Audit is carried out based on an annual plan composed on the Risk Based Audit (RBA) which has been approved by President Director and President Commissioner as well as the related parties give input therefor.*
3. *To audit referring to general guidance, such as SPFAIB, Internal Audit Guidance of Bank Muamalat Indonesia (Audit Charter).*

4. Melaksanakan audit secara reguler pada unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana.
5. Bekerja sama dengan unit Kepatuhan dalam hal audit kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
7. Mengadakan pertemuan rutin dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit serta membahas temuan dan *follow up* temuan.
8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
9. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut *(follow up)* temuan hasil audit.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
11. Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.
12. Menyiapkan laporan tentang *follow up* temuan OJK dan Bank Indonesia (BI).
13. melakukan audit khusus apabila diperlukan.

*4. To audit regularly Head Office and Branch Office units based on priority scale and risk level which have been calculated previously according to the plan.*

*5. To cooperate with Compliance unit in the event of compliance audit to the applicable laws and regulations, including fulfillment of Sharia aspects.*
*6. To make report of Audit Results and submit it to President Director and the Board of Commissionenrs through the Audit Committee with copy carbon to Compliance Director and related Directors.*
*7. To hold a routine meeting with the Audit Committee to evaluate any audit finding as well as discuss and follow up the finding.*
*8. To give improvement and objective information on activities investigated at all management levels;*

*9. To monitor the performed follow-up Melakuka of the audit result finding.*
*10. To compose program for evaluating quality of internal audit activity carried out.*
*11. To prepare report from President Director and the Board of Commissioners in the form of Audit Result Provisions Report to be submitted to the Financial Service Authority (FSA) and other reports according to needs.*
*12. To prepare report on follow-up of finding of OJK and Bank Indonesia (BI).*
*13. To audit in particular if required.*

## Jumlah Karyawan SKAI

Per posisi 31 Desember 2018, jumlah karyawan SKAI ada 22 (dua puluh dua) orang dengan komposisi sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Head of IAT | : 1 orang |
| *Head Office Desk Audit* | : 5 orang |
| *Financing Audit* | : 5 orang |
| *Information System Audit* | : 2 orang |
| *Region & Channel Audit* | : 3 orang |
| *Sharia Audit Specialist* | : 1 orang |
| *Investigation & Disciplinary Action* | : 1 orang |
| *Audit Policy & Quality Assurance* | : 4 orang |

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran SKAI Tahun 2019 (RKAT 2019), SKAI masih memerlukan tambahan 8 (delapan) orang karyawan.

## *Total Employee of SKAI*

*Per posision on December 31, 2018, total employee of SKAI is 22 (twenty-two) persons with the following composition:*

| | |
|---|---|
| *Head of IAT* | *: 1 people* |
| *Head Office Desk Audit* | *: 5 people* |
| *Financing Audit* | *: 5 people* |
| *Information System Audit* | *: 2 people* |
| *Region & Channel Audit* | *: 3 people* |
| *Sharia Audit Specialist* | *: 1 people* |
| *Investigation & Disciplinary Action* | *: 1 people* |
| *Audit Policy & Quality Assurance* | *: 4 people* |

*According to the Work Plan and Budget of SKAI Year 2019 (RKAT 2019), SKAI still needs 8 (eight) employees.*

## Kualifikasi dan Sertifikasi

Sampai dengan akhir tahun 2018, auditor yang telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang, 3 (tiga) orang BSMR Level 3, 1 (satu) orang BSMR Level 4, termasuk kualifikasi ketrampilan lainnya dengan mengundang beberapa narasumber eksternal berupa *inhouse training*. Program sertifikasi keahlian ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2019 baik sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional seperti *Qualified Internal Auditor* (QIA), *Certified Internal Auditor* (CIA) dan Sertifikasi Manajemen Risiko level 1, 2 dan 3 sesuai peraturan yang berlaku.

Sedangkan program pelatihan yang telah dilakukan pada tahun 2018 adalah *Audit Grading* dan *Audit Report*, *inhouse training Financing Audit, Treasury Audit* dan *Trade Finance Audit*. Selain itu SKAI juga telah menyelenggarakan *knowledge sharing* setiap minggu dengan mengundang narasumber baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. KaryawanSKAI juga telah secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Human Capital Learning, seperti analisa pembiayaan ritel, operasional cabang, dll.

## Pelaksanaan Audit Intern

Selama tahun 2018, SKAI telah melakukan 18 audit reguler/ umum (yaitu audit yang direncanakan di dalam RKAT 2017) dan 21 audit khusus (yaitu audit di luar RKAT 2017 atau audit karena adanya permintaan oleh Direksi, Komite Audit, Regulator, dll.). Dengan demikian, secara keseluruhan SKAI telah melakukan penugasan audit sebanyak 39 audit (195%).

## *Qualification and Certification*

*Up to the end of 2018, auditosr who have obtained Bank's Internal Auditor Certification at Supervisor Level from Banking Profession Certification Institution (LSPP) are 13 (thirteen) persons, 3 (three) persons at BSMR Level 3, 1 (one) person at BSMR Level 4, including other skill qualifications by inviting several information sources in the form of inhouse training. This expertise certification program will be continued in 2019 for national and international certification as Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Internal Auditor (CIA) and Risk Management Certification level 1, 2 and 3 according to the applicable regulations.*

*Whilst, the training program provided in 2018 is Audit Grading and Audit Report, inhouse training Financing Audit, Treasury Audit and Trade Finance Audit. Moreover, SKAI has also held knowledge sharing every week by inviting information sources from both inside and outside the Corporate. Employees of SKAI has also participated in training actively implemented by the Human Capital Learning, such as retail financing analysis, branch operation, etc.*

## *Implementation of Internal Audit*

*Throughout 2018, SKAI has carried out 18 regular/general audits (that is audit planned in RKAT 2017) and 21 special audit (that is audit outside RKAT 2017 or audit carried out because of request from the Board of Directors, the Audit Committee, Regulator, etc.). Therefore, SKAI has entirely assigned 39 audits (195%).*

# Sistem Pengendalian Intern (SPI)

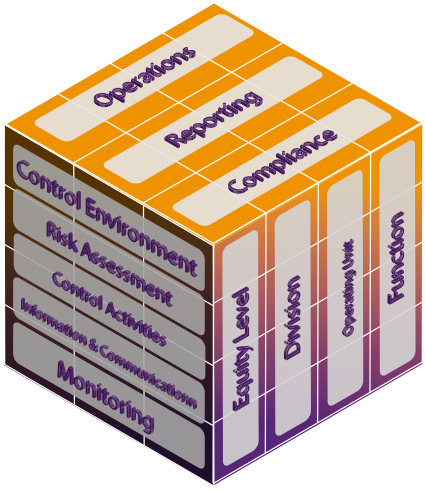
## *Internal Control System (ICS)*

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personil lain.

Salah satu konsep sistem pengendalian intern yang saat ini digunakan oleh banyak perusahaan di dunia adalah sistem pengendalian intern yang dirancang oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Sistem pengendalian intern menurut COSO mencakup 5 elemen utama sebagaimana gambar dan penjelasan di bawah ini:

*Internal control system is a system designed to reach operational effectivity and efficiency, reliability of financial statement and compliance to the applicable laws and regulations. The internal control process involves the Board of Commissioners, of Directors, Management, and other personnels.*

*One of internal control system concepts currently used by most of Corporate in the world is internal control system designed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The internal control system according to COSO covers 5 main elements as indicated in the figure and explanations below:*




1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)
   Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya manajemen, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*)
   Yaitu mekanisme yang dirancang untuk mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)
   Yaitu pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
   Yaitu sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan membagi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
5. Pemantauan (*monitoring*)
   Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus dipantau untuk memastikan sistem telah berjalan dengan baik.

1. *Control environment*
   *Control environment is a base of all internal control components. Control environmental factors cover integrity, ethical value, and competency of human and entity, management philosophy and management style, management manner gives authority and responsibility as well as organizes and develop its human, concern and direction given by Commissioners.*
2. *Risk assessment*
   *It is a mechanism designed to identify, analize, and manage the risks relating to various activity in which the organization operates.*
3. *Control activities*
   *It is the implementation of policies and procedures stipulated by the management to assist the ensured goal to be reached*
4. *Iinformation and communication*
   *It is a system enabling person or entity, to obtain and provide information required for the purpose of implementing, managing, and control its operation.*
5. *Monitoring*
   *Implementation of the internal control system must be monitored to ensure that the system has run well.*

SKAI telah melakukan audit untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen, yaitu:

1. Risiko bank telah diidentifikasi dan dikelola secara baik.
2. Risiko dan pengendalian telah dikomunikasikan di semua jajaran organisasi.
3. Interaksi dengan berbagai unit kerja sebagai bagian dari proses tata kelola telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tersedia informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu.
5. Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, standar (kode etik), prosedur, hukum serta peraturan yang berlaku.
6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
7. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
8. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
9. Ketentuan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah diterapkan dengan baik.
10. Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan terhadap Bank, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
11. Dana masyarakat telah dikelola dengan baik.
12. Harta kekayaan Bank telah diamankan dengan baik.

*SKAI has audited to ensure that the internal control system has been operated well by the management, that is:*

1. *Bank risk has been identified and managed well.*
2. *The risk and control have been communicated at all networks of organization.*
3. *Interaction with various working units as part of governance process has been performed well.*
4. *Availability of accurate, reliable, complete and on-time financial, managerial and operational information.*
5. *Employees' action obey policies, standards (code of conduct), procedures, laws as well as applicable regulations.*
6. *Resources are obtained economically, use efficiently, and protected sufficiently.*
7. *Program, plan and target determined may be reached optimumly.*
8. *Internal control quality is always improved continously.*
9. *Provisions of Sharia issued by National Sharia Board (DSN) have been applied well.*
10. *Regulations having impact and influence significantly to the Bank, are identified and managed reasonably.*
11. *The Fund of community has been managed well.*
12. *The Bank's properties have been protected well.*

## Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit (*on site*) maupun pengawasan diluar audit (*off site monitoring*). Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit. Tindak lanjut terhadap temuan audit dan pencapaian atas rencana audit tersebut dipantau oleh bagian *Quality Assurance* (QA) yang merupakan bagian independen di SKAI.

## *Supervisory Process*

*SKAI exercises supervision continously and regularly, through on site audit activity and off site monitoring. The supervision provided through the audit activity, begins from making annual audit plan approved by President Director and Commissioners through the Audit Committee, realizing the audit plan according to the schedule determined, reporting the audit results to president Director and Commissioners through the Audit Committee and other related parties, and monitoring the follow-up of audit finding. The follow-up of the audit finding and reach of the audit plan are monitored by the Quality Assurance (QA) division which is an independent part in SKAI.*

## Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SKAI untuk menentukan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan auditee.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2018 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada auditee secara bulanan. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang

## *Finding Follow-up Monitoring*

*In accordance with the provisions of Working Guidance of Internal Supervisor Unit concerning Follow-up Monitoring, one of duties from Head of SPI is to compose and maintain the system to monitor the follow-up of assignment results submitted to the management.*

*The auditor's finding follow-up monitoring is a series of activity carried out sistematically by SKAI to determine that the audit object (auditee) has perfomed recommendation of investigation results, coming from internal and external auditor, in the grace period agreed previously.*

*The follow-up Monitoring is aimed to assess objectively how far the recommendation of finding is performed and to ensure written and physical data truth in the field for the follow-up report ever submitted by the auditee.*

*The auditor's finding follow-up monitoring activity in 2018 was performed throughout the year by asking the monthly follow-up report to the auditee. Physical check activity in the field was also carried out to see the physical realization of the performed follow-up in Head Office and Branch Office*

# Audit Eksternal

## *External Audit*

Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang merupakan sekumpulan dari beberapa Kantor Akuntan Publik. Sebagai anggota (member) dari BKR International yang berkantor pusat di New York dan telah ditunjuk Doli Diapary Siregar sebagai *Managing Partner* di Indonesia serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Register AP.0396. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali beralamat di Menara Kuningan lantai 11, Jl HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940. KAP ditugaskan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Penugasan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) sebagai akuntan publik merupakan penunjukan yang ketiga bagi Bank dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 31 Desember 2018 berdasarkan surat No. 196/B/FND-SRT/XII/2108 tanggal 10 Desember 2018 perihal Penunjukan Akuntan Publik. Berikut adalah informasi Akuntan Publik (AP) dan KAP yang telah ditunjuk Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

*Bank Muamalat Indonesia has appointed Public Accountant Office (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali (dbsd&a) which is a group of several Public Accountant Offices. As member of International BKR having head office in New York and has been appointed by Doli Diapary Siregar as Managing Partner in Indonesia as well as listed in the Financial Service Authority (FSA) with Registry Number AP.0396. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali domiciled at Menara Kuningan floor 11, Jl HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940. KAP was assigned to audit the Financial Statement for fiscal year ending December 31, 2018. The assignment from KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali (dbsd&a) as public accountant is the third appointment for the Bank in the framework of audit for annual historical financial information for the fiscal year of December 31, 2018 pursuant to letter No. 196/B/FND-SRT/XII/2108 dated December 10, 2018 regarding Appointment of Public Accountant. The following is information on Public Accountant (AP) and KAP which has been appointed by Bank Muamalat Indonesia within year 2018, that is as follows:*

| Akuntan Publik<br>*Public Accountant* | | |
|---|---|---|
| Nama<br>*Name* | : | Doli Diapary Siregar, CPA<br>*Doli Diapary Siregar, CPA* |
| Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan<br>*Registration Number of AP from Minister of Finance* | : | AP.0396 |
| Nomor Surat Tanda Terdaftar AP<br>*Registered Letter Number of AP* | : | STTD. AP-314/PM.22/2018 |
| Tahun Penugasan<br>*Year of assignment* | : | 2018 |

Sedangkan Biaya honorarium KAP dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

*Whilst, honorarium cost of KAP from 2013 to 2018 is as follows :*

| Periode Tahun<br>*Period of year* | Signing Partner | Kanto Akuntan Publik<br>*Public Accountant Office* | Kantor Akuntan Publik Asing<br>*Foreign Public Accountant Office* | Honorarium |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Doli Diapary Siregar, CPA | Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) | BKR International | 1.000.000.000 |
| 2017 | Doli Diapary Siregar, CPA | Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) | BKR International | 900.000.000 |
| 2016 | Doli Diapary Siregar, CPA | Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) | BKR International | 1.200.000.000 |
| 2015 | Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA | Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA | - | 1.350.000.000 |
| 2014 | Sinarta | Purwantono, Suherman, & Surja | Ernst & Young Global Ltd | 925.000.000 |

# Fungsi Anti Fraud

## *Anti-Fraud Function*

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, fungsi Anti *Fraud* menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee* dijabarkan dibawah ini:
   a. Anti *Fraud Awareness* :
      Upaya untuk menumbuhkan Anti *Fraud* Awareness dilakukan diantaranya melalui :
      i. Penyampaian deklarasi anti *fraud*.
         Deklarasi Anti *Fraud* ini wajib untuk diketahui, dipahami dan ditandatangani/disetujui oleh seluruh karyawan BMI dua kali setahun melalui "Muamalat Human Power (MHP)" atau sistem/ aplikasi SDM yang diperbaharui setiap tahunnya.
      ii. Program *Employee Awareness*.
         Secara konsisten melaksanakan program kampanye/sosialisasi Anti *Fraud* serta *Email Blast* melalui *employee relations* ke seluruh karyawan di kantor kas, kantor capem dan kantor cabang. Selain itu juga dikirim melalui *News Letter* yang di email kepada seluruh pejabat internal Bank Muamalat Indonesia untuk diteruskan kepada sub ordinat masing-masing. Program kampanye tersebut juga dilaksanakan bekerjasama dengan HC *Learning* pada saat pelaksanaan program training reguler di unit kerja/bisnis seperti Program Mulia, MODP *Future Leader*, dan RFC *Managers Program*.
      iii. Program *Customer Awareness*.
         - Menyampaikan informasi anti *fraud* di media elektronik Bank : ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, dan juga melalui *social media* (Twitter, Facebook).
         - Himbauan tertulis di area *banking hall*.
      iv. Pelaksanaan Training
         Mengikutsertakan karyawan dalam eksternal training/*workshop*.
      v. Sosialisasi Anti *Fraud*
         Telah dilakukan *Training of Trainer* (ToT) Anti *Fraud* yang diikuti oleh Region Head, Region Operation Manager, Branch Manager, dan Branch Operation Manager diseluruh area dan cabang se-Indonesia yang kemudian disebut Anti *Fraud* Ambasador (Ambasador). Ambasador diberi sertifikat dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kampanye di area dan cabang masing - masing.
         Selama tahun 2018, Ambassador telah menyampaikan kampanye dengan pencapaian 100% (dari 83 Cabang).
   b. Identifikasi Kerawanan
      Berdasarkan kasus-kasus *fraud* yang terjadi, aktivitas yang memiliki tingkat kerawanan *fraud* yang tinggi antara lain bidang Operasional, bidang Pembiayaan, dan bidang Teknologi Informasi. Hasil identifikasi kerawanan telah tertuang dalam rekomendasi perbaikan masing-masing kasus dan telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
   c. *Know Your Employee*
      Dalam hal proses seleksi atau rekruitmen calon karyawan, Divisi terkait atau Kantor Cabang secara

*In the performed function and duties, Anti-Fraud function applies a fraud control strategy referring to SEBI No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 having 4 (four) pillars, that is:*

1. *Prevention is to take steps in order to reduce risk potency of the occurred fraud, among others anti-fraud awereness, identification of crisis, and know your employee are explained below:*
   a. *Anti-Fraud Awareness :*
      *Trying to grow Anti-Fraud Awareness is made, among others:*
      i. *Submitted anti-fraud declaration.*
         *Anti-fraud declaration is obliged to know, understand and sign/approve by all employees of BMI twice in a year through "Muamalat Human Power (MHP) " or SDM system/application renewed every year.*
      ii. *Employee Awareness Program.*
         *Campaign program/Anti-Fraud socialization along with Email Blast through the employee relation to all employees in cash office, supporting-branch office and branch office is performed. Moreover, News Letter is emailed to all internal officers of Bank Muamalat Indonesia to be continued to each subordinate. Such campaign program is also performed in cooperation with HC Learning at the time of the performed regular training program in the working/business unit, such as Mulia Program, MODP Future Leader, and RFC Managers Program.*
      iii. *Customer Awareness Program.*
         - *It is to provide anti-fraud information in Bank electronic media: ATM, Mobile Banking, Internet Banking, and also through social media (Twitter, Facebook).*
         - *A written appeal in banking hall area.*
      iv. *Given Training*
         *It includes employees in external training/workshop*
      v. *Anti-Fraud Socialization*
         *Training of Trainer (ToT) Anti-Fraud attended by Region Head, Region Operation Manager, Branch Manager, and Branch Operation Manager throughout Indonesia area and branch later named Anti-Fraud Ambassador (Ambassador) has been provided. Ambassador gives certificate and obligation to conduct campaign in each area and branch.*
         *Throughout 2018, Ambassador conducted campaign reaching 100% (from 83 branches).*
   b. *Crisis Identification*
      *Based on fraus cases occurred, activity having high level of fraud crisis among others in the field of Operation, Finance, and Information Technology. Crisis identification results are included in the improvement recommendation of each cases and have been submitted to related parties to follow up.*
   c. *Know Your Employee*
      *In the selection or recruitment process of prospective employees, the related Division or Branch Office*

reguler telah melakukan proses penerimaan calon karyawan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk yang terkait dengan *screening*.

2. Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system* dijabarkan dibawah ini:
   a. Kebijakan dan Mekanisme *Whitsleblowing*
      Kebijakan *Whistleblowing* telah tercantum dalam ketentuan internal, yakni terkait perlindungan kepada *whistleblower*, pengaduan *fraud* dan Sistem Pelaporan & Mekanisme Tindak Lanjut Laporan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dimana Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikannya dengan format bebas.
   b. *Surprise Audit*
      Pemeriksaaan mendadak untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pencegahan *fraud* di Bank Muamalat Indonesia.
   c. *Surveillance System*
      Pemeriksaaan secara diam-diam untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pencegahan *fraud* di Bank Muamalat Indonesia.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
   a. Adapun investigasi dilakukan untuk:
      i. Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*, sehingga (jika diperlukan) dapat digunakan untuk melakukan tuntutan hukum ke pengadilan.
      ii. Mengetahui bagaimana *fraud* dapat terjadi.
      iii. Mengetahui dampak atas *fraud*, pihak yang terlibat dan kelemahan dari sistem/proses yang menyebabkan terjadinya *fraud* sehingga dapat ditemukan langkah perbaikan yang efektif.
      iv. Pemberian sanksi kepada pelaku *fraud*.
   b. Sistem pelaporan mencakup pelaporan secara internal kepada pihak Manajemen Bank maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
   c. Pihak yang berwenang memutuskan pengenaan sanksi yang dikategorikan sebagai tindakan *fraud* berdasarkan hasil rekomendasi Komite Disiplin adalah Direksi. Pengenaan jenis dan kadar berat ringannya sanksi kepada pelaku mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut seperti dijabarkan dibawah ini.
   a. Pemantauan
      i. Melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan dalam upaya menghindari berulangnya kasus *fraud* yang sama.
      ii. Memastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan secara memadai oleh unit kerja terkait.

*regularly, recruitment process of prospective employees in accordance with the applicable procedures, including those relating to the screening has been taken place.*

2. *Detection is to take steps for identifying and finding Fraud in bank business activity, among others whistleblowing policy and mechanism, surprise audit and surveillance system explained below:*
   a. *Whitsleblowing policy and mechanism*
      *Whistleblowing policy has been included in internal provisions, that is related to protection against whistleblower, fraud complaint and Reporting & Mechanism System of report follow-up referring to the applicable laws and regulations in which the Bank guarantees confidentiality of informant's identity and report submitted in free format.*
   b. *Surprise Audit*
      *A surprise audit to increase employee awareness in the performance of duties and responsibilities in order to prevent fraud in Bank Muamalat.*
   c. *Surveillance System*
      *A secret audit to increase employee awareness in the performance of duties and responsibilities in order to prevent fraud in Bank Muamalat.*

3. *Investigatioin, Reporting and Sanction are to take steps in order to dig information (investigation), reporting system and sanction imposed to the fraud in bank business activity.*
   a. *Investigation is carried out:*
      i. *To collect evidences related to events which are suspected as fraud, so that (if required) it can be used to file a lawsuit in court.*
      ii. *To know how fraud can occur.*
      iii. *To know impact on the fraud, parties involved and weakness of the system/process causing the fraud so that effective steps of improvement can be found.*
      iv. *Sanction imposed to a fraud actor.*
   b. *Reporting system covers internal reporting to Bank Management and the Financial Service Authority and Bank Indonesia.*
   c. *The authorized party to decide the imposed sanction categorized as fraud action based on recommendation results of Discipline Committee is the Board of Directors. The imposed sanction type and level of light or heavy sanction to an actor refer to the applicable provisions.*

4. *Monitoring, Evaluation and Follow-up are to take steps in order to monitor and evaluate fraud, as well as follow-up mechanism as explained below.*
   a. *Monitoring*
      i. *To do a monitoring of improvement to avoid the same repeating fraud case.*
      ii. *To ensure that recommendation of improvement has been carried out sufficiently by related working unit.*

b. Evaluasi
Mengevaluasi akar penyebab dari setiap kejadian *fraud* untuk menentukan langkah perbaikan *(corrective action)* yang perlu dilakukan, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kontrol (sistem pengendalian) dan pelaksanaan pedoman dan prosedur kerja, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola di unit kerja terkait tempat terjadinya *fraud*.

c. Tindak Lanjut
Memperbaiki penyebab terjadinya *fraud* dengan memperkuat sistem pengendalian internal, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola yang lebih baik.

*b. Evaluation*
*To evaluate root cause of each fraud event to determine a corrective action required to do, it covers evaluation of control adequacy (control system) and an implemented guidance and work procedures, risk management process and governance process in the working unit related to the occurred place of fraud.*

*c. Follow-up*
*To correct cause of fraud by strengtening the internal control system, risk management process and better governance process.*

Disamping itu fungsi Anti *Fraud* mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya.
2. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi selama proses investigasi berlangsung.
3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil audit khusus/ investigasi kepada Presiden Direktur, Komisaris melalui Komite Audit dan ditembuskan ke Direktur Kepatuhan untuk mendapatkan arahan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
4. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin.
5. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Pedoman dan Prosedur Anti *Fraud*.
6. Memberikan training, sosialisasi ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya *Fraud*.
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/implementasi dari Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti *Fraud*.
8. Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *Fraud* yang terjadi.
9. Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *Fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
10. Berkoordinasi dengan instansi dan aparatur negara terkait untuk menindaklanjuti kasus *Fraud*, baik yang dilakukan oleh Pelaku internal maupun eksternal.
11. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
12. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui.
13. Mengadministrasikan seluruh dokumen dengan sebaik-baiknya. Seluruh dokumen bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak manapun kecuali atas izin Head of Internal Audit secara tertulis dengan diketahui oleh Presiden Direktur.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Anti *Fraud* bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait.

*Moreover, Anti-Fraud function has duties and responsibilities, among others :*

1. *to be obliged to conceal all information relating to informant's identity forever.*
2. *To be obliged to conceal all information during the investigation process being taken place.*
3. *To be obliged to submit report on special audit result/ investigation to president Director, Commissioners throught the Audit Committee andn copy carbon to Compliance Director to get direction then reported to the related party to follow up.*
4. *To be obliged to submit all documents and data including information from the parties related to the Discipline Committee.*
5. *To compose and make review periodically for Anti-Fraud Guidance and Procedures.*
6. *To give training, socialization or campaign and guidance to all networks of organization for the purpose of Fraud anticipation and prevention.*
7. *To monitor and evaluate the implementantion of Anti-Fraud Guidance and Procedures.*
8. *To evaluate effectivity of the Corporate to prevent, detect, invetigate and improve impact of fraud occurred.*
9. *To hold routine meeting related to follow-up of fraud handling and make periodic report to Supervision Director.*
10. *To coordinate with the related institution and state apparatus reforms to follow up fraud case, done by internal and external actor.*
11. *To coordinate with the related working unit in report to Bank Indonesia and or the Financial Service Authority in order to submit Anti-Fraud Strategy Applying Report of each semester made in January and July every year.*
12. *To report to the Financial Service Authority relating to the Fraud estimated to have negative impact significantly to Bank, no later than 3 (three) business days after Bank has known.*
13. *To administer all documents as well as possible. All documents is very secret and can not be lended to any party except getting permit from Head of Internal Audit in writing acknowledged by President Direktur.*
14. *In the performance of its duties, Anti-Fraud function cooperates with other related working units.*

Aktivitas yang dilakukan fungsi Anti *Fraud* selama tahun 2018 sebagai berikut:

*Activity carried out is Anti-Fraud function throughout 2018 is as follows:*

1. Penyampaian Laporan Penerapan Strategi anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan semester I dan semester II tahun 2018.
2. Penyampaian Laporan Kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
3. Mengikutsertakan anggota unit kerja Anti *Fraud* dalam training/pelatihan, seminar atau workshop tentang anti *fraud* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
4. Sosialisasi anti *fraud* kepada seluruh unit bisnis /unit kerja.
5. Melakukan reminder kepada unit bisnis/unit kerja tentang kewajiban pengiriman kejadian *fraud*.
6. Meeting koordinasi pembahasan penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
7. Proses investigasi penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/ unit kerja.
8. Rekapitulasi kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan
9. Menyampaikan Anti *Fraud Statement* yang disampaikan dua kali setahun selama tahun 2018.
10. Selama tahun 2018, Anti *Fraud Ambassador* telah menyampaikan kampanye dengan pencapaian 100% (dari 83 Cabang).

*1. Submission of report on Applied Anti-Fraud Strategy to the Financial Service Authority in semester I and semester II of 2018.*
*2. Submission of report on fraud events to the Financial Service Authority estimated to have negative impact significantly to the Bank and/or customers, including having potency to be public attention.*
*3. To include members of Anti-Fraud working unit in training, seminar or workshop concerning anti-fraud held by external party.*
*4. Anti-fraud socialization to all buisness units/working units.*
*5. To make a reminder to business units/working units concerning obligation of dispatch of fraud event.*
*6. Coordination Meeting discussiong settlement of fraud case in business units/working units.*
*7. Investigation process to settle the fraud case in business units/working units.*
*8. Recapitulation of fraud case in business units/working units for the current year*
*9. To submit an Anti-Fraud Statement once in a year throughout 2018.*
*10. Throughout 2018, Anti-Fraud Ambassador has submitted campaign reaching 100% (from 83 Branches).*

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh unit kerja Anti *Fraud* dan berikut kami sampaikan tabel Internal *Fraud* BMI:

*Each audit finding with fraud category will be handled by the anti-fraud working unit and the following we give Internal BMI Fraud table:*

## Tabel Internal *Fraud* BMI

## *Internal BMI Fraud Table*

| Internal *Fraud* dalam 1 (satu) tahun *Internal Fraud in 1 (one) year* | Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh *Total Case Settled By* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengurus *Management* | | Pegawai Tetap *Permanent Employee* | | Pegawai Tidak Tetap *Non-Permanent Employee* | |
| | Tahun Sebelumnya *Prior Year* | Tahun Berjalan *Current Year* | Tahun Sebelumnya *Prior Year* | Tahun Berjalan *Current Year* | Tahun Sebelumnya *Prior Year* | Tahun Berjalan *Current Year* |
| Total *Fraud* *Total Fraud* | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan *Were Settled* | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank*) *In the Process of Completion in the Internal Bank* | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya *Not Yet Resolved* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum *It Has Been Followed Through The Law Process* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**) kasus fraud sudah diselesaikan di 2018.*

**) fraud cases were settled in 2018.*

Kasus pada tahun berjalan telah diselesaikan seluruhnya oleh unit Anti *Fraud* bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/*Ittifaq* Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, ada penggantian kerugian oleh pelaku sehingga dampak kerugian finansial bagi Bank Muamalat Indonesia menjadi kecil.

*The case of the current year have been resolved entirely by the Anti units fraudcooperate with other relevant units. The perpetrators also been penalized in accordance with internal guidelines and CLA/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia. Moreover, no compensation by the offender so that the impact of the financial loss for the Bank Muamalat Indonesia becomes small.*

## Kegiatan Sosialisasi Selama Tahun 2018

## *Socialization Activity in 2018*

Pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

1. *Gathering* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan pasca kejadian *fraud* yang terjadi di Unit Bisnis/Cabang.
2. *Campaign* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan *Fraud Prevention* di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Training* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyisipkan materi anti *fraud* kedalam acara training-training reguler yang diselenggarakan oleh fungsi Human Capital (HC) - Learning & Talent Management.

*The implemented socialization has been made through several ways, among others :*

1. *Gathering is socialization activity carried out after the fraud event occurred in a Business Unit /BranchCabang.*
2. *Campaign is socialization activity carrying out Fraud Prevention in several locations which have been determined previously.*
3. *Training is socialization activity carried out by inserting anti-fraud material into regular training given by Human Capital Division (HCD)-Learning Center.*

Pelaksanaan kampanye Anti *Fraud* telah dilakukan oleh Anti *Fraud Ambasador* di cabang masing-masing. Anti *Fraud* Ambasador terdiri dari *Branch Manager, Branch Operation Manager, Regional Manager* serta *Regional Operation Manager* yang telah mengikuti *Train the Trainer* untuk menyampaikan Kampanye Anti *Fraud*.

*The Anti-Fraud campaign has been implemented by Anti-Fraud Ambasador in each branch. The Anti-Fraud Ambasador consists of Branch Manager, Branch Operation Manager, Regional Manager as well as Regional Operation Manager which have participated in Training the Trainer to provide Anti-Fraud Campaign.*

# *Whistleblowing System*

## *Whistleblowing System*

*Whistle Blowing* adalah tindakan seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain mengungkap dugaan indikasi *fraud*. *Whistleblower* adalah seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain yang mengungkapkan dugaan indikasi *fraud*.

*Whistle Blowing is action of an employee or several employees or other persons divulging the alleged fraud indication. Whistleblower is one or several employees or other persons divulging the alleged fraud indication.*

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblower* tersebut telah diatur dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* dan *Prosedur* Anti *Fraud* Bank Muamalat Indonesia, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya. Sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

*Generally Whistleblower has been arranged in Good Corporate Governance Policy and Procedures for Anti-Fraud Bank Muamalat Indonesia, in which the Corporate gives opportunity to each employee, former employees or other employees, member of an institution or organization, as well as other parties in order to submit/report an action deemed to have violated the implementation of Corporate GCG Perseroan personally, by a letter, phone, email and other media. This system guarantees the confidentiality of informant identity and his information.*

Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

*whistleblowing policy and mechanism consist of 2 (two) main activities, that is :*

1. Perlindungan kepada *Whistleblower*
   a. Pelapor atau *Whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
   b. Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *Whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
   d. Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data indentitasnya.
   e. Mekanisme *Whistleblowing* ditangani oleh fungsi Anti *Fraud* dan mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Anti *Fraud*.
   f. *Whistleblower* dapat diberikan *reward* atau *punishment* yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi.
   g. Sistem Pelaporan dan mekanisme tindaklanjut laporan diatur Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Anti *Fraud*.

1. *Protection against Whistleblower*
   a. *Informant or Whistleblower may give information verbally or in writing through media determined.*
   b. *Bank has commitment to protect and facilitate legal protection given to Whistleblower by keeping the confidentiality of whistleblower identity and information provided in accordance with the prevailing provisions.*
   c. *For any cost incurred to facilitate legal protection against Whistleblower until the cases has been settled it shall be Bank's burden.*
   d. *Bank keeps the Whistleblower identity data secret for those include their identity data.*
   e. *The Whistleblowing mechanism is handled by the Anti-Fraud Function and refers to the procedures for Anti-Fraud Implementation.*
   f. *For Whistleblower, reward or punisment may be given, the provisions of which conform to policy of Directors.*
   g. *The follow-up report and mechanism is provided in the procedures for the Anti-Fraud Implementation.*

2. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*
   a. *Whistleblower* membuat laporan dengan format bebas, dikirimkan ke fungsi Anti *Fraud* melalui berbagai media yang ada.
   b. Fungsi Anti *Fraud* mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima.
   c. Fungsi Anti Fraud menganalisa laporan kasus terindikasi *Fraud* yang diterima dari *whistleblower*.
   d. Jika dari analisa fungsi Anti *Fraud* diperoleh dugaan kuat adanya *Fraud*, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran laporan *wistleblower* tersebut.
   e. Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan fungsi Anti *Fraud* sesuai dengan Pedoman dan Prosedur Anti *Fraud*.

2. *The Follow-up Report and Mechanism of Whistleblower*
   a. *Whistleblower makes report in free format, is dispatched to the Anti-Fraud function through various existing media.*
   b. *The Anti-Fraud function administers whistleblower report accepted.*
   c. *Anti-Fraud function analyzes fraud-indicating case accepted from whistleblower.*
   d. *If from the Anti-Fraud function analysis it is obtained a strong allegation of fraud, further investigation will be carried out to prove the truth of the wistleblower's report.*
   e. *Further process follows procedures for investigation and report of Anti-Fraud function in accordance with the Anti-Fraud Guidance and Procedure.*

3. Terdapat 3 (tiga) *whistleblower* yang masuk selama 2018 dan semuanya telah ditangani oleh fungsi investigasi.

3. *There are 3 (three) whistleblowers included in 2018 and all of them are handled by the investigation function.*

| No. | Jenis Laporan<br>*Type of Report* | Jumlah \| *Total* | |
|---|---|---|---|
| | | Laporan<br>*Report* | Sudah ditindaklanjuti<br>*Has been followed up* |
| 1. | Benturan Kepentingan<br>*Conflict of Interest* | - | - |
| 2. | Kelakuan Tidak Etis<br>*Not Ethical Attitude* | - | - |
| 3. | Pembocoran Informasi<br>*Divulged Information* | - | - |
| 4. | Penyuapan/Gratifikasi/Permintaan Uang<br>*Bribery /Gratification/Money Request* | 2 | 2 |
| 5. | Lainnya*<br>*Others** | 1 | 1 |
| Jumlah \| *Total* | | 3 | 3 |

*Keluhan nasabah, komplain pegawai, dan lain-lain.

**Customer, employee complaints, etc.*

4. *Contact center* terkait dengan *whistleblowing system* dapat menghubungi:
   PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
   Gedung Muamalat Tower Lantai 9
   Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
   Jakarta 12950
   UP. Internal Audit
   atau melalui email kepada : antifraud@bankmuamalat.co.id

4. *Contact center related to the whistleblowing system can contact:*
   *PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*
   *Gedung Muamalat Tower Lantai 9*
   *Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18*
   *Jakarta 12950*
   *attention Internal Audit*
   *or by email to : antifraud@bankmuamalat.co.id*

## Sosialisasi dan Evaluasi *Whistleblowing System*

Bank Muamalat Indonesia melaksanakan sosialisasi *Whistleblowing System* secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perusahaan dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

## *Socialization and Evaluation of Whistleblowing System*

*Bank Muamalat has performed the sustainable Whistleblowing System socialization to all Employees of the Corporate and will periodically make update and completion for sustainable improvement in accordance with the Corporate's business development.*

# Fungsi Kepatuhan

## *Compliance Function*

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

*In accordance with Rules of the Financial Service Authority Number 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank which is a series of preventive actions or steps (ex-ante) to ensure that the policies, conditions, systems and procedures, as well as business activity carried out by Bank has complied with the conditions of the Financial Service Authority and provisions of laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, as well as ensure Bank's compliance to the commitment made by Bank to the Financial Service Authority and/or other competent supervisor authorities.*

Sejalan dengan itu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

*In line with that, Director supervising the Compliance Function and Compliance Working Unit to Sharia Commercial Bank is obliged to coordinate with Sharia Supervisory Board related to the implementation of Compliance Function to the Sharia Principles.*

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia adalah *Compliance Director* yang diangkat dengan memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 27 Juni 2016.

*Director supervising the Compliance Function of Bank Muamalat is Compliance Director appointed fulfilling requirements for independency and criteria as provided in the regulation and being effective to pass the fit and proper test from OJK dated June 27, 2016.*

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut:

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

*Duties and responsibilities of Directors supervising the Compliance Function in accordance with the Financial Service Authority Number 46/POJK.03/2017 are as follows:*

1. *To formulate a strategy in order to support a creation of Bank's Compliance Culture;*
2. *To propose compliance policies or principles to be determined by Directors;*
3. *To determine compliance system and procedure used to compose internal Bank conditions and guidance;*
4. *To ensure that all policies, conditions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by Bank has conformed to the conditions of the Financial Service Authority and provisions of laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Bank and Sharia business unit;*
5. *To minimize Bank Compliance Risk;*
6. *To do prevention in order that the policy and/or decision made by Bank's Directors or Branch Manager of the bank domiciled abroad do not deviate from the conditions of the Financial Service Authority and provisions of laws and regulations; and*
7. *To do other duties related to the Compliance Function.*

## Unit Kerja Kepatuhan/*Compliance*

## *Compliance Working Unit*

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. membantu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian;
2. membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

*In the performance of duty and responsibility according to Rules of the Financial Service Authority Number 46/POJK.03/2017 regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank, Compliance Director assisted by Compliance Working Unit having duties and responsibilities as follows:*

1. *To determine steps required to ensure Bank compliance in the fulfillment of all internal and external regulations as well as other applicable laws and regulations for prudence principles;*
2. *To monitor and maintain that Bank business activity does not deviate from the prevailing provisions;*

3. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
4. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis;
6. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;
7. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah;
8. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
9. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
10. melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
11. menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG; dan
12. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

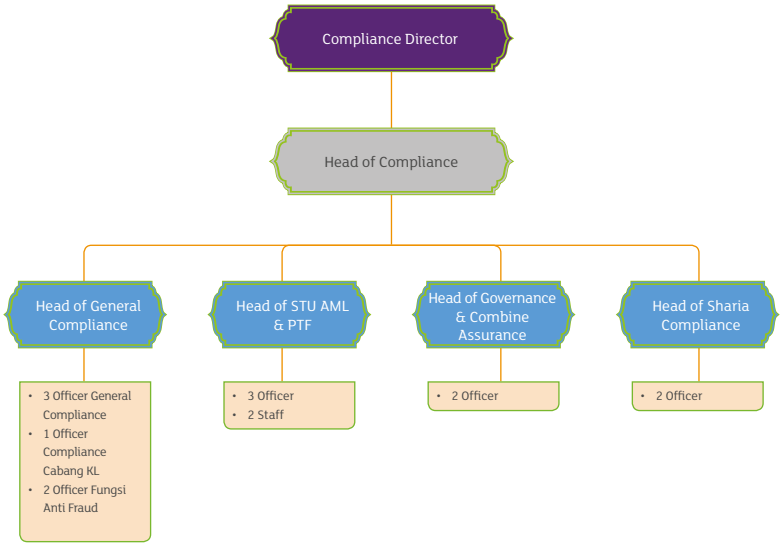
Unit kerja Kepatuhan/Compliance merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia yang dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Kepala Unit kerja Kepatuhan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulasi antara lain memenuhi persyaratan independensi, menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.

*3. To take steps in order to support a creation of Compliance Culture to all Bank business activities in each network of organization;*
*4. To make identification, measurement, monitoring, and control of Compliance Risk referring to the Financial Service Authority concerning the Risk Management Application for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit;*
*5. To monitor and evaluate periodically to the development of compliance risks and internal control for Bank's interest in accordance with business development;*
*6. To asses and evaluate effectivity, adequacy, and conformity of Bank's policy, provisions, system and procedures under laws and regulations;*
*7. To review and/or recommend an update and completion of Bank's policy, provision, system and procedure so that they conform to the conditions of the Financial Service Authority and laws and regulations, including Sharia Principles;*
*8. To have effort of ensuring that the policy, conditions, system and procedure, as well as Bank business activity has conformed to the conditions of the Financial Service Authority as well as laws and regulation;*
*9. To ensure Bank Compliance to the commitment made by Bank to the Financial Service Authority and/or other competent supervisor authorities;*
*10. To socialize to all Bank Employees concerning the matters related to the Compliance Function particularly pertaining the applicable provisions;*
*11. To perform consultative role as Strategic Business Partner in order to prevent compliance risk mitigation and give recommendation for improving and increasing compliance effectivity, internal control and GCG; and*
*12. To do other duties related to the Compliance Function.*

*Compliance working unit is compliance working unit of Bank Muamalat formed separately and free of other working unit influences, as well as has direct access to Director supervising the Compliance Function. Head of Compliance working unit has fulfilled criteria determined by regulations among others fulfilling requirements for independency, take control of the conditions of the Financial Service Authority (FSA)/Bank Indonesia as well as the applicable laws and regulations and does not perform other duties outside the Compliance Function.*

## Struktur Organisasi Unit Kerja Kepatuhan/ Compliance

## *Organizational Structure of Compliance Working Unit*




Perubahan struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia terakhir tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Muamalat Indonesia No. 021/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dimana Compliance and Risk Management Directorate berubah menjadi Compliance Directorate yang membawahkan Unit Kerja Compliance, Corporate Legal, DPLK Muamalat dan Baitulmaal Muamalat. SK Direksi tersebut menghapus Unit Kerja Anti Fraud dan mengalihkan fungsi-fungsi yang ada ke dalam Unit Kerja dengan tugas dan tanggung jawab serupa, yaitu:

1. Mengalihkan fungsi *Prevention & Detection* ke dalam Unit Kerja Compliance; dan
2. Mengalihkan fungsi *Investigation & Disciplinary Action* dan fungsi *Monitoring, Evaluation & Administration Support* ke dalam Unit Kerja Internal Audit.

Meskipun organisasi Unit Kerja Compliance tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari fungsi General Compliance, Sharia Compliance, Unit Kerja Khusus APU & PPT dan Governance & Combine Assurance, namun dalam fungsi General Compliance ditambahkan fungsi *Prevention & Detection* yang sebelumnya menjadi bagian dari Unit Kerja Anti *Fraud*.

Dengan dialihkannya fungsi *Prevention & Detection* ke dalam fungsi General Compliance, maka terdapat penambahan 2 (dua) orang karyawan di Unit Kerja Kepatuhan sehingga sampai dengan akhir Desember 2018 karyawan di Unit Kerja Kepatuhan menjadi berjumlah 20 (dua puluh) orang.

*The last change of organizational structure of Bank Muamalat is contained in Decree of the Board of Directors of Bank Muamalat No. 021/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 20, 2018 regarding Completion of Organizational Structure of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in which the Compliance and Risk Management Directorate is changed into Compliance Directorate supervising Compliance working unit, Corporate Legal, DPLK Muamalat and Baitulmaal Muamalat. Such Decree becomes Anti-Fraud working unit and transfers the existing functions to the working unit having the same duties and responsibilities, that is:*

1. *To transfer function of Prevention & Detection to the Compliance working unit; and*
2. *To transfer function of Investigation & Disciplinary Action and function of Monitoring, Evaluation & Administration Support to the Internal Audit working unit.*

*Althought the Compliance working unit organization does not experience change, that is function of General Compliance, Sharia Compliance, special Working Unit of APU & PPT and Governance & Combine Assurance, but in function of General Compliance, function of Prevention & Detection previously becoming part of the Anti-Fraud working unit is added.*

*By transferring the function of Prevention & Detection to functioin of General Compliance, there are addition of 2 (two) employees in the Compliance Working Unit so that up to the end of December 2018 employees in the Compliance Working Unit became 20 (twenty) persons.*

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Bank

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2018 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantuan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

## *Duty and Responsibility Performance of Bank Compliance Function*

*In order to maintain and improve the implementation of Compliance Function, compliance activities carried out within the period of 2018 among others relating to improvement of compliance culture, compliance risk management, internal provision evaluation, monitoring of Bank prudence aspect, monitoring of compliance to the commitment made by Bank and other compliaince activities.*

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

1. Membangun *compliance awareness* melalui *email blast* dengan materi terkait regulasi, GCG, APU-PPT dan Anti *Fraud*.
2. Melakukan sosialisasi regulasi baru (*sharing information*) baik secara tertulis maupun melalui forum sosialiasi dan menyampaikan analisa dampak regulasi kepada unit kerja terkait untuk menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan opini atas penerapan regulasi termasuk penerapan aspek syariah.
4. Melakukan peringatan/teguran, reminder atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
5. Menyampaikan *compliance alert* atau peringatan terhadap reminder yang belum ditindaklanjuti atau kegiatan Bank yang berpotensi menyimpang atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan.
6. Menyampaikan hasil GCG *review* dan rekomendasi perbaikan penerapan GCG kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta memonitor pemenuhan rekomendasi yang diberikan.
7. Menyusun kertas kerja *compliance Self-Assessment* sebagai *tools* untuk menilai tingkat kepatuhan cabang terhadap regulasi, APU PPT dan aspek syariah.
8. Ikut serta mendampingi dan membantu Dewan Pengawas Syariah dalam agenda Uji Petik Dewan Pengawas Syariah dan melakukan sosialisasi/*sharing* terkait dengan pemenuhan aspek syariah di Kantor Cabang.
9. Menyusun Buku Himpunan Regulasi Jilid 7 dan Jilid 8 yang berisi regulasi penting yang berterkaitan dengan kegiatan Bank Syariah.
10. Berperan aktif mendampingi Unit Bisnis dalam melakukan edukasi kepada calon nasabah penghimpunan dana khusunya terkait dengan transaksi syariah.
11. Mengingatkan kepada seluruh unit kerja untuk menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas melalui aplikasi *Muamalat Report Reminder* (MR2) dan melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan.
12. Mengembangkan sertifikasi internal melalui program *Muamalat Internal Certification* (MIC) dengan materi *Basic Sharia Knowledge*.
13. Melakukan training dan *sharing knowledge* antara lain *Basic Sharia Banking*, *Sharia Sharing Session* dan *Training* APU & PPT.

## Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Pengelolaan risiko kepatuhan dibahas dalam rapat *Risk Management Committee* (RMC) yang diselenggarakan secara berkala dan disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Triwulanan maupun Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran .

*Efforts taken in order to support a creation of Bank compliance culture, among other:*

1. *To develope compliance awareness by email blast with materials related to regulations, GCG, APU-PPT and Anti Fraud.*
2. *To socialize a new regulation (sharing information) in writing and through socialization forum and to deliver regulation impact analysis to the related working unit to maintain that Bank business activity does not deviate from the applicable laws and regulations.*
3. *To give opinion about applied regulations including applied Sharia aspects.*
4. *To give warning/caution, reminder of obligation and commitment which must be delivered and performed by Working Unit and Business Unit.*
5. *To give compliance alert or warning to the reminder which has not been followed up or Bank activity having deviation potency or violation occurred against laws and regulations.*
6. *To give results of GCG review and recommendation for improving the applied GCG to the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as monitor the fulfilled recommendation given.*
7. *To compose work paper of compliance self assessment as tools to assess branch compliance level to regulation, APU PPT and Sharia aspects.*
8. *To participate in accompanying and helping Sharia Supervisory Board in agenda of selecting sampling procedure for Sharia Supervisory Board and make socialization /sharing related to the fufilled Sharia Aspects in Branch Office.*
9. *To compose Regulation Set Book Edition 7 and 8 containing the important regulation relating to Sharia Bank Activities.*
10. *To have active role for accompanying Business Unit in order to educate prospective customers of fund collection particularly related to Sharia transaction.*
11. *To remind all working units to submit report to supervisor authority through application of Muamalat Report Reminder (MR2) and monitor the submission of report.*
12. *To develop internal certification through Muamalat Internal Certification (MIC) program with Basic Materials of Sharia Knowledge.*
13. *To do training and sharing knowledge among others Basic Sharia Banking, Sharia sharing session and Training APU & PPT.*

## *Compliance Risk Management and Mitigation*

*Compliance risk occurs when Bank does not comply with or meet regulations of the Financial Service Authority and/or Bank Indonesia, and other applicable laws and regulations. Bank maximumly tries that any applicable laws and regulations may be complied with well (comply with regulation) and continously take steps of improvement in the risk management quality, the internal control system and good governance implementation as well as considers prudence and Sharia principles to perform bank operational activity.*

*Compliance risk management is discussed in Risk Management Committee (RMC) meeting held periodically and presented in Bank Risk Profile Report delivered to the Financial Service Authority Quarterly and Bank Health Level Report in Semester.*

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan aktivitas mitigasi risiko kepatuhan, antara lain:

1. Melakukan pemantauan terhadap *prudential aspect* bank antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Posisi Devisa Neto (PDN), Giro Wajib Minumum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) syariah, Giro RIM syariah, Penyangga Likuiditas Moneter (PLM) syariah, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
2. Melakukan review atas pelaksanaan tata kelola bank melalui Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) review yang dilakukan secara periodik dan memonitor perbaikan pelaksanaan GCG.
3. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan/atau pendekatan terhadap nasabah dan calon nasabah serta melakukan pelatihan/*sharing* kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank.
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas setiap proses bisnis Bank agar sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari sisi *governace* maupun sisi syariah.
5. Melakukan review usulan pembiayaan melalui rapat Komite Pembiayaan level Direksi dengan menyampaikan opini baik dari aspek kepatuhan umum maupun kepatuhan syariah.
6. Menyampaikan opini, review, *reminder* dan *sharing info* ketentuan/peraturan terkait Kebijakan dan/atau prosedur terkait pembiayaan, pemenuhan ketentuan syariah dalam pembiayaan dan fatwa, POJK dan SEOJK.
7. Melakukan *Compliance Checklist* yang bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor sebelum pengajuan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Melakukan Sertifikasi *Muamalat Internal Certification* (MIC) - *Basic Sharia Knowledge*.
9. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT mengacu pada Kebijakan Penerapan APU dan PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu :
   a. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
   b. kebijakan dan prosedur;
   c. pengendalian intern;
   d. sistem informasi manajemen; dan
   e. sumber daya manusia dan pelatihan.

## Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT & PPT), selain dibutuhkan perhatian dari Direksi dan Dewan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. Peran Aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan Organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan Unit Kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan diseluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang dimiliki.

*To manage the compliance risk, Bank has carried out mitigation of the compliance risk, amont others:*

1. *To montior bank prudential aspect amont others Minimum Capital Provision Obligation (KPMM), Netto Foreign Exchange Position (PDN), Minimum Compulsory Giro (GWM), Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) of Sharia, Sharia RIM Giro, Monetary Liquidity Support (PLM) of Sharia, Offshore Load (PLN), Productive Asset Quality and Maximum Limit of Financing Grant (BMPP).*
2. *To review implementation of bank governance through report on Good Corporate Governance (GCG) review made periodically and monitor improvement of the implemented GCG.*
3. *To supervise and accompany working unit and/or business unit to issue product, program, operation, socialization and/or approach to customers and prospective customers as well as carry out training/sharing to new employees and internal bank party.*
4. *To improve and complete bank business process in order to conform to the applicable regulations from the side of governace and Sharia.*
5. *To review proposal of financing through the Financing Committee meeting at the Board of Directors level by giving opinion from general compliance aspect and Sharia compliance.*
6. *To give opinion, review, reminder and sharing info of conditions/rules related to policy and/or procedures related to financing, fulfillment of Sharia conditions in the loan and decision letter, POJK and SEOJK.*
7. *To do a Compliance Checklist intending to ensure opening operational preparation, change of address and change of office status before such submission is performed to the Financial Service Authority (FSA).*
8. *Conducting Internal Muamalat Certification Certification (MIC) - Basic Knowledge Sharia.*
9. *To make a strength of the applied APU and PPT program referring to policy of the applied APU and PPT at least 5 (five) pillars, that is:*
   a. *active supervision of the board of commissioners and the board of directors;*
   b. *policy and procedure;*
   c. *internal control;*
   d. *management information system; and*
   e. *human capital and training.*

## *Applied Anti-Money Laundering Program and Counter-Terrorism Financing*

*In order to support the implemented anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (PPT & PPT), besides needs attention from the Board of Directors and the Board of Commissioners, Bank is obliged to form Special Working Unit or appoint a responsible Bank Officer for the applied APU and PPT program. Active role from the Board of Directors and the Board of Commissioners, is very needed to create applied effectivity of APU and PPT program, in view of role of the Board of Directors and the Board of Commissioners will influence reach level of organization purpose in the applied APU and PPT program. moreover, role of the Board of Directors and the Board of Commissioners may also motivate employees and Working Unit to support a creation of compliance culture in all networks of organization. Formation of the strong Corporate Governance in the organization will support a supervision of the implemented Application Guidance of APU and PPT program owned.*

Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* yang sebelumnya dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer)* juga telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia. *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, *Walk In Customer*, atau Nasabah. Penerapan Prinsip CDD yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam rangka untuk, mencegah pihak-pihak lain yang berupaya menggunakan Bank Muamalat Indonesia sebagai sarana masuknya uang hasil kejahatan dan sebagai pendukung kegiatan pemberantas serta pencegahan terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

*Application of Customer Due Diligence principles named CDD previously known as Know Your Customer principles has been also performed by Bank Muamalat. Customer Due Diligence (CDD) is activity in the form of identification, verification and monitoring carried out by Bank to ensure that such transaction conforms to Prospective Customer profile, Walk In Customer, or Customers. The applied CDD principles performed by Bank Muamalat in order to protect, prevent other parties from desiring and trying to use Bank Muamalat as facility of entering the money of crime result and as activity support to eradicate and protect against money laundering action and terrorism funding.*

Dalam rangka mencegah Bank Muamalat Indonesia dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme maka Bank Muamalat Indonesia tunduk pada peraturan yang berlaku.

*In order to prevent Bank Muamalat from being the target of money laundering activity and terrorism financing, Bank Muamalat shall obey the applicable regulations.*

Kegiatan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas penyusunan dan penyampaian laporan (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
2. Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
3. Pemantauan *Risk Based Approach* (RBA), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dan daftar orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.
4. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari pihak eksternal terutama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
5. *Sharing* informasi atau *reminder* terkait dengan penerapan Program APU & PPT kepada seluruh unit kerja terkait.
6. Pelatihan/sosialisasi/*coaching* terkait penerapan Program APU & PPT kepada karyawan terkait.
7. Melakukan review dan/atau memberikan opini APU & PPT terkait dengan produk, operasional maupun aktivitas Bank.
8. Menyampaikan proses kegiatan pengikinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori *high risk*, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar.
9. Pengisian KYC/AML *Questionnaire* yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden banking guna memastikan penerapan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

*Activities related to the applied Anti-Money Laundering Program (APU) and the Counter-Terrorism Financing ~~(PPT)~~ performed throughout 2018 are as follows:*

1. *To carry out Report composition and submission activity (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) as well as to carry out customer's data update and monitoring.*
2. *To maintain List of Suspected Terrorists and Terrorist Organization (DTTOT).*
3. *To monitor the Risk Based Approach (RBA), Suspicious Financial Transaction (TKM), and list of persons determined as Suspect or defendant.*
4. *To fulfill request for data/information/document from external parties particularly Law Enforcers (Apgakum) or Supervisory and Control Board (LPP).*
5. *To share Information or reminder related to the applied APU & PPT Program to all related working units.*
6. *To train/socialize/coach related to the applied APU & PPT Program to related employees.*
7. *To review and/or give opinion about APU & PPT related to Bank's products, operations and activities.*
8. *To communicate customer's data update activity process with priority scale, among other to customers having high-risk category, active mutation and sufficient-large balance.*
9. *To fill out KYC/AML Questionnaire which is a part of banking correspondence activity in order to ensure the applied AML/KYC performed in accordance with the conditions.*

10. Permintaan dan penyampaian informasi ke Unit Kerja terkait.
11. Penyampaian Informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
12. Memberikan pelatihan APU & PPT didalam internal Bank dan mendapatkan pelatihan dari PPATK dan FKDKP.
13. Melakukan monitoring CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single* CIF) untuk mengurangi data-data CIF yang ganda/duplikat.
14. Menyelenggarakan program menyelenggarakan program sertifikasi APU & PPT yang dilaksanakan secara internal bekerjasama dengan HC - Learning & Talent Management dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh karyawan terhadap penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Setiap tahun dilakukan kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori *high risk*, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar. Selain itu, secara rutin Unit Kerja Kepatuhan melaporkan hasil monitoring terkait APU & PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU& PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Unit Kerja Khusus APU & PPT telah menyampaikan laporan atau menindaklanjuti permintaan dari Aparat Penegak Hukum atau pihak eksternal lainnya yang antara lain:

1. *Cash Transaction Report* (CTR), *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL) kepada PPATK;
2. penyampaian data/informasi atau laporan kepada PPATK;
3. penyampaian data/informasi atau pemblokiran rekening kepada KPK; dan
4. penyampaian data/informasi kepada Bareskrim POLRI/ Densus dan pihak eksternal lainnya.

*10. To request and give information to the related Working Unit.*
*11. To provide information to Anti-Corruption Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) and report to the Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center (PPATK).*
*12. To give training of APU & PPT inside Bank and training from PPATK and FKDKP.*
*13. To monitor CIF in order to ensure that Bank has maintained Customer's profile integratedly (Single CIF) to reduce duplicate CIF data.*
*14. To hold certification program of APU & PPT held internally in cooperation with the Learning & Talent Managemen in order to increase comprehension of all employees regarding the applied Anti Money Laundering and the Counter-Terrorism Financing (APU & PPT).*

*Every year customer's data update activity with priority scale is made, among others for customers having high-risk category, active mutation and sufficient-large balance. Moreover, the Compliance Working Unit routinely reports the monitoring results related to APU & PPT to the Board of Directors and the Board of Commissioners as one of active supervising forms to the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

*In the course of the applied Anti Money Laundering Program and Counter-Terrorism Financing (APU& PPT) in accordance with the prevailing provisions, the Special Working Unit of APU & PPT has submitted report or followed up the request from Law Enforcers or other external parties, among others:*

*1. Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Report (STR) and Financial Transaction Report related to Fund Transfer from and to abroad (LTKL) to PPATK;*
*2. Submission of data/information or report to PPATK;*
*3. Submission of data/information on account blocking to KPK; and*
*4. Submission of data/information to Bareskrim POLRI/Densus and other external parties.*

# Inisiasi Anti Gratifikasi

## *Initiation of Anti-Gratification*

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa praktik gratifikasi berpotensi terjadi saat bersinggungan dengan upaya menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik *stakeholders* maupun vendor. Untuk itu dibutuhkan sebuah pedoman agar seluruh Insan Bank Muamalat Indonesia memiliki pemahaman yang setara tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta terhindar dari praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap. Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia menginisiasi pedoman dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank.

*Bank Muamalat Indonesia realizes that gratification practice having potency to be occurred when it intersects with efforts of having working relations with any third party, both stakeholders and vendors. For that purpose, a guidance is needed so that all employees of Bank Muamalat Indonesia have equal experiences concerning treatment to the gratification and are escaped from gratification practices which is bribery criminal act. Therefore, Bank Muamalat Indonesia initiates a gratification guidance and control in the circle of Bank.*

Pedoman dan pengendalian gratifikasi tersebut juga berlaku untuk anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi gratifikasi/hadiah adalah semua bentuk penerimaan atau pemberian baik langsung maupun tidak langsung. Gratifikasi/hadiah dapat berupa uang, barang atau sesuatu penerimaan atau pemberian berupa apa saja (termasuk hiburan dan pelayanan) atau keuntungan lain yang tidak sepatutnya yang diketahui atau patut diduga bahwa penerimaan atau pemberian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan dan/atau pihak lain atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

*Such gratification guidance and control is also applied to subsidiaries of Bank Muamalat Indonesia in accordance with the prevailing provisions. Definition of gratification/gift is all forms of acceptance or grant directly and indirectly. The gratification/gift may be in the form of money, goods or a request or grant in any form (including entertaintment and services) or other benefits which are not duly known or alleged that the acceptance or grant is intended to influence an officer's decision of Corporate and/or other parties or the gift is granted as a result of having done or not having done something in one's position contradicting with one's obligation.*

Bank melarang seluruh Jajaran Bank menerima atau memberi hadiah dari dan/atau kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk atau diduga dapat mempengaruhi keputusan pejabat Bank dan/atau pihak lain. Bank dapat dibenarkan memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal atau sosial dalam jumlah yang wajar sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan, ketentuan dan kaidah syariah yang berlaku.

*Bank prohibits to all Networks of Bank to accept or grant gift from and/or to other parties intended to or alleged to be able to influence Bank officer's decision and/or other parties. Bank may be justified to grant donation for charity or social interest in a reasonable amount as long as it conforms to the applicable laws and regulations, provisions and norms of Sharia.*

# Keterbukaan Informasi

## *Disclosure of Information*

Sebagai perusahaan publik, Bank Muamalat Indonesia menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai Bank yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Bank Muamalat Indonesia percaya bahwa penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Untuk menyediakan informasi terkini bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia menyediakan sarana portal informasi melalui situs Perseroan di www.bankmuamalat.co.id.

*As public company, Bank Muamalat Indonesia guarantees to disclose in decision making process and provides material and relevant information on Bank which is accessible by stokeholders according to their interests. Bank Muamalat Indonesia believes that spread of information to all stakeholder is an important part of the internal and external information transparency principle realization, expected to help, maintain and improve knowledge, comprehension, and positive perception of stakeholders to Bank's policies and activities. To provide recent information to all stakeholders, Bank Muamalat Indonesia gives information portal facility through Corporate's website in www.bankmuamalat.co.id.*

### Ketersediaan Siaran Pers di Website Bank

### *Availability of Press Release in Bank's Website*

Setiap aksi korporasi dan kegiatan penting lainnya secara aktif dipublikasikan melalui berita dan informasi terkini yang tersedia di situs Bank.

*Every corporate's action and other important activities actively published through recent news and information which are available in Bank's website.*

## E-mail Bank (Contact Us)

Bank Muamalat Indonesia secara terbuka senantiasa membina jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui fungsi "Hubungi Kami" pada situs Bank atau melalui e-mail serta berbagai media sosial Bank untuk mengakomodasi berbagai pertanyaan.

## *Bank E-mail (Contact Us)*

*Bank Muamalat Indonesia openly develops communication line with stakeholders through function of "Contact us" in Bank's website or by e-mail as well as various Bank's social media to accommodate various questions.*

## E-mail Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

Sementara untuk para instansi atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal serta para investor dapat langsung menghubungi Sekretaris Perusahaan atau Hubungan Investor Bank Muamalat Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

## *E-mail of Corporate Secretary and Investor Relation*

*Whilst, for institutions or parties relating to capital market and investors may directly contact Corporate Secretary or Investor Relation of Bank Muamalat Indonesia having address as follows:*

## Sekretaris Perusahaan

Telp : 02180666000 ext. 117023
email: corporate.secretary @bankmuamalat.co.id
Bank Muamalat Indonesia juga selalu membagikan informasi kepada publik mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan. Sepanjang tahun 2018, keterbukaan informasi yang dipaparkan kepada publik adalah:

## *Corporate Secretary*

*Phone: 02180666000 ext. 117023*
*email: corporate.secretary @bankmuamalat.co.id*
*Bank Muamalat Indonesia always provides information to public concerning business activities carried out. Throughout 2018, the disclosure of information explained to public is:*

| No | Keterangan<br>*Remarks* | Tanggal<br>*Date* | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan pergantian Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Report of change of Secretary for PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 19-Des-18<br>*19-Dec-18* | Website Bank<br>*Bank's Website* |
| 2 | Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Q3<br>*Publication of Financial Statement of Bank Muamalat Indonesia Q3* | 30-Nov-18 | Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan<br>*Bank's Website and Suara Pembaruan newspaper* |
| 3 | Keterbukaan Informasi mengenai Pengesahan Pengunduran Diri Bapak Indra Yurana Sugiarto selaku Direktur PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of Information on the Validated Resign of Mr. Indra Yurana Sugiarto as Director of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 15-Okt-18<br>*15-Oct-18* | Website Bank<br>*Bank's Website* |
| 4 | Publikasi Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Publication of minutes of meeting relating to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 15-Okt-18<br>*15-Oct-18* | Website Bank dan Surat Kabar Investor Daily<br>*Bank's Website and Investor Daily newspaper* |
| 5 | Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of information to Shareholders in the course of the Limited Public Offering (PUT) VI with rights issue (HMETD) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 12-Okt-18<br>*12-Oct-18* | Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan<br>*Bank's Website and Suara Pembaruan newspaper* |
| 6 | Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Bapak Indra Yurana Sugiarto selaku Direktur PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of Information on the Resign of Mr. Indra Yurana Sugiarto as Director of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 11-Okt-18<br>*11-Oct-18* | Website Bank<br>*Bank's Website* |
| 7 | Keterbukaan Informasi tentang Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of Information on the Summon of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 19-Sep-18<br>*19-Sep-18* | Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan4<br>*Bank's Website Bank and Suara Pembaruan newspaper* |
| 8 | Keterbukaan Informasi tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of Information on the Increase in Capital of Public Company with Rights Issue (HMETD) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 04-Sep-18<br>*04-Sep-18* | Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan<br>*Bank's Website and Suara Pembaruan newspaper* |
| 9 | Keterbukaan Informasi tentang Pengumuman RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of Information on the Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 04-Sep-18<br>*04-Sep-18* | Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan<br>*Bank's Website and Suara Pembaruan newspaper* |
| 10 | Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Q2<br>*Publication of the Financial Statement of Bank Muamalat Indonesia Q2* | 15-Agu-18<br>*15-Aug-18* | Website Bank<br>*Bank's Website* |

| No | Keterangan<br>*Remarks* | Tanggal<br>*Date* | Media |
|---|---|---|---|
| 11 | Publikasi Ralat Risalah RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Publication of the revised minutes of meeting relating to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 03-Jul-18<br>*03-Jul-18* | Website Bank dan Surat Kabar Investor Daily<br>*Bank's Website and Investor Daily newspaper* |
| 12 | Publikasi Risalah RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Publication of the Minutes of Meeting relating to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 02-Jul-18<br>*02-Jul-18* | Website Bank dan Surat Kabar Investor Daily<br>*Bank's Website and Investor Daily newspaper* |
| 13 | Keterbukaan Informasi tentang Pemanggilan RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of Information on the Summon of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 06-Jun-18<br>*06-Jun-18* | Website Bank dan Surat Kabar Investor Daily<br>*Bank's Website and Investor Daily newspaper* |
| 14 | Keterbukaan Informasi tentang Pengumuman RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>*Disclosure of Information on the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk* | 22-May-18<br>*22-May-18* | Website Bank dan Surat Kabar Investor Daily<br>*Bank's Website and Investor Daily newspaper* |
| 15 | Penyampaian Laporan Tahunan 2017<br>*Submission of Annual Report 2017* | 26-Apr-18<br>*26-Apr-18* | Website Bank<br>*Bank's Website* |
| 16 | Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Q1<br>*Publication of the Financial Statement of Bank Muamalat Indonesia Q1* | 18-Apr-18<br>*18-Apr-18* | Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan<br>*Bank's Website and Suara Pembaruan newspaper* |

# Kode Etik

## *Code of Conduct*

Bank telah memiliki kode etik yang berisikan standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan. Disusun mengacu kepada Kode Etik Bankir Indonesia, *Core Values* Bank Muamalat Indonesia dan Ittifaq serta berdasarkan *best practice* penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu meliputi :

1. Kepatuhan terhadap ajaran Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Memastikan Kehalalan Sumber, Proses dan Hasil dari Pekerjaan, yaitu mencakup pengaturan benturan kepentingan, hubungan dengan *stakeholder*, kegiatan politik Karyawan.
3. Menunjukkan Perilaku Disiplin dalam Bekerja dan Menjalankan Ibadah.
4. Menjunjung Tinggi Etika Moral dan Sopan Santun.
5. Menjaga amanah yang diberikan, termasuk pengaturan perilaku untuk menjaga nama baik Perusahaan, menjaga fasilitas Perusahaan, melayani Nasabah dengan baik, dan mencegah tindakan pelanggaran.
6. Menjaga Kerahasiaan Informasi Nasabah dan Perusahaan.

*Bank has code of conduct containing attitude standard, value system, business ethics, working ethics, commitment and enforcement to the applicable regulation for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees. It is composed by referring to code of Indonesian Banker Conduct, Core Values of Bank Muamalat and Ittifaq as well as based on the best practice applied to the Good Corporate Governance, that is:*

1. *Compliance to Islamic teaching and the applicable laws and regulations.*
2. *To ensure halal source, Process and Results of Work, that is covering conflict of interest arrangement, relation with stakeholder, employee's political activity.*
3. *To show discipline attitude in working and conducting worship.*
4. *To uphold moral ethics and politeness.*
5. *To keep mandate granted, including attitude arrangement to keep the Corporate's reputation, maintain the Corporate's facilities, serve Customers well, and prevent action from violation.*
6. *To protect Customer's and Corporate's Information Confidentiality.*

Sejak Kode Etik diterbitkan pada bulan Maret 2017, Bank telah melakukan sosialisasi melalui serangkaian training, menayangkan materi Kode Etik melalui media Muamalat Human Power yang dapat diakses oleh seluruh Karyawan, serta sosialisasi yang dilakukan melalui HC News. Sebagai perwujudan penerapan *Good Corporate Governance*, seluruh Karyawan telah diwajibkan untuk memberikan pernyataan kesanggupan menjalankan Kode Etik secara online melalui aplikasi Muamalat Human Power.

*After the Code of Conduct has been issued in March 2017, Bank has made socializatioin through a series of training, presenting Code of Conduct materials through Muamalat Human Power media which is accessible by all employees, as well as socialization made by HC News. As realization of the applied Good Corporate Governance, all employees are obliged to give a letter of commitment to perform online the Code of Conduct through the application of Muamalat Human Power.*

# Manajemen Risiko

## *Risk Management*

Bank Muamalat Indonesia secara berkelanjutan mengimplementasikan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja Bank, dengan tujuan agar dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

*Bank Muamalat Indonesia sustainably implements the risk management application comprehensively for each Bank work line, for the purpose of resulting in healthy business growth, as well as maximizes a value added of shareholders for long term.*

### Kegiatan Manajemen Risiko di Tahun 2018

### *Risk Management Activity in 2018*

Selama tahun 2018, Bank Muamalat Indonesia melakukan upaya perbaikan dan konsolidasi di bidang manajemen risiko yang berfokus pada tiga aspek utama. Pertama adalah memperkokoh pondasi manajemen risiko, di antaranya dengan melakukan pembenahan tata kelola manajemen risiko dengan memperkuat implementasi *Good Corporate Governance*. Kedua, memperkuat fungsi *internal control*, antara lain melalui *segregation of duties*, penguatan fungsi *monitoring*, serta perbaikan kebijakan dan prosedur. Ketiga adalah pengembangan Sumber Daya Insani melalui implementasi *value* Muamalat Ideal (Islami, Modern, dan Profesional) melalui berbagai program budaya dengan tujuan agar karyawan *living the values* dari *risk culture* Ideal. Berikut beberapa hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko selama tahun 2018, antara lain:

*Throughout 2018, Bank Muamalat made efforts of improvement and consolidation in the field of risk management focused on three main aspects. Firstly, it is to strengthen the risk management foundation, among others by fixing the risk management governance and strengtening implementation of the Good Corporate Governance. Secondly, it strengtens internal control function, among others through segregation of duties, the strengtened monitoring function, as well as improvement of policies and procedures. Thirdly, it is a development of Human Resource through the implementatioin of value Muamalat Ideal (Islami, Modern, and Professional) in varous culture program intended that employees live from the values of ideal risk culture. The following is several matters relating to the risk management in 2018, among others:*

1. Secara berkelanjutan menyempurnakan dan melaksanakan review berkala terhadap ketentuan internal Bank dengan mempertimbangkan perubahan regulasi, kondisi pasar serta lingkungan bisnis, ternasuk yang terkait dengan risiko IT.
2. Melakukan review atas penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dan bisnis.
3. Melakukan akselerasi penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain melalui rapat berkala untuk membahas perkembangan *bad bank*, dan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) melalui beberapa program.
4. Melakukan penyempurnaan manajemen portofolio pembiayaan antara lain melalui pengkinian *Target Market*, *Risk Acceptance Criteria* dan *Financing Allocation Limit*.
5. Memperkuat manajemen risiko likuiditas, antara lain dengan melakukan pengkinian atas kelengkapan infrastruktur *Contingency Funding Plan*, melakukan pemantauan atas likuiditas Bank secara harian dan melakukan *stress test* secara berkala.
6. Membangun *operational risk tools* antara lain *Risk & Control Self-Assessment tools* untuk melengkapi *operational risk tools* yang telah dikembangkan sebelumnya.
7. Memperkuat budaya manajemen risiko melalui implementasi *value* Muamalat IDEAL, pengembangan modul terkait manajemen risiko yang disampaikan dalam kelas training atau secara *online* dan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* atas risiko kepada seluruh jajaran di Bank Muamalat Indonesia.
8. Melakukan uji coba *Business Continuity Management* untuk melihat efektivitas atas *call tree* dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.

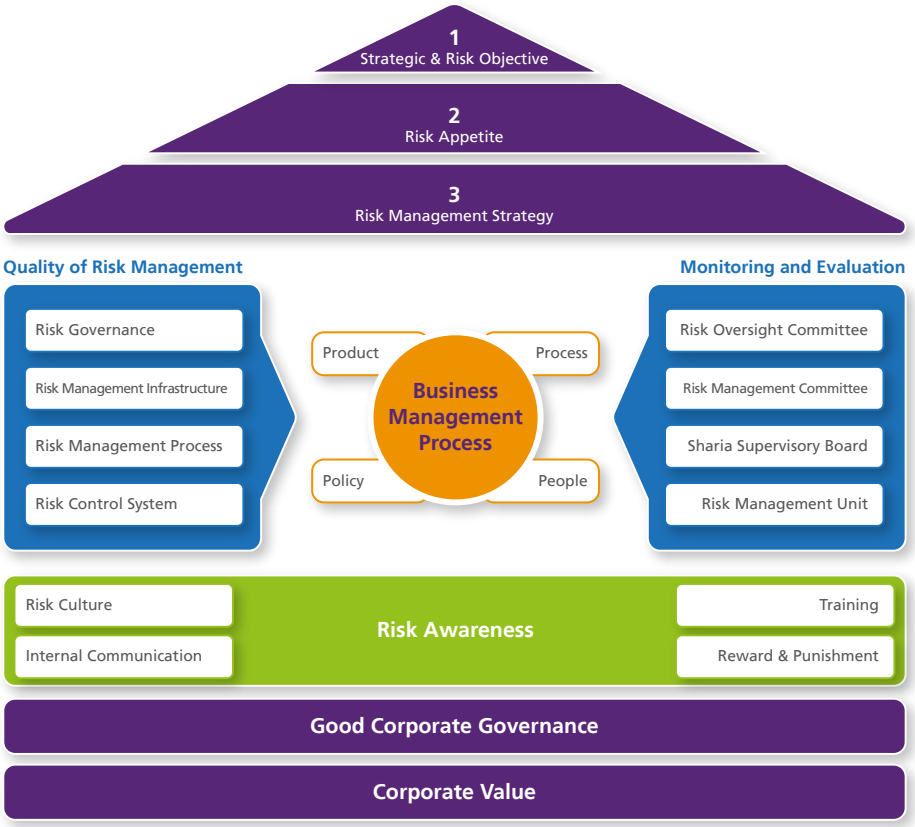
## Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65 / POJK.03/ 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk memitigasi berbagai risiko yang dihadapi, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki kebijakan manajemen risiko dan kerangka kerja manajemen risiko yang merupakan seperangkat strategi, aturan, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep dan prinsip manajemen risiko secara komprehensif. Kerangka kerja manajemen risiko Bank Muamalat Indonesia disajikan pada gambar berikut ini:

1. *completed and made periodic review of Bank internal conditions continuously by considering change of regulations, market condition and business environment, including those related to the risk of IT.*
2. *made review of the determined risk appetite and risk tolerance as tool to measure the reached strategy and business goals.*
3. *accelerated the settlement of problem financing, among others periodic meeting to discuss bank development, and selling of Forecloses Collaterals (AYDA) through several program.*
4. *Completed financing portfolio management amont others update of Market Target, , Risk Acceptance Criteria and Financing Allocation Limit.*
5. *Strengthened the liquidity risk management, among others update of the completed infrastructure of Contingency Funding Plan, daily monitoring of Bank liquidity and make periodic stress tests.*
6. *Developed risk tool operation, among others Risk & Control Self Assessment tools to complete the risk tools operation previously developed.*
7. *Strengthened the risk management culture through the implementation of Muamalat IDEAL value, module development related to the risk management communicated in training or online class and socialization to increase risk awareness to all networks of Bank Muamalat Indonesia.*
8. *Committed trial period of Business Continuity Management to see effectivity of call tree and follow-up required to carry out.*

## *Risk Management Framework*

*The risk management application of Bank Muamalat is guided by Regulation of the Financial Service Authority No.65 /POJK.03/ 2016 dated December 28, 2016 regarding the Risk Management Application for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. To mitigate various risk faced, Bank Muamalat Indonesia has had the risk management policy and framework which is a set of strategies, rules, facilities, and infrastructures used to implement comprehensive risk management concepts and principles. The risk managemen framework of Bank Muamalat Indonesia is presented in the following figure:*




Keberhasilan dari proses manajemen risiko sangat tergantung pada landasan bisnis Bank Muamalat Indonesia, yaitu *Good Corporate Governance* dan *Corporate Value*. Landasan tersebut dibangun melalui penguatan *risk awareness* di seluruh lini kerja Bank Muamalat Indonesia melalui implementasi *risk culture*, *internal communication* yang baik, kecukupan training terkait manajemen risiko, dan penerapan *reward & punishment* sebagaimana diatur dalam Ittifaq Bank Muamalat Indonesia.

*Success of the risk management process deeply depends on the business base of Bank Muamalat Indonesia, that is Good Corporate Governance and corporate value. Such base has been developed through the strengthened risk awareness in all networks of Bank Muamalat Indonesia through the implemented risk culture, good internal communication, sufficient training related to the risk management, and applied reward & punishment as provided in Ittifaq Bank Muamalat Indonesia.*

Dengan landasan yang kuat tersebut, Bank Muamalat Indonesia melaksanakan proses bisnis yang tercakup dalam kebijakan, produk, proses dan sumber daya manusia. Pelaksanaan proses bisnis Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan senantiasa memperhatikan mitigasi risiko yang memadai sesuai jenis risiko inheren yang dapat diidentifikasi, dalam bentuk tata kelola, infrastruktur, proses manajemen risiko, dan pengendalian risiko. Hal tersebut tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan manajemen risiko pada setiap aktivitas bisnis Bank Muamalat Indonesia.

*With such strong base, Bank Muamalat Indonesia performs business process contained in policies, products, processes and human resources. Business process implementation of Bank Muamalat Indonesia is achieved by considering the sufficient risk mitigation according to inherent risk type which can be identified, in the form of governance, infrastructure, risk management process, and risk control. Such matter is one of forms of the risk management application in every business activity of Bank Muamalat Indonesia.*

Proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas proses bisnis Bank Muamalat Indonesia dilakukan antara lain melalui Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di level Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) di level Direksi, Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*), dan Unit Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*).

*Continous monitoring and evaluation process to the business process of bisnis Bank Muamalat is taken place among others through Risk Oversight Committee at the level of the Board of Commissioners, Risk Management Committee at the level of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and risk management unit.*

Dengan landasan dan pilar yang kuat, Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk mencapai dan melaksanakan *corporate strategy* dan *risk objective*, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, sesuai dengan *risk appetite* untuk menjaga tingkat eksposur risiko Bank dan *risk management strategy* yang disusun dengan prinsip dasar untuk menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

*With the strong base and pillar, Bank Muamalat Indonesia tries to reach and perform the corporate strategy and risk objective, for long term, intermediate term, and short term, in accordance with the risk appetite to keep Bank risk exposure level and the risk management strategy composed with basic principles to create a value added for stakeholders.*

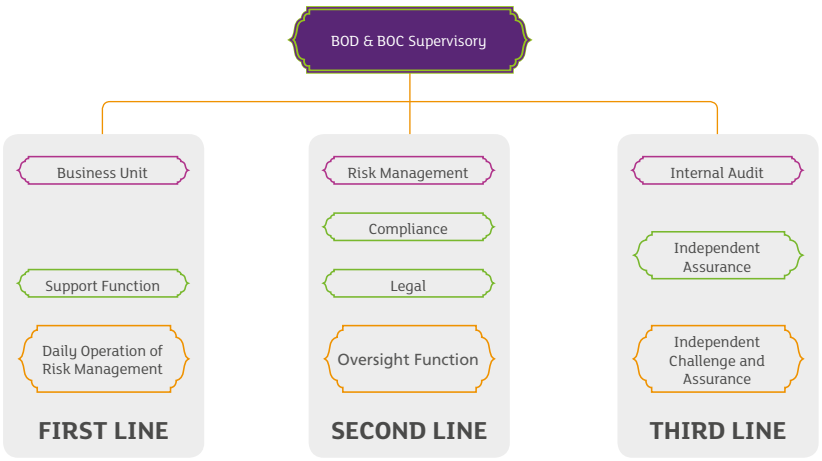
Pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia. Kesadaran akan risiko akan terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank Muamalat Indonesia.

*The implemented risk management of Bank Muamalat Indonesia is the mutual responsiblity of all managements and employees of Bank Muamalat Indonesia. Risk awareness will continously be implanted in every organization level and an inseperable part of Bank Muamalat's culture.*

Bank Muamalat Indonesia menerapkan konsep 'tiga lini pertahanan' dalam pengelolaan risiko, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, seperti gambar di bawah ini:

*Bank Muamalat applies 'three lines of defense' concept in the risk management, in which the risk management is made by all organizational lines and supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as figure below:*

The Three Lines of Defense of Bank Muamalat Indonesia




## Lini Pertahanan Pertama

Garis pertahanan pertama terdiri dari unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan.

## *First Line of Defense*

*The first line of defense consists of risk taker and owner working unit performing businss function and supporting working unit. Such working unit, in the performance of its daily activities, is face to face with various risk types and possibilities faced by Bank. All functions in the first line of defense are responsible to identify and manage risk attached to each product, activity, process and system run.*

## Lini Pertahanan Kedua

Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja di lini pertahanan kedua berfungsi untuk mengembangkan kerangka, strategi dan ketentuan terkait dengan pengelolaan risiko, kepatuhan dan hukum untuk mendukung proses bisnis Bank.

## *Second Line of Defense*

*The second line of defense consists of risk managemen, compliance and legal working unit. The working unit in the second line of defense has function to develop framework, strategy and provision related to the risk management, compliance and law to support the business process of Bank.*

## Lini Pertahanan Ketiga

Pada garis ketiga pertahanan terdiri dari unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan *risk-based audit* yang memberikan *value added* kepada *first line* dan *second line of defense,* untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat Indonesia dan regulasi yang berlaku.

## *Third Line of Defense*

*The third line of defense comprises internal audit unit. The Internal audit has function as independent unit having duty to do a risk-based audit giving a value added to the first and second defens lines, to ensure that all Bank elements have performed its function and responsibility well including ensure conformity to the management policy of Bank Muamalat Indonesia and the applicable regulations.*

## Penerapan Manajemen Risiko secara Bankwide

Bank Muamalat Indonesia secara berkelanjutan mengimplementasikan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja Bank, dengan tujuan agar dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dalam mengelola risiko yang dihadapinya, Bank Muamalat Indonesia mengacu SE OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, di mana terdapat empat aspek yang mendasari pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan SE OJK tersebut, yaitu:

## *Risk Management Application and Compliance*

*Bank Muamalat Indonesia continously implement the risk management application comprehensively for every Bank work line, with the purpose so that it may produce healthy business growth, as well as maximize a value added for shareholders in the long term.*

*In managing the risk faced, Bank Muamalat Indonesia refers SE OJK No.10/SEOJK.03/2014 regarding Health Level Assessment of Sharia Commercial Bank, in which four aspects underlying the implented risk management of Bank Muamalat Indonesia in accordance with SE OJK are found, that is:*

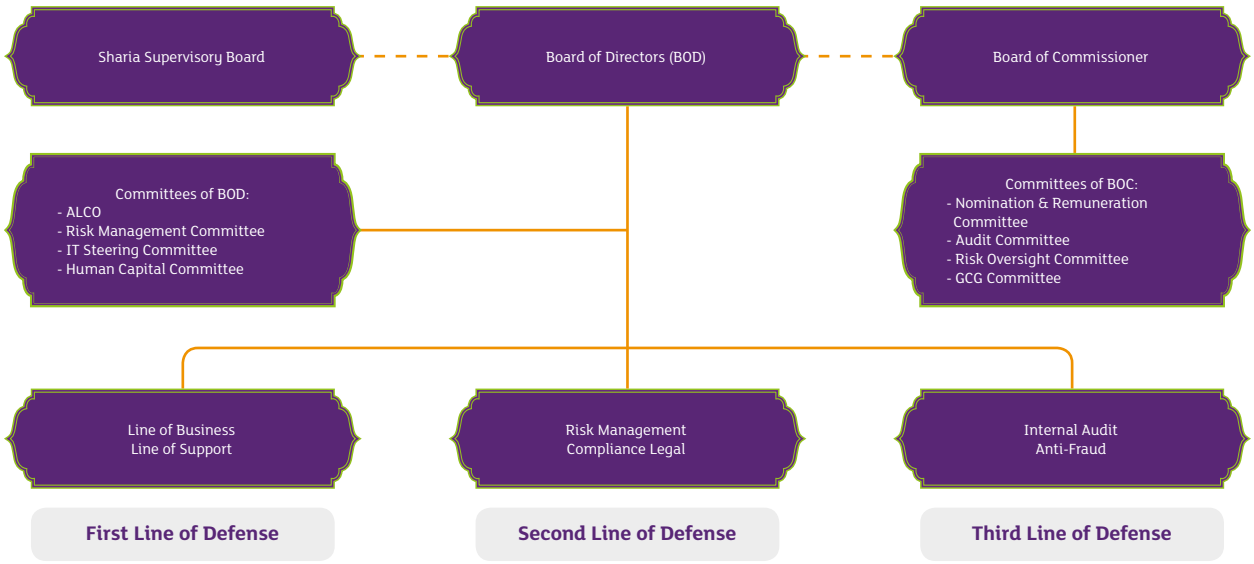
## Tata Kelola Risiko

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawasan Syariah di Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan pengawasan aktif seperti pada bagan struktur berikut:

## Risk Governance

*As part of risk governance, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board in Bank Muamalat has performed an active supervisory as in the following structural chart:*

**RISK MANAGEMENT STRUCTURE**




## Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko dalam bentuk kebijakan, prosedur, maupun limit.

1. Bank telah memiliki hierarki ketentuan internal sebagai panduan bagi unit kerja dalam memahami dan menyusun ketentuan internal yang digunakan dalam kegiatan operasi dan bisnis Bank. Saat ini Bank telah memiliki ketentuan internal mengenai manajemen risiko secara umum dan manajemen risiko terkait dengan risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas dan risiko lainnya.

2. Bank memastikan setiap penyusunan kebijakan dan prosedur, dan penetapan limit selalu memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko *(risk tolerance*)

## *Risk Management Framework*

*Risk management framework in the form of policy, procedure, and limit.*

1. *Bank has had internal provision hierarchy as guidance for working unit to understand and compose internal conditions used in bank operational and business activities. Currently Bank has had internal conditions concerning general risk management and risk management related to credit risk, operation, market, liquidity and other risks.*

2. *Bank ensure that every composition of policy and procedure, and limit determination always considers risk appetite and risk tolerance.*

3. Bank menetapkan limit terkait kewenangan memutus pembiayaan dan operasional Bank yang disusun berjenjang dengan berlandaskan pada prinsip *dual control* dan *segregation of duties.*
4. Bank Muamalat Indonesia juga melakukan *review* atas limit kewenangan memutus pembiayaan dan limit kewenangan memutus transaksi, yang ditetapkan berjenjang dan dipastikan bahwa pemutusan dilakukan dengan berpedoman pada *four eyes principle*.

## Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas; serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

1. Identifikasi Risiko
   Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk, aktivitas layanan dan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank Muamalat Indonesia.

2. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko, dan menentukan modal untuk meng-*cover* risiko residual.

   Pengukuran dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan model matematis ataupun simulasi.

   Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko, antara lain untuk mengukur:

   a. sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
   b. kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
   c. faktor risiko (*risk factors*) secara individual;
   d. eksposur risiko secara keseluruhan *(aggregate*) dengan mempertimbangkan *risk correlation*; dan
   e. seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan syariah dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

   Evaluasi atas metode pengukuran risiko, antara lain terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, dilakukan secara berkala.

3. Pemantauan Risiko
   Pemantauan risiko dilakukan dengan membandingkan limit risiko dengan eksposur risiko yang dihadapi.

   Pemantauan risiko dilakukan oleh setiap kepala unit kerja dan kebenaran pelaporan atas hasil pemantauan risiko tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing kepala unit kerja.

*3. Bank determines limit related to authority deciding Bank financing and operation composed level by level having base of dual control principles and segregation of duties.*

*4. Bank muamalat also conducted a review of the upper limit cut financing and limit the authority cut, transactions set a series of steps and ascertained that termination is based on four eyes principle.*

## *Risk Management Process*

*Risk management process covers identification, measurement, monitoring, and risk control; adequacy of human resources in quantity and quality; as well as adequacy of risk management information system.*

*1. Risk Identification*
*Risk identification intends to know all risk types included in every product, service activity and functional activity having potency of injuring Bank Muamalat Indonesia.*

*2. Risk Measurement*
*Risk measurement intends to know the risk size included in Bank activities to be compared with Bank risk appetite so that Bank may take action of the risk mitigation, and determine capital to cover a residual risk.*

*The measurement may be made in qualitatif and quantitative using mathematics or simulation model.*

*The risk measurement approach is used to measure Bank risk profile in order to obtain effectivity picture of the risk management application, to measure among others:*

*a. Sensitivity of product/activity to change of factors influencing it, in normal and abnormal conditions;*

*b. Change Tendency of factors intended based on fluctuation of change occurred in the past and its correlation;*
*c. Individually Risk factors;*
*d. Aggregate risk exposure by considering risk correlation; and*
*e. All risks are included in all transaction and Sharia banking product and able to be integrated in Bank Management Information system.*

*Evaluation of the risk measurement method is adjustment of assumption, data source, and procedure used to measure risk, done periodically.*

*3. Risk Monitoring*
*Risk monitoring is carried out by considering the risk limit with risk exposure faced.*

*Risk monitoring is carried out by each head of working unit and true report on risk monitoring results are the responsiblity of each head of working unit.*

4. Pengendalian Risiko
   Tindakan pengendalian risiko dilakukan oleh Bank dengan pelaksanaan mitigasi atas potensi risiko misalnya dengan cara *hedging* (sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar), penerbitan garansi atau di-*cover* oleh jaminan, penutupan asuransi, sekuritisasi asset (sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan prinsip syariah), dan penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

4. *Risk Control*
   *Risk control action is done by Bank performing mitigation of risk potency, for example hedging (according to the applicable laws and regulations and advice of DSN-MUI concerning Sharia Hedging Transaction for Exchange Rate), issue of guarantee or covered by guarantee, insurance coverage, asset security (according to the applicable laws and regulations and Sharia principles), and increase in Bank capital to absorb a loss potency.*

## Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Kecukupan sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian internal oleh unit internal audit dan *independent review* yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan. Hasil review dari pengendalian internal dikomunikasikan dengan unit manajemen risiko dan kepatuhan sebagai masukan dalam perbaikan ketentuan internal dan proses operasional.

## *Adequacy of Internal Control System*

*Adequacy of internal control system, covers internal control by internal audit unit and independent review made by external auditor and consultant as well. Review results from the internal control are communicated with the risk and compliance management unit as input in internal conditions improvement and operational process.*

## Penilaian Profil Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Muamalat Indonesia melakukan penilaian atas profil risiko secara individu dan juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak (PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF), dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.

Penilaian profil risiko Bank Muamalat Indonesia secara individu dan juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank Muamalat Indonesia (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian profil risiko Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan.

## *Risk Profile Assessment*

*According to the provisions of POJK No. 65/ POJK.03/2016 dated December 28, 2016 regarding Applied Risk Management for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, Bank Muamalat Indonesia makes a risk profile assessment individually and consolidation with subsidiaries (PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)), and it is reported to the Financial Service Authority (OJK) periodically.*

*Risk profile assessment of Bank Muamalat Indonesia individually and in consolidation with subsidiaries illustrates risks included in business activity of Bank Muamalat Indonesia (inherent risk) and risk management applicatioin quality reflecting risk control system for each risk type. The risk profile assessment of Bank Muamalat Indonesia has been made in accordance with the prevailing provisions of the Financial Service Authority.*

## Pengungkapan Permodalan, Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

### Pengungkapan Permodalan

1. Struktur Permodalan
   Manajemen permodalan pada Bank Muamalat Indonesia difokuskan kepada pengelolaan struktur permodalan yang sehat untuk menyerap risiko serta memenuhi ketentuan permodalan dari regulator, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Oleh sebab itu, terdapat beberapa inisiatif selama tahun 2018 untuk meningkatkan permodalan Bank Muamalat Indonesia di antaranya dengan rencana menerbitkan sukuk subordinasi dan juga menerbitkan saham baru melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) pada Oktober 2018. Proses penguatan modal ini masih terus berlangsung dan diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2019. Dalam mengelola permodalan, Bank Muamalat Indonesia memberikan perhatian terhadap tingkat pengembalian modal yang optimal kepada para pemegang sahamnya.

## *Disclosure of Capital, Risk Exposure and Risk Management Application*

### *Disclosure of Capital*

1. *Capital Structure*
   *Capital management at Bank Muamalat Indonesia is focused on managing a healthy capital structure to absorb the risks and meet the capital requirement by the regulator, as well as to support the healthy business growth. Therefore, there are several initiatives during 2018 to increase the capital of Bank Muamalat Indonesia, including the plan to issue a subordinated sukuk and new shares through the pre-emptive rights mechanism or rights issue VI(PUT VI) in October 2018 . this capital strengthening process is still ongoing and is expected to be realized in 2019. In managing the capital, Bank Muamalat Indonesia have a concern to the optimal level of capital return to its shareholders.*

Struktur permodalan saat ini didominasi oleh komponen Modal Inti Utama atau *Common Equity Tier 1* (CET 1) sampai dengan 88% dari Total Modal Bank, sedangkan pada komponen Modal Pelengkapan didominasi oleh surat utang yang terbitkan oleh Bank sebanyak Rp100 Milliar atau 11% dari total modal yang ada. Berikut adalah rincian dari surat utang yang dimiliki:

*Current capital structure is dominated by Common Equity Tier 1 (CET 1) which is up to 88% of Bank's total equity, whilst the supplementary capital is dominated by the securites issued by Bank amounting to Rp100 Billion or 11% of the existing total equity. the dtails as follows:*

*Medium Term Notes* Syariah Subordinasi Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018

*Subordinated Sharia Medium Term Notes of Bank Muamalat in 2018*

Pada tanggal 25 Juli 2017, Bank Muamalat Indonesia menerbitkan *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017 melalui mekanisme *private placement* yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Nisbah Pemegang MTN Syariah Subordinasi sebesar 23,75% per tahun yang dihitung dari Pendapatan yang Dibagihasilkan atau dengan indikasi tingkat bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.250.000,- untuk setiap Rp10.000.000,- per tahun. Penerbitan Surat Berharga Subordinasi ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-143/PB.13/2017 pada tanggal 20 Juli 2017.

*On July 25th, 2017, Bank Muamalat Indonesia issued Subordinated Sharia Medium Term Notes I issued by Bank Muamalat Indonesia in 2017 through private placement which the maturity date is on July 25th, 2022, with the Nisbah of 23,75% per annum which calculated based on the shared income or by the indication of profit sharing level offered amounting to Rp1.250.000 for every IDR10.000.000 per year. The issuance of this subordinated instrument has been approved by the Financial Service Authority through Letter No. S-143/PB.13/2017 on July 20, 2017.*

2. Pengungkapan Kuantitatif Mengenai Struktur Permodalan

*2. Quantitative Disclosure on Capital Structure*

(dalam jutaan Rp| In million Rp)

| KOMPONEN MODAL<br>*COMPONENTS* | | | | | | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modal Inti (Tier 1)<br>*Tier 1* | | | | | |
| | 1.1. | Modal Inti Utama (CET 1)<br>*Common equity Tier 1 (CET 1)* | | | | |
| | | 1.1.1. | Modal Disetor (saham biasa)<br>*Paid-up Capital (common share)* | | | |
| | | | 1.1.1.1. | Modal dasar<br>*Authorized Capital* | | 4.400.000 |
| | | | 1.1.1.2. | Modal yang belum disetor<br>*Unpaid Capital* | (-/-) | (3.296.565) |
| | | | 1.1.1.3. | Saham biasa yang dibeli kembali (treasury stocks)<br>*Common share bought back (treasury stocks)* | (-/-) | - |
| | | 1.1.2. | Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)<br>*Additional Capital Reserves (Disclosed Reserves)* | | | |
| | | | 1.1.2.1. | Faktor Penambah Cadangan Tambahan Modal<br>*Adding factor of Additional Capital Reserves* | | |
| | | | | 1.1.2.1.1 Agio saham biasa<br>*common paid-in Surplus* | | 1.578.925 |
| | | | | 1.1.2.1.2 Modal sumbangan<br>*Donated Capital* | | - |
| | | | | 1.1.2.1.3 Cadangan umum<br>*Common Reserves* | | 1.487.396 |
| | | | | 1.1.2.1.4 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak<br>*Previous years profit after tax has been calculated* | | - |
| | | | | 1.1.2.1.5 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (100%)<br>*Current year profit after tax has been calculated (100%)* | | 46.002 |

(dalam jutaan Rp| In million Rp)

| KOMPONEN MODAL *COMPONENTS* | | | | | Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.2.1.6 | Selisih lebih penjabaran laporan keuangan<br>*exessive difference of translation of financial statement* | | - |
| | | 1.1.2.1.7 | Dana setoran modal<br>*Fund for Paid Capital* | | - |
| | | 1.1.2.1.8 | Waran yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%)<br>*common share-based issued warrant (the highest of 50%)* | | - |
| | | 1.1.2.1.9 | Opsi saham yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%)<br>*Common share-based issued share option (the highest of 50%)* | | - |
| | | 1.1.2.1.10 | Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan<br>*other comprehensive Income: profit potency* | | - |
| | | 1.1.2.1.11 | Saldo surplus revaluasi aset tetap<br>*fixed asset revaluation surplus balance* | | 747.432 |
| | 1.1.2.2. | Faktor Pengurang Cadangan Tambahan Modal<br>*Deduction factor of Additional Capital reserves* | | | |
| | | 1.1.2.2.1 | Disagio saham biasa<br>*Common share disagio* | (-/-) | - |
| | | 1.1.2.2.2 | Rugi tahun-tahun lalu<br>*Previous years loss* | (-/-) | (1.024.559) |
| | | 1.1.2.2.3 | Rugi tahun berjalan<br>*Current year loss* | (-/-) | - |
| | | 1.1.2.2.4 | Selisih kurang penjabaran laporan keuangan<br>*Negative difference of translation of financial statement* | (-/-) | - |
| | | 1.1.2.2.5 | Pendapatan komprehensif lainnya: potensi kerugian<br>*Other comprehensive Income: loss potency* | (-/-) | (16.964) |
| | | 1.1.2.2.6 | Selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan CKPN aset produktif<br>*negative difference between Regulatory Provision on productive asset and CKPN on productive asset* | (-/-) | - |
| | | 1.1.2.2.7 | Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam<br>*Negative differences on adjustment of fair value on financial instrument in* | (-/-) | - |
| | | | *trading book* | | |
| | | 1.1.2.2.8 | PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung<br>*PPA on non-productive asset required to be calculated* | (-/-) | - |
| | 1.1.3. | Minority Interest dari CET 1 yang diterbitkan perusahaan anak (khusus untuk konsilidasi)<br>*Minority Interest of CET 1 issued by subsidiaries (special for consolidation)* | | | - |
| | 1.1.4. | Faktor Pengurang Modal Inti Utama (CET 1)<br>*Deduction factor of Common Equity Tier 1 (CET 1)* | | | |
| | | 1.1.4.1. | Perhitungan aset pajak tangguhan (deferred tax)<br>*Asset Calculation of deferred tax* | (-/-) | (146.236) |
| | | 1.1.4.2. | *Goodwill* | (-/-) | - |
| | | 1.1.4.3. | Aset tidak berwujud lainnya<br>*other Intangible asset* | | |
| | | 1.1.4.3.1 | *Copyright* | (-/-) | - |

(dalam jutaan Rp| In million Rp)

| KOMPONEN MODAL *COMPONENTS* | | | | | | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.1.4.3.2 | Hak paten<br>*Copyright* | (-/-) | - |
| | | | 1.1.4.3.3 | Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak (software))<br>*other intellectual property rights (including software)* | (-/-) | - |
| | | | 1.1.4.3.4 | Lainnya<br>*others* | (-/-) | - |
| | | 1.1.4.4. | | Penyertaan<br>*Equity investment* | (-/-) | (6.095) |
| | | 1.1.4.5. | | Kekurangan modal pada perusahaan anak yang berupa perusahaan asuransi (khusus untuk konsolidasi)<br>*Shortfall on the capital of insurance subsidiary (special for consolidation)* | (-/-) | - |
| | | 1.1.4.6. | | Eksposur sekuritisasi<br>*Security Exposure* | (-/-) | - |
| | | 1.1.4.7. | | Investasi pada instrumen AT 1 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 tidak cukup)<br>*Investment in instrument AT 1 of other banks (in the event that the amount of AT 1 is not sufficient)* | (-/-) | - |
| | | 1.1.4.8. | | Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 dan Tier 2 tidak cukup)<br>*Investment in instrument Tier 2 of other banks (in the event that total AT 1 and Tier 2 are not sufficient)* | (-/-) | - |
| | Total Modal Inti Utama (CET 1)<br>*Total Common Equity Tier 1 (CET 1)* | | | | | 3.769.336 |
| 1.2. | Modal Inti Tambahan (AT 1)<br>*Additional Tier 1 (AT 1)* | | | | | |
| | 1.2.1. | | | Saham preferen (non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali<br>*Preferent share (non cumulative) after deducted by repurchase* | | - |
| | 1.2.2. | | | Surat berharga subordinasi (perpetual non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali<br>*Subordinated securities (perpetual non cumulative) after deducted by repurchase* | | - |
| | 1.2.3. | | | Pinjaman subordinasi (perpetual non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali<br>*Subordinated loan (perpetual non cumulative) after deducted by repurchase* | | - |
| | 1.2.4. | | | Agio dari instrumen modal inti tambahan<br>*Agio from additional tier 1 instrument* | | - |
| | 1.2.5. | | | Disagio dari instrumen modal inti tambahan<br>*Disagio from additional tier 1* | (-/-) | - |
| | 1.2.6. | | | Penerbitan instrumen modal inti tambahan oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain<br>*issue of additional tier 1 instrument by subsidiary purchased by other parties* | | - |
| | | | | (khusus untuk konsolidasi)<br>*(special for consolidation)* | | |
| | 1.2.7. | | | Faktor pengurang Modal Inti Tambahan (AT 1)<br>*deduction factor of additionel tier 1 (AT 1)* | | |
| | | 1.2.7.1. | | Investasi pada instrumen AT 1 bank lain:<br>*Investment in AT 1 instrument of other banks:* | | |
| | | | 1.2.7.1.1 | Saham preferen (non cumulative)<br>*preferent share (non cumulative)* | (-/-) | - |
| | | | 1.2.7.1.2 | Surat berharga subordinasi (perpetual non cumulative)<br>*Subordinated securities (perpetual non cumulative)* | (-/-) | - |

(dalam jutaan Rp| In million Rp)

| KOMPONEN MODAL *COMPONENTS* | | | | | | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.2.7.1.3 | Pinjaman subordinasi (perpetual non cumulative)<br>*Subordinated loan (perpetual non cumulative)* | (-/-) | - |
| | | 1.2.7.1. | | Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (Dalam hal jumlah Tier 2 tidak cukup)<br>*investment in Tier 2 instrument of other banks (in the event that total Tier 2 is not sufficient)* | (-/-) | - |
| | Total Modal Inti Tambahan (AT 1)<br>*Total Additional Tier 1 (AT 1)* | | | | | - |
| | Total Modal Inti (1.1. + 1.2.)<br>*Total Tier 1 (1.1. + 1.2.)* | | | | | 3.769.336 |
| | | | | | | |
| 2 | Modal Pelengkap (Tier 2)<br>*Supplementary Capital (Tier 2)* | | | | | |
| | 2.1. | Saham preferen (cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali<br>*Preferent share (cumulative) after deducted by repurchase* | | | | - |
| | 2.2. | Surat berharga subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) setelah dikurangi pembelian kembali<br>*subordinated securities (perpetual cumulative, non perpetual) after dedcuted by repurchase* | | | | 100.000 |
| | 2.3. | Pinjaman subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) setelah dikurangi pembelian kembali<br>*subordinated loan (perpetual cumulative, non perpetual) after deducted by repurchase* | | | | - |
| | 2.4. | Mandatory convertible bond<br>*Mandatory convertible bond* | | | | - |
| | 2.5. | Agio dari instrument modal pelengkap<br>*Agio from supplementary capital instrument* | | | | - |
| | 2.6. | Disagio dari instrument modal pelengkap<br>*Disagio from supplementary capital instrument* | | | (-/-) | - |
| | 2.7. | Cadangan umum PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif (paling tinggi 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit)<br>*Common reserve of PPA obliged to be formed on productive asset (the highest is 1,25% ATMR for Credit Risk)* | | | | 385.670 |
| | 2.8. | Cadangan tujuan<br>*Appropriate reserve* | | | | - |
| | 2.9. | Penerbitan instrumen modal pelengkap oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain (khusus untuk konsolidasi)<br>*issue of supplementary capital instrument by subsidiary purchased by other parties (special for consolidation)* | | | | - |
| | 2.10. | Instrumen modal pelengkap (Tier 2) lainnya<br>*other supplementary capital instruments (Tier 2)* | | | | - |
| | 2.11. | Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa<br>*left time period-based Amortization* | | | (-/-) | - |
| | 2.12. | Sinking fund yang dibentuk untuk melunasi instrumen modal pelengkap<br>*Sinking fund formed to pay off the supplementary capital instrument* | | | (-/-) | - |
| | 2.13. | Faktor pengurang modal pelengkap (Tier 2) berupa investasi pada instrumen Tier 2 bank lain<br>*deduction factor of supplementary capital (Tier 2) in the form of investment in Tier 2 instrument of other banks* | | | | |
| | | 2.13.1. | | Saham preferen (cumulative)<br>*Preferent Share (cumulative)* | (-/-) | - |
| | | 2.13.2. | | Surat berharga subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual)<br>*Subordinated securities (perpetual cumulative, non perpetual)* | (-/-) | - |

(dalam jutaan Rp| In million Rp)

| KOMPONEN MODAL<br>*COMPONENTS* | | | | Bank |
|---|---|---|---|---|
| | 2.13.3. | Pinjaman subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual)<br>*Subordinated Loan (perpetual cumulative, non perpetual)* | (-/-) | - |
| | 2.13.4. | Mandatory convertible bond<br>*Mandatory convertible bond* | (-/-) | - |
| | Total Modal Pelengkap (2.1. s.d. 2.13.)<br>*Total Supplementary Capital (2.1. s.d. 2.13.)* | | | 485.670 |
| 3 | Total Modal (1+2)<br>*Total Capital (1+2)* | | | 4.255.006 |
| 4 | Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)<br>*Risk Weighted Asset (ATMR)* | | | |
| | 4.1. | ATMR untuk Risiko Kredit<br>*ATMR for Credit Risk* | | 30.853.637 |
| | 4.2. | Selisih Lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang menjadi pengurang ATMR Risiko Kredit (-/-)<br>*positive diffference of common reserve of PPA on productive asset to be reducer of ATMR of Credit Risk (-/-)* | | (79.014) |
| | 4.3. | ATMR untuk Risiko Pasar<br>*ATMR for Market Risk* | | 17.446 |
| | 4.4. | ATMR untuk Risiko Operasional<br>*ATMR for Operational Risk* | | 3.681.357 |
| | Total ATMR (4.1. s.d. 4.4)<br>*Total ATMR (4.1. s.d. 4.4)* | | | 34.473.426 |
| 5 | Rasio KPMM (Aktual)<br>*Ratio of KPMM (Actual)* | | | |
| | 5.1. | Rasio CET 1<br>*Ratio of CET 1* | | 10,93% |
| | 5.2. | Rasio AT 1<br>*Ratio of AT 1* | | 0,00% |
| | 5.3. | Rasio Tier 1 (5.1 + 5.2)<br>*Ratio of Tier 1 (5.1 + 5.2)* | | 10,93% |
| | 5.4. | Rasio Tier 2 (paling tinggi sama dengan Tier 1)<br>*Ratio of Tier 2 (the highest is the same as Tier 1)* | | 1,41% |
| | 5.5. | Rasio total (5.3 + 5.4)<br>*Ratio of total (5.3 + 5.4)* | | 12,34% |
| 6 | Kekurangan CET 1 untuk memenuhi paling rendah 4,5%<br>*Shortfall of CET 1 to fulfill the lowest of 4,5%* | | | 0,00% |

(dalam jutaan Rp| In million Rp)

| | KOMPONEN MODAL<br>*COMPONENTS* | | Bank |
|---|---|---|---|
| 7 | Kekurangan Tier 1 untuk memenuhi paling rendah 6%<br>*Shortfall of Tier 1 to fulfill the lowest of 6%* | | 0,00% |
| 8 | Rasio KPMM sesuai profil risiko<br>*Ratio of KPMM conforms to risk profile* | | 10,00% |
| 9 | Alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko<br>*Fulfillment allocation of KPMM conforms to risk profile* | | |
| | 9.1. | Rasio CET 1 (paling rendah 4,5%)<br>*Ratio of CET 1 (the lowest of 4,5%)* | 4,50% |
| | 9.2. | Rasio AT 1 yang dialokasikan<br>*Ratio ofAT 1 allocated* | 0,00% |
| | 9.3. | Tambahan CET 1 yang dialokasikan untuk memenuhi paling rendah 6% dari Tier 1 (jika 9.2 < 1,5%)<br>*additional CET 1 allocated to fulfill the lowest of 6% from Tier 1 (if 9.2 < 1,5%)* | 1,50% |
| | 9.4. | Rasio Tier 2 yang dialokasikan<br>*Ratio of Tier 2 allocated* | 1,41% |
| | 9.5. | Tambahan rasio CET 1 yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko (jika 8 > 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)<br>*Additional ratio of CET 1 allocated to fulfill KPMM of risk profile (if 8 > 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)* | 2,59% |
| | 9.6. | Pemenuhan rasio KPMM profil risiko<br>*Ratio fulfillment of KPMM of risk profile* | 10,00% |
| 10 | Kekurangan modal untuk pemenuhan KPMM profil risiko (8 - 9.6)<br>*Shortfall of capital to fulfill KPMM of risk profile (8 - 9.6)* | | 0,00% |
| 11 | CET 1 yang tersedia untuk pemenuhan buffer<br>*CET 1 available for buffer fulfillment* | | 2,34% |
| 12 | Jumlah buffer yang wajib dibentuk<br>*Total buffer obliged to be formed* | | |
| | 12.1. | Capital Conservation Buffer<br>*Capital Conservation Buffer* | 0,00% |
| | 12.2. | Countercyclical Buffer<br>*Countercyclical Buffer* | - |
| | 12.3. | Capital Surcharge untuk D-SIB<br>*Capital Surcharge untuk D-SIB* | - |
| | 12.4. | Total Buffer<br>*Total Buffer* | 0,00% |
| 13 | Kelebihan atau kekurangan CET 1 untuk pemenuhan buffer<br>*Excess of shortfall of CET 1 for buffer fulfillment* | | 2,34% |
| Rasio KPMM (%)<br>*Ratio of KPMM (%)* | | | 12,34% |

3. Kecukupan Permodalan

Sehubungan dengan meningkatnya perkembangan risiko di dunia perbankan saat ini, maka perhitungan kecukupan modal juga perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material. Hal ini sesuai dengan penerapan Basel II Pilar 2 dan juga POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Syariah yang mengatur mengenai kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Bank (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*/ ICAAP).

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan ICAAP dalam menetapkan kecukupan modalnya, dimana Bank Muamalat Indonesia memperhitungkan risiko tambahan yang dianggap material, selain dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, yakni antara lain risiko konsentrasi dari risiko kredit, risiko likuditas, risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book* dan juga dampak penerapan *stress test*.

Pada posisi bulan Desember 2018 hasil *Self-Assessment* profil risiko Bank Muamalat Indonesia menunjukkan rasio KPMM telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait kecukupan modal sesuai dengan profil risiko.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, pada POJK tersebut juga diatur mengenai kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang merupakan implementasi dari Basel III, dengan kriteria penambahan buffer diatur sebagai berikut:

a. *Capital Conservation Buffer*, yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis. Pada posisi tanggal 31 Desember 2018, Bank Muamalat Indonesia Indonesia tergolong pada Buku II sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk membentuk *Capital Conservation Buffer*.
b. *Countercyclical Buffer*, yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan pembiayaan/kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Regulator menetapkan pembentukan *countercyclical buffer* sebesar 0% bagi Bank Muamalat Indonesia. Untuk selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer* paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
c. *Capital Surchage* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB), yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian. Sampai dengan akhir Tahun 2018, tidak ada informasi dari OJK yang menyatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia dikategorikan sebagai Bank dengan Risiko Sistemik, sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk membentuk *Capital Surcharge Buffer*.

*3. Capital Adequacy*

*In line with the increasing risk development in current banking industry the calculation of capital adequacy needs to be adjusted so that is not only able to absorb the potential loss which arises from credit risk, market risk, and operational risk but also other material risks. this is in accordance with the practice of Basel II Pillar 2 and also POJK No.21/POJK.03/2014 regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) for Sharia Bank which regulates Bank's capital adequacy in accordance with the risk profile and the strategy determination to maintain the capital adequacy (Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP).*

*In line with such matter, Bank Muamalat has applied ICAAP to determine its adequacy of capital, in which Bank Muamalat calculated addition risk deemed materials, besides credit risk, market risk and operational risk, there is a risk concentration of credit risk, liquidity risk, interest rate benchmark risk in the banking book and also stress test application impact.*

*In December 2018, the self-assessment on risk profile of Bank Muamalat Indonesia showed the Capital Adequacy Ratio (CAR) has complied with the provisions determined by Financial Service Authority (OJK) regarding capital adequay according to the risk profile.*

*Besides the capital adequacy ratio matched with risk profile, this POJK also regulates Bank's obligation to form the additional capital as buffer which is the implementation of Basel III, with the criteria of buffer addition arranged as follows:*

*a. Capital Conservation Buffer, functioned as buffer if loss is found in the crisis period. In December 31, 2018, Bank Muamalat Indonesia was categorized in Book II so that Bank Muamalat had no obligations to form a Capital Conservation Buffer.*

*b. Countercyclical Buffer, functioned as buffer to anticipate loss if excessive banking financing/credit growth is found so that it potentially disturbs the financial system stability.. Regulator determines a formation of countercyclical buffer by 0% for Bank Muamalat Indonesia. Furthermore, Bank Indonesia will evaluate dimension and time of the application Countercyclical Buffer at least 1 (one) time in 6 (six) months.*

*c. Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Bank (D-SIB), functioned to reduce negative impact to the financial and economic system stability if the bank's failure has systemic impact is found through the improvement of Bank's ability in absorbing the loss. Up to the end of 2018, there is no information stated that Bank Muamalat Indonesia is categorized as Bank with Sistemic Risk was found, so that Bank Muamalat Indonesia had no obligations to form a Capital Surcharge Buffer.*

## Pengungkapan Eksposur Risiko dan Manajemen Risiko

1. Risiko Kredit

   a. Penerapan Manajemen Risiko Kredit
   Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Dalam upaya menjaga risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta masih memberikan keuntungan, Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada ketentuan, termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan Umum Pembiayaan dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pada proses pembiayaan dilakukan pemisahan fungsi kerja *(segregation of duties)* dan implementasi *four eyes principle*.

   Pengelolaan risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia diterapkan pada tingkat *account* dan juga tingkat portofolio. Pada tingkat *account*, setiap keputusan pembiayaan dianalisis oleh unit bisnis dan dilakukan *review* oleh unit *risk underwriting*, untuk selanjutnya diputuskan oleh Komite Pembiayaan dengan anggota yang mewakili fungsi bisnis dan fungsi risiko. Limit kewenangan Komite Pembiayaan ditetapkan berjenjang disesuaikan dengan segmentasi pembiayaan, tingkat risiko dan kompetensi anggota Komite Pembiayaan.

   Pada tingkat portofolio, dilakukan pembatasan pembiayaan pada sektor ekonomi, dan atau produk, dan atau segmen tertentu dalam bentuk antara lain penetapan *target market* dan *Financing Allocation Limit* (FAL) yang dikaji secara berkala. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga melakukan analisis dan pemantauan atas portofolio pembiayaan yang dilaporkan kepada manajemen dan atau komite level Direksi dan atau Dewan Komisaris melalui media rapat secara berkala.

   Terkait dengan tagihan yang telah jatuh tempo, Bank Muamalat Indonesia merujuk definisi tagihan yang telah jatuh tempo kepada SEOJK No.34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, yakni tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bagi hasil atau margin atau *ujrah*.

   Dalam menentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Bank Muamalat Indonesia menghitung CKPN hanya untuk eksposur dengan akad *murabahah* saja, hal ini sesuai dengan penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) sementara PSAK Syariah tidak mengatur secara detail. Perhitungan CKPN dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu:

## *Disclosure of Risk Exposure and Risk Management*

*1. Credit Risk*

*a. Credit Risk Management Application*
*Credit Risk is risk caused by customer's or other parties' failure to fulfill obligations to Bank Muamalat according to the agreement, including credit risk due to debtor's failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk. In the effort of maintaining the credit risk included in business activity of Bank Muamalat to remain controlled in the acceptable limit as well as still give advantages, Bank Muamalat is guided by the conditions, including but not limited to General Policy of Financing and General Policy of Risk Management stipulated by the Board of Directors under approval from the Board of Commissioners. In the financing process, segregation of duty and implementation of four eyes principle have been performed.*

*Credit risk management of Bank Muamalat is applied at account level and portfolio level. At account level, each financing decision is analyzed by the business unit and reviewed by the underwriting risk unit, further decided by the Finance Committee having members representing business function and risk function. Authority Limit of the Finance Committee is determined multilevel adjusted to financing segmentation, risk and competency level of Finance Committee members.*

*At portfolio level, financing limit in economy and/or product sector, and or certain segments in the form of determining target market and Financing Allocatioin Limit (FAL) reviewed periodically have been performed . Moreover, Bank Muamalat also analyzes and monitors the financing portfolio reported to management and or committee at level of the Board of Directors and or of Commissioners through periodic meeting media.*

*Related to the claim on past due, Bank Muamalat refers definition of claim on past due to SEOJK No.34/SEOJK.03/2015 concerning Weighted Asset Calculation according to Risk for Credit Risk using standard approach for Sharia Commercial Bank, that is claim on past due of more than 90 (ninety) days, for principal repayment and/or profit-sharing or margin or ujrah payment.*

*In the determination of Provision for Possible Losses (CKPN), Bank Muamalat calculates CKPN only for exposure with akad murabahah, this matter conforms to the application of PSAK 50/55 (Revisi 2006) whilst, PSAK of Sharia does not regulate in detail. Calculation of CKPN is differentiated to be two approaches, that is:*

i. CKPN Individual, yang dihitung berdasarkan jumlah ekspektasi arus kas yang diterima di masa akan datang, dikurangi jumlah tercatat.
ii. CKPN *Collective*, yang dihitung dengan mempertimbangkan *Probability of Deafult* dan *Loss Given Default* dengan menggunakan data historis 3 tahun terakhir.

*i. CKPN-individual, calculated on the basis of total cash flow expectation accepted in the future, reduced by total recorded.*
*ii. CKPN-collective, calculated by considering Probability of Default and Loss Given Default using the last 3 year historical data.*

Tabel 1.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah/ *IndividualDisclosure of Net Claims by Region*

(dalam jutaan rupiah)/ (in million rupiah)

| No. | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah *Net Claim by Region* | | | | | |
| | | Jabodetabek *Greater Jakarta* | Jawa *Java* | Sumatera *Sumatera* | Kalimantan *Borneo* | Lainnya *Others* | Total *Total* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | 9.324.858 | 134 | 4 | - | - | 9.324.995 |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | - | 101.962 | 115.986 | - | - | 217.948 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | 632.737 | 124.442 | 24.217 | - | 41.281 | 822.677 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | 3.382.467 | 1.724.620 | 948.844 | 507.866 | 494.144 | 7.057.942 |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | 21.944 | 14.099 | 16.981 | 8.096 | 15.878 | 76.997 |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit* | 5.856 | 6.995 | 4.127 | 2.823 | 11.004 | 30.805 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | 3.231.250 | 1.441.476 | 608.661 | 222.499 | 340.169 | 5.844.056 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | 22.502.693 | 4.288.751 | 650.822 | 178.503 | 708.610 | 28.329.379 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due* | 134 | 10 | 8 | - | 56 | 208 |
| 11 | Aset Lainnya *Others Asset* | 5.615.306 | - | - | - | - | 5.615.306 |
| | Total | 44.717.245 | 7.702.489 | 2.369.649 | 919.787 | 1.611.142 | 57.320.313 |

Tabel 1.2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / *Disclosure of Net Claims Based Remaining Contract Term*

| No. | Kategori Portofolio<br>*Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak<br>*Net Claims Based Remaining Contract Term* | | | | | |
| | | < 1 tahun<br>*< 1 year* | >1 thn s.d. 3 thn<br>*> 1 year until 3 years* | >3 thn s.d. 5 thn<br>*> 3 year until 5 years* | > 5 thn<br>*> 5 years* | Non-Kontraktual<br>*Non-Contractual* | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah<br>*Claim to The Government* | 3.054.159 | 1.030.621 | 265.470 | 2.392.316 | 2.582.429 | 9.324.995 |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik<br>*Claim to Public Sector Entities* | - | 115.986 | 100.195 | 1.768 | - | 217.948 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional<br>*Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank<br>*Claim to The Bank* | 17.653 | 75.679 | 66.933 | 18.166 | 644.246 | 822.677 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal<br>*Residential Mortgage Loans* | 44.971 | 336.407 | 1.079.392 | 5.596.186 | 987 | 7.057.942 |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial<br>*Commercial Property Mortgage Loans* | 1.046 | 7.037 | 23.157 | 45.708 | 49 | 76.997 |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan<br>*Retired Employee Credit* | 1.458 | 4.855 | 5.896 | 18.735 | (139) | 30.805 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel<br>*Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | 981.266 | 983.147 | 1.295.357 | 2.507.919 | 76.367 | 5.844.056 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi<br>*Claim to Corporate* | 7.651.355 | 4.579.878 | 2.274.294 | 13.331.146 | 492.705 | 28.329.379 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo<br>*Claim on past due* | 21 | 140 | 47 | - | (0) | 208 |
| 11 | Aset Lainnya<br>*Others Asset* | - | - | - | - | 5.615.306 | 5.615.306 |
| | Total | 11.751.929 | 7.133.750 | 5.110.741 | 23.911.944 | 9.411.950 | 57.320.313 |

Tabel 1.3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi / *Disclosure of Net Claims by Economic Sector*

| No. | Sektor Ekonomi<br>*Economic Sectors* | Tagihan Kepada Pemerintah<br>*Claim to The Government* | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik<br>*Claim to Public Sector Entities* | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional<br>*Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | Tagihan Kepada Bank<br>*Claim to The Bank* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| | 31-Dec-18 | | | | | |
| 1 | Pertanian, perburuan dan Kehutanan<br>*Agriculture, Hunting and Forestry* | - | 100.195 | - | - | |
| 2 | Perikanan<br>*Fisheries* | - | - | - | - | |
| 3 | Pertambangan dan Penggalian<br>*Mining and Quarrying* | - | - | - | - | |
| 4 | Industri pengolahan<br>*Manufacturing Industry* | - | - | - | - | |
| 5 | Listrik, Gas dan Air<br>*Electricity, Gas and Water* | - | 115.986 | - | - | |
| 6 | Konstruksi<br>*Construction* | - | - | - | - | |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran<br>*Wholesale and Retail Trade* | - | - | - | - | |
| 8 | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum<br>*Accommodation Providers and food and Beverage Providers* | - | - | - | - | |
| 9 | Transportasi, pergudangan dan komunikasi<br>*Transportation, Storage and Communication* | - | - | - | - | |
| 10 | Perantara keuangan<br>*Financial Brokers* | - | - | - | 817.891 | |

| | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Retired Employee Credit* | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due* | Aset Lainnya *Others Asset* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | - | - | - | 511.517 | 577.684 | - | - |
| | - | - | - | 6.175 | 264.126 | - | - |
| | - | - | - | 83.009 | 1.247.434 | - | - |
| | - | - | - | 70.405 | 3.980.508 | - | - |
| | - | - | - | 9.237 | 1.936.187 | - | - |
| | - | - | - | 114.818 | 2.036.620 | - | - |
| | - | - | - | 338.710 | 4.309.055 | - | - |
| | - | - | - | 43.223 | 79.765 | - | - |
| | - | - | - | 65.869 | 1.511.337 | - | - |
| | - | - | - | 688.320 | 964.136 | - | - |

| No. | Sektor Ekonomi<br>*Economic Sectors* | Tagihan Kepada Pemerintah<br>*Claim to The Government* | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik<br>*Claim to Public Sector Entities* | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional<br>*Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | Tagihan Kepada Bank<br>*Claim to The Bank* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan<br>*Real Estate, Rental Business, and orporate Services* | - | - | - | - | |
| 12 | Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib<br>*Public Administration, Defense nd Compulsory Social Security* | - | - | - | - | |
| 13 | Jasa pendidikan<br>*Education Services* | - | - | - | - | |
| 14 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial<br>*Health Services and Social Activities* | - | 1.768 | - | - | |
| 15 | Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya<br>*Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual* | - | - | - | 300 | |
| 16 | Jasa perorangan yang melayani rumah tangga<br>*Households Personal Services* | - | - | - | - | |
| 17 | Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya<br>*International and Extra International Agencies* | - | - | - | - | |
| 18 | Kegiatan yang belum jelas batasannya<br>*Undefined activities* | - | - | - | - | |
| 19 | Bukan Lapangan Usaha<br>*Not a Business Field* | - | - | - | - | |
| 20 | Lainnya<br>*Others* | 9.324.995 | - | - | 4.486 | |
| | Total | 9.324.995 | 217.948 | - | 822.677 | |

| | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Retired Employee Credit* | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due* | Aset Lainnya *Others Asset* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | 130.217 | 2.007.641 | - | - |
| | - | - | - | 1.337 | - | - | - |
| | - | - | - | 475.663 | 40.885 | - | - |
| | - | - | - | 118.130 | 56.507 | - | - |
| | 635 | - | - | 1.551.782 | 602.522 | - | - |
| | - | - | - | 824 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | 40.647 | 96.376 | - | - |
| | 7.057.307 | 76.997 | 30.805 | 1.586.592 | 87.942 | 208 | - |
| | - | - | - | 7.581 | 8.530.651 | - | 5.615.306 |
| | 7.057.942 | 76.997 | 30.805 | 5.844.056 | 28.329.379 | 208 | 5.615.306 |

Tabel 1.4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah / *Disclosure of Bills and Allowance By Region*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Keterangan *Information* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wilayah *Region* | | | | | |
| | | Jabodetabek / *Greater Jakarta* | Jawa / *Java* | Sumatera / *Sumatra* | Kalimantan / *Borneo* | Lainnya / *Others* | Total *Total* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (10) |
| 1 | Tagihan/ *Claims* | 46.263.397 | 7.867.757 | 2.380.951 | 924.656 | 1.600.837 | 59.037.599 |
| 2 | Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired )/ *Impaired Claims* | | | | | | - |
| | a. Belum jatuh tempo/ *Not Past Due Yet* | 370.650 | 122.669 | | | | 493.319 |
| | b. Telah jatuh tempo/ *Past Due* | 75.437 | 92.546 | | | | 167.983 |
| 3 | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual/ *Provision for Possible Losses – Individual* | 32.036 | 51.201 | | | | 83.237 |
| 4 | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif/ *Provision for Possible Losses - Collective* | 761.317 | 96.704 | 24.250 | 9.149 | 15.443 | 906.863 |
| 5 | Tagihan yang dihapus buku/ *Written-Off Claims* | 425.537 | 162.724 | 145.175 | 25.957 | 916.320 | 1.675.713 |

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi / *Disclosure of Claims and Allowance by Economic Sector*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Sektor Ekonomi *Economic Sector* | Tagihan *Claim* | Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Claims* | | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual *Provision for Possible Losses – Individual* | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif *Provision for Possible Losses - Collective* | Tagihan yang hapus buku *Written-Off Claims* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belum Jatuh Tempo *Not Past Due Yet* | Telah Jatuh Tempo *Past Due* | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 31-Dec-18 | | | | | | |
| 1 | Pertanian, perburuan dan Kehutanan *Agriculture, Hunting and Forestry* | 1.190.817 | | | | 10.013 | 80.087 |
| 2 | Perikanan *Fisheries* | 272.821 | | | | 4.740 | - |
| 3 | Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying* | 1.332.375 | | | | 187.005 | 47.415 |
| 4 | Industri pengolahan *Manufacturing Industry* | 4.143.116 | 20.044 | 167.983 | 577 | 70.120 | - |
| 5 | Listrik, Gas dan Air *Electricity, Gas and Water* | 2.065.639 | - | - | - | 23.789 | - |
| 6 | Konstruksi *Construction* | 2.204.427 | 58.528 | - | 9.317 | 68.869 | - |

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Sektor Ekonomi *Economic Sector* | Tagihan *Claim* | Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Claims* | | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual *Provision for Possible Losses – Individual* | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif *Provision for Possible Losses - Collective* | Tagihan yang hapus buku *Written-Off Claims* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belum Jatuh Tempo *Not Past Due Yet* | Telah Jatuh Tempo *Past Due* | | | |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran *Wholesale and Retail Trade* | 4.946.056 | 115.568 | - | 8.168 | 336.360 | 602 |
| 8 | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum *Accommodation Providers and food and Beverage Providers* | 123.730 | - | - | - | 1.715 | 95.344 |
| 9 | Transportasi, pergudangan dan komunikasi *Transportation, Storage and Communication* | 1.607.237 | 299.179 | - | 8.471 | 29.250 | 4.957 |
| 10 | Perantara keuangan *Financial Brokers* | 2.481.729 | | | | 23.801 | 9.280 |
| 11 | Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan *Real Estate, Rental Business, and orporate Services* | 2.140.079 | | | | 22.565 | 191 |
| 12 | Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib *Public Administration, Defense nd Compulsory Social Security* | 1.339 | | | | 9 | - |
| 13 | Jasa pendidikan *Education Services* | 517.285 | | | | 5.353 | - |
| 14 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial *Health Services and Social Activities* | 177.228 | | | | 2.353 | - |
| 15 | Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya *Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual* | 2.162.058 | | | | 21.426 | 2.274 |
| 16 | Jasa perorangan yang melayani rumah tangga *Households Personal Services* | 824 | | | | 5 | - |
| 17 | Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya *International and Extra International Agencies* | - | | | | 1.399 | - |
| 18 | Kegiatan yang belum jelas batasannya *Undefined activities* | 137.084 | | | | 91.205 | 285 |
| 19 | Bukan Lapangan Usaha *Not a Business Field* | 8.877.441 | | | | 5.532 | 16.704 |
| 20 | Lainnya *Others* | 24.656.314 | | | | 1.354 | 1.418.573 |
| | Total | 59.037.599 | 493.319 | 167.983 | 26.532 | 906.863 | 1.675.713 |

Tabel 1.6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Disclosure of Provision of Possible Losses Mutation Details*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Keterangan *Information* | 31-Dec-18 | |
|---|---|---|---|
| | | CKPN Individual *Provision of Possible Losses - Individual* | CKPN Kolektif *Provision of Possible Losses - Collective* |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Saldo awal CKPN *Provision of Possible Losses Beginning Balance* | 410 | 1.211 |
| 2 | Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) *Provisions (Reversal of Provisions) of Possible Losses in Current Year* | - | - |
| | 2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan *Provisions of Possible Losses in Current Year* | - | - |
| | 2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan *Reversal of Provisions of Possible Losses in Current Year* | (29) | (359) |
| 3 | CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan *Provisions of Possible Losses that used for Write-off in Current Year* | (93) | (87) |
| 4 | Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan *Other Provisions (Other Reversal of Provisions) in Current Year* | 313 | 773 |
| Saldo akhir CKPN *Provision of Possible Losses Ending Balance* | | 630 | 1.897 |

## Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit, Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34 /SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

Berdasarkan pendekatan standar tersebut, perhitungan ATMR untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal *(external rating)* dan sebagian lagi berdasarkan bobot risiko sesuai ketentuan regulator. Peringkat eksternal yang digunakan Bank Muamalat Indonesia adalah peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui regulator sesuai dengan SEOJK No.37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat yang diakui OJK.

## *Disclosure of Credit Risk with Standard Approach*

*In the calculation of ATMR for credit risk, Bank Muamalat refers to the Financial Service Authority No.21/POJK.03/2014 regarding Minimum Capital Provision obligation of Sharia Commercial Bank and also Circular of Financial Service Authority No.34 / SEOJK.03/2015 regarding Weighted Asset Calculation according to Risk Credit using Standard Approach for Sharia Commercial Bank.*

*Based on such standard approach, calculation of ATMR for several categories of portfolio is based on external rating and partly based on risk weight according to provisions from regulator. External rating used by Bank Muamalat is the rating issued by rating institution acknowledged by regulator in accordance with SEOJK No.37/SEOJK.03/2016 regarding Rating Institution acknowledged by OJK.*



Tabel 1.7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat / *Disclosure of Net Claims by Portfolio Category and Rating Scale*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Kategori Portofolio/ Portfolio Categories | Lembaga Pemeringkat/ Rating Agencies | Peringkat Jangka panjang/ Long Term Rating | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Standard and Poor's | AAA | AA+ s.d AA- | A+ s.d A- | BBB+ s.d BBB- | BB+ s.d BB- | |
| | | Fitch Rating | AAA | AA+ s.d AA- | A+ s.d A- | BBB+ s.d BBB- | BB+ s.d BB- | |
| | | Moody's | Aaa | Aa1 s.d Aa3 | A1 s.d A3 | Baa1 s.d Baa3 | Ba1 s.d Ba3 | |
| | | PT. Fitch Ratings Indonesia | AAA (idn) | AA+(idn) s.d AA-(idn) | A+(idn) s.d. A-(idn) | BBB+(idn) s.d BBB-(idn) | BB+(idn) s.d BB-(idn) | |
| | | PT ICRA Indonesia | [Idr]AAA | [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- | [Idr]A+ s.d [Idr] A- | [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- | [Idr]BB+ s.d [Idr] BB- | |
| | | PT Pemeringkat Efek Indonesia | idAAA | idAA+ s.d idAA- | idA+ s.d id A- | id BBB+ s.d id BBB- | id BB+ s.d id BB- | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah/ *Claim to The Government* | | - | - | - | - | - | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/ *Claim to Public Sector Entities* | | - | - | - | - | - | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | | - | - | - | - | - | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank/ *Claim to The Bank* | | 6.273 | 3.475 | 12.491 | - | - | |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal/ *Residential Mortgage Loans* | | - | - | - | - | - | |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial/ *Commercial Property Mortgage Loans* | | - | - | - | - | - | |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan/ *Retired Employee Credit* | | - | - | - | - | - | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | | - | - | - | 155.365 | - | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi/ *Claim to Corporate* | | - | - | 8.789 | 541.106 | - | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/ *Claim on past due* | | - | - | - | - | - | |
| 11 | Aset Lainnya/ *Others Asset* | | - | - | - | - | - | |
| | TOTAL | | 6.273 | 3.475 | 21.280 | 696.471 | - | |

| | | | | | | | | 31-Dec-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagihan Bersih/ Net Claims | | | | | | | | |
| | | | Peringkat Jangka Pendek/ Long Term Rating | | | | | |
| | B+ s.d B- | Kurang dari B- | A-1 | A-2 | A-3 | Kurang dari A-3<br>Less than A-3 | Tanpa Peringkat/<br>Non rated | Total |
| | B+ s.d B- | Kurang dari B- | F1+ s.d F1 | F2 | F3 | Kurang dari F3<br>Less than F3 | | |
| | B1 s.d B3 | Kurang dari B3 | P-1 | P-2 | P-3 | Kurang dari P-3<br>Less than P-3 | | |
| | B+(idn) s.d<br>B-(idn) | Kurang dari B-(idn) | F1+(idn) s.d<br>F1(idn) | F2(idn) | F3(idn) | Kurang dari F3(idn)<br>Less than F3(idn) | | |
| | [Idr]B+ s.d<br>[Idr]B- | Kurang dari [Idr]B- | [Idr]A1+ s.d<br>[Idr]A1 | [Idr]A2+ s.d<br>[Idr]A2 | [Idr]A3+ s.d<br>[Idr] A3 | Kurang dari [Idr]A3<br>Less than [Idr]A3 | | |
| | id B+ s.d<br>id B- | Kurang dari idB- | idA1 | idA2 | idA3 s.d<br>id A4 | Kurang dari idA4<br>Less than idA4 | | |
| | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | - | - | - | - | - | - | 9.324.995 | 9.324.995 |
| | - | - | - | - | - | - | 217.948 | 217.948 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | 800.437 | 822.677 |
| | - | - | - | - | - | - | 7.057.942 | 7.057.942 |
| | - | - | - | - | - | - | 76.997 | 76.997 |
| | - | - | - | - | - | - | 30.805 | 30.805 |
| | - | - | - | - | - | - | 5.688.691 | 5.844.056 |
| | - | - | - | - | - | - | 27.779.484 | 28.329.379 |
| | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 |
| | - | - | - | - | - | - | 5.615.306 | 5.615.306 |
| | - | - | - | - | - | - | 56.592.813 | 57.320.313 |

Tabel 1.8.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif/ *Disclosure of Counterparty Credit Risk: Derivative Transactions*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No | Variabel yang Mendasari *Underlying Variables* | 31-Dec-18 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Notional Amount | | | Tagihan Derivatif *Derivative Claim* | Kewajiban Derivatif *Derivative Liabilties* | Tagihan Bersih sebelum MRK *Net Claim before CRM* | MRK *CRM* | Tagihan Bersih setelah MRK *Net Claim after CRM* |
| | | < 1 Tahun < 1 Year | > 1 Tahun - < 5 Tahun > 1 Year - < 5 Years | > 5 Tahun > 5 Years | | | | | |
| 1 | Shariah Compliant Profit Rate Swap | | | | | | | | - |
| 2 | Shariah Compliant Foreign Currency Swap | 612.025 | 34.780 | | 2.261 | 1.497 | 10.096 | 922 | 9.174 |
| 3 | Lainnya *Others* | | | | | | | | - |
| | TOTAL | 612.025 | 34.780 | - | 2.261 | 1.497 | 10.096 | 922 | 9.174 |

Tabel 1.8.b. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo / *Disclosure of Counterparty Credit Risk*

Bank tidak memiliki eksposur Transaksi Repo
*Bank did not have Repo Transaction exposure*

Tabel 1.8.c. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo / *Disclosure of Counterparty Credit Risk: Reverse Repo Transactions*

Bank tidak memiliki eksposur Transaksi Reverse Repo
*Bank did not have Reverse Repo Transaction exposure*

## Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Sesuai dengan POJK terkait perhitungan ATMR untuk risiko kredit yang disebutkan sebelumnya, Bank Muamalat Indonesia juga mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). Bank Muamalat Indonesia menggunakan Teknik MRK-Agunan dengan pendekatan sederhana *(simple approach)* untuk sebagian besar portofolionya, dimana jenis agunan keuangan yang diakui *(eligible financial collateral)* dalam Teknik MRK-Agunan mengacu kepada ketentuan terkait dari OJK.

## *Disclosure of Credit Risk Mitigation with Standard Approach*

*In accordance with POJK related to calculation of ATMR for credit risk named previously, Bank Muamalat also acknowledges the existence of collateral, guarantee, underwriting or credit insurance as credit risk mitigation technique (MRK). Bank Muamalat uses MRK-Collateral technique with simple approach for most part of portfolio, in which the eligible financial collateral in MRK-Collateral technique refers to related provisions on OJK.*

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

*Disclosure of Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation*

| No. | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | | | | | | ATMR *RWA* | Beban Modal *Capital Charge* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation* | | | | | | | | | | | |
| | | 0% | 20% | 35% | 40% | 45% | 50% | 75% | 100% | 150% | Lainnya | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| A | Eksposur Neraca *Exposure on Balance Sheet* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | 9.324.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | - | - | - | - | - | 217.948 | - | - | - | | 108.974 | 10.549 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | - | 656.179 | - | - | - | 166.498 | - | - | - | | 214.485 | 20.762 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | - | 4.545.588 | 3.111.171 | - | - | - | - | - | - | | 1.998.028 | 193.409 |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | - | - | - | - | - | - | - | 76.977 | - | | 76.977 | 7.451 |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit* | - | - | - | - | - | 30.805 | - | - | - | | 15.403 | 1.491 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | - | - | - | - | - | - | 5.844.056 | - | - | | 4.383.042 | 424.278 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | - | - | - | - | - | 8.789 | - | 28.320.588 | - | | 28.324.983 | 2.741.858 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due* | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | | 208 | 20 |
| 11 | Aset Lainnya *Others Asset* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | Total Eksposur Neraca *Total Exposure on Balance Sheet* | 9.324.995 | 5.201.767 | 3.111.171 | - | - | 424.040 | 5.844.056 | 28.397.773 | - | - | 35.122.098 | 3.399.819 |

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

*Disclosure of Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation*

| No. | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | | | | | | ATMR *RWA* | Beban Modal *Capital Charge* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation* | | | | | | | | | | | |
| | | 0% | 20% | 35% | 40% | 45% | 50% | 75% | 100% | 150% | Lainnya | | |
| B | Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif *Exposure on Commitments Contingencies for off Balance Sheet Transactions* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | | | | | | | | | | | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | - | - | - | - | - | 4.486 | - | - | - | | 2.243 | 217 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | - | - | - | - | - | - | 2.154 | - | - | | 1.616 | 156 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | 19.710 | 299.784 | - | - | - | 202.150 | - | 74.207 | - | - | 235.239 | 22.771 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | Total Eksposur TRA *Total Exposure on Off Balance Transactions* | 19.710 | 299.784 | - | - | - | 206.636 | 2.154 | 74.207 | - | - | 239.097 | 23.145 |

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

*Disclosure of Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation*

| No. | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | | | | | | ATMR *RWA* | Beban Modal *Capital Charge* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation* | | | | | | | | | | | |
| | | 0% | 20% | 35% | 40% | 45% | 50% | 75% | 100% | 150% | Lainnya | | |
| C | Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) *Exposure on Counterparty Credit Risk* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | - | 1.734 | - | - | - | 8.362 | - | - | - | | 4.528 | 438 |
| 5 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 6 | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | - | | | | | | | - | | | - | - |
| | Total Eksposur Counterparty Credit Risk *Total Exposure on Counterparty Credit Risk* | - | 1.734 | - | - | - | 8.362 | - | - | - | - | 4.528 | 438 |

Tabel 1.10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

*Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques*

(dalam jutaan rupiah) / *(in million rupiah)*

| No. | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih *Net Claims* | Bagian Yang Dijamin Dengan *Portion which Secured by* | | | | Bagian Yang Tidak Dijamin *Portion which not Secured* |
| | | | Agunan *Collateral* | Garansi *Guarantee* | Asuransi Kredit *Credit Insurance* | Lainnya *Others* | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)] |
| A | Eksposur Neraca *Exposure on Balance Sheet* | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | 9.324.995 | - | - | - | | 9.324.995 |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | 217.948 | - | - | - | | 217.948 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - | - | | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | 822.677 | 87.512 | - | - | | 735.165 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | 7.057.942 | 14.779 | - | - | | 7.043.163 |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | 76.977 | 537 | - | - | | 76.440 |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit* | 30.805 | 2.140 | - | - | | 28.665 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | 5.844.056 | 225.003 | - | - | | 5.619.053 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | 28.329.379 | 9.170.052 | - | - | | 19.159.327 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due* | 208 | | - | - | | 208 |
| 11 | Aset Lainnya *Others Asset* | 5.615.306 | - | - | - | | 5.615.306 |
| | Total Eksposur Neraca *Total Exposure on Balance Sheet* | 57.320.293 | 9.500.023 | - | - | - | 47.820.270 |
| B | Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif *Exposure on Commitments Contingencies for off Balance Sheet Transactions* | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | - | - | - | - | | - |

Tabel 1.10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
*Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques*

(dalam jutaan rupiah) / *(in million rupiah)*

| No. | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih *Net Claims* | Bagian Yang Dijamin Dengan *Portion which Secured by* | | | | Bagian Yang Tidak Dijamin *Portion which not Secured* |
| | | | Agunan *Collateral* | Garansi *Guarantee* | Asuransi Kredit *Credit Insurance* | Lainnya *Others* | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | - | - | - | - | | - |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - | - | | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | 4.486 | - | - | - | | 4.486 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | - | - | - | - | | - |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | - | - | - | - | | - |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit* | - | - | - | - | | - |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | 2.154 | - | - | - | | 2.154 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | 235.239 | - | - | - | | 235.239 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due* | - | - | - | - | | - |
| | Total Eksposur TRA *Total Exposure on Off Balance Transactions* | 241.879 | - | - | - | - | 241.879 |
| C | Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) *Exposure on Counterparty Credit Risk* | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | - | - | - | - | | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | - | - | - | - | | - |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - | - | | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | 10.095 | - | - | - | | 10.095 |
| 5 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | - | - | - | - | | - |

Tabel 1.10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
*Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques*

(dalam jutaan rupiah) / *(in million rupiah)*

| No. | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih *Net Claims* | Bagian Yang Dijamin Dengan *Portion which Secured by* | | | | Bagian Yang Tidak Dijamin *Portion which not Secured* |
| | | | Agunan *Collateral* | Garansi *Guarantee* | Asuransi Kredit *Credit Insurance* | Lainnya *Others* | |
| 6 | Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate* | - | - | - | - | | - |
| | Total Eksposur Counterparty Credit Risk *Total Exposure on Counterparty Credit Risk* | 10.095 | - | - | - | - | 10.095 |

## Pengungkapan Sekuritisasi Aset

## *Disclosure of Asset Securitization*

Sampai dengan akhir Desember 2018, Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki eksposur dalam bentuk sekuritisasi aset.

*Up to the end of December 2018, Bank Muamalat did not have exposure in the form of asset securitization.*

Tabel 1.11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset

*Table 1.11. Disclosure of Securitization Transactions*

Bank tidak memiliki eksposur Transaksi Sekuritisasi

*Bank did not have exposure of the Securitization Transaction*

## Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

## *Disclosure of ATMR Calculation for the Credit Risk using Standard Approach*

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

*Disclosure of ATMR Calculation for the Credit Risk using Standard Approach*

Tabel 1.13.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca/ *Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No | Kategori Portofolio *Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih *Claim Net* | ATMR Sebelum MRK *RWA before CRM* | ATMR Setelah MRK *RWA after CRM* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government* | 9.324.995 | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities* | 217.948 | 108.974 | 108.974 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank* | 822.677 | 214.485 | 170.729 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans* | 7.057.942 | 1.998.028 | 1.994.365 |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans* | 76.977 | 76.977 | 76.440 |

Tabel 1.13.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca/ *Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No | Kategori Portofolio<br>*Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih<br>*Claim Net* | ATMR Sebelum MRK<br>*RWA before CRM* | ATMR Setelah MRK<br>*RWA after CRM* |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan<br>*Retired Employee Credit* | 30.805 | 15.403 | 14.333 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel<br>*Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | 5.844.056 | 4.383.042 | 4.225.478 |
| *9* | Tagihan kepada Korporasi<br>*Claim to Corporate* | 28.329.379 | *28.324.983* | *19.181.363* |
| *10* | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo<br>*Claim on past due* | 208 | 208 | 208 |
| 11 | Aset Lainnya<br>*Others Asset* | 5.615.306 | | 4.838.584 |
| *TOTAL* | | 57.320.293 | 35.122.098 | 30.610.473 |

Tabel 1.13.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca/ *Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No | Kategori Portofolio<br>*Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih<br>*Claim Net* | ATMR Sebelum MRK<br>*RWA before CRM* | ATMR Setelah MRK<br>*RWA after CRM* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah<br>*Claim to The Government* | 9.324.995 | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik<br>*Claim to Public Sector Entities* | 217.948 | 108.974 | 108.974 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional<br>*Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank<br>*Claim to The Bank* | 822.677 | 214.485 | 170.729 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal<br>*Residential Mortgage Loans* | 7.057.942 | 1.998.028 | 1.994.365 |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial<br>*Commercial Property Mortgage Loans* | 76.977 | 76.977 | 76.440 |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan<br>*Retired Employee Credit* | 30.805 | 15.403 | 14.333 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel<br>*Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | 5.844.056 | 4.383.042 | 4.225.478 |
| *9* | Tagihan kepada Korporasi<br>*Claim to Corporate* | 28.329.379 | *28.324.983* | *19.181.363* |

Tabel 1.13.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca/ *Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No | Kategori Portofolio<br>*Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih<br>*Claim Net* | ATMR Sebelum MRK<br>*RWA before CRM* | ATMR Setelah MRK<br>*RWA after CRM* |
| *10* | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo<br>*Claim on past due* | 208 | 208 | 208 |
| 11 | Aset Lainnya<br>*Others Asset* | 5.615.306 | | 4.838.584 |
| *TOTAL* | | 57.320.293 | 35.122.098 | 30.610.473 |

Tabel 1.13.b. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif/ *Disclosure of Commitments / Contingent Exposure on Balance Sheet*

| No | Kategori Portofolio<br>*Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih<br>*Claim Net* | ATMR Sebelum MRK<br>*RWA before CRM* | ATMR Setelah MRK<br>*RWA after CRM* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah<br>*Claim to The Government* | - | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik<br>*Claim to Public Sector Entities* | - | - | - |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional<br>*Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank<br>*Claim to The Bank* | 4.486 | 2.243 | 2.243 |
| 5 | Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal<br>*Residential Mortgage Loans* | - | - | - |
| 6 | Pembiayaan Beragun Properti Komersial<br>*Commercial Property Mortgage Loans* | - | - | - |
| 7 | Pembiayaan Pegawai/Pensiunan<br>*Retired Employee Credit* | - | - | - |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel<br>*Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | 2.154 | 1.616 | 1.616 |
| *9* | Tagihan kepada Korporasi<br>*Claim to Corporate* | 235.239 | *235.239* | *235.239* |
| *10* | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo<br>*Claim on past due* | - | - | - |
| TOTAL | | 241.879 | 239.097 | 239.097 |

Tabel 1.13.c. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)/ *Disclosure of Potential credit risk exposure due to failure of competitor (Counterparty Credit Risk)*

| No | Kategori Portofolio<br>*Portfolio Categories* | 31-Dec-18 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tagihan Bersih<br>*Claim Net* | ATMR Sebelum MRK<br>*RWA before CRM* | ATMR Setelah MRK<br>*RWA after CRM* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah<br>*Claim to The Government* | - | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik<br>*Claim to Public Sector Entities* | - | - | - |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional<br>*Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions* | - | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank<br>*Claim to The Bank* | 10.095 | 4.528 | 4.067 |
| 5 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel<br>*Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio* | - | - | - |
| *6* | Tagihan kepada Korporasi<br>*Claim to Corporate* | - | - | - |
| TOTAL | | 10.095 | 4.528 | 4.067 |

Tabel 1.13.d. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)/ *Disclosure of Potential Credit Risk exposure due to failure of settlement (settlement risk)*

| |
|---|
| Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen<br>*Bank did not have exposure arising from the Credit Risk dut to failure of settlement* |

Tabel 1.13.e. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi/ *Disclosure of Securitization Exposures*

| |
|---|
| Bank tidak memiliki eksposur yang sekuritisasi<br>*Bank did not have Securitization Exposures* |

Tabel 1.13.f. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit/ *Disclosure of Total Credit Risk Measurement*

| | 31-Dec-18 |
|---|---|
| TOTAL ATMR RISIKO KREDIT<br>*TOTAL OF RISK WEIGHTED ASSETS CREDIT RISK* | 30.853.637 |
| TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL<br>*TOTAL OF DEDUCTION FROM CAPITAL FACTOR* | - |

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan dan perubahan harga *option*. Dalam melaksanakan manajemen risiko pasar, Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan pemisahan fungsi yang jelas antara *front office* sebagai unit pelaksana transaksi tresuri dan investasi, *middle office* yang berfungsi sebagai unit yang melakukan pemantauan aktivitas tresuri

2. *Market Risk*

*Market Risk is a risk in the position balance and administrative account due to the change of market price, such as risk in terms of the change of value from the tradeable assets or leased and the change of option price. In carrying out the management of market risk, Bank Muamalat Indonesia has specified the separation of clear function between front office as the executive unit of treasury and investment transactions, middle office functioning as the unit monitoring the treasury activity and*

dan juga merekomendasikan limit-limit, serta *back office* sebagai unit yang melaksanakan *settlement* transaksi. Pemantauan risiko pasar pada tingkat Direksi dilakukan melalui *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif.

Dalam rangka pemantauan risiko pasar secara periodik, Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan limit-limit untuk aktivitas tresuri, seperti limit Posisi Devisa Netto (PDN), limit *dealer* dan juga limit *cut loss*. Bank mengantisipasi risiko pasar atas transaksi valuta asing kerena perubahan kurs dengan menetapkan limit internal PDN maksimum sebesar 2%, atau jauh di bawah ketentuan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20%.

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank Muamalat Indonesia mengacu pada POJK No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan SEOJK No.35 /SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah. Perhitungan KPMM risiko pasar mencakup risiko *benchmark* suku bunga dan risiko nilai tukar.

Berikut di bawah ini adalah beberapa mekanisme pengendalian risiko pasar yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

a. Melakukan perbaikan atas prosedur manajemen risiko pasar, dimana di dalamnya proses pemantauan dan pengukuran risiko pasar temasuk limit pada aplikasi pendukung transaksi tresuri telah diperbaharui.
b. Meningkatkan fungsi *middle office* yaitu unit manajemen risiko sebagai unit pelaksana yang independen dalam menyajikan data pasar yang berkaitan dengan proses *marked to market* untuk setiap aktivitas *trading*.
c. Melakukan finalisasi atas pengembangan sistim pemantauan atas transaksi *foreign exchange, money market* dan *fixed income* yang dilakukan oleh unit kerja Treasury, terutama yang berkaitan dengan pemantauan batas nominal transaksi (*dealer limit monitoring*) dan batas kerugian transaksi (*loss limit monitoring*)

*recomended the limits, and back office as the unit carrying out the transaction settlement. Monitoring for the market risk at the level of Board of Directors shall be made through the Asset & Liabilities Committee (ALCO) with the members of Board of Directors and executive officials.*

*In order to monitor the periodical market risk, Bank Muamalat Indonesia has specified the limits for the treasury activities, such as limit of Net Open Position (PDN), limits of dealer and also cut loss. Bank anticipated market risk for the transaction of foreign exchange due to the change of rate by specifying the internal limit of PDN (Net Open Position) with the maximum of 2%, or far under the terms as allowed by Bank Indonesia namely with the maximum of 20%.*

*In the calculation of ATMR for Market Risk, Bank Muamalat Indonesia refers to POJK No.21/POJK.03/2014 concerning the Obligation to Provide Minimum Capital of Bank Umum Syariah (Syariah Commercial Bank) and SEOJK No.35 /SEOJK.03/2015 concernng the Weighted Asset Calculation according to the Risk for the Market Risk using the Standard Method for the Syariah Commercial Bank. The calculation of KPMM for the market risk includes benchmark risks of the interest rate and exchange rate.*

*The following are some mechanism of controlling the market risk made by Bank Muamalat Indonesia, such as:*

*a. To recover for the procedure of market risk management, in which the process of monitoring and measurement of market risk including limit to the supporting treasury transaction application has been renewed.*
*b. To improve the function of middle office namely risk management unit as the independent performer unit to present market data relating to the process of marked to market for any activity of trading.*
*c. To finalize the development for the monitoring system in respect of the foreign exchange, money market and fixed income transactions conducted by the working unit of Treasury, chiefly relating to dealer limit monitoring and loss limit monitoring*

Tabel 2. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar/ *Market Risk Disclosure Based on Standards Method*

| No. | Jenis Risiko<br>*Type of Risk* | 31-Dec-18 | |
|---|---|---|---|
| | | Beban Modal/ Capital Charge | ATMR/ RWA |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Risiko Benchmark Suku Bunga<br>*Interest Rate Benchmark Risk* | | |
| | a. Risiko Spesifik<br>*Specific Risk* | - | - |
| | b. Risiko Umum<br>*General Risk* | 19,37 | 242,13 |
| 2 | Risiko Nilai Tukar<br>*Exchange Rate Risk* | 1.376,32 | 17.204,00 |
| 3 | Risiko Ekuitas *)<br>*Equity Risk *)* | | |
| 4 | Risiko Komoditas *)<br>*Commodity Risk *)* | | |
| | Total | 1.395,69 | 17.446,13 |

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
*As to a bank which have a firm a son who has the exposure of there is very little risk referred to*

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

*Asset & Liabilities Committee* (ALCO) yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif melakukan pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan batasan risiko yang dapat diterima oleh Bank Muamalat Indonesia. Secara harian manajemen risiko likuditas dilakukan oleh Unit Kerja Treasury dan fungsi dari Unit Kerja Enterprise Risk Management antara lain melakukan pemantauan rasio-rasio likuditas sebagai indikator peringatan dini *(early warning indicators)* termasuk juga stabilitas pendanaan inti *(core deposits)*.

Selain itu, Bank Muamalat Indonesia secara berkala melakukan *stress testing*, untuk melihat kemampuan likuditas (termasuk cadangan likuditas) dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kondisi *stress* yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas Bank. Dalam menghadapi kondisi krisis likuditas, Bank telah memiliki ketentuan internal mengenai *Contingency Funding Plan* (CFP) yang melibatkan seluruh unit kerja terkait termasuk juga proses pengawasan atas *early warning indicators* untuk risiko likuiditas.

Untuk memperbaiki profil risiko likuiditas, Bank melaksanakan kebijakan pembiayaan secara selektif selama penguatan likuiditas Bank dan memastikan agar tingkat Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dapat dikelola dalam rentang 80% hingga 92%. Bank juga melakukan strategi penghimpunan dana yang diarahkan pada peningkatan dana retail dan pertumbuhan dana korporasi akan dilakukan secara selektif, sehingga dengan demikian struktur dana lebih diprioritaskan pada pertumbuhan dana murah khususnya pada giro dan tabungan (CASA).

*3. Liquidity Risk*

*Liquidity Risk is the risk due to incompetence of Bank to meet the due date obligation from the source of cash flow and/or highly qualified liquid assets which may be encumbered, without hampering the activity and financial condition of Bank.*

*Asset & Liabilities Committee (ALCO) with the members of Board of Directors and executive official shall manage liquidity risks in accordance with the risk limit acceptable by Bank Muamalat Indonesia. Routinely, liquidity risk management is made by Working Unit of Treasury and function from the Working Unit of Enterprise Risk Management such as monitoring liquidty risks as the early warning indicators including the stability of core deposits.*

*In addition, Bank Muamalat Indonesia has periodically made stress testing, to see the liquidity competence (including liquidty reserve) in anticipation of possible stress condition which may affect liquidty conditions of Bank. To encounter the liquidity crisis condition, Bank has had internal provisions on Contingency Funding Plan (CFP) involving all related working units including process for the supervision in respect of the early warning indicators for liquidity risks.*

*To recover profile of liquidity risks, Bank carried out selective financing as long as the support of Bank liquidity and ensured that the level of Macro-prudential Intermediation Ratio (RIM) can be managed with an interval of 80% up to 92%. Bank also conducted the strategy of fund-raising directed in the enhancement of retail fund and corporate fund growth will be selectively made, so that the structure of fund is more prioritized in the growth of low fund especially demand deposit and savings (CASA).*

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual/ *Disclosure of Maturity Profile for Rupiah*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Pos-pos *Posts* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo *Balance* | Jatuh Tempo *Due Date* | | | | |
| | | | < 1 bulan < 1 Month | > 1 bln s.d. 3 bln > 1 Month till 3 Months | > 3 bln s.d. 6 bln > 3 Month till 6 Months | > 6 bln s.d. 12 bln > 6 Month till 12 Month | > 12 bulan > 12 Months |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | NERACA *ON BALANCE* | | | | | | |
| | A Aset *Asset* | | | | | | |
| | 1 Kas *Cash* | 751.822 | 751.822 | - | - | - | - |
| | 2 Penempatan pada Bank Indonesia *Placement on Bank of Indonesia* | 5.219.054 | 5.219.054 | - | - | - | - |

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual/ *Disclosure of Maturity Profile for Rupiah*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Pos-pos *Posts* | Saldo *Balance* | 31-Dec-18 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jatuh Tempo *Due Date* | | | | |
| | | | < 1 bulan < 1 Month | > 1 bln s.d. 3 bln > 1 Month till 3 Months | > 3 bln s.d. 6 bln > 3 Month till 6 Months | > 6 bln s.d. 12 bln > 6 Month till 12 Month | > 12 bulan > 12 Months |
| | 3 Penempatan pada bank lain *Placements on Other Banks* | 60.159 | 60.159 | - | - | - | - |
| | 4 Surat Berharga *Securities* | 12.223.679 | 102.199 | 145.710 | 287.363 | - | 11.688.407 |
| | 5 Kredit yang diberikan *Loan* | 15.924.893 | 265.647 | 1.820.329 | 747.843 | 940.419 | 12.150.655 |
| | 6 Tagihan lainnya *Others Bills* | 14.549.364 | 1.153.063 | 1.323.676 | 798.333 | 486.726 | 10.787.566 |
| | 7 Lain-lain *Others* | 1.076.398 | 1.076.398 | - | - | - | - |
| | Total Aset *Total Assets* | 49.805.369 | 8.628.342 | 3.289.715 | 1.833.539 | 1.427.145 | 34.626.628 |
| | B. Kewajiban *Liabilities* | | | | | | |
| | 1 Dana Pihak Ketiga *Third Party Funds* | 41.805.049 | 33.360.847 | 5.245.554 | 2.051.909 | 1.146.739 | - |
| | 2 Kewajiban pada Bank Indonesia *Liabilities on Bank of Indonesia* | 1.072.328 | - | - | - | - | 1.072.328 |
| | 3 Kewajiban pada bank lain *Liabilities on Other Banks* | 1.099.976 | 1.099.976 | - | - | - | - |
| | 4 Surat Berharga yang Diterbitkan *Securities Issued* | 2.849.000 | 1.149.000 | - | - | - | 1.700.000 |
| | 5 Pinjaman yang Diterima *Borrowing* | 1.150.000 | - | - | 450.000 | 450.000 | 250.000 |
| | 6 Kewajiban lainnya *Other Liabilities* | - | - | - | - | - | - |
| | 7 Lain-lain *Others* | 932.259 | 932.259 | - | - | - | - |
| | Total Kewajiban *Total Liabillities* | 48.908.612 | 36.542.082 | 5.245.554 | 2.501.909 | 1.596.739 | 3.022.328 |
| | Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca *Difference Between Assets with Liabilities in the Balance Sheet* | 896.757 | (27.913.740) | (1.955.839) | (668.370) | (169.594) | 31.604.300 |
| II | REKENING ADMINISTRATIF *ADMINISTRATIVE ACCOUNT* | | | | | | |
| | A. Tagihan Rekening Administratif *Administrative Account* | | | | | | |

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual/ *Disclosure of Maturity Profile for Rupiah*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Pos-pos *Posts* | Saldo *Balance* | 31-Dec-18 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jatuh Tempo *Due Date* | | | | |
| | | | < 1 bulan < 1 Month | > 1 bln s.d. 3 bln > 1 Month till 3 Months | > 3 bln s.d. 6 bln > 3 Month till 6 Months | > 6 bln s.d. 12 bln > 6 Month till 12 Month | > 12 bulan > 12 Months |
| | 1 Komitmen *Commitment* | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Kontijensi *Contingency* | - | - | - | - | - | - |
| | Total Tagihan Rekening Administratif *Total Administrative Account Claims* | - | - | - | - | - | - |
| | B. Kewajiban Rekening Administratif *Administrative Account Liabilities* | | | | | | |
| | 1 Komitmen *Commitment* | 281.278 | 219.411 | 41.676 | 10.279 | 9.912 | - |
| | 2 Kontijensi *Contingency* | 190.753 | 62.290 | 11.131 | 6.477 | 93.224 | 17.631 |
| | Total Kewajiban Rekening Administratif *Total Administrative Account Liabilities* | 472.031 | 281.701 | 52.807 | 16.756 | 103.136 | 17.631 |
| | Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif *Difference Between Charges with Liabilities in the Balance Sheet* | (472.031) | (281.701) | (52.807) | (16.756) | (103.136) | (17.631) |
| | Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] *Difference [(IA-IB)+(IIA-IIB)]* | 424.726 | (28.195.441) | (2.008.646) | (685.126) | (272.730) | 31.586.669 |
| | Selisih Kumulatif *Cummulative Difference* | | (28.195.441) | (30.204.087) | (30.889.213) | (31.161.943) | 424.726 |

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual/ *Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Pos-pos *Posts* | Saldo *Balance* | 31-Dec-18 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jatuh Tempo *Due Date* | | | | |
| | | | < 1 bulan < 1 Month | > 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months* | > 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months* | > 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month* | > 12 bulan *> 12 Months* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | NERACA *ON BALANCE* | | | | | | |
| | A Aset *Asset* | | | | | | |
| | 1 Kas *Cash* | 24.906 | 24.906 | - | - | - | - |

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual/ *Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Pos-pos *Posts* | Saldo *Balance* | 31-Dec-18 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jatuh Tempo *Due Date* | | | | |
| | | | < 1 bulan < 1 Month | > 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months* | > 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months* | > 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month* | > 12 bulan *> 12 Months* |
| 2 | Penempatan pada Bank Indonesia *Placement on Bank of Indonesia* | 120.375 | 120.375 | - | - | - | - |
| 3 | Penempatan pada bank lain *Placements on Other Banks* | 15.574 | 15.574 | - | - | - | - |
| 4 | Surat Berharga *Securities* | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kredit yang diberikan *Loan* | 1.242.662 | 4.041 | 27.912 | 148.977 | 42.924 | 1.018.809 |
| 6 | Tagihan lainnya *Others Bills* | 1.842.524 | 64.451 | 362.577 | 432.220 | 68.880 | 914.395 |
| 7 | Lain-lain *Others* | 31.607 | 31.607 | - | - | - | - |
| Total Aset *Total Assets* | | 3.277.648 | 260.954 | 390.489 | 581.196 | 111.805 | 1.933.204 |
| B. | Kewajiban *Liabilities* | | | | | | |
| 1 | Dana Pihak Ketiga *Third Party Funds* | 3.830.530 | 3.039.155 | 706.044 | 71.152 | 14.179 | - |
| 2 | Kewajiban pada Bank Indonesia *Liabilities on Bank of Indonesia* | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kewajiban pada bank lain *Liabilities on Other Banks* | 244.518 | 244.518 | - | - | - | - |
| 4 | Surat Berharga yang Diterbitkan *Securities Issued* | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pinjaman yang Diterima *Borrowing* | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kewajiban lainnya *Other Liabilities* | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lain-lain *Others* | 12.913 | 12.913 | - | - | - | - |
| Total Kewajiban *Total Liabillities* | | 4.087.961 | 3.296.586 | 706.044 | 71.152 | 14.179 | - |
| Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca *Difference Between Assets with Liabilities in the Balance Sheet* | | (810.313) | (3.035.632) | (315.555) | 510.044 | 97.626 | 1.933.204 |

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual/ *Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Pos-pos *Posts* | 31-Dec-18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo *Balance* | Jatuh Tempo *Due Date* | | | | |
| | | | < 1 bulan < 1 Month | > 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months* | > 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months* | > 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month* | > 12 bulan *> 12 Months* |
| II | REKENING ADMINISTRATIF *ADMINISTRATIVE ACCOUNT* | | | | | | |
| | A. Tagihan Rekening Administratif *Administrative Account* | | | | | | |
| | 1 Komitmen *Commitment* | - | | | | | |
| | 2 Kontijensi *Contingency* | - | - | - | - | - | - |
| | Total Tagihan Rekening Administratif *Total Administrative Account Claims* | - | - | - | - | - | - |
| | B. Kewajiban Rekening Administratif *Administrative Account Liabilities* | | | | | | |
| | 1 Komitmen *Commitment* | 18.507 | 13.057 | 5.450 | - | - | - |
| | 2 Kontijensi *Contingency* | 94.318 | 1.553 | 57.779 | 2.718 | 32.269 | - |
| | Total Kewajiban Rekening Administratif *Total Administrative Account Liabilities* | 112.825 | 14.610 | 63.229 | 2.718 | 32.269 | - |
| | Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif *Difference Between Charges with Liabilities in the Balance Sheet* | (112.825) | (14.610) | (63.229) | (2.718) | (32.269) | - |
| | Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] *Difference [(IA-IB)+(IIA-IIB)]* | (923.138) | (3.050.242) | (378.784) | 507.326 | 65.357 | 1.933.204 |
| | Selisih Kumulatif *Cummulative Difference* | | (3.050.242) | (3.429.026) | (2.921.700) | (2.856.343) | (923.138) |

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Penerapan manajemen risiko operasional di Bank Muamalat Indonesia melibatkan berbagai pihak melalui penerapan 3 (tiga) Lini Pertahanan, dimana unit bisnis dan unit pendukung berperan sebagai *risk owner* pada Lini Pertahanan Pertama. Selain itu, terdapat juga Unit Kerja Risk Underwriting yang berperan sebagai Lini Pertahanan Kedua dan pelaksanaan fungsi *check and balance* dalam pengelolaan risiko operasional oleh Lini Pertahanan Ketiga yaitu Unit Kerja Internal Audit.

*4. Operational Risks*

*Operational Risks are the losses caused by the insufficient internal process, failure of internal process, human error, system failure, and/or any external occurrences affecting the Bank operation. Applied operational risk management at Bank Muamalat Indonesia involved various parties through the application of 3 (three) Lines of Defence, in which the business unit and supporting unit play role as the risk owner in the First Defense Line. In addition, there has been also any Working Unit of Risk Underwriting acting as the Second Defense Line and the implementation of function for the check and balance to manage operational risks by the Third Defense Line namely Working Unit of Internal Audit.*

Untuk memperkuat pengelolaan risiko operasional melalui konsep tiga garis pertahanan, Bank telah melaksanakan program *Operational Risk Champion* (ORION) dan secara berkelanjutan membangun budaya risiko melalui program operational risk awareness kepada unit kerja terkait dalam bentuk e-mail blast, screen saver, banner, memo reminder.

*To support the management of operational risk through concept of three-line defense, Bank has carried out Operational Risk Champion (ORION) program and sustainably build risk culture through the program of operational risk awareness to the related working unit in the form of e-mail blast, screen saver, banner, memo reminder.*

Perangkat yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional telah mengacu kepada praktek yang berlaku umum, seperti penggunaan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicator* (KRI) dan juga *Loss Event Database* (LED).

*The instruments used to identify and measure operational risk has referred to the generally applicable practice, such as the use of Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) and also Loss Event Database (LED).*

Untuk memastikan kelangsungan operasional Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usaha dan pelayanan nasabah tetap berjalan lancar, meski terjadi gangguan dan bencana, Bank telah melaksanakan incident management - monitoring dan koordinasi penanganan kejadian risiko operasional oleh tim *Business Continuity Management* (BCM) dengan unit kerja/cabang dan/vendor terkait.

*To ensure the survival of operational Bank Muamalat Indonesia to carry out business and service of the customer remains being running well, even though no disturbance and natural disaster occurs, Bank has carried out incident management - monitoring and handling coordination for the occurrence of operational risk by Business Continuity Management (BCM) team with the relevant working unit/ branch and/vendor.*

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko operasional, Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.

*In the calculation of ATMR for the operational risk, Bank Muamalat Indonesia refers to the Regulation of Financial Service Authority No. 21/POJK.03/2014 concerning the Obligation of Minimum Capital Supply for Syariah Commercial Bank and Financial Authority Circular Letter No. 13 /SEOJK.03/2015 concerning the Calculation of Weighted Asset according to the Risk for the Operational Risk using the Approach of Basic Indicator for Syariah Commercial Bank.*

Tabel 4. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional / *Quantitative Disclosures of Operational Risk*

(dalam jutaan rupiah)
*(in million rupiah)*

| No. | Pendekatan Yang Digunakan *Approach Method* | 31-Dec-18 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) *Gross Income (Average Last 3 years)* | Beban Modal *Capital Charge* | ATMR *RWA* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pendekatan Indikator Dasar *Basic Indicator Approach* | 1.963.390 | 294.509 | 3.681.357 |
| | Total | 1.963.390 | 294.509 | 3.681.357 |

5. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari, kelemahan perikatan, tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.

Organisasi manajemen risiko hukum dilaksanakan dibawah koordinasi unit kerja Corporate Legal yang menjalankan fungsi dan tugas terkait pemberian *review*/advis/ opini/ bantuan hukum yang bersifat strategis sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari unit-unit kerja lain, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

*5. Legal Risk*

*Legal risk is a risk posed due to lawsuit and/or jurisdiction aspect weakness. This risk may also be posed because of non-underlying laws and regulations, binding contract, non-fulfillment of legitimate contract requirements, agreement clause weakness and/or non-fulfillment of the agreed requirements.*

*Legal risk management organization performs under coordination of Corporate Legal working unit carrying out functions and duties related to the given review/advice/ opinion/strategic legal assistance in accordance with needs and requests of other working units, pursuant to provisions of the applicable laws and regulations.*

Berikut di bawah ini adalah beberapa mekanisme pengendalian risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia mengenai aspek legal yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk dalam hal pembiayaan, melalui workshop.
b. Membentuk tim legal yang fokus mendukung penyelesaian bad bank.
c. Melakukan pendampingan dan melakukan berbagai upaya untuk membantu penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Bank, termasuk penunjukan lawyer eksternal jika diperlukan.
d. Melakukan koordinasi atas kasus hukum yang terjadi bersama dengan unit terkait di antaranya seperti Internal Audit, Operational Risk Management dan Enterprise Risk Management.
e. Melaporkan secara berkala kepada Direksi atas kasus hukum yang dihadapi Bank sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaiannya.
f. Melakukan review yang komprehensif atas seluruh perjanjian yang dilakukan oleh Bank dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai mitigasi potensi kerugian yang mungkin akan dialami oleh Bank.

*The following is several legal risk control mechanisms made by Bank Muamalat Indonesia, among others:*

*a. To improve human resource competency concerning legal aspect faced in daily work, including financing matter, through workshop.*
*b. To form legal team focused on supporting settlement of bad bank.*
*c. To provide accompaniment and do various efforts for helping settlement of legal case encountered by Bank, including external lawyer appointment if required.*
*d. To coordinate legal case occurred together with related unit among others Internal Audit, Operational Risk Management and Enterprise Risk Management.*
*e. To report periodically to the Board of Directors related to legal case encounterd by Bank so that an action can be taken as soon as possible for its settlement.*
*f. To review comprehensively for all agreement entered into by Bank with third party. This matter is made to ensure that all agreement have conformed to the applicable regulations and as loss potency mitigation which is possibly experienced by Bank.*

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Organisasi pengelolaan risiko reputasi antara lain dilaksanakan oleh unit kerja *Service Quality* yang melakukan pemantauan atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan melakukan tindak lanjut atas komplain nasabah, serta unit kerja *Corporate Affair* melalui pemantauan terhadap setiap berita yang berkaitan dengan Bank Muamalat Indonesia di media massa.

Dalam hal rencana penambahan modal Bank yang masih belum dapat direalisasikan berpotensi pada penurunan rasio KPMM Bank di masa mendatang, dimana hal tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap reputasi Bank.

*6. Reputation Risk*

*Reputation Risk is a risk due to decrease in confidence level of stakeholders sourced from negative perspective to Bank. Reputation risk management organization among others it is performed by Service Quality working unit monitoring service provided to customer and follow up to customer's complaints, as well as Corporate Affair working unit through monitoring each news relating to Bank Muamalat Indonesia in mass media.*

*In the event that Bank capital increase plan which has not been realized has potency of Bank KPMM ratio reduction in the future, in which such matter has potency to give negative impact to Bank reputation.*

7. Risiko Stratejik

Risiko stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pelaksanaan pengelolaan risiko stratejik dilakukan oleh unit kerja *Corporate Strategy Planning* dibawah koordinasi *President Director* yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana stratejik dan inisiatif-inisiatif bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui serangkaian diskusi yang melibatkan jajaran manajemen dan juga masukan dari tiap-tiap unit kerja.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko stratejik dan untuk memastikan inisiatif-inisiatif bisnis berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Bank Muamalat Indonesia melakukan upaya penguatan modal melalui penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah dan penawaran Umum Terbatas (PUT) VI.

*7. Strategic Risk*

*Strategic risk is a risk due to inaccuracy of strategic decision making and/or implementation as well as failure of anticipating business circle change. The managed strategic risk is implemented by Corporate Strategy Planning working unit under coordination of Finance Director who is responsible to compose a strategic plan and business initiatives included in Bank Business Plan (RBB) through a series of discussion involving a network of management and also input of each working unit.*

*In the course of applying strategic risk management and to ensure that business initiatives run according to the target determined in the Bank Business Plan (RBB), Bank Muamalat Indonesia has tried to strengten capital through issue of subordinated Sukuk Mudharabah and Limited public offering (PUT) VI.*

8. Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank Muamalat Indonesia tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh unit kerja Compliance dibawah koordinasi Compliance Director yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan pada aspek umum dan syariah.

Dalam rangka memastikan pengendalian risiko kepatuhan berjalan efektif, maka aktivitas pemantauan dilakukan secara berkala antara lain melalui pemantauan terhadap kebijakan baru yang telah dikeluarkan regulator. Pengendalian risiko kepatuhan antara lain dilakukan melalui kampanye budaya kepatuhan melalui sharing informasi regulasi, melakukan compliance checklist atas pengajuan pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor jaringan layanan, reminder kepada unit kerja terkait mengenai pemenuhan regulasi dan memberikan opini/ advisory kepada unit kerja terkait dengan permasalahan kepatuhan yang dihadapi serta sharing informasi terkait aspek syariah dan Fatwa DSN-MUI.

9. Risiko Imbal Hasil
Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko ini dipicu oleh kinerja dari pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dengan akad bagi hasil, namun pelaksanaan manajemen risiko imbal hasil dilakukan juga oleh unit kerja yang berkaitan dengan penghimpunan.

Pengendalian risiko imbal hasil antara lain dilakukan melalui meningkatkan komposisi funding nasabah Retail dan mengurangi porsi nasabah Corporate serta special nisbah.

10. Risiko Investasi
Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Karena risiko ini dipicu oleh kinerja dari pembiayaan Bank Muamalat Indonesia yang memiliki akad bagi hasil, maka pelaksaanaan manajemen risiko investasi dilakukan oleh seluruh unit kerja yang berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Terkait dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi dilakukan sejalan dengan pemantauan terhadap risiko kredit, yaitu dengan melakukan proses pembiayaan yang sehat dan *prudent* serta melakukan pemantauan pembiayaan secara ketat. Pemantauan minimal dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis nasabah, pola pembayaran, pemenuhan *covenant*, nilai *collateral*, dan kredibilitas nasabah. Bentuk pengendalian risiko investasi diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain melalui pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil secara selektif kepada nasabah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia.

*8. Compliance Risk*
*Compliance Risk is a risk because Bank Muamalat Indonesia does not obey and/or does not comply with the applicable laws and regulations, provisions, as well as Sharia principles. The managed compliance risk is implemented by Compliance working unit under coordination of Compliance Director who is responsible to ensure the compliance and minimize compliance risk in general and Sharia aspects.*

*In the course of ensuring compliance risk control effectively running, monitoring activity is periodically carried out among others through monitoring a new policy established by regulator. The compliance risk control is carried out through compliance cultural campaign by sharing informasi on regulations, compliance checklist for filing of establishment, address change and office status change of service network, reminder to related working unit concerning the complied regulation and giving opinion / advisory to the related working unit with problems of compliance encountered as well as information sharing related to Sharia and DSN-MUI Advice aspects.*

*9. Profit-Sharing Risk*
*Profit-Sharing risk is a risk due to profit-sharing level change paid by Bank Muamalat Indonesia to customers, because profit-sharing level change received from fund channeling which can influence customer behavior of third party fund occurs. This risk is stimulated by finance performance of Bank Muamalat Indonesia with profit-sharing contract, but the managed risk management is also implemented by working unit relating to accumulation.*

*The Profit-sharing risk control is carried out by increasing a funding composition of retail customer and reducing Corporate's customer portion as well as special nisbah.*

*10. Investment Risk*
*Investment risk is a risk in which Bank participates in bearing customer's business loss paid in the profit-sharing financing, using net revenue sharing method and profit and loss sharing method. Because this risk is stimulated by financing performance of Bank Muamalat Indonesia having profit-sharing contract, the investment risk management is implemented by all working units relating to financing granted by Bank Muamalat Indonesia.*

*Related to the investment risk monitoring and control mechanism, it is carried out in line with credit risk monitoring, that is financing process, having healthy and prudent financing process and monitoring the financing strictly. Minimum monitoring is carrid out to customer's financial and business condition, pattern of payment, fulfilled covenant, collateral value, and customer credibility. Form of the investment risk control is applied by Bank Muamalat Indonesia among others grant of selective profit-sharing based financing to the customers fulfilling criteria determined by Bank Muamalat Indonesia.*

# Perkara Hukum

## *Legal Cases*

Bank Muamalat Indonesia menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata maupun Pidana. Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, tercatat 143 (seratus empat puluh tiga) perkara Perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan dan 12 (duabelas) perkara Pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan.

*Bank Muamalat Indonesia encounters lawsuit in the field of Civil and Criminal. From January 2018 to December 2018, 143 (one hundred and forty-three) civil cases registered in various Courts and 12 (twelve) criminal cases investigated at preliminary investigation and court stages were recorded.*

Dari 143 (seratus empat puluh tiga) perkara perdata tersebut tercatat 15 (lima belas) perkara telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 128 (seratus dua puluh depalan) perkara masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Adapun untuk perkara pidana, terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum pidana yang dinyatakan telah selesai, dan 9 (sembilan) perkara pidana masih dalam pemeriksaan tahap penyelidikan, peyidikan maupun pengadilan.

*From 143 (one hundred and forty-three) civil cases recorded, 15 (fifteen) cases were decided by decisions having permanent legal force, whilst 128 (one hundred and twenty-eight) cases are still at the stage of first level, appeal level and cassation level investigation. For criminal case, 3 (three) criminal legal problem were solved, and 9 (nine) criminal case are still in examination at preliminary investigation, investigation and court stage.*

Permasalahan hukum Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

*Legal problem of Bank Muamalat Indonesia in 2018 may be illustrated in the following table berikut:*

| Permasalahan Hukum<br>*Legal problem* | Jumlah<br>*total* | |
|---|---|---|
| | Perdata<br>*Criminal* | Pidana<br>*Civil* |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)<br>*Has been settled (having had permanent legal force)* | 15 | 3 |
| Dalam proses penyelesaian<br>*In investigation process* | 128 | 9 |
| Total | 143 | 12 |

Pokok Perkara yang melibatkan Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

*Substances of the case involving Bank Muamalat Indonesia are:*

1. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar wanprestasi, terdaftar di Pengadilan Agama Jember.
   Bank Muamalat Indonesia telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan tujuan untuk pembelian tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank Muamalat Indonesia sehingga akan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan Bank Muamalat Indonesia telah wanprestasi karena tidak pernah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan (restruktur) dan menuntut agar Pengadilan Agama menyatakan lelang yang akan dilakukan adalah tidak sah.

   *Counter-measures to the execution of security right with default base, has been registered in the Religious Court of Jember.*
   *Bank Muamalat Indonesia gave loan facility to the plaintiff for the purpose of purchasing land and building, but the Plaintiff did not fulfill his obligation of payment to Bank Muamalat Indonesia so that a foreclosure sale of the security right through KPKNL was made. The Plaintiff filed a lawsuit with the reason that Bank Muamalat Indonesia is default because it has never made an effort to save the loan (restructurization) and he has demanded to Religious Court to state about the invalid foreclosure sale implemented.*

2. Gugatan perbuatan melawan hukum oleh ahli waris pemilik asal jaminan, terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.
   Bank Muamalat Indonesia telah memberikan pembiayaan kepada debitur (Tergugat) untuk pembelian tanah dan bangunan milik orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai salah satu dari wahli waris menyatakan tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut. Faktanya transaksi jual beli dilakukan oleh dan antara para ahli waris dengan debitur dan sertifikat tanah telah dibalik nama ke atas nama debitur.

   *Illegal action of heirs of guarantee owner, has been registered in the District Court of Medan.*
   *Bank Muamalat Indonesia gave loan to the debtor (Defendant) for the purpose of purchasing parents of the plaintiff's land and building, but the Plaintiff as one of the heirs states that he did not know about such buy and sale transaction. In fact, such buy and sale transaction was made by and between said heirs and the debtor and the land certificate has been transfered to be the debtor's name.*

3. Perlawanan yang diajukan oleh pemilik asal jaminan dengan dasar perbuatan melawan hukum, terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta

   *Counter-measures done by guarantee owner with illegal action base, has been registered in the District Court of Surakarta*

Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan kepada debitur (Tergugat 2) dengan jaminan tanah dan bangunan sebelumnya dimiliki atas dasar PPJB dan kemudian dilanjutkan dengan AJB dan proses balik nama serta dibebani hak tanggungan. Para Penggugat menggugat Para Tergugat dan menyatakan tidak pernah menjual objek sengketa, hanya meminjam uang kepada Tergugat 1 dan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan.

*Bank Muamalat Indonesia gave loan to the debtor (Defendant 2) with land and building guarantee previously belonged to as contained in PPJB and continued to the buy and sale deed (AJB) process and name transfer process as well as security right borne. The Plaintiffs have sued the Defendants and state that they never sell the disputed object, they only lent money to the Defendant 1 and submitted the certificate as guarantee.*

Sebagian besar permasalahan hukum perdata yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, dimana perkara-perkara tersebut merupakan perkara dengan tingkat risiko yang minim dan tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian Bank Muamalat Indonesia akan tetap menangani dan memonitor perkembangan setiap perkara sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum Bank Muamalat secara maksimal.

*Most of civil legal problems encountered by Bank Muamalat Indonesia are counter-measures cases to the execution of security right which has been implemented or will be implemented Bank Muamalat Indonesia, in which such cases are minimum level cases and did not entirely influence business of Bank Muamalat Indonesia. However, Bank Muamalat Indonesia will remain to handle and monitor development of each case so that it may protect legal rights and interests of Bank Muamalat Indonesia maximally.*

# Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

## *Corporate Social Responsibility*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perseroan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi operasional usaha. Terkait pelaksanaan CSR, Bank membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

*Corporate Social Responsibility (CSR) is a media for the Corporate to build a relation growing together with stakeholders, both internally as management and employees and externally as community surrounding business operational location. Related to the implementation of CSR, Bank divides it into 4 (four) aspects.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup<br>*Corporate Social Responsibility related to environment* | *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja<br>*Corporate Social Responsibility related to manpower, health, and occupational safety* | *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan<br>*Corporate Social Responsibility related to social and community development* | *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada produk/konsumen<br>*Corporate Social Responsibility related to responsibiliity to products/customers* |

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perseroan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

*The complete implementation of CSR by the Corporate can be seen in chapter of Corporate Social Responsibility in this Annual Report.*

# Informasi Lain

## *Other Information*

### Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank. Dalam setiap kebijakan dan prosedur yang disusun baik pembiayaan, operasional dan lainnya serta keputusan yang akan dibuat, Bank selalu mencantumkan klausula khusus terkait dengan benturan kepentingan.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Muamalat Indonesia.

Hal ini antara lain telah di atur dalam *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia dan Kebijakan Umum Pembiayaan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Dengan demikian, pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan Tidak Ada Benturan Kepentingan dimaksud. Sebagai gambaran, dalam perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Di sisi lain dalam kebijakan kepersonaliaan, telah diberlakukan kepada setiap karyawan Bank Muamalat Indoneisa tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut disetujui oleh karyawan yang bersangkutan secara elektronik. Selain itu, dalam rekrutmen karyawan baru dimasukan sebagai salah satu persyaratan bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia.

### *Transaction Containing Conflict of Interest*

*Bank has Policies, Systems and Procedures for settlement relating to the conflict of interest binding each bank's management and employees. In each policy and procedure composed to loan, operational and others as well as decision made, Bank always includes a special clause related to the conflict of interest.*

*Actions that conflict of interest, in accordance with the applicable policies and procedures need to be able to be avoided so that if they happen actions conflict of interest, does not harm or reduce the assets and profits of Bank Muamalat Indonesia*

*This matter has been regulated in the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia and General Policy of Loan regulating grant of loan to customers required in each agreement/contract, cooperation or contract between bank and customers and consultants, the conflict of interest with the above parties is prohibited.*

*Thus, on any agreement/financing agreement or contract always/shall be required to include clauses related to No Conflict of Interest in question. As an illustration, in the agreement where Article of the Conflict of Interest stated as follows:*

1. *Second parties are not allowed to give gifts or gifts of any kind to the employees and the leadership of the First Party. Violation of this provision resulted in termination of this agreement and also any losses due to the expiration of this agreement is the responsibility of the Second Party in this world and in the hereafter.*
2. *Second parties hereby declare that there is no conflict of interest and/or affiliation between the parties Both the Management and/or Employees First Party and/or shareholders of the First Party.*

*On the other hand the kepersonaliaan policy, have been applied to each employee of Bank Muamalat Indoneisa without exception to required to make a written statement that among other things on Conflict of Interest. The Statement was approved by the employee electronically. In addition, the recruitment of new employees are introduced as a requirement that the prospective employee must make a statement unrelated to the employees of Bank Muamalat Indoneisa*

Dalam rangka pelaksanaan operasionalnya, khusus untuk pengadaan barang dan jasa dan lainnya, Bank Muamalat Indonesia telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan Supplier, dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang tidak ada benturan kepentingan dan larangan, memberi/menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada manajemen dan karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait

*In the framework of its operations, specifically for the procurement of goods and services and others, Bank Muamalat Indonesia has collaborated with several parties such as consultants, vendors, contractors and Supplier, on the basis of contracts/employment agreements are clear, transparent and shall mention about no conflict of interest and prohibitio, give/promise to give something to the management and employees of the Bank related and unrelated*

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Transaksi dengan pihak afiliasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga kecuali piutang Murabahah karyawan kunci dimana terdapat perbedaan margin piutang Murabahah yang diberikan kepada karyawan kunci tersebut.

*In its business activity, the Corporate makes transaction with affiliates. Transaction with affiliates shall be implemented under the same provisions and conditions with third party except Murabahah receiveables of key employees in which difference of Murabahah receiveable margin granted to such key employees is found.*

## Sengketa Pajak

## *Tax Dispute*

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat sengketa pajak yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia .

*Throughout 2018, Bank Muamalat Indonesia did not encountered a tax dispute.*

## Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia

## *Case Involving the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia*

Sepanjang tahun 2018 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia .

*Throughout 2018, the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia were not involved in any legal case.*

## Sanksi Regulator

## *Sanction by Regulator*

Selama tahun 2018 Bank Muamalat Indonesia pernah mendapatkan sanksi dari Regulator namun tidak mempengaruhi bisnis Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan.

*During 2018, Bank Muamalat Indonesia never get sanctions from regulators but does not affect the overall business of Bank Muamalat Indonesia.*

## Penyimpangan Internal

## *Internal Deviation*

Selama tahun 2018 ditemukan adanya penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia namun telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*During 2018 the deviations found any fraud committed by employees of Bank Muamalat Indonesia yet been completed in accordance with applicable regulations.*

## Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Bank Muamalat Indonesia tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi atau bantuan untuk kepentingan politik. Sedangkan kepedulian terhadap masalah sosial merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat. Uraian lebih lengkap terdapat pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

## *Grant of Fund for Social and Political Activity*

*Bank Muamalat Indonesia was not involved in political activity and did not grant donation or aid for political interest. Whilst social care is an important part of Bank Muamalat Indonesia's duties and responsibilities to community. More complete description is found at part of Corporate Social Responsibility in this Annual Report.*

## *Buy Back Share* dan/atau *Buy Back Sukuk*

Selama tahun 2018, Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan *Buy Back Share* dan/atau *Buy Back Sukuk*.

## *Buy Back Share and/or Buy Back Sukuk*

*Throughout 2018, Bank Muamalat Indonesia did not perform Buy Back Share and/or Buy Back Sukuk.*

## Progam Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen

ESOP/MSOP adalah progam yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Progam kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan progam kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). Progam kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma (*stock grant*) kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu Motivasi atau tujuan dari perusahaan untuk mengeluarkan ESOP/MSOP tentunya beragam seperti berikut:

1. *Rewards*
   ESOP/MSOP ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan.
2. Peningkatan Motivasi dan Komitmen
   Dengan adanya ESOP/MSOP, maka hal ini bisa meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan di mana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.

## *Stock Ownership Progam of Employee and/or Management*

*ESOP/MSOP is a progam granting stock ownership right to employee. The corporate stock ownership progam in Indonesia is known as Employee Stock Ownership Program (PKSK). The corporate stock ownership progam and ESOP are run in several manners, among others the corporate grants its stocks to employees, sells corporate stocks to employees (generally in discount price) and gives option to employees to buy corporate's stocks in certain period and certain price. Motivation or purpose of the corporate is to issue ESOP/MSOP as follows:*

1. *Rewards*
   *ESOP/MSOP is intended to give reward to all employees and management relating to their contribution helping to improve the corporate performance.*

2. *Improvement of Motivation and Commitment*
   *Referring to ESOP/MSOP, this matter can improve the employees' motivation and commitment to the corporate in which the final result is improvement of the corporate's productivity and performance.*

3. *Retaining Program*
   ESOP/MSOP dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dan manajemen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan *value* perusahaan.
4. Rasa Memiliki ESOP/MSOP
   Menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan karena adanya bagian dari karyawan di dalam perusahaan, yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus semangat kerja karyawan untuk turut serta dalam merealisasikan kemajuan perusahaan.

Selama tahun 2018 Bank Muamalat Indonesia belum pernah melakukan ESOP maupun MSOP.

## Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Selama tahun 2018, Bank Muamalat Indonesia tidak melanggar dan/atau melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

*3. Retaining Program*
*ESOP/MSOP may attract, maintain, and motivate employees and management having important role in order to increase the corporate's value.*
*4. Sense of belonging ESOP/MSOP*
*Appealing to a sense of belonging for employees to the corporate because a part of employees in the corporate, it enables to grow sense of responsiblity and working spirit of employees to participate in realizing the corporate's progress.*

*Throughout 2018 Bank Muamalat Indonesia had never performed ESOP and MSOP.*

## *Maximum Limit of Loan Grant*

*Throughout 2018, Bank Muamalat Indonesia did not violate and/or exceed maximum limit of loan grant to parties and parties related and unrelated to Bank.*

# Pendapatan Non Halal dan Penggunaanya

## *Non-Halal Revenue and Its Utilization*

| No. | Sumber Pendapatan Non Halal<br>*Non-Halal Revenue Source* | Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)<br>*Non-Halal Revenua Value (Rp)* | Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp)<br>*Non-Halal Revenue Spending (Rp)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2017<br>*Conventional Bank's Interest Revenue in 2017* | 633,292,857 | 633,292,857 |
| 2. | Dana denda (ta'zir)<br>*Penalty fund (ta'zir)* | 23,582,250 | 23,582,250 |
| | Jumlah<br>*Total* | 656,875,106.93 | 656,875,106.93 |

# Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

## *Integrated Governance Application*

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat Indonesia diwajibkan menerapkan manajemen risiko dan tata kelola secara terintegrasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, Konglomerasi Keuangan harus mengelola seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan termasuk risiko yang berasal dari perusahaan anak.

Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tata kelola terintegrasi yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan.

*With the issue of Regulation of the Financial Service Authority Number 17/POJK.03/2014 regarding Integrated Risk Management Application for Financial Conglomerates and Regulation of the Financial Service Authority Number 18/POJK.03/2014 regarding the Integrated Governance Application for Financial Conglomerates, as financial conglomerate, Bank Muamalat Indonesia is obliged to implement the risk management and integrated governance. In the integrated risk management application, the financial conglomerate shall manage all risk directly and indirectly influencing the Financial Conglomerate business including the risk coming from subsidiaries.*

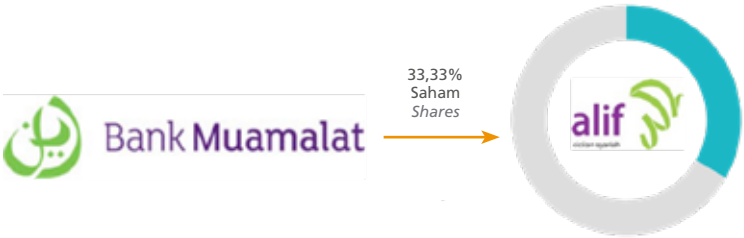
*The financial Conglomerate of Bank Muamalat Indonesia has commitment to implement the more prudent integrated governance in accordance with GCG principles so that it may increase performance of the Financial Conglomerate and improve compliance to the laws and regulations as well as ethics values prevailing in the financial service industry.*

### Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia telah menyampaikan laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 120/BMI/DIR/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

### *Financial Conglomerate Structure of Bank Muamalat Indonesia*

*Bank Muamalat Indonesia has submitted the Financial Conglomerate Structure report of Bank Muamalat Indonesia to the Financial Service Authority through Letter No. 120/BMI/DIR/III/2015 date march 27, 2015 regarding Financial Conglomerate Struture Report of Bank Muamalat Indonesia. Such Financial Conglomerate Structure of Bank Muamalat Indonesia is as follows:*




Bank Muamalat Indonesia berkedudukan sebagai Entitas Utama, karena Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu perusahaan induk dari PT. Al Ijarah Indonesia Finance, dimana kepemilikan saham Bank Muamalat Indonesia di PT. Al Ijarah Indonesia Finance per posisi Desember 2018 sebesar 33,33% dimana kepemilikan Bank Muamalat Indonesia dan pihak lainnya pada ALIF masing-masing sama besar.

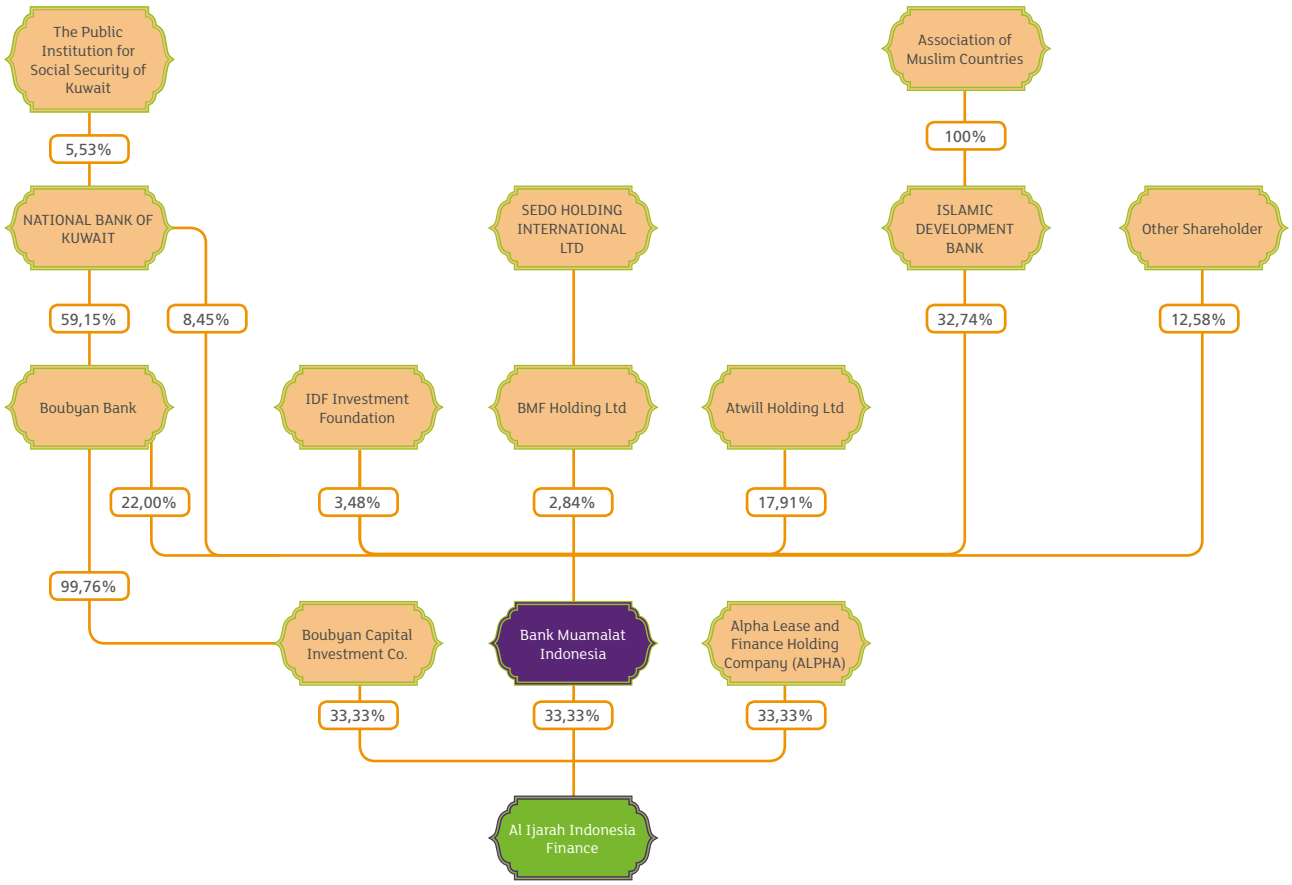
*Bank Muamalat Indonesia has position as Primary Entity, because Bank Muamalat Indonesia is one of subsidiaries of PT. Al Ijarah Indonesia Finance, in which the stock ownership of Bank Muamalat Indonesia in PT. Al Ijarah Indonesia Finance per position of Desember 2018 is 33,33% in which ownership of Bank Muamalat Indonesia and other parties in ALIF is respectively equal.*

PT Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia.

*PT Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) is Sharia financial Corporate established to fulfill Indonesian community financing needs.*

## Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan

## *Financial Conglomeration Shareholders Structure*



## Infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi

### Kelengkapan Kebijakan

Sebagai Entitas Utama, Bank Muamalat Indonesia berkoordinasi dengan ALIF untuk menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
   Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat Indonesia memuat materi terkait Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Koglomerasi, *Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dan Pelaporan Tata Kelola Terintegrasi.

2. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
   Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengatur tentang Organisasi dan Kewenangan, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Proses Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Pengendalian Internal, Profil Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

## *Integrated Governance Infrastructure*

### *Completeness of Policy*

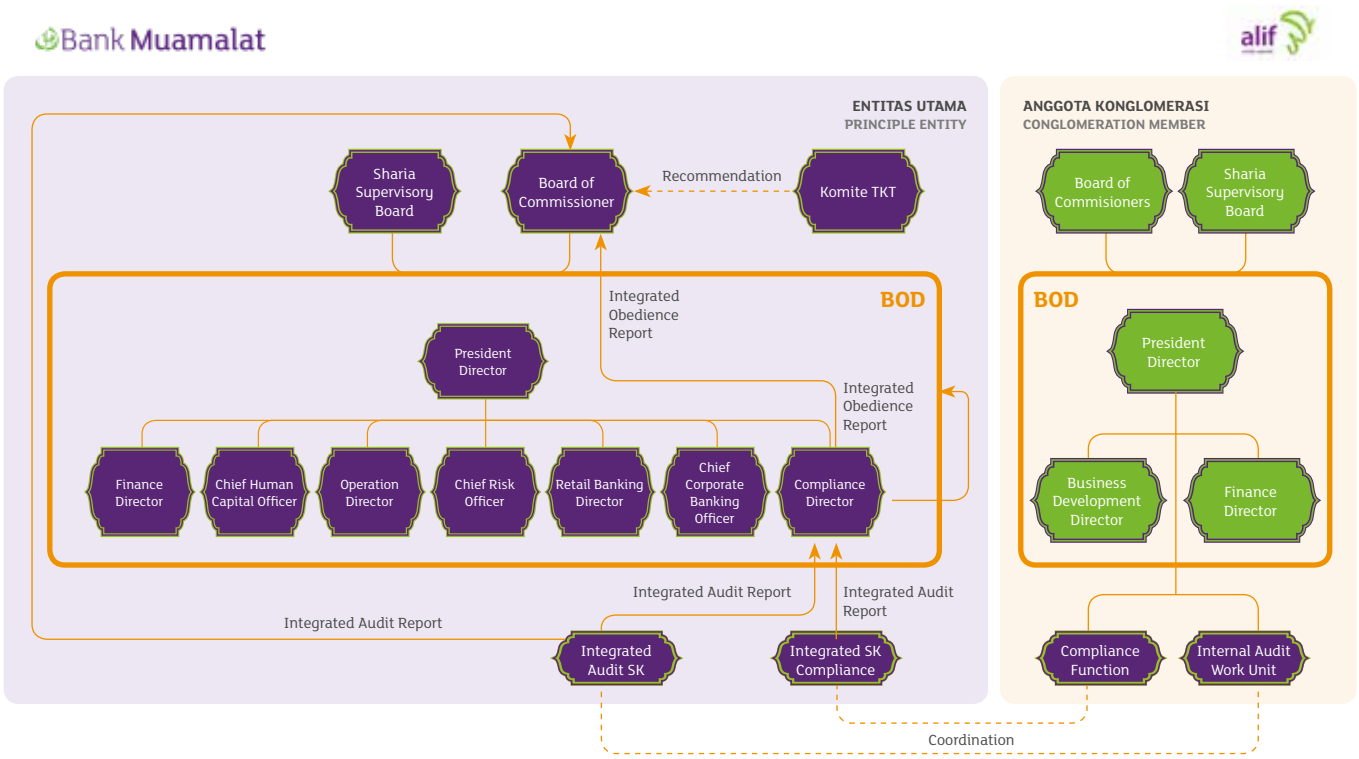
*As Primary Entity, Bank Muamalat Indonesia coordinates with ALIF to compose Integrated Governance Policy and Integrated Risk Management Policy.*

1. *Integrated Governance Policy*
   *The Integrated Governance Policy of Bank Muamalat Indonesia contains materials related to the Financial Conglomerate Structure of Bank Muamalat Indonesia, the Integrated Governance for Primary Entity, the Integrated Governance for Members of Conglomerate, the Self Assessment of the Integrated Governance and the Integrated Governance Report.*

2. *General Policy of the Integrated Risk management and the Integrated Capital Management for the Financial Conglomerate.*
   *General Policy of the Integrated Risk Management and the Integrated Capital Management for the Financial Conglomerate regulate Organization and Authority, the Integrated Risk Management Policy, the Integrated Risk Management Process, the Integrated Risk Management Information System, the Internal Control System, the Integrated Risk Profile and the Integrated Capital Management.*

### Struktur Tata Kelola Terintegrasi

### *Integrated Governance Structure*

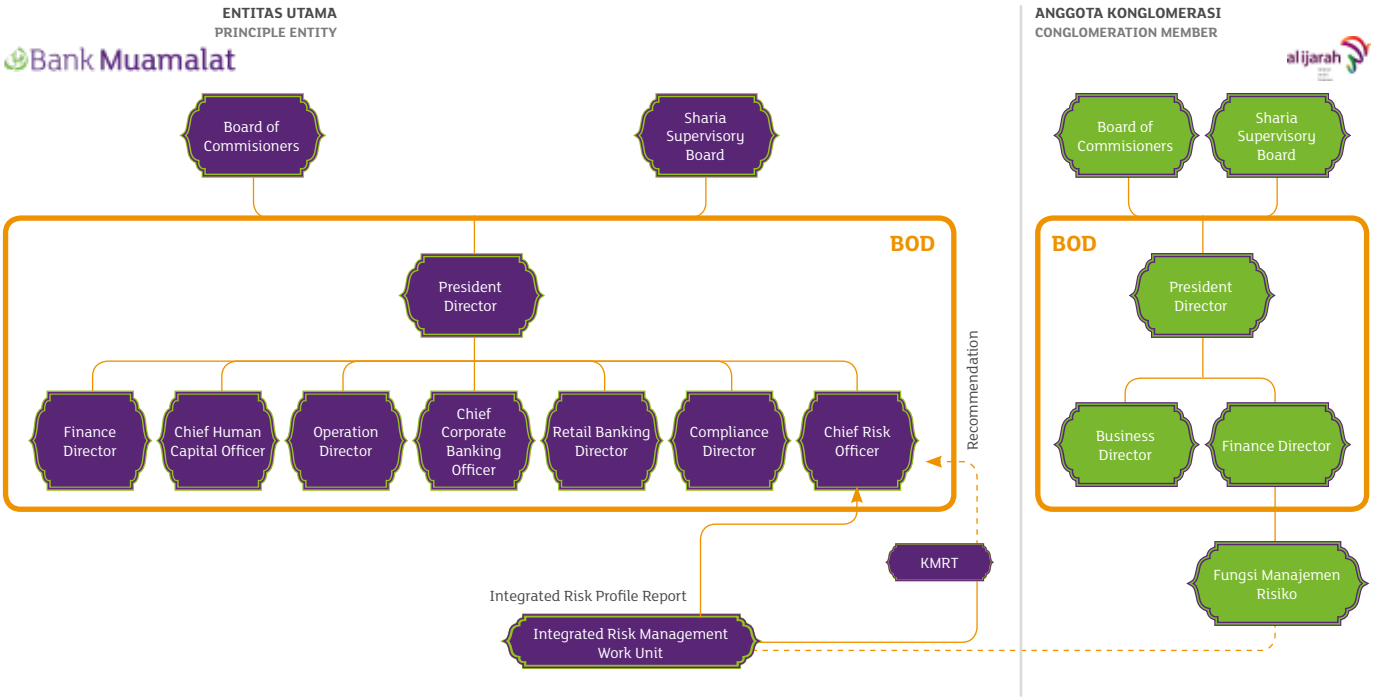



Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Compliance Bank Muamalat Indonesia, sedangkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit Bank Muamalat Indonesia.

*Function of the Integrated Compliancen Working Unit is implemented by the Compliance working unit of Bank Muamalat Indonesia, while function of the Integrated Internal Audit Working Unit is implemented by the Internal Audit Working Unit of Bank Muamalat Indonesia.*

## Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi

## *Integrated Risk Management Structure*




Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komperehensif dan efektif, Bank Muamalat Indonesia juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

*Chief Risk Officer* bertindak sebagai Pejabat yang membawahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Sedangkan fungsi yang menjalankan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dari beberapa unit kerja yang telah ada di Bank Muamalat Indonesia yaitu unit kerja *Enterprise Risk Management, Operational Risk Management* dan *Accounting and Tax*.

*To support the implementation of the integrated risk management who komperehensif and effective, Bank Muamalat Indonesia is to establish a committee has also integrated risk management and work units integrated risk management.*

*Chief Risk Officer acts as Officer supervising the Integrated Risk Management Working Unit. While the function serving the Integrated Risk Management Working Unit is made from several working units existing in Bank Muamalat Indonesia, that is the Enterprise Risk Management working nunit, Operational Risk Management and Accounting and Tax.*

## Hasil *Self*-Assessment Tata Kelola Terintegrasi

Selain melakukan penilaian GCG secara individual, sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat Indonesia juga melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola secara terintegrasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian *Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat Indonesia semester I dan semester II tahun 2017 di peringkat 3 (tiga) dengan definisi peringkat Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK dengan analisa sebagai berikut:

## *Result of Self-Assessment of Integrated Governance*

*Besides making assessment of GCG individually, as financial conglomerate, Bank Muamalat Indonesia also assesses the integrated governance application referring to Regulation of the Financial Service Authority No. 18/POJK.03/2014 regarding the Integrated Governance Application for Financial Conglomerate and Circular of the Financial Service Authority No. 15/SEOJK.03/2015 regarding the Integrated Governance Application for the Financial Conglomerate.*

*The self-assessment of the Integrated Governance of Bank Muamalat Indonesia semester I and semester II year 2017 at rank 3 (three) with definition of the Financial Conglomerate rating is deemed to have made the Integrated Governance Application generally satisfactory. This matter is reflected from the sufficient fulfillment for the Integrated Governance Application principles. In case of weakness in the implemenetation of the Integrated Governance principles, generally such weakness is sufficiently significant and needs sufficient attention from the Primary Entity and/or LJK with the following analysis:*

## Analisis
*Analysis*

**Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:**

- ***Governance Structure***

  Struktur Organisasi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia telah lengkap dan memadai. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama dari Entitas Utama serta memiliki pengetahuan terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan. Sementara Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

  Seluruh Direksi Entitas Utama telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Terkait dengan PKK Dewan Komisaris Entitas Utama, masih terdapat 3 (tiga) anggota Komisaris Entitas Utama yang masih dalam proses PKK oleh OJK. Sementara terkait dengan kepengurusan anggota konglomerasi (ALIF), seluruh calon Direksi dan 2 (dua) calon anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat melalui RUPS LB, masih dalam proses pemenuhan dokumen dalam rangka pengajuan PKK ke OJK.

  Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dengan pengunduran diri seorang Komisaris Indepeden anggota Konglomerasi (ALIF), kekurangan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari seorang Komisaris Independen anggota konglomerasi (ALIF) akan segera dipenuhi setelah Komisaris Utama Independen ALIF yang diangkat melalui RUPSLB ALIF tanggal 31 Oktober 2018 lulus PKK. Direksi Entitas Utama telah memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang membantu pelaksanaan tugas Direksi Entitas Utama dalam mengelola risiko Konglomerasi Keuangan.

  Struktur organisasi lainnya seperti Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan oleh unit kerja yang telah ada di Entitas Utama didukung dengan sumber daya yang berkualitas dengan jumlah yang memadai dan independen terhadap satuan kerja operasional.

  Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah disusun menyesuaikan kondisi dan perkembangan Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah memuat Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam konglomerasi keuangan.

*Powers of the Integrated Governance Application for the Financial Conglomerate of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk are:*

- *Governance Structure*

  *Primary Entity Organizational Structure of the Financial Conglomerate of Bank Muamalat Indonesia has been complete and sufficient. The Board of Directors, the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Primary Entity have fulfilled the requirements for integrity, competency and financial reputation. The Board of Directors of the Primary Entity has knowlege and experiences relating of the primary business and risk activity of LJK having members of the Financial Conglomerate. Whilst, the Board of Commissioners of the Primary Entity has knowledge about the Primary Entity, that is comprehension of primary business activity and primary risk of LJK in the Financial Conglomerate.*

  *All Directors of the Primary Entity have passed from the Fit and Proper Test (PKK) by the Financial Service Authority (FSA) and all Sharia Supervisory Boards of the Primary Entity have obtained an approval from OJK. Related to PKK of the Board of Commissioners of the Primary Entity, there are still 3 (three) Commissioner members of the Primary Entity which is still in the process of PKK by OJK. Whilst, related to Conglomerate Member Management (ALIF), all prospective Directors and 2 (two) members of the Board of Commissioners have been appointed in RUPS LB, and is still in the document fulfillment process in the course of filing PKK to OJK.*

  *In order to assist the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of the Primary entity has established the Integratd Governance Committee. Because an Independent Commissioner of Conglomerate Member (ALIF) resigns, shortage of the Integrated Governance Committee members coming from an Independent Commissioners of Conglomerate members (ALIF) will be meet after the Independent President Commissioner ALIF appointed by RUPSLB ALIF on October 31, 2018 passed. The Board of Directors of the Primary Entity has had the Integrated Risk Management Committee assisting the duties implementation of the Board of Directors of the Primary Entity in order to manage the Financial Conglomerate risk.*

  *Other organizational structures as the Integrated Compliance Working Unit, the Integrated Internal Audit Working Unit and the Integrated Risk Management Working Unit are implemented by the working unit existing in the Primary Entity supported by qualified human resources with sufficient and independent quantity to the operational working unit .*

  *Policy of the Integrated Governance has beetn regulated by conforming the Financial Conglomerate condition and development of Bank Muamalat Indonesia Indonesia and has been approved by the Board of Commissioners of the Primary Entity. The Policy of the Integrated Governance has included a Framework of the Integrated Governance for the Primary Entity and Framework of the Integrated of Governance for LJK in the Financial Conglomerate.*

## Analisis
*Analysis*

- ***Governance Process***
  Dalam proses penyusunan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan koordinasi antara Entitas Utama dengan anggota Konglomerasi dalam rangka mendapatkan masukan-masukan terhadap materi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam konglomerasi keuangan dan telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

  Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta telah menyelenggarakan rapat Komisaris Entitas Utama yang membahas antara lain kondisi usaha LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2018 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait proses perbaikan dalam penerapan tata kelola terintegrasi.

  Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan dan tata kelola di LJK dalam konglomerasi Keuangan (ALIF) antara lain berdasarkan laporan kepatuhan, *Self-Assessment* GCG dan laporan GCG yang disampaikan secara berkala oleh fungsi kepatuhan ALIF kepada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja kepatuhan ALIF antara lain melalui rapat yang diselenggarakan secara berkala, komunikasi melalui telepon dan email guna mendiskusikan/ membahas pemenuhan aspek kepatuhan, perbaikan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, proses *self-assessment* GCG serta penerapan APU PPT ALIF. Selanjutnya Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melalui Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyampaikan rekomendasi kepada ALIF hal-hal yang memerlukan perbaikan baik dari aspek kepatuhan, tata kelola maupun penerapan APU PPT.

  Dalam rangka memantau dan mengevaluasi audit intern dan manajemen risiko di LJK dalam konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan upaya sebagai berikut:
  1. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko ALIF melalui rapat yang membahas mengenai penerapan manajemen risiko dan profil risiko terintegrasi.
  2. SKAI Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh SKAI ALIF dengan melakukan pertemuan berkala, korespondensi, surat elektronik/email, diskusi baik langsung, melalui telepon maupun melalui email, permintaan laporan setiap semester, klarifikasi data/informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.

  Proses koordinasi antara Entitas Utama dan anggota konglomerasi telah dilakukan dalam upaya penerapan konglomerasi keuangan antara lain penyusunan Perjanjian Kerjasama dan penyampaian data-data dari anggota konglomerasi kepada Entitas Utama untuk keperluan Pengawasan dan Pelaporan.

  Dalam rangka memenuhi permodalan ALIF agar sesuai ketentuan, pencarian investor/strategic partner masih terus dilakukan dan diupayakan untuk dapat direalisasikan.

- *Governance Process*
  *In the proces of arranging the Policy of the Integrated Governance, coordination between the Primary Entity and Conglomerate members in the course of getting inputs of Policy materials of the Integrated Governance has been made. The Board of Directors of the Primary Entity has submitted the Policy of the Integrated Governance to the Board of Directors to LJK in the financial conglomerate and has directed, monitored, and evaluated the Policy implementation of the Integrated Governance.*

  *The Board of Commissioners of the Primary Entity has supervised the duties and responsibility implementation of the Board of Directors of the Primary Entity and and implementation of the Integrated Governance as well as has held meeting of the Board of Commissioners of the Primary Entity discussing business condition of LJK in the Financial Conglomerate. Committee of the Integrated Governance formed by the Board of Commissioners of the Primary Entity, held 2 (two) Committee meetings of the Integrated Governance in 2018 and gave recommendation to the Board of Commissioners of the Primary Entity related to an improvemen process in the Integrated Governance Application.*

  *The Integrated Compliance Working Unit has monitored and evaluated the compliance and governance function of LJK in the Financial Conglomerate (ALIF) based on compliance, self-assessment of GCG and report on GCG submitted periodically by the compliance function of ALIF to the Integrated Compliance Working Unit. In such monitoring and evaluation, the Integrated Compliance Working Unit has coordinated with the compliance working unit of ALIF through meeting held periodically, communication by phone and email in order to discuss the fulfillment of compliance aspect, improvement of governance structure, governance process and governance outcome, self-assessment process of GCG as well as application of APU PPT ALIF. Furthermore, the Integrated Compliance Working Unit through Director of the Primary Entity submits the recommendation to ALIF about the matters requiring improvement from compliance, governance and application aspects of APU PPT.*

  *In the course of monitoring and evaluating internal audit and risk management of LJK in the Financial Conglomerate, the Integrated Audit Working Unit and the Integrated Risk Management Working Unit has made efforts as follows:*
  1. *The Integrated Risk Management Working Unit has coordinated with the Risk Management Working Unit of ALIF through meeting discussiong the risk management application and the integrated risk profile.*

  2. *The integrated SKAI has monitored the implementation of the internal audit made by SKAI ALIF making periodic meeting, correspondence, electronic letter / email, the discussion performed directly, by phone and email, request of report of each semester, data clarification/information requiring further explanation and giving input about the matters to improve.*

  *Coordination process between the Primary Entity and Conglomerate members has been made in the effort of implementing financial conglomerate for the purpose of arranging Cooperation Agreement and data submission from conglomerate members of the Primary Entity for the interest of Supervision and and Reporting.*

  *In the course of fulfilling capital of ALIF in order to conform to the provisions, investor finding/strategic partner is still performed and tried to be realized.*

- ***Governance Outcome***
  Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang mengatur tentang kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta hubungan antara Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Peraturan OJK sehingga menjadi panduan dalam memperkuat penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya, Dewan Komisaris Entitas Utama peru melakukan evaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

  Laporan hasil evaluasi dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi telah disampaikan kepada Direksi dan Komisaris Entitas Utama. Rekomendasi perbaikan terkait aspek kepatuhan, tata kelola dan internal audit juga telah disampaikan kepada Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Internal Audit ALIF sebagai acuan dalam memperbaiki struktur dan proses tata kelola serta penerapan fungsi kepatuhan dan audit intern.

  Rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terkait dengan perbaikan proses manajemen risiko terintegrasi telah disampaikan kepada ALIF sebagai acuan dalam memperbaiki proses manajemen risiko ALIF. Laporan Profil Risiko Terintegrasi juga telah dilaporkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara semesteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- *Governance Outcome*
  *Policy of the Integrated Governance arranging the framework of the Integrated Governance for the Primary Entity and LJK in the Financial Conglomerate and relation between Primary Entity and LJK in the Financial Conglomerate has conformed to the Regulation of OJK so that it will be a guidance to strengten the Integrated Governance Application in the Financial Conglomerate of Bank Muamalat Indonesia. Furthermore, the Board of Commissioners for the Primary Entity should evaluate the Policy of the Integrated Governance.*

  *Report on the evaluation result from the Integrated Compliance Working Unit and the Integrated Internal Audit Working Unit has been submitted to the Board Directors and the Board of Commissioners for the Primary Entity. Recommendation about the improvement related to compliance, governance and internal audit aspects has been also submitted to the Compliance Working Unit and the Internal Audit Working Unit ALIF as reference to the improvement of governance structure and process as well as the compliance and internal audit function application.*

  *Recommendation from the Integrated Risk Management Committee related to the improvement of the integrated risk process has been submitted to ALIF as reference to the improvoemen of the risk management process of ALIF. The Integrated Risk Profile report has been also submitted by the Integrated Risk Management Working Unit in semester in accordance with the applicable provisions.*

## Hubungan Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi

### Prinsip Umum

1. Hubungan Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perseroan yang berbeda.
3. Mekanisme yang berlaku di antara Entitas Utama dengan anggota konglomerasi harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Dalam transaksi antara Entitas Utama dan anggota konglomerasi wajib dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
   b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
   c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan anggota konglomerasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.
   d. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
   e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Entitas Utama terhadap anggota konglomerasi dilakukan dengan:
1. Penempatan wakil Perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur Perusahaan Anak.
2. Keberadaan unit khusus yang menangani pengawasan dan pelaporan Perusahaan Anak (jika diperlukan).
3. Penyampaian laporan berkala audit intern terintegrasi dan laporan kepatuhan terintegrasi.
4. Pembentukan komite Tata Kelola Terintegrasi.

### Transaksi Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi

1. Transaksi bisnis Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi harus dilakukan atas dasar *arm's length relationship* sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak lainnya. Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip kesetaraan terhadap anggota konglomerasi.
2. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi tertentu sesuai dengan kepentingan Konglomerasi Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## *Relation between Primary Entity and Conglomerate Members*

### *General Principles*

1. *Relation between the Primary Entity and the Financial Conglomerate members is made by fulfilling the applicable laws and regulations.*
2. *The Primary Entity and the Financial Conglomerate members are separated juridical person having different Corporate Organ.*
3. *The mechanism prevailing between the Primary Entity and Conglomerate members must be carried out through corporate mechanism which is good and applies Good Corporate Governance principles and refers to the applicable provisions.*
4. *In transaction between the Primary Entity and the Conglomerate members, it is obliged to underlie the following principles:*
   a. *Transparency is disclosure of material and relevant information and openness of decision making process.*
   b. *Accountability is clarity of function and implementation of organ accountability in the Financial Conglomerate so that the management run effectively.*
   c. *Responsibility is conformity of the Primary Entity management and Conglomerate members with the applicable laws and regulations and good management principles.*
   d. *Professional is to have competency, able to act objectively and free of influence from any party's pressure (independent) as well as have absolute commitment to develop Sharia bank.*
   e. *Fairness is justice and equivalence to fulfill stockholder's rights arising from agreements and laws and regulations.*

### *Supervisory Mechanism*

*Supervisory Mechanism carried out by the Primary entity to the Conglomerate members is:*
1. *Appointment of Corporate representative as Member of the Board of Commissioners and/or Director of the Subsidiaries.*
2. *Existence of special unit handling supervision and reporting of Subsidiaries (if required).*
3. *Submission of periodic report on the integrated internal audit and report on the integrated compliance.*
4. *Formation of the Integrated Governance committee.*

### *Transaction between the Primary Entity and the Conglomerate Members*

1. *Business transaction between the Primary Entity and the Conglomerate Members must be conducted on the basis of arm's length relationship as a business transaction with other parties appropriately. Principally the Corporate prioritizes the equivalence principles to the Conglomerate members.*
2. *A special treatment will be only given under specified conditions in accordance with the interest of the Financial Conglomerate as long as it does not contradict with the applicable laws and regulations.*

## Penerapan Tata Kelola Pada Perusahaan Anak (ALIF)

1. Profil Pemegang Saham ALIF

   a. Boubyan Capital Investment Co.
   Boubyan Capital adalah perusahaan manajemen investasi syariah berbasis di Kuwait. Perusahaan ini didirikan salah satu bagian investasi Boubyan Bank yang dianugerahi *Best Bank Islam* di Kuwait oleh Arabian Business.

   Perusahaan ini mempunyai beberapa *line of bussiness* yaitu *Asset Management, Brokerage Services, Custody, Principal Invesment* selain memperoleh dan mengelola properti real estate. Sebagai anak perusahaan dari Boubyan Bank, Boubyan Capital menggabungkan kekuatan dari sumber yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling cepat berkembang di Kuwait dalam bidang jasa keuangan. Boubyan Capital Invesment Co dimiliki oleh Boubyan Bank sebanyak 99,55% saham.

   b. Bank Muamalat Indonesia
   PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

   Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang mewujudkan ekspansi bisnisnya di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 278 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-*channel* seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

## *Governance Application to Subsidiaries (ALIF)*

*1. Shareholder Profiles of ALIF*

*a. Boubyan Capital Investment Co.*
*Boubyan Capital is Kuwait-based Sharia management Corporate. This Corporate was established to be one of investment parts of Boubyan Bank awarded Best Bank Islam in Kuwait by Arabian Business.*

*This Corporate has several lines of bussiness, that is Asset Management, Brokerage Services, Custody, Principal Invesment, besides has obtained and managed real estate property. As subsidiary of Boubyan Bank, Boubyan Capital combines force from the source which is one of the fastest-growing Kuwait financial institutions in the field of financial service. Boubyan Capital Invesment Co is belonged to Boubyan Bank by 99,55% of shares.*

*b. Bank Muamalat Indonesia*
*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") began its business journey as first Sharia Bank in Indonesia on November 1, 1991 or 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Establishment of Bank Muamalat Indonesia was initiated by Indonesian Council of Ulema (MUI), the Indonesian Association of Moslem Intellectuals (ICMI) and Moslem entrepreneur then getting support from Government of the Republic of Indonesia. On October 27, 1994, Bank Muamalat Indonesia got permit as Foreign Exchange Bank and is registered as public company which is not listing in Indonesian Stock Exchange (BEI). Bank Muamalat Indonesia is first banking institution in Indonesia issuing Subordinated Sukuk Mudharabah. Such corporate action confirms that the position of Bank Muamalat Indonesia in Indonesia banking industrial map. Moreover, Bank's Shar-e product launched in 2004 is also first instant saving in Indonesia.*

*Over the Bank's capacity increasingly acknowledged, Bank develops its wings by continously adding its branch office networks throughout Indonesia. In 2009, Bank got permit to open branch office in Kuala Lumpur, Malaysia and to be first Indonesian bank bringin into reality its business in Malaysia. Up to now, Bank has had 278 service offices including 1 (one) branch office in Malaysia. The Bank operation is also supported by broad service network in the form of 710 unit ATM Muamalat, 120.000 networks of ATM Bersama and ATM Prima, as well as more than 11.000 networks of ATM di Malaysia through Malaysia Electronic Payment (MEPS). Shar-e Gold Debit Visa product launched in 2011 got appreciation from Indonesian World Record Museum (MURI) as Sharia Debit Card with first Indonesian chip technology as well as e-channel service such as internet banking, mobile banking, ATM, and cash management. All such products become pioneer of Sharia product in Indonesia and important landmark in Sharia banking industry.*

Bank terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

*Bank continously bring into reality of various progress and achievements acknowledged nationally and internationally. Up to now, Bank has operated together with several entities of subsidiaris to give the best service that is Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) providing Sharia loan service, (DPLK Muamalat) providing pension fund service through Pension Fund of the Financial Institution, and Baitulmaal Muamalat providing service to distribute Zakat fund, Infaq and Sadaqat (ZIS).*

c. Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA).

ALPHA menjadi pemegang saham Al Ijarah pada tanggal 24 Juni 2009 setelah pengalihan saham Ijarah dari *International Leasing & Investment Company* (ILIC) kepada ALPHA. ALPHA didirikan untuk mengembangkan dan mengelola portofolio aset leasing di Asia, Afrika Utara, Arab dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara Teluk (*Gulf Cooperation Council*) oleh ILIC, Sukuk Efek Centre (Tadawul) BSC - Bahrain dan Sabaek Leasing & Investment Co - Kuwait pada bulan Desember 2007 di Bahrain.

*c. Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA).*

*ALPHA became shareholder of Al Ijarah on June 24, 2009 following Ijarah share transfer from International Leasing & Investment Company (ILIC) to ALPHA. ALPHA was established to develop and managed leasing asset portfolio in Asia, North Africa, Arabic and countries associated with Gulf Cooperation Council by ILIC, Sukuk Efek Centre (Tadawul) BSC - Bahrain and Sabaek Leasing & Investment Co - Kuwait in December 2007 in Bahrain.*

2. Dewan Pengawas Syariah ALIF
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, dengan memberikan nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

*2. Sharia Supervisory Board of ALIF*
*Sharia Supervisory Board (DPS) is obliged to supervise the corporate's business activities that it conforms to the provisions and Sharia principles, by giving advices and suggestions to the management about the matters related to Sharia aspect.*

Sampai Dengan Oktober 2018, Susunan Dewan Pengawas Syariah ALIF adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Ketua Dewan Pengawas Syariah | : Prof. DR. H. Umar Shihab |
| Anggota | : Prof. DR. H. Muardi Chatib |
| Anggota | : Faisal Muchtar |

*Up to October 2018, Composition of Sharia Supervisory Board of ALIF is as follows:*

| | |
|---|---|
| *Head of Sharia Supervisory Board* | *: Prof. DR. H. Umar Shihab* |
| *Member* | *: Prof. DR. H. Muardi Chatib* |
| *Member* | *: Faisal Muchtar* |

Berdasarkan hasil keputusan RUPS LB tanggal 31 Oktober 2018, ALIF menetapkan anggota DPS berjumlah 1 (satu) orang yaitu Bapak M. Faisal Muchtar, sebagai Ketua merangkap Anggota. Bapak M. Faisal Muchtar telah lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK berdasarkan surat keputusan No. KEP-23/NB.22/2015 tertanggal 17 September 2015.

*Based on decision results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 31, 2018, ALIF assinged 1 (one) member of DPS, that is Mr. M. Faisal Muchtar, as Head concurently serving Member. Mr. M. Faisal Muchtar passed the fit and proper test of OJK pursuant to Decree No. KEP-23/NB.22/2015 dated September 17, 2015.*

RUPS LB juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar ALIF, sehingga jumlah anggota DPS ALIF sekurang-kurangnya ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang, sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan yang mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang - kurangnya 1 (satu) orang yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi DSN MUI.

*The Extraordinary General Meeting of Shareholders also approved amendment of Articles of Association of ALIF, so that total member of DPS ALIF at least was 1 (one) person, in accordance with POJK Number 30/POJK.05/2014 regarding Good Corporate Governance for multi-finance company arranging that the Sharia Supervisory Board comprises at least 1 (one) person appointed by the General Meeting of Shareholders over recommendation from DSN MUI.*

3. Dewan Komisaris
Susunan Dewan Komisaris ALIF sebelum pelaksanaan RUPS LB tanggal 31 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

*3. The Board of Commissioners*
*Composition of the Board of Commissioners of ALIF prior to the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 31, 2018 is as follows:*

| | |
|---|---|
| Komisaris Utama/Independen | : Maulana Ibrahim |
| Komisaris | : Purnomo B Soetadi |
| Komisaris | : Abdullah Najran Al Tuwaijri |
| Komisaris | : Syed Hussain Yahya Bakhtiar |

| | |
|---|---|
| *Independent President Commissioner* | *: Maulana Ibrahim* |
| *Commissioner* | *: Purnomo B Soetadi* |
| *Commissioner* | *: Abdullah Najran Al Tuwaijri* |
| *Commissioner* | *: Syed Hussain Yahya Bakhtiar* |

Seluruh Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dari OJK dengan nomer dokumen keputusan sebagai berikut :

a. Abdullah Al Najran Al Tuwaijri (keputusan PKK no. KEP-441/NB.1/2015).
b. Syed Hussain Bakhtiar (keputusan PKK no. KEP-36/NB.22/2015).
c. Purnomo B Soetadi (keputusan PKK no. KEP-65/NB.22/2016).
d. Maulana Ibrahim (keputusan PKK no. KEP-19/NB.22/2018) (Komisaris Utama Independen).

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018, ALIF menyelenggarakan RUPS LB dan menetapkan susunan Dewan Komisaris ALIF sebagai berikut:

a. Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Sukamto

b. Komisaris : Purnomo B. Soetadi
c. Komisaris : Tindomora Siregar

Dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tersebut, yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan adalah Bapak Purnomo B. Soetadi. Sementara 2 (dua) orang anggota komisaris lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen untuk pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ke OJK.

Dewan Komisaris ALIF telah membentuk Komite level Komisaris yaitu komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan melalui SK Direksi tanggal 27 November 2017, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Komite Audit:
Ketua : Maulana Ibrahim
Anggota : Purnomo B. Soetadi
Anggota : Syed Hussain Mohammed Yahya Bakhtiar

Komite Nominasi dan Remunerasi:
Ketua : Maulana Ibrahim
Anggota : Purnomo B. Soetadi
Anggota : Abdullah Al Najran Al Tuwaijri

Selama tahun 2018, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi ALIF belum aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, sejalan dengan penggantian anggota Dewan Komisaris sesuai hasil RUPS LB tanggal 31 Oktober 2018, dari 3 (tiga) anggota di masing-masing komite tersebut, hanya 1 (satu) anggota yang masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di ALIF yaitu Bapak Purnomo B. Soetadi.

*All Commissioners passed the fit and proper assessement of OJK with the following decision document number :*

*a. Abdullah Al Najran Al Tuwaijri (decision of PKK no. KEP-441/NB.1/2015).*
*b. Syed Hussain Bakhtiar (decision of PKK no. KEP-36/NB.22/2015).*
*c. Purnomo B Soetadi (decision of PKK no. KEP-65/NB.22/2016).*
*d. Maulana Ibrahim (decision of PKK no. KEP-19/NB.22/2018) (independent President Commissioner).*

*Furthermore, on October 31, 2018, ALIF held the Extraordinary General Meeting of Shareholders and determined composition of the Board of Commissioners of ALIF as follows:*
*a. President Commissioner/Independent Commissioner : Sukamto*
*b. Commissioner : Purnomo B. Soetadi*
*c. Commissioner : Tindomora Siregar*

*From 3 (three) members of the Board of Commissioners, Mr. Purnomo B. Soetadi passed the Fit and Proper Test. Whilst, 2 (dua) other commissioner members are still in the process of completing documents to file the Fit and Proper Test to OJK.*

*The Board of Commissioners of ALIF has formed Commissioner Level Committee, that is the Audit Committee and Nomination Committee and Remuneration stipulated by Decree of the Board of Directors dated November 27, 2017, with the following membership:*

*Audit Committee:*
*Chairman : Maulana Ibrahim*
*Member : Purnomo B. Soetadi*
*Member : Syed Hussain Mohammed Yahya Bakhtiar*

*Nomination and Remuneration Committee:*
*Chairman : Maulana Ibrahim*
*Member : Purnomo B. Soetadi*
*Member : Abdullah Al Najran Al Tuwaijri*

*Throughout 2018, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee of ALIF had not been active yet to perform its duties and responsibilities. Moreover, conforming to change of members of the Board of Commissioners according to result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 31, 2018, from 3 (three) members in each committee, only 1 (one) member still takes office as member of the Board of Commissioners of ALIF, that is Mr. Purnomo B. Soetadi.*

4. Direksi ALIF

Sebelum pelaksanaan RUPS LB tanggal 31 Oktober 2018, ALIF hanya memiliki seorang Direksi/Direktur Utama yaitu Bapak Gatot B.S Sarosa, sehingga komposisi Direksi belum sesuai dengan regulasi yang mengatur bahwa perusahaan pembiayaan dengan aset di atas 200 Milyar wajib memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Pada tanggal 31 Oktober 2018, ALIF menyelenggarakan RUPS LB dan menetapkan susunan Direksi ALIF sebagai berikut:

a. Presiden Direktur : Afrid Wibisono
b. Direktur : Agus Darmawan
c. Direktur : Teguh Nogroho

Terkait proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi ALIF, saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen untuk diajukan ke OJK.

*4. The Board of Directors of ALIF*

*Before the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on October 31, 2018, ALIF only had one Director/ President Director, that is Mr. Gatot B.S Sarosa, so that composition of the Board of Directors has not conformed to the regulation governing that a multi-finance company with asset of more than 200 billion Milyar is obliged to have at least 3 (three) members of the Board of Directors.*

*On October 31, 2018, ALIF held the Extraordinary General Meeting of Shareholders and stipulated composition of the Board of Directors of ALIF as follows:*

*a. President Director : Afrid Wibisono*
*b. Director : Agus Darmawan*
*c. Direktur : Teguh Nogroho*

*Related to the Fit and Proper Test process to the Board of Directors of ALIF, it is still in the process to complete documents to be filed to OJK.*